



Renstra

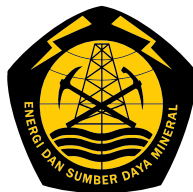
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015 – 2019



Renstra

RENCANA STRATEGIS

**Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan
2015 – 2019**



Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

Kata Pengantar

Energi listrik merupakan kebutuhan dasar manusia modern. Seluruh kehidupan kita saat ini sangat bergantung pada kebutuhan listrik yang cukup dan handal. Seiring meningkatnya konsumsi listrik, kebutuhan pasokan listrik di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6,7% per tahun (sesuai RPJMN 2015-2019), maka Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit rata-rata 7 GW per tahun dan tambahan jaringan transmisi rata-rata 9.000 kms per tahun.

Hingga akhir tahun 2014, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 84,35%. Angka ini meningkat 17,20% dibandingkan tahun 2010 yang baru mencapai 67,15%. Sedangkan kapasitas pembangkit tenaga listrik mengalami penambahan sebesar 17.405 MW dibandingkan tahun 2010 sebesar 36.180 MW. Pemerintah secara berkesinambungan juga berupaya untuk memperbaiki bauran energi pembangkitan tenaga listrik dengan menekan secara maksimal penggunaan BBM dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik. Realisasi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) menurun dari 22% pada tahun 2010 menjadi 9,70% pada tahun 2014.

Pada akhir tahun 2019, diharapkan, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 97,35%, meningkat 13% dibanding tahun 2014. Untuk meningkatkan angka rasio elektrifikasi, pemerintah juga tetap melaksanakan program-program pro rakyat yang pendanaannya melalui APBN seperti program listrik perdesaan yang

membangun jaringan distribusi hingga pelosok-pelosok desa, serta program instalasi listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu dan nelayan.

Kebutuhan pasokan listrik 5 tahun ke depan diperkirakan membutuhkan tambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 42,9 GW sehingga kapasitas terpasang dari tahun 2014 sebesar 53,6 GW menjadi 96,5 GW dengan penggunaan bahan bakar minyak ditargetkan sebesar 2,04%. Untuk mendukung penyaluran tenaga listrik tersebut maka dibutuhkan tambahan jaringan transmisi sekitar 46.000 kms sampai akhir tahun 2019.

Buku Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015-2019 ini memberikan gambaran kepada kita rencana pembangunan 5 tahun ke depan, mencakup berbagai peluang dan tantangan dalam mengembangkan sub sektor ketenagalistrikan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan buku ini dan semoga bermanfaat bagi pembangunan nasional.

Jakarta, November 2015



Ir. Jarman, M.Sc.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Daftar Isi

**Kata Pengantar –
ii**

Daftar Isi – iv

I

Pendahuluan – 1

- I.1. TUGAS DAN FUNGSI
DIREKTORAT
JENDERAL KETENA-
GALISTRIKAN – 2
- I.2. KONDISI UMUM DAN
CAPAIAN SUB SEKTOR
KETENAGALISTRIKAN
– 4

II

**Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran
Strategis – 17**

- II.1. VISI DAN MISI – 17
- II.2. TUJUAN – 18
- II.3. SASARAN STRATEGIS
– 25

III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan – 63

III.1. ARAH KEBIJAKAN,
STRATEGI DAN
RENCANA AKSI –
67

IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan – 91

IV.1. TARGET KINERJA –
91

IV.2. KERANGKA
PENDANAAN – 92

1. Investasi dan
Pendanaan – 92

2. Program dan
Kegiatan Pokok –
94

Lampiran – 97

LAMPIRAN-1

Matriks Kinerja dan
Pendanaan – 97

LAMPIRAN-2

Matriks Kerangka Regulasi
– 101

LAMPIRAN-3

Matriks Target Kinerja Tahun
2015 – 2019 (RPJMN &
RUPTL) – 105

LAMPIRAN-4

Rencana Pembangunan
Pembangkit, Transmisi, Gardu
Induk Tahun 2015-2019 –
109

LAMPIRAN-5

Matriks Bidang Pembangunan
RPJMN 2015-2019
Matriks K/L RPJMN 2015-
2019 – 159

Daftar Gambar

2	Gambar I-1	Tema RPJMN dalam RPJPN 2005-2025
3	Gambar I-2	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
6	Gambar I-3	Rasio Elektrifikasi Tahun 2014
8	Gambar I-4	Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik
9	Gambar I-5	Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2010-2014
10	Gambar I-6	Proyek 10.000 MW Tahap I
11	Gambar I-7	Proyek 10.000 MW Tahap II
11	Gambar I-8	Perkembangan Energy Mix Pembangkit
13	Gambar I-9	Susut Jaringan
14	Gambar I-10	Subsidi Listrik 2010-2014
14	Gambar I-11	Perkembangan BPP dan TTL
15	Gambar I-12	Investasi Sektor ESDM 2010-2014
19	Gambar II-1	Skema Penyelesaian Tantangan dengan Penetapan Tujuan, Sasaran dan Strategi
23	Gambar II-2	Mekanisme Perhitungan Tariff Adjustment sesuai Permen 31/2014
23	Gambar II-3	Pola Penerapan Tariff Adjustment
27	Gambar II-4	Peta Sebaran Target Rasio Elektrifikasi 2015-2019 Wilayah Sumatera
28	Gambar II-5	Peta Sebaran Target Rasio Elektrifikasi 2015-2019 Wilayah Jawa Bali
29	Gambar II-6	Peta Sebaran Target Rasio Elektrifikasi 2015-2019 Wilayah Kalimantan
30	Gambar II-7	Peta Sebaran Target Rasio Elektrifikasi 2015-2019 Wilayah Sulawesi
30	Gambar II-8	Peta Sebaran Target Rasio Elektrifikasi 2015-2019 Wilayah Nusa Tenggara
31	Gambar II-9	Peta Sebaran Target Rasio Elektrifikasi 2015-2019 Wilayah Maluku dan Papua
33	Gambar II-10	Rencana Penambahan Pembangkit Wilayah Sumatera 2015-2019
34	Gambar II-11	Rencana Penambahan Per Jenis Pembangkit Wilayah Sumatera 2015-2019
34	Gambar II-12	Rencana Penambahan Pembangkit Wilayah Jawa-Bali 2015-2019
37	Gambar II-13	Rencana Penambahan Per Jenis Pembangkit Wilayah Jawa-Bali 2015-2019
37	Gambar II-14	Rencana Penambahan Pembangkit Wilayah Kalimantan 2015-2019

39	Gambar II-15	Rencana Penambahan Per Jenis Pembangkit Wilayah Kalimantan 2015-2019
39	Gambar II-16	Rencana Penambahan Pembangkit Wilayah Maluku & Nusa Tenggara 2015-2019
40	Gambar II-17	Rencana Penambahan Per Jenis Pembangkit Wilayah Maluku & Nusa Tenggara 2015-2019
41	Gambar II-18	Rencana Penambahan Pembangkit Wilayah Sulawesi 2015-2019
42	Gambar II-19	Rencana Penambahan Per Jenis Pembangkit Wilayah Sulawesi 2015-2019
43	Gambar II-20	Rencana Penambahan Per Jenis Pembangkit Wilayah Sulawesi 2015-2019
44	Gambar II-21	Rencana penambahan Per Jenis Pembangkit Wilayah Papua 2015-2019
50	Gambar II-22	Rencana penambahan Jaringan Transmisi Indonesia 2015-2019
51	Gambar II-23	Rencana Pengembangan Jaringan Transmisi Sistem Sumatera 2015-2019
53	Gambar II-24	Rencana Pengembangan Jaringan Transmisi Sistem Jawa-Bali 2015-2019
55	Gambar II-25	Rencana Pengembangan Jaringan Transmisi Sistem Kalimantan 2015-2019
56	Gambar II-26	Rencana Pengembangan Jaringan Transmisi Sistem Maluku & Nusa Tenggara 2015-2019
57	Gambar II-27	Rencana Pengembangan Jaringan Transmisi Sistem Sulawesi 2015-2019
58	Gambar II-28	Rencana Pengembangan Jaringan Transmisi Sistem Papua 2015-2019
59	Gambar II-29	Energi Primer BBM 2015-2019
60	Gambar II-30	Rencana Subsidi Listrik 2015-2019
60	Gambar II-31	Rencana Subsidi Listrik 2015-2019
61	Gambar II-32	Rencana Investasi Ketenagalistrikan
65	Gambar III-1	Kebijakan Umum Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral
66	Gambar III-2	Konsep Ketahanan Energi
67	Gambar III-3	Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW
68	Gambar III-4	Sebaran Jumlah dan Kapasitas Transmisi
69	Gambar III-5	Rencana Pengembangan Gardu Induk Wilayah Sumatera Tahun 2015-2019
69	Gambar III-6	Rencana Pengembangan Gardu Induk Wilayah Jawa-Bali 2015-2019
70	Gambar III-7	Rencana Pengembangan Gardu Induk Wilayah Kalimantan 2015-2019

70	Gambar III-8	Rencana Pengembangan Gardu Induk Wilayah Maluku & Nusa Tenggara 2015-2019
71	Gambar III-9	Rencana Pengembangan Gardu Induk Wilayah Sulawesi 2015-2019
71	Gambar III-10	Rencana Pengembangan Gardu Induk Wilayah Papua 2015-2019
72	Gambar III-11	Target Konsumsi Listrik per Kapita 2015-2019
73	Gambar III-12	Grafik Rencana Pengembangan Distribusi di Indonesia
74	Gambar III-13	Grafik Rencana Pengembangan Distribusi di Wilayah Sumatera
74	Gambar III-14	Grafik Rencana Pengembangan Distribusi di Wilayah Jawa-Bali
75	Gambar III-15	Grafik Rencana Pengembangan Distribusi di Wilayah Indonesia Timur
76	Gambar III-16	Grafik Rencana Pengembangan kapasitas Gardu Distribusi di Indonesia
76	Gambar III-17	Grafik Rencana Pengembangan kapasitas Gardu Distribusi di Wilayah Sumatera
77	Gambar III-18	Grafik Rencana Pengembangan kapasitas Gardu Distribusi di Wilayah Jawa Bali
77	Gambar III-19	Grafik Rencana Pengembangan kapasitas Gardu Distribusi di Indonesia Timur
80	Gambar III-20	Grafik Rencana peningkatan Rasio Elektrifikasi
81	Gambar III-21	Grafik Rencana Program Penyambungan dan Pemasangan Instalasi Listrik Gratis
85	Gambar III-22	Rencana Pembangunan Kabel Laut di Kepulauan Seribu
86	Gambar III-23	Lokasi KEK 2015-2019
93	Gambar IV-1	Indikasi Kerangka Pendanaan Sektor ESDM 2015-2019



Daftar Tabel

5	Tabel I-1	Capaian Indikator Kinerja Prioritas Nasional Bidang Energi Sub Sektor Ketenagalistrikan pada RPJMN Tahun 2010-2014
8	Tabel I-2	Target dan Realisasi Rasio Elektrifikasi
13	Tabel I-3	Pembangunan Infrastruktur Listrik Non-Pembangkit Tahun 2010-2014
18	Tabel II-1	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KESDM Tahun 2015-2019
20	Tabel II-2	Target 2019 Penyediaan Akses dan Infrastruktur Energi
22	Tabel II-3	Target Subsidi Listrik
24	Tabel II-4	Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan
25	Tabel II-5	Target 2015 - 2019 Penyediaan Akses dan Infrastruktur Energi
26	Tabel II-6	Rencana Rasio Elektrifikasi per Provinsi di Indonesia tahun 2016 - 2019
33	Tabel II-7	Daftar Kapasitas MPP tiap Provinsi
35	Tabel II-8	Daftar FTP II Jawa-Bali beroperasi Tahun 2015-2019
44	Tabel II-9	Daftar Sistem Kelistrikan di Indonesia
78	Tabel III-1	Rencana Program Listrik Perdesaan pada APBN-P 2015 per Wilayah (1/2)
79	Tabel III-2	Rencana Program Listrik Perdesaan pada APBN-P 2015 per Wilayah (2/2)
82	Tabel III-3	Harga Patokan Tertinggi Pembelian Tenaga Listrik
92	Tabel IV-1	Target Kinerja Tahun 2015 - 2019
93	Tabel IV-2	Investasi Sektor Ketenagalistrikan
95	Tabel IV-3	Daftar Anggaran Program/Kegiatan Pokok dari Tahun 2015 - 2019



I

Pendahuluan

Sebagaimana Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025, terdapat 4 tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Masing-masing periode RPJMN tersebut memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda. Tema RPJMN tahun 2015-2019 atau RPJM ke-3, adalah: **“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan lptek”**. Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, maka RPJMN tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 pada 8 Januari 2015.

Sebagai landasan operasional dari RPJMN dimaksud, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Rencana Strategis (Renstra) KESDM Tahun 2015-2019 yang penyusunannya dilakukan bersinergi dengan RPJMN. Renstra Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM tersebut, antara lain berisi mengenai:

1. **Kondisi umum (*mapping*)**, mencakup capaian kinerja 2010-2014, potensi dan tantangan.
2. **Tujuan dan Sasaran**, merupakan cerminan dari visi yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) yang harus dicapai pada 2019.
3. **Strategi**, merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada. Strategi mencakup kegiatan yang dibiayai APBN dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif.

Gambar I-1

Tema RPJMN dalam
RPJPN 2005-2025



I.1. TUGAS & FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Sesuai Keputusan Presiden tersebut di atas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan rumusan kebijakan bidang ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
- Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di

- bidang ketenagalistrikan;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan membawahi 4(empat) unit Eselon II yang terdiri dari:

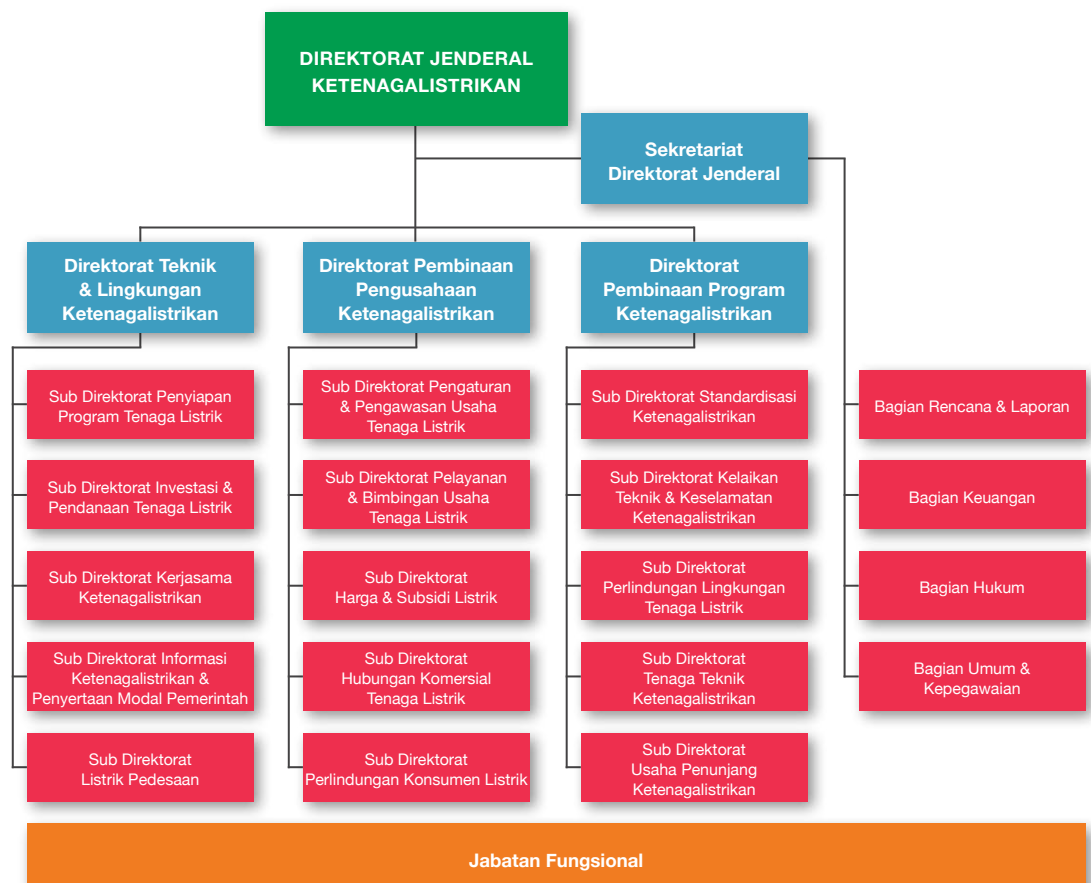
- Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
- Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
- Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai bidang tugas:

Gambar I-2

Struktur Organisasi
Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



A. Sekretariat Direktorat Jenderal

- Perencanaan kerja, penganggaran dan ketatalaksanaan
- Penyiapan bahan laporan dan akuntabilitas kinerja;
- Pengelolaan sistem dan jaringan informasi;
- Pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan negara
- Pengelolaan kepegawaian dan pengurusan organisasi;
- Pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan rumah tangga;
- Perumusan peraturan perundangan, pemberian pertimbangan hukum, informasi hukum dan urusan kehumasan.

B. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

- Perumusan program ketenagalistrikan;
- Perumusan kebijakan pengembangan investasi ketenagalistrikan;
- Pengembangan ketenagalistrikan sosial (listrik perdesaan);
- Fasilitasi kerjasama bilateral, regional dan multilateral;
- Administrasi Penyertaan Modal Pemerintah.

C. Direktorat Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan

- Pengaturan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan;
- Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (sejak awal 2015 dilimpahkan ke BKPM);

- Perumusan kebijakan harga jual tenaga listrik, tarif dasar listrik dan subsidi listrik;
- Fasilitasi penyelesaian perselisihan usaha penyediaan tenaga listrik;
- Perlindungan konsumen.

D. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

- Perumusan standarisasi ketenagalistrikan;
- Pengaturan keselamatan dan kelaikan teknis ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan kebijakan lingkungan ketenagalistrikan;
- Pembinaan usaha penunjang ketenagalistrikan;
- Pengaturan sertifikasi tenaga teknik.

I.2. KONDISI UMUM DAN CAPAIAN SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Sesuai amanat RPJMN Tahun 2010-2014, Ditjen Ketenagalistrikan KESDM utamanya mengembangkan tugas melaksanakan “**Prioritas Nasional ke-8 di Bidang Energi**”. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Prioritas Nasional Bidang Energi tersebut, terdapat 2 indikator utama sub sektor ketenagalistrikan yang harus dicapai pada akhir tahun 2014. Sebagaimana terlihat pada

Tabel I-1

Capaian Indikator Kinerja Prioritas Nasional Bidang Energi Sub Sektor Ketenagalistrikan pada RPJMN Tahun 2010-2014

No	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian
1	Pembangunan Pembangkit	3.000 MW per tahun	3.813 MW per tahun	127%
2	Rasio Elektrifikasi	80%	84,35%	105%

tabel I-1, 2 indikator tersebut dapat terealisasi.

Selain target pada RPJMN Tahun 2010-2014 di atas, berikut ini adalah capaian sektor ESDM sub sektor ketenagalistrikan tahun 2010-2014 secara lebih luas, yang merupakan pengalaman dan pertimbangan dalam menetapkan target-target ke depan:

1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga Indonesia. Pada awal periode Renstra 2010-2014, rasio elektrifikasi hanya sebesar 67,15% dan meningkat menjadi 84,35% pada akhir 2014. Pencapaian pada akhir tahun 2014 tersebut lebih tinggi 4,35% dari pada target RPJMN 2010-2014 sebesar 80%.



Gambar I-3 Rasio Elektrifikasi Tahun 2014



Tabel I-2

Target dan Realisasi
Rasio Elektrifikasi

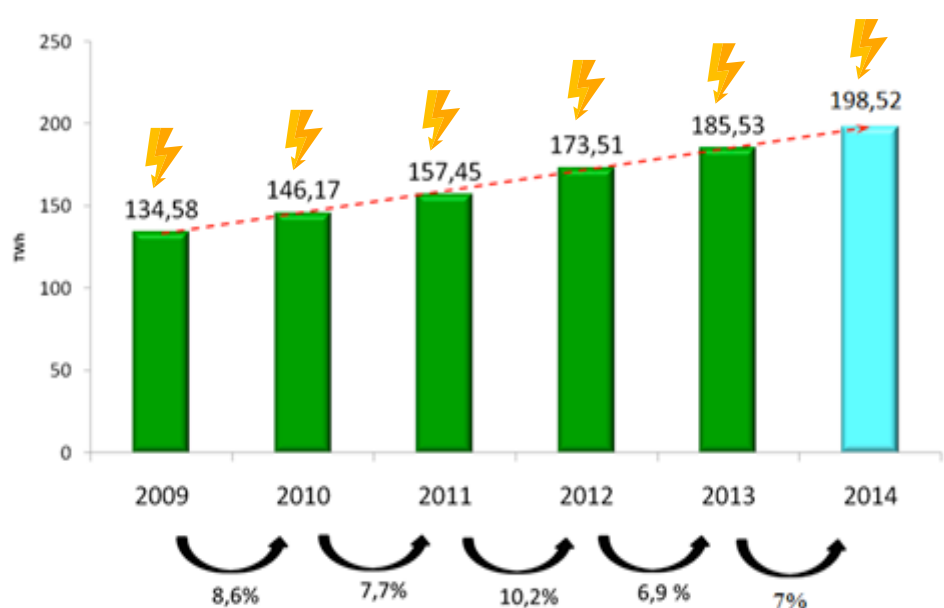
Rasio Elektrifikasi	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Target RPJMN	67,20	70,40	73,60	76,80	80,00
Realisasi	67,15	72,95	76,56	80,51	84,35

Penjualan Tenaga Listrik merupakan salah satu indikator peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Penjualan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan rata-rata sekitar 8%. Penjualan tenaga listrik pada 2009 sebesar 134,58 TWh dan meningkat 8% menjadi 185,53 TWh pada 2013. Untuk tahun 2014 (APBN-P) penjualan tenaga listrik ditargetkan sebesar 198,52 TWh atau tumbuh sebesar 7%.

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Sampai dengan 2014 kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 53.585 MW, mengalami penambahan sebesar 17.405 MW dibandingkan tahun 2010 sebesar 36.180 MW. Kapasitas terpasang tersebut terdiri dari pembangkit milik PT PLN (Persero) sebesar 37.280 MW (70%), IPP sebesar 10.995 MW (20%) dan PPU sebesar 2.633 MW (5%) serta Izin Operasi (IO) non-BBM sebesar 2.677 MW (5%).

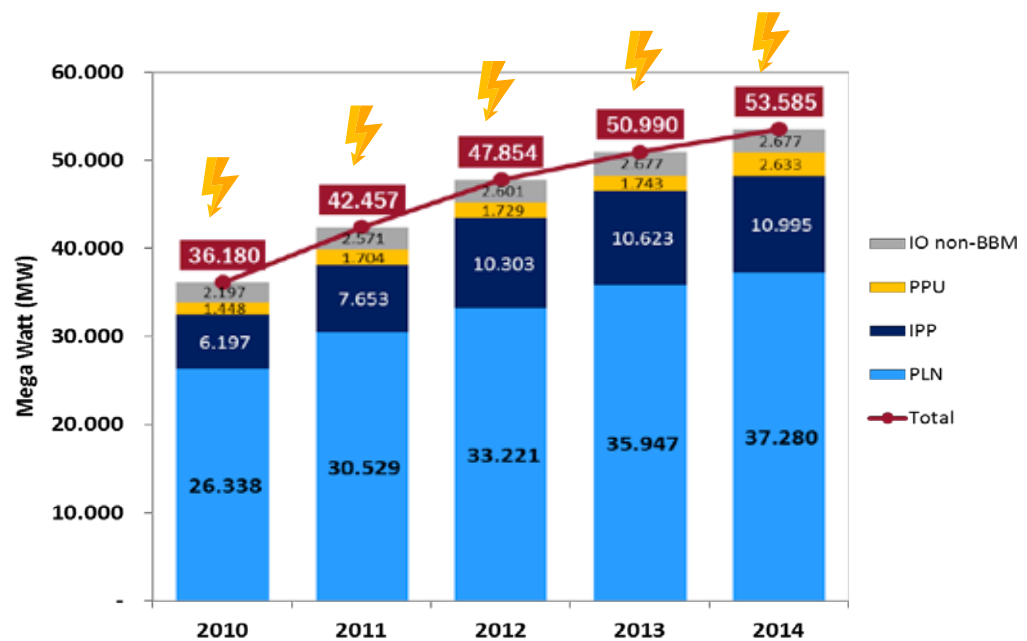
Gambar I-4

Pertumbuhan
Penjualan Tenaga
Listrik



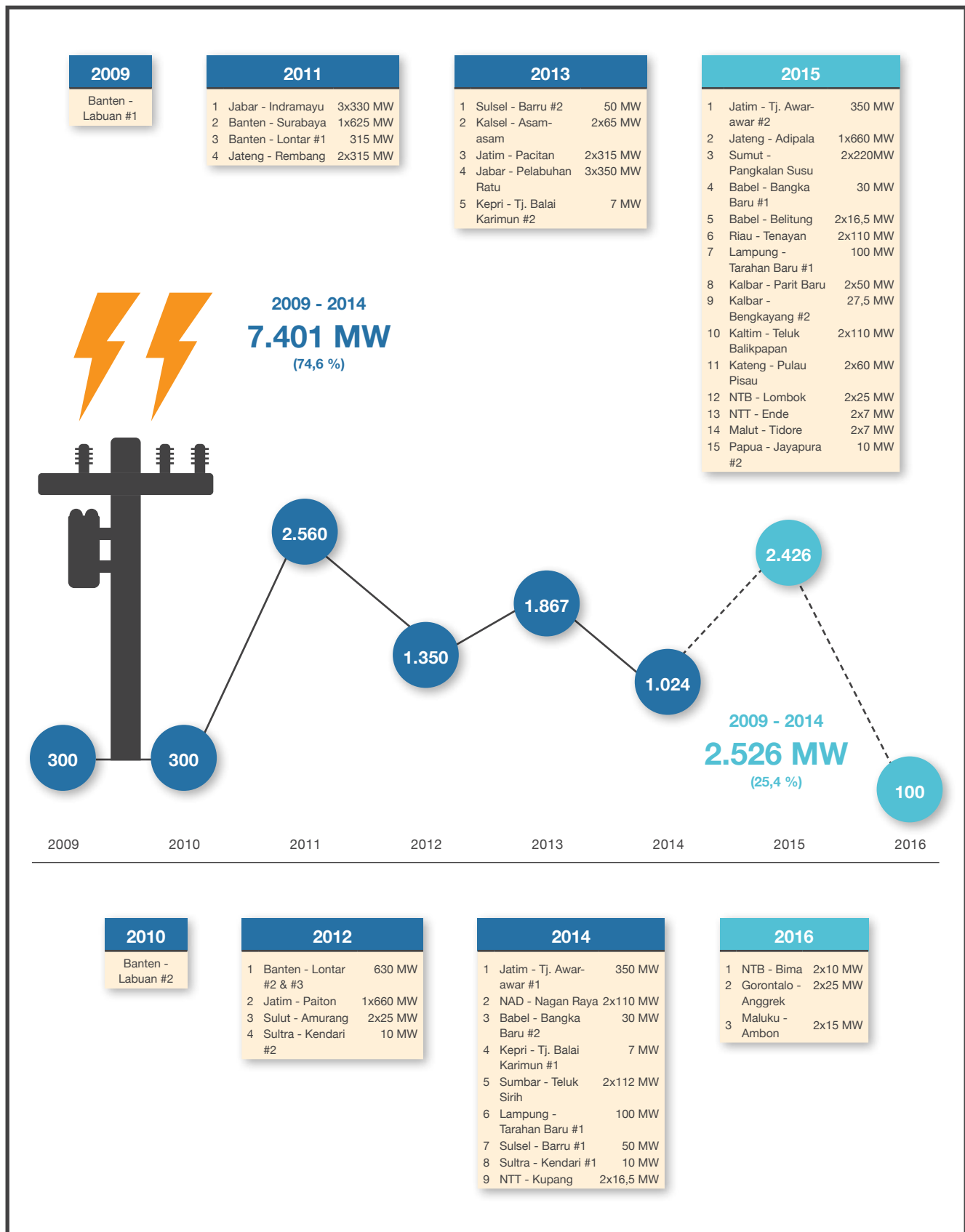
Gambar I-5

Kapasitas Terpasang
Pembangkit Tenaga
Listrik Tahun 2010-
2014



Proyek 10.000 MW Tahap I (FTP 1), dimulai tahun 2006 terdiri dari 37 proyek yang ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2009. Namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala sehingga target penyelesaiannya mengalami keterlambatan. Berbagai kendala yang dihadapi antara lain: permasalahan *engineering* (*desain/drawing*,

commissioning), *non-engineering* (*perijinan/rekomendasi*, *pengadaan/pembebasan lahan*, *impor barang*, *pendanaan*) dan masalah konstruksi (*material/equipment*, *lack of management*, *eskalasi*). Sampai dengan akhir 2014, FTP 1 yang telah berhasil diselesaikan sebesar 7.401 MW dan selebihnya 2.526 MW diperkirakan selesai tahun 2015-2016.



Gambar I-6 Proyek 10.000 MW Tahap I

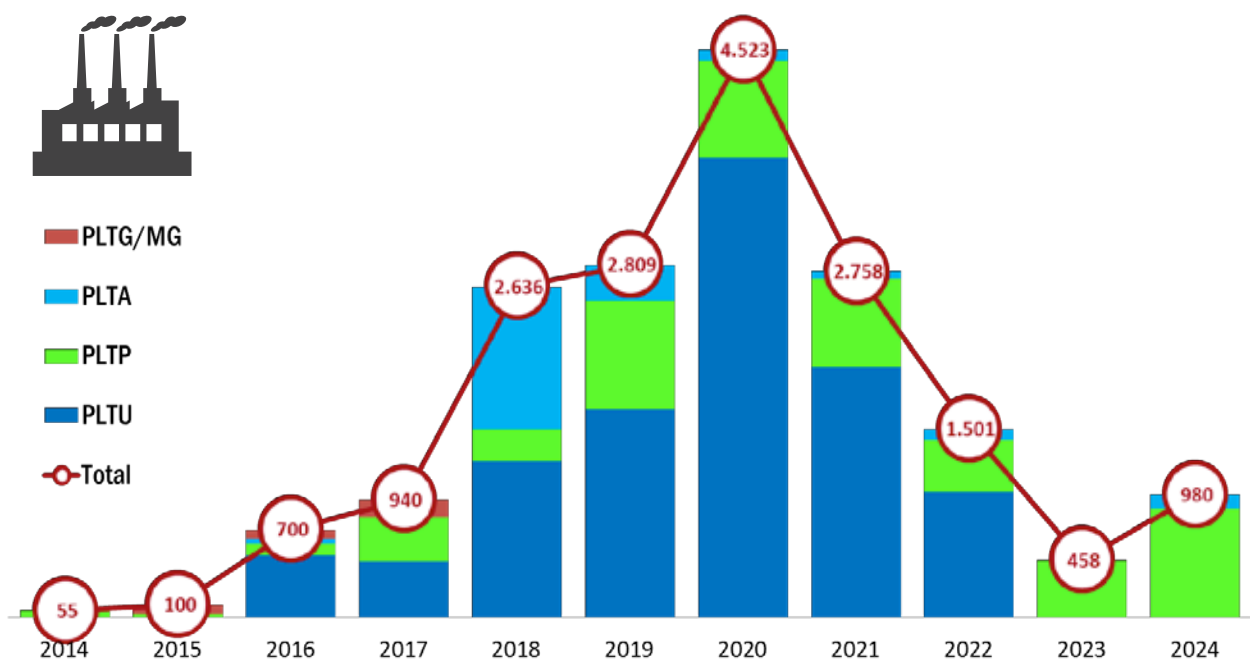
Proyek 10.000 MW Tahap II (FTP 2), dicanangkan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk mempercepat diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non-BBM, mengoptimalkan pemanfaatan potensi panas bumi dan tenaga air serta sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat.

FTP 2 terdiri atas pembangkit yang menggunakan energi terbarukan (38%) yakni panas bumi dan tenaga air. Selain itu, pembangkit yang

menggunakan batubara dengan teknologi yang lebih efisien dan gas (62%). Pelaksana proyek pembangkit didominasi oleh swasta (68%) dan PLN (32%). FTP 2 terdiri dari 76 proyek dengan total kapasitas 17.918 MW, dengan rincian Proyek PLN sebanyak 17 proyek (5.749 MW) dan proyek swasta sebanyak 59 proyek (12.169 MW). Sampai dengan tahun 2014, FTP 2 telah berhasil diselesaikan sebesar 55 MW yaitu dari PLTP Patuha di Pengalengan, Jawa Barat.

Gambar I-7

Proyek 10.000 MW
Tahap II



Energi Mix Pembangkit sangat mempengaruhi besarnya biaya pokok produksi (BPP) tenaga listrik. BBM merupakan energi primer pembangkit yang paling mahal, sedangkan batubara relatif murah. Oleh karena itu, setiap tahunnya diupayakan penurunan penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan meningkatkan penggunaan batubara. Pada tahun 2010, penggunaan BBM mencapai 22% dari *energy mix* pembangkit sedangkan batubara sebesar 38%. Porsi BBM tersebut terus diturunkan sehingga pada tahun 2014 turun drastis menjadi 9,70% seiring dengan terselesaikannya proyek pem-

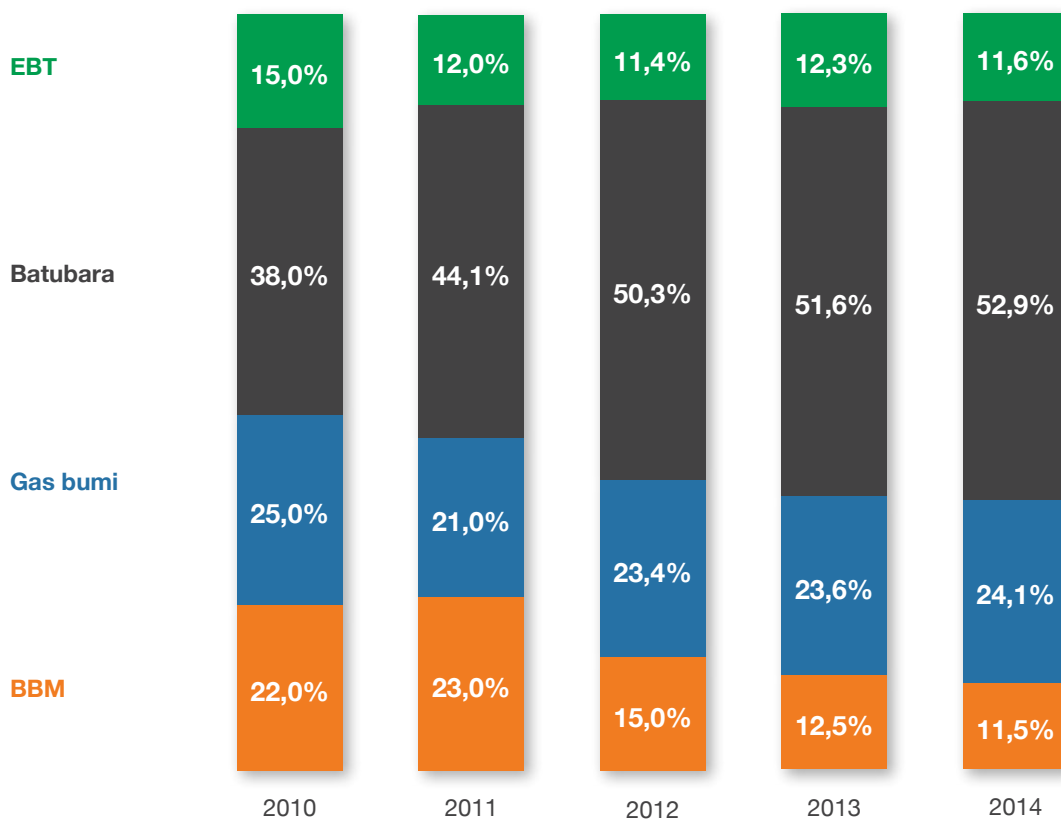
bangkit listrik 10.000 MW tahap I yang seluruhnya menggunakan bahan bakar batubara.

Pembangunan Jaringan Transmisi, Distribusi Tenaga Listrik, Lisdes dan Listrik Gratis.

Penambahan pembangunan transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan jaringan distribusi selama periode 2010-2014 dapat terlihat pada tabel I-3. Selain itu, sejak 2012, Pemerintah telah meluncurkan pembangunan instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan, dimana tahun 2012 telah dilaksanakan untuk 60.702 Rumah

Gambar I-8

Perkembangan *Energy Mix* Pembangkit



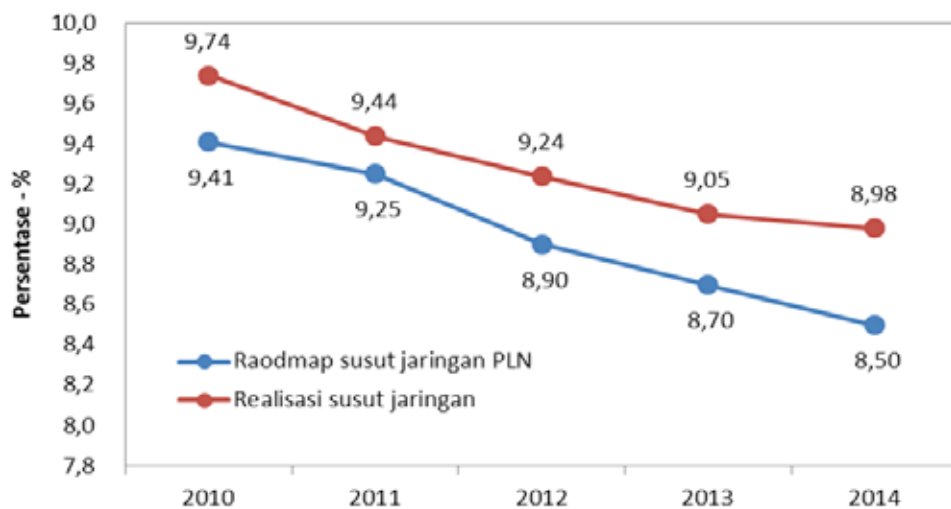
Tabel I-3

Pembangunan
Infrastruktur Listrik
Non-Pembangkit
Tahun 2010-2014

No	Infrastruktur	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Transmisi	kms	100	1.670	1.377	1.299	2.525
2	Gardu induk	MVA	2.294	5.946	5.458	5.510	5.655
3	Gardu distribusi (LISDES)	MVA	53	368	249	258	181
4	Jaringan distribusi (LISDES)	kms	3.406	17.570	11.311	12.637	9.543
5	Program listrik gratis	RTS	-	-	60.702	94.140	118.460

Gambar I-9

Susut Jaringan



Tangga Sasaran (RTS), tahun 2013 untuk 94.140 RTS dan tahun 2014 untuk 118.460 RTS.

Susut Jaringan. Pada 2010, realisasi susut jaringan sebesar 9,74% dari total tenaga listrik yang dibangkitkan. Pada 2014 susut jaringan turun menjadi sebesar 8,98%. Adapun upaya-upaya yang dilakukan guna menurunkan susut jaringan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas jaringan distribusi;
2. Penambahan trafo distribusi sisipan baru;
3. Meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk penerangan jalan umum dan pemakaian listrik ilegal; serta
4. Mendorong penggunaan listrik Prabayar.

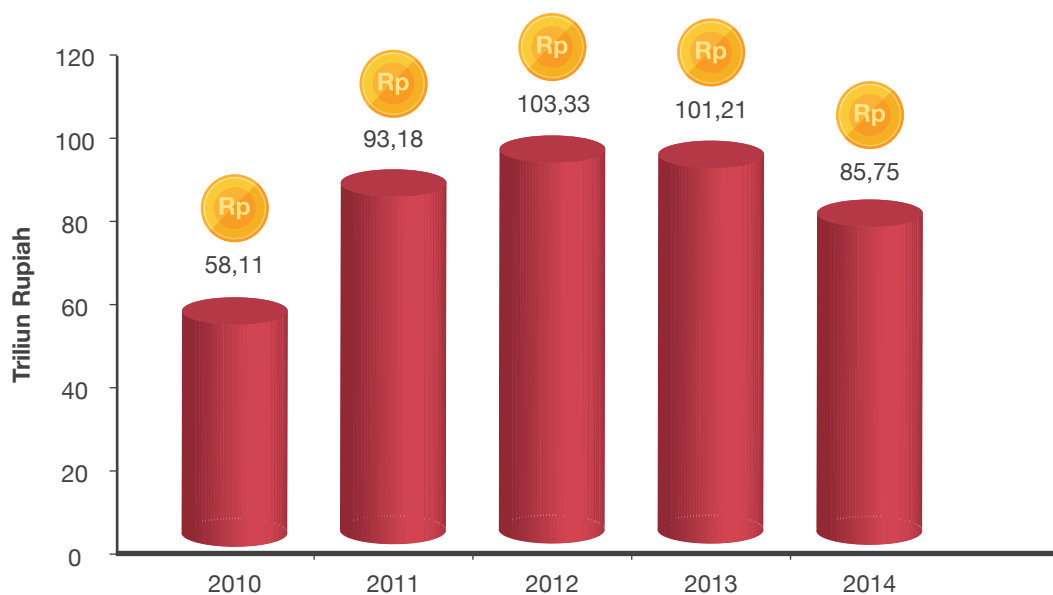
2. SUBSIDI DAN TARIF LISTRIK

Pada medio 2010-2014 total subsidi listrik cenderung meningkat. Subsidi Listrik tahun 2010 sebesar Rp 58,11 triliun dan pada tahun 2014 subsidi listrik mengalami peningkatan sebesar Rp 85,75 triliun.

Untuk mengendalikan besaran subsidi listrik, Pemerintah bersama PT PLN (Persero) melakukan langkah-langkah upaya penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik. Tarif Tenaga Listrik (TTL) disesuaikan secara bertahap menuju harga keekonomian.

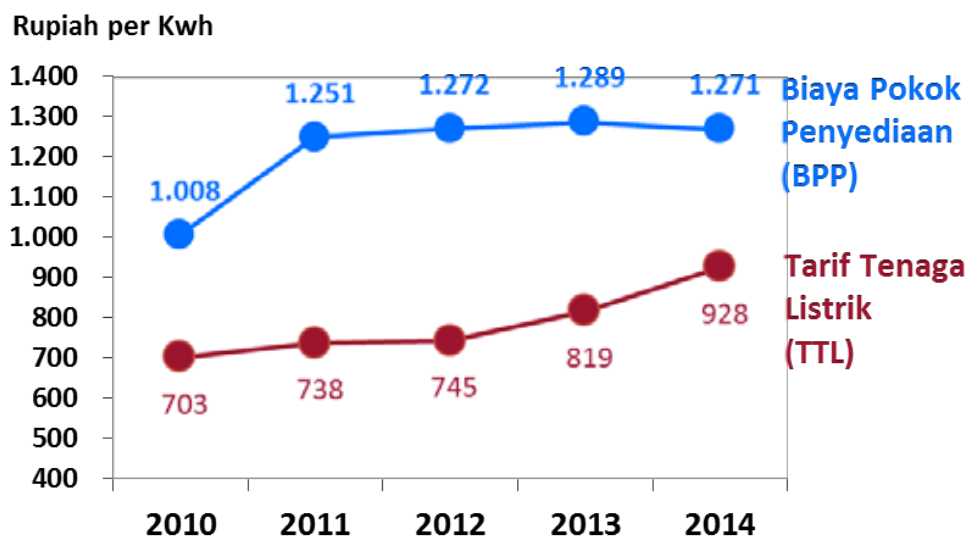
Gambar I-10

Subsidi Listrik 2010-2014



Gambar I-11

Perkembangan BPP dan TTL



Pada 2013 telah dilaksanakan penyesuaian tarif tenaga listrik secara bertahap dan pada akhir tahun 2013 terdapat 4 (empat) golongan tarif yang diterapkan tarif non subsidi yaitu golongan pelanggan Rumah Tangga Besar (R-3 daya 6.600 VA keatas), golongan pelanggan Bisnis Menengah (B-2 daya 6.600 VA s.d 200 kVA), golongan pelanggan Bisnis Besar (B-3 daya di atas 200 kVA), dan golongan pelanggan Kantor Pemerintah Sedang (P-1 daya 6.600 VA s.d 200 kVA). Untuk keempat golongan pelanggan tarif non subsidi tersebut pada tahun 2014 diterapkan

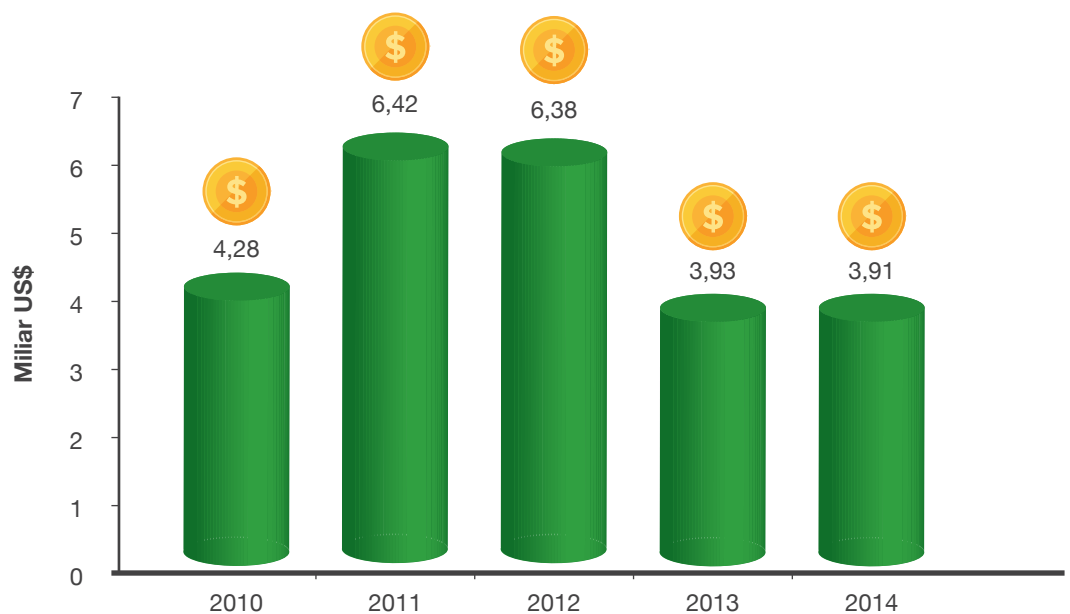
tarif *adjustment* yang dilakukan dengan mengacu pada perubahan indikator ekonomi makro yaitu kurs, ICP dan inflasi.

3. INVESTASI SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Investasi sub sektor ketenagalistrikan pada tahun 2010 sebesar US\$ 4,28 miliar dan pada tahun 2014 menjadi US\$ 3,91 miliar. Kemudahan perizinan dan ketersediaan lahan merupakan 2 faktor kunci yang harus diselesaikan kedepan agar investasi sektor ESDM semakin bergairah.

Gambar I-12

Investasi Sektor ESDM
2010-2014





II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

II.1. VISI DAN MISI

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan visi dan misi pembangunan nasional tersebut, khususnya bidang energi listrik dengan menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019.

II.2. TUJUAN

Tujuan merupakan intisari dari visi, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019. Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi KESDM. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui

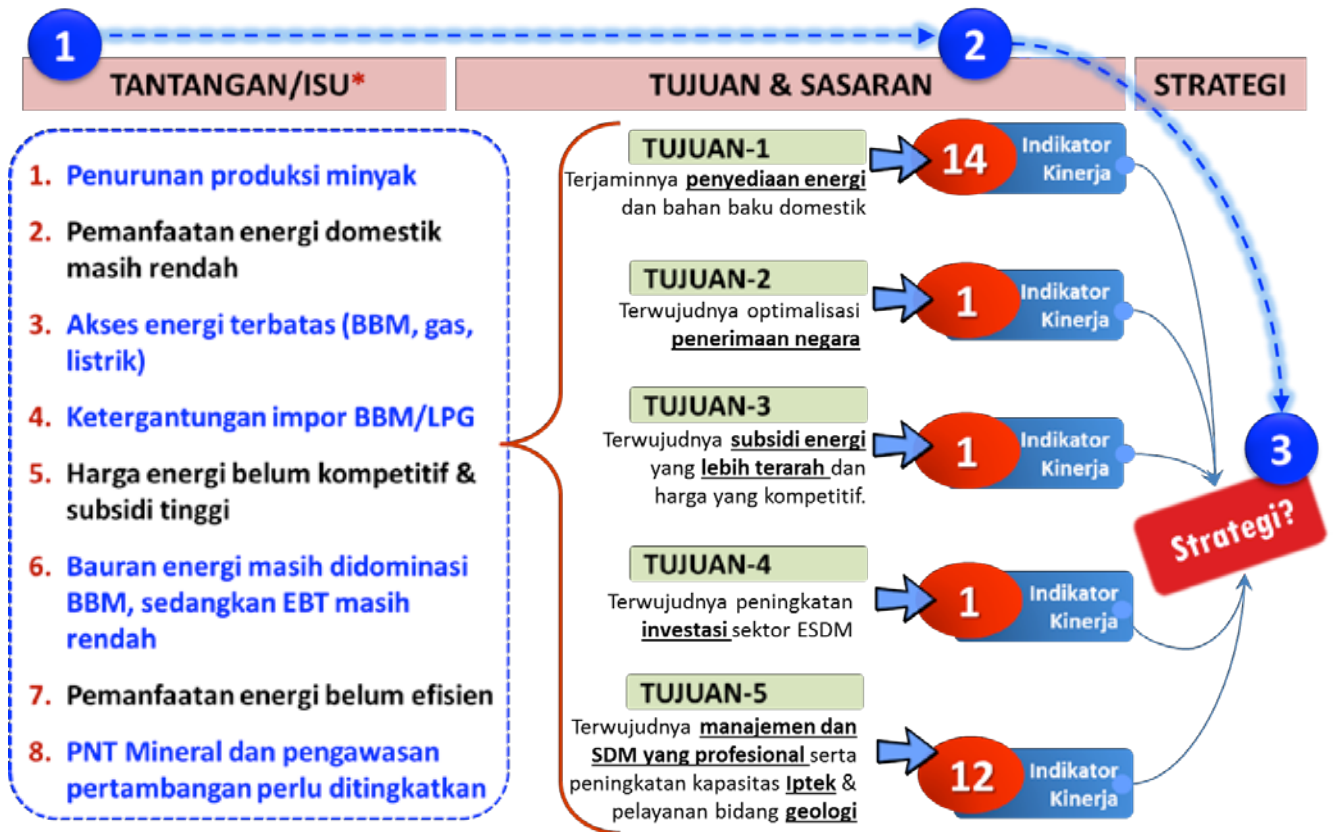
strategi yang tepat, serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada.

Adapun uraian terhadap makna masing-masing tujuan yang mencakup sasaran dan indikator kinerja untuk periode Renstra KESDM Sub Sektor Ketenagalistrikan tahun 2015-2019, sebagai berikut:

Tabel II-1

Tujuan, Sasaran
Strategis dan Indikator
Kinerja KESDM Tahun
2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kerja
1. Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik	1. Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil 2. Meningkatkan alokasi energi domestik 3. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi 4. Meningkatkan diversifikasi energi 5. Meningkatkan efisiensi energi & pengurangan emisi 6. Meningkatkan produk mineral & PNT	3 2 3 2 2 2
2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM	7. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM	1
3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif	8. Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran	1
4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM	9. Meningkatkan investasi sektor ESDM	1
5. Terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi.	10. Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional 11. Meningkatkan kapasitas iptek 12. Meningkatkan kualitas informasi dan pelayan bidang geologi	6 3 3
TOTAL	12	29



Gambar II-1

Skema Penyelesaian Tantangan dengan Penetapan Tujuan, Sasaran dan Strategi

TUJUAN -1 : TERJAMINNYA PENYEDIAAN ENERGI DAN BAHAN BAKU DOMESTIK

Rasio elektrifikasi pada tahun 2015 direncanakan sebesar 87,35% dan ditargetkan tahun 2019 menjadi sebesar 97%. Beberapa infrastruktur dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mendorong rasio elektrifikasi pada tahun 2015-2019, antara lain:

a. Pembangkit listrik, dengan rencana penyelesaian proyek sekitar 42,9 GW selama 5 tahun, terdiri dari 35,5 GW proyek baru dan 7,4 GW proyek yang sudah berjalan. Dengan adanya tambahan pembangunan pembangkit tersebut maka kapasitas terpasang pembangkit pada 2015 direncanakan menjadi sebesar

57 GW dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sekitar 95 GW.

b. Transmisi listrik, dengan rencana pembangunan sekitar 46 ribu kms selama 5 tahun atau rata-rata sekitar 9.000 kms per tahun.

c. Distribusi Tenaga Listrik, dengan rencana pengembangan jaringan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia dari tahun 2015-2019 yang diantaranya meliputi rencana pengembangan Jaringan tegangan Menengah (JTM) sepanjang 82,1 ribu kms, rencana pengembangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 67,1 ribu kms serta rencana pembangunan Gardu Distribusi sebesar 16, 4 ribu MVA.

Tabel II-2

Target 2019 Penyediaan Akses dan Infrastruktur Energi

SASARAN-3 : MENYEDIKAKAN AKSES DAN INFRASTRUKTUR ENERGI

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Satuan
8	Akses & Infrastruktur Ketenagalistrikan		
	a. Rasio Elektrifikasi	97	%
	b. Infrastruktur Ketenagalistrikan		
	- Pembangunan Pembangkit	42.939	MW
	- Pembangunan Transmisi	46.688	kms
	c. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Listrik	2,04	%

Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit listrik, diarahkan untuk terus diturunkan sehingga Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik juga dapat menurun, mengingat BBM merupakan sumber energi primer pembangkit yang paling mahal. Porsi BBM dalam bauran energi pembangkit tahun 2015 direncanakan sebesar 8,85% sebagaimana APBN-P 2015 dan terus diturunkan menurun menjadi sekitar 2,04% pada tahun 2019 seiring dengan ditingkatkannya porsi batubara melalui PLTU dan EBT melalui PLTP, PLT Bioenergi, PLTA, PLTMH, PLTS, dan PLTBayu.

Pembangkitan tenaga listrik merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi biaya penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu,

Pemerintah secara berkesinambungan berupaya untuk memperbaiki bauran energi pembangkitan tenaga listrik dengan menekan secara maksimal penggunaan BBM dalam pembangkitan tenaga listrik. Pangsa pemakaian energi primer ditetapkan dalam UU APBN sebagai asumsi dalam penetapan subsidi listrik. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkitan listrik secara umum turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 pangsa BBM mencapai 39% dan realisasi pada tahun 2013 menurun menjadi 12,54 % dan ditargetkan pada akhir tahun 2014 sebesar 9,70%. Upaya yang dilakukan untuk menekan penggunaan BBM antara lain: melalui program diversifikasi bahan bakar pembangkit dari BBM ke Non BBM (Program percepatan tahap 1 dan 2);

larangan pembangunan pembangkit baru yang menggunakan BBM dan mendorong pengembangan pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan melalui kebijakan *Feed in Tariff*.

Pada dasarnya, kebijakan bauran energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik dalam RUKN adalah berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UU 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa RUKN disusun berdasarkan pada KEN. Kebijakan pemanfaatan energi primer setempat untuk pembangkit tenaga listrik dapat terdiri dari fosil (batubara lignit/batubara mulut tambang, gas marginal) maupun non-fosil (air, panas bumi, biomassa, dan lain-lain). Pemanfaatan energi primer setempat tersebut memprioritaskan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan tetap memperhatikan aspek teknis, ekonomi, dan keselamatan lingkungan. Sedangkan pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) diminimalkan dan dibatasi penggunaannya, kecuali untuk menjaga keandalan sistem, dan mengatasi daerah krisis penyediaan tenaga listrik jangka pendek atau daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam lain.

Salah satu pemenuhan ketahanan energi nasional yaitu dengan melakukan upaya-upaya melistriki di beberapa daerah di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia, karena dirasa minimnya

sentuhan pembangunan bagi pulau perbatasan dan terluar serta masyarakat yang bermukim di sana, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pembangkit skala kecil yang dapat cepat beroperasi meskipun pada awalnya menggunakan bahan bakar minyak, seperti pembangunan PLTD. Pembangunan PLTD di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia akan dirasa lebih efektif dan lebih cepat dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik, dengan catatan sesuai dengan prioritas pengembangan nasional agar pengendalian penggunaan bahan bakar minyak untuk PLTD tersebut dapat dikendalikan.

Dalam penggunaan energi primer perlu memperhatikan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (*business as usual*/BAU. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan terus di dorong pemanfaatannya di samping untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik juga dalam rangka menurunkan tingkat emisi CO₂ dengan memberikan skema investasi yang menarik dan harga jual tenaga listrik yang lebih kompetitif.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan dalam menyusun *Roadmap Energy Mix* pada pembangkit tenaga listrik, yaitu:

1. Besar kapasitas pembangkit listrik harus dapat memenuhi pertumbuhan demand yang tinggi;
2. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik dilakukan secara optimal dengan prinsip biaya penyediaan listrik terendah (*least cost*), dengan tetap memenuhi tingkat keandalan yang ditetapkan;
3. Memperhatikan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

TUJUAN - 3 : TERWUJUDNYA SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH TEPAT SASARAN DAN HARGA YANG KOMPETIIF

Subsidi listrik tahun 2015 direncanakan sebesar Rp 66,15 triliun sebagaimana APBN-P 2015. Pada tahun 2019 subsidi listrik diperkirakan meningkat menjadi Rp 89,41 triliun, antara lain karena pertumbuhan penjualan listrik atau semakin meningkatnya rumah tangga yang dilistriki. Penurunan subsidi listrik dapat dilakukan dengan penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan tertentu, perbaikan energi mix pembangkit, pengurangan

losses, dan mekanisme pemberian margin PT PLN (Persero) yang lebih terukur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, mulai 1 Januari 2015 terdapat 12 (dua belas) golongan pelanggan tarif non subsidi yang akan diterapkan *tariff adjustment*/penyesuaian tarif tenaga listrik, yaitu : (1) Rumah Tangga R-1/TR daya 1.300 VA, (2) Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200VA, (3) Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500VA s.d 5.500VA, (4) Rumah Tangga R-3/TR daya 6.600VA keatas, (5) Bisnis B-2/TR, daya 6.600VA s.d 200kVA, (6) Bisnis B-3/TM daya diatas 200kVA, (7) Industri I-3/TM daya diatas 200kVA, (8) Industri I-4/TT daya di atas 30.000kVA, (9) Kantor Pemerintah P-1/TR daya 6.600VA s.d 200kVA, (10) Kantor Pemerintah P-2/TM daya diatas 200kVA, (11) Penerangan Jalan Umum P-3/TR dan (12) Layanan khusus TR/TM/TT.

Tabel II-3

Target Subsidi Listrik

SASARAN-8 : MEWUJUDKAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH TEPAT SASARAN

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Satuan
1	Subsidi Listrik	89,41	Triliun Rp

Gambar II-2

Mekanisme
Perhitungan *Tariff
Adjustment* sesuai
Permen 31/2014

$$T_B = T_L + T_A$$

$$T_B = T_L \times (1 + \% T_A)$$

$$\% T_A = \% (K_{\text{kurs}} \times \Delta \text{Kurs}) + \% (K_{\text{inflasi}} \times \Delta \text{Inflasi}) + \% (K_{\text{ICP}} \times (\Delta \text{ICP}))$$

Keterangan:

T_B : Tarif Baru	K_{kurs} : Koefisien Kurs	ΔKurs : Kenaikan Kurs (Rp)
T_L : Tarif Lama	K_{inflasi} : Koefisien Inflasi	$\Delta \text{Inflasi}$: Kenaikan Inflasi (%)
T_A : Tarif Adjustment	K_{ICP} : Koefisien ICP	ΔICP : Kenaikan Harga ICP (\$)

Contoh:

$T_{L(R3)} = \text{Rp } 1.352/\text{kWh}$ (sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014)

Jika $T_A = 1\%$

$T_{B(R3)} = \text{Rp } 1.352 \times (1+1\%) = \text{Rp } 1.366/\text{kWh}$, ada penambahan Rp 14/kWh (T_A)

Gambar II-3

Pola Penerapan *Tariff
Adjustment*

Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12	Bulan 1
Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8	Data 9	Data 10	Data 11	Data 12	Data 1
		T_{B1}	T_{B2}	T_{B3}	T_{B4}	T_{B5}	T_{B6}	T_{B7}	T_{B8}	T_{B9}	T_{B10}	T_{B11}

Untuk 12 (dua belas) golongan tarif tersebut, fluktuasi BPP karena faktor yang bersifat *uncontrollable* (kurs, inflasi, ICP) tidak dibebankan pada subsidi, namun dibebankan kepada pelanggan non subsidi melalui mekanisme *tariff adjustment* yang perhitungannya dilakukan per bulan. Hal ini berarti sekitar 19% pelanggan dari 61 juta pelanggan yang sudah membayar listrik dengan *tariff adjustment*. Pelanggan yang sudah membayar listrik dengan *tariff adjustment* mengkonsumsi 66% listrik dari total penjualan listrik 18 TWh/bulan dan memberikan 81% *revenue* bagi PLN dari total *revenue* Rp 19,7 Triliun/bulan.

TUJUAN-4: TERWUJUDNYA PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR ESDM

Investasi merupakan modal dasar penggerak perekonomian, yang mewujudkan kegiatan usaha di sektor ESDM. Penyediaan energi dan mineral serta penerimaan sektor ESDM yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, berawal dari investasi.

Investasi ketenagalistrikan mencakup pembangunan pembangkitan, transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan jaringan

Tabel II-4

Investasi Sub Sektor
Ketenagalistrikan

SASARAN-9 : MENINGKATKAN INVESTASI SEKTOR ESDM

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Satuan
1	Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	15,9	Miliar US \$

distribusi serta usaha penunjang ketenagalistrikan. Peran Pemerintah dalam investasi di subsektor ketenagalistrikan cukup besar. Lebih dari Rp 3 triliun per tahun dialokasikan APBN untuk infrastruktur pembangkit listrik. Target investasi ketenagalistrikan tahun 2015 sebesar US\$ 11,2 miliar dan meningkat dimana pada 2019 direncanakan sekitar US\$ 15,9 miliar utamanya karena pembangunan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW.

Terdapat beberapa kebijakan sub sektor ketenagalistrikan yang akan dilakukan dalam rangka mendorong investasi, antara lain :

- a. Penyederhanaan Perizinan
- b. Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- c. Regulasi terkait Prosedur Pembelian Tenaga Listrik & Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) serta mekanisme Pemilihan Langsung

& Penunjukan Langsung dengan maksud antara lain :

- Mempercepat negosiasi harga dengan adanya harga patokan;
 - Mempercepat prosedur persetujuan harga antara PLN dan IPP (mempercepat waktu negosiasi) yang selama ini memakan waktu lama dan berbelit-belit lebih dari setahun;
 - Memberikan kepastian/kepercayaan bagi PLN dalam pelaksanaan pembelian tenaga listrik;
 - Membangun iklim investasi yang lebih kondusif.
- d. Regulasi terkait Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik dalam rangka meningkatkan utilitas jaringan dengan maksud antara lain :
- Meningkatkan utilitas jaringan transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik yang selama ini tertutup;
 - Meningkatkan harga marginal sehingga menarik pihak swasta untuk menjual excess power

Indikator Kinerja	Target					Satuan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Akses & infrastruktur ketenagalistrikan						
a. Rasio Elektrifikasi	87,35	90,15	92,75	95,15	97	%
b. Infrastruktur Ketenagalistrikan						
- Pembangunan Pembangkit	3.782	4.212	6.389	9.237	19.319	MW
- Pembangunan Transmisi	11.805	10.721	10.986	7.759	5.417	Kms
c. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Listrik	8,85	6,97	4,66	2,08	2,04	%

Tabel II-5

Target 2015 - 2019
Penyediaan Akses
dan Infrastruktur
Energi

II.3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dicapai oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setiap tahun. Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM selama 5 tahun mulai 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. SASARAN-3 : MENYEDIKAN AKSES DAN INFRASTRUKTUR ENERGI

a. Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik dengan jumlah

rumah tangga secara keseluruhan. Adapun data Rumah Tangga secara keseluruhan adalah mengacu pada sensus BPS. Sedangkan data yang dipergunakan untuk menghitung rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik mengacu pada sensus BPS meliputi pelanggan PLN dan non PLN.

Perkembangan rasio elektrifikasi secara nasional dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Rasio elektrifikasi pada tahun 2015 direncanakan sebesar 87,35% dan ditargetkan tahun 2019 menjadi sebesar 97%.

Berikut Rencana Rasio Elektrifikasi per Provinsi di Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2019 :

Tabel II-6

Rencana Rasio
Elektrifikasi per Provinsi
di Indonesia tahun
2016- 2019

No.	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	94.25	95.94	97.41	98.67	99.73
2	Sumatera Utara	93.15	95.02	96.68	98.12	99.37
3	Sumatera Baraf	83.82	87.24	90.45	93.46	96.25
4	Riau	87.59	90.38	92.97	95.34	97.51
5	Kepulauan Riau	78.6	82.88	86.95	90.81	94.47
6	Bengkulu	86.67	89.62	92.36	94.88	97.21
7	Jambi	84.3	87.64	90.78	93.7	96.42
8	Sumatera Selatan	80.59	84.55	88.3	91.84	95.18
9	Kepulauan Bangka Belitung	97	98.21	99.22	99.4	99.57
10	Lampung	84.79	88.05	91.1	93.94	96.58
11	Banten	94.78	96.38	97.76	98.93	99.9
12	DKI Jakarta	99.66	99.72	99.77	100	100
13	Jawa Barat	88.87	91.45	93.83	95.99	97.94
14	Jawa Tengah	90.59	92.89	94.97	96.84	98.51
15	D. I. Yogyakarta	85.64	88.76	91.67	94.37	96.86
16	Jawa Timur	86.74	89.67	92.4	94.92	97.23
17	Bali	88.13	90.84	93.33	95.61	97.69
18	Kalimantan Barat	83.5	86.98	90.25	93.3	96.15
19	Kalimantan Tengah	72.75	78.02	83.08	87.92	92.57
20	Kalimantan Selatan	86.91	89.82	92.52	95.01	97.29
21	Kalimantan Tinnur& Kalimantan Utara '	90.92	93.16	95.19	97.01	98.62
22	Sulawesi Utara	88.42	91.07	93.5	95.72	97.74
23	Gorontalo	79.11	83.32	87.32	91.1	94.69
24	Sulawesi Tengah	79.9	83.96	87.82	91.46	94.9
25	Sulawesi Barai	78.65	82.94	87.01	90.87	94.53
26	Sulawesi Selatan	88.01	90.73	93.23	95.52	97.61
27	Sulawesi Tenggara	72.36	77.68	82.79	87.69	92.39
28	Nusa Tenggara Barat	73.45	78.59	83.52	88.24	92.75
29	Nusa Tenggara Timur	65.6	72.05	78.29	84.32	90.14
30	Maluku	85.64	88.75	91.65	94.33	96.82
31	Maluku Utara	92.7	94.63	96.36	97.86	99.17
32	Papua	52.36	61.02	69.46	77.7	85.72
33	Papua Barat	81.81	85.56	89.09	92.42	95.54
	Jawa-Bali	89.72	92.12	94.32	96.33	98.13
	Luar Jawa-Bali	83.63	87.08	90.32	93.34	96.16
	INDONESIA	87.35	90.15	92.75	95.15	97.35

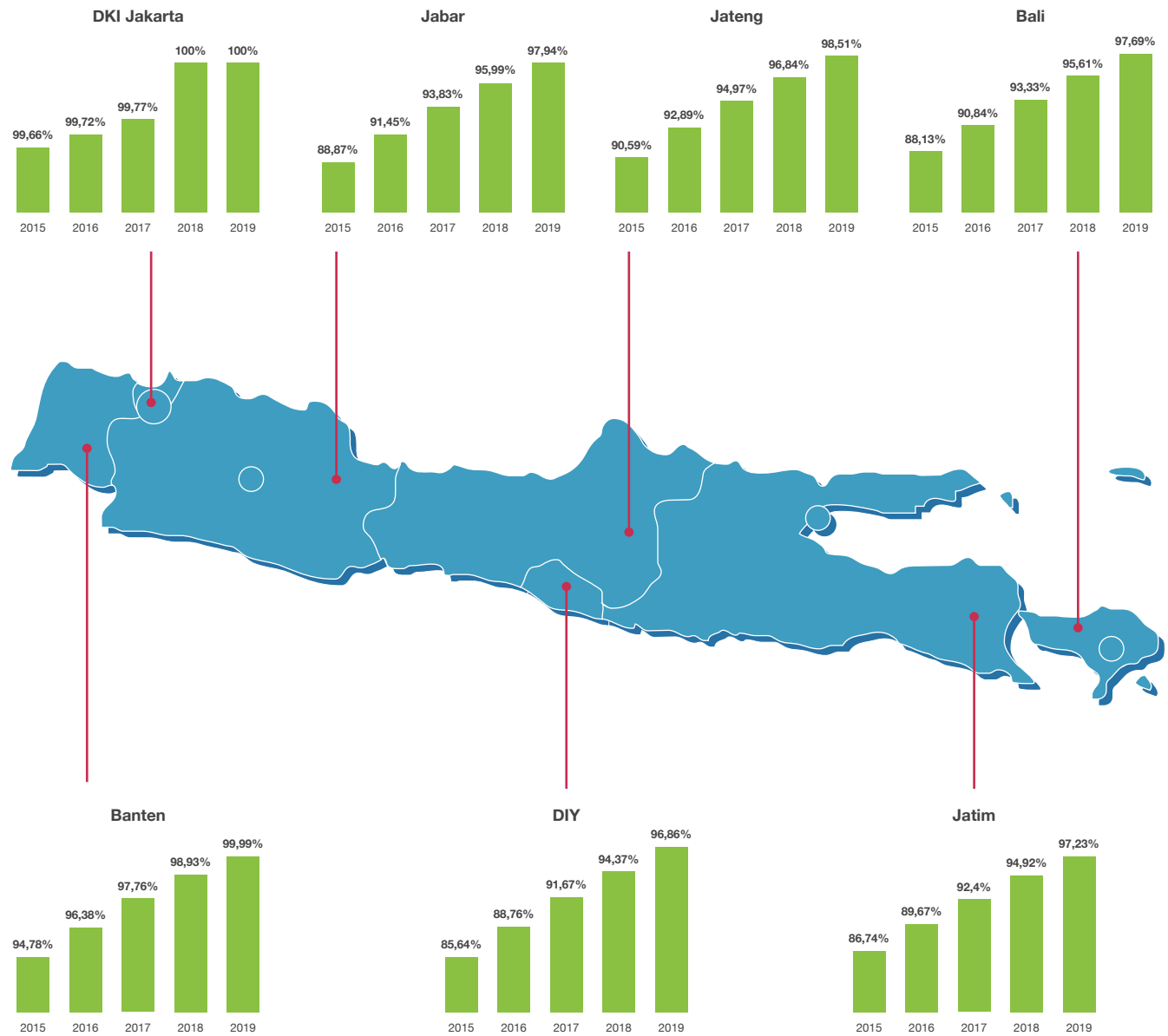
Berikut target rasio elektrifikasi tahun 2015-2019 per provinsi pada masing-masing pulau utama:

**Gambar II-4**

Peta Sebaran Target
Rasio Elektrifikasi
2015-2019 Wilayah
Sumatera

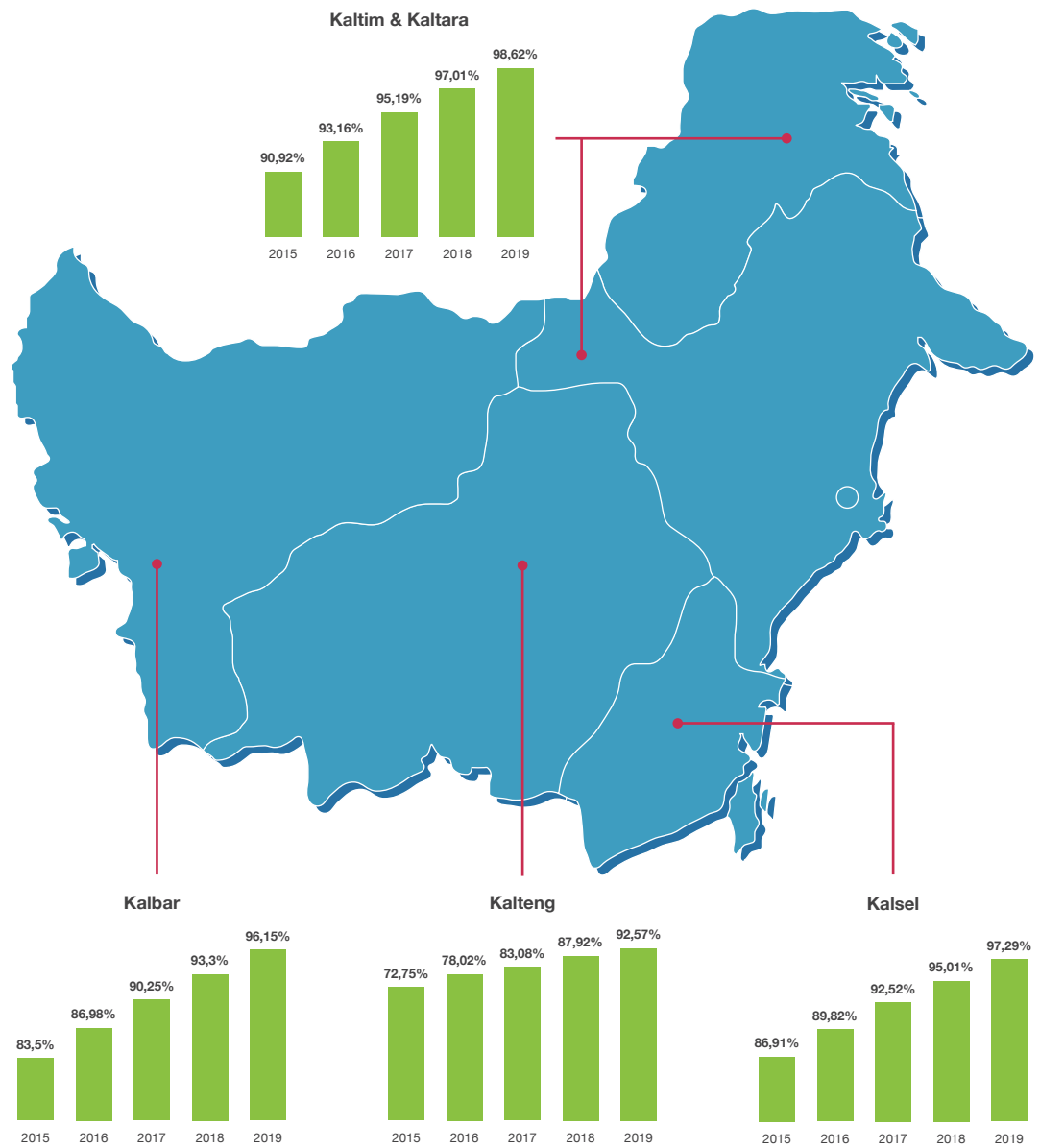
Gambar II-5

Peta Sebaran Target
Rasio Elektrifikasi
2015-2019 Wilayah
Jawa Bali



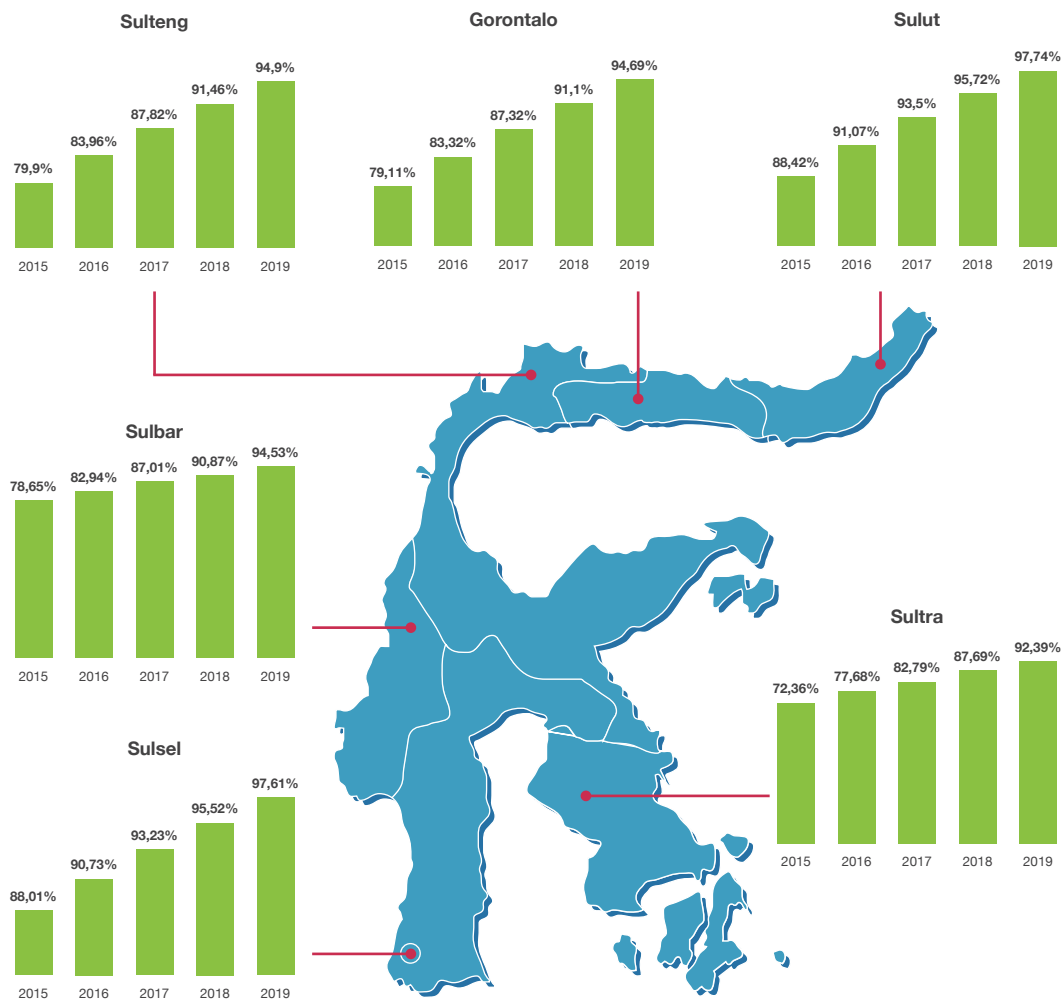
Gambar II-6

Peta Sebaran Target
Rasio Elektrifikasi
2015-2019 Wilayah
Kalimantan

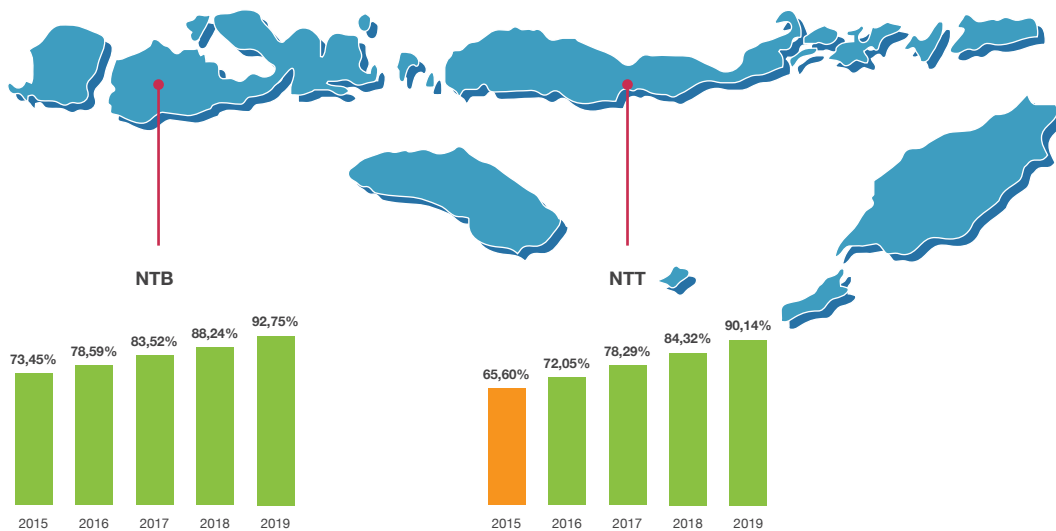


Gambar II-7

Peta Sebaran Target
Rasio Elektrifikasi
2015-2019 Wilayah
Sulawesi

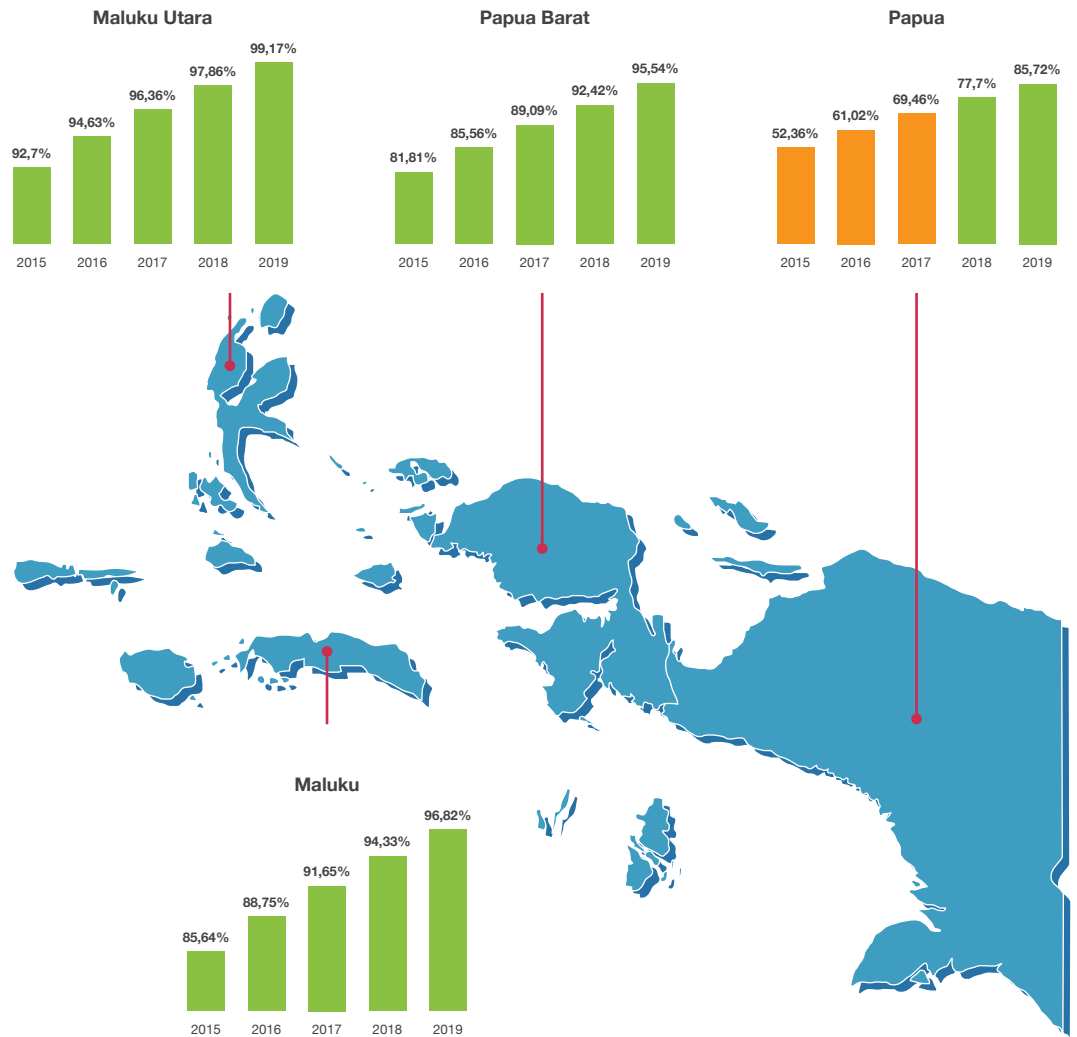
**Gambar II-8**

Peta Sebaran Target
Rasio Elektrifikasi
2015-2019 Wilayah
Nusa Tenggara



Gambar II-9

Peta Sebaran Target
Rasio Elektrifikasi
2015-2019 Wilayah
Maluku dan Papua



Untuk tahun 2015 Rasio Elektrifikasi di Provinsi Papua diperkirakan masih memiliki prosentase yang paling kecil diantara provinsi-provinsi yang lain yaitu sebesar 52,36 % dan tahun 2019 meningkat menjadi 85,72 %. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi ini yaitu adanya program instalasi listrik gratis untuk nelayan dan rakyat tidak mampu yang

diperkirakan dari tahun 2015-2019 sebanyak 494.732 RTS.

b. Infrastruktur Ketenagalistrikan

1. Pembangunan Pembangkit

Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan pada pertumbuhan yang realistis, dan diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan

tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah, mendukung kecukupan ketersediaan tenaga listrik untuk meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan serta membatasi rencana pengembangan pembangkit BBM dalam rangka pelaksanaan Nawacita, khususnya agenda VII (mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik) dengan sub agenda kedaulatan energi.

Tambahan pembangkit baru yang diperlukan untuk 5 tahun ke depan sebesar 35,5 GW tidak termasuk yang sedang dalam tahap konstruksi sebesar 7,4 GW.

1.1. Wilayah Sumatera

Sistem PLN di wilayah Sumatera terdiri dari 1 sistem interkoneksi, yaitu Sistem Sumatera. Di luar sistem interkoneksi tersebut pada saat ini terdapat 2 sistem isolated yang cukup besar dengan beban puncak di atas 50 MW, yaitu Bangka dan Tanjung Pinang serta terdapat beberapa sistem isolated dengan beban puncak di atas 10 MW, yaitu Takengon, Sungai Penuh, Rengat, Tanjung Balai Karimun dan Belitung.

Rencana penambahan kapasitas pembangkit yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 yaitu sebesar 11.327 MW. Untuk tahun 2015 rencana penambahan pembangkit untuk

wilayah Sumatera yaitu sebesar 1.309 MW dan untuk tahun 2019 direncanakan sebesar 5.629 MW.

Berikut daftar proyek-proyek strategis yang terdapat di wilayah Sumatera:

1. Proyek PLTU Percepatan Tahap I (PLTU Pangkalan Susu, PLTU Tarahan, PLTU Tenayan) dan PLTA Peusangan 1-2 serta PLTA Asahan III, merupakan proyek yang sangat strategis karena selain proyek-proyek ini akan dapat mengatasi defisit pasokan daya yang saat ini terjadi juga sekaligus akan mengurangi pemakaian BBM dari pembangkit-pembangkit yang eksisting;
2. Pembangkit-pembangkit Peaker yaitu : PLTMG Arun (200 MW), Sumbagut-1 (250 MW), Riau (200 MW), Jambi (100 MW) dan Lampung (200 MW) merupakan proyek pembangkit strategis karena untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sistem Sumatera pada saat beban puncak yang saat ini masih dioperasikan dengan BBM;
3. Pembangkit MPP merupakan proyek yang strategis, karena pembangkit ini dapat dipindahkan sehingga sangat bermanfaat untuk mengatasi kekurangan pasokan daya akibat keterlambatan proyek pembangkit serta untuk memenuhi demand;
4. Pembangkit skala besar yang listriknya juga akan disalurkan ke sistem interkoneksi Sumatera di samping ditransfer ke Jawa

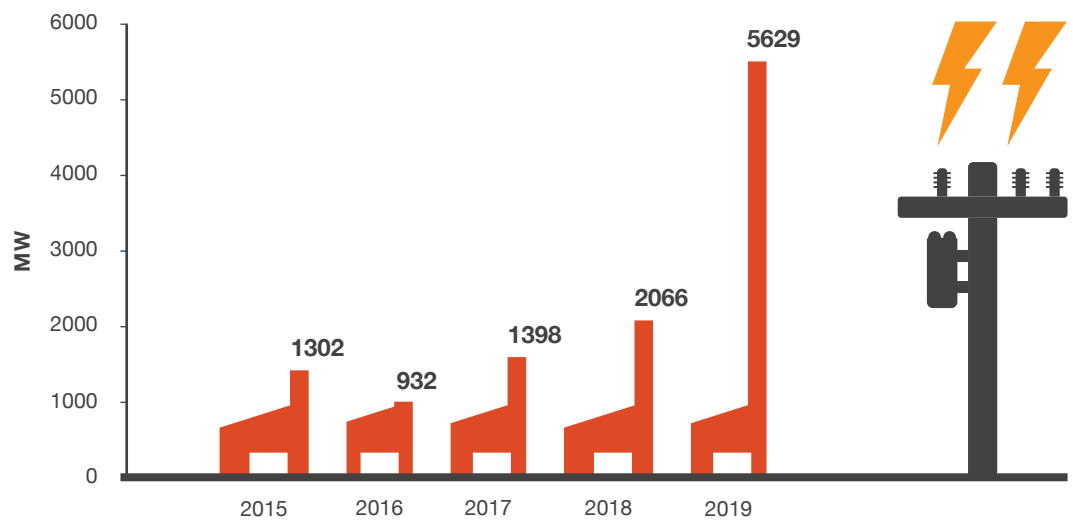
melalui transmisi 500 kV HVDC harus dapat diselesaikan selaras dengan penyelesaian proyek interkoneksi Jawa-Sumatera 500 kV HVDC;

5. PLTU Jambi 2x600 MW dan PLTA Merangin 350 MW di Provinsi Jambi serta PLTA Batang Toru 510 MW di provinsi Sumatera Utara merupakan proyek strategis karena akan memenuhi kebutuhan sistem Sumatera dan sekaligus menurunkan BPP.

Berikut rencana penambahan pembangkit 2015-2019 di wilayah Sumatera:

Gambar II-10

Rencana penambahan Pembangkit Wilayah Sumatera Tahun 2015-2019



Untuk mengurangi pembangkit sewa dalam mengatasi kondisi kekurangan pasokan daya, perlu dibangun MPP (Barge Mounted atau Truck Mounted) dengan total kapasitas 625 MW dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

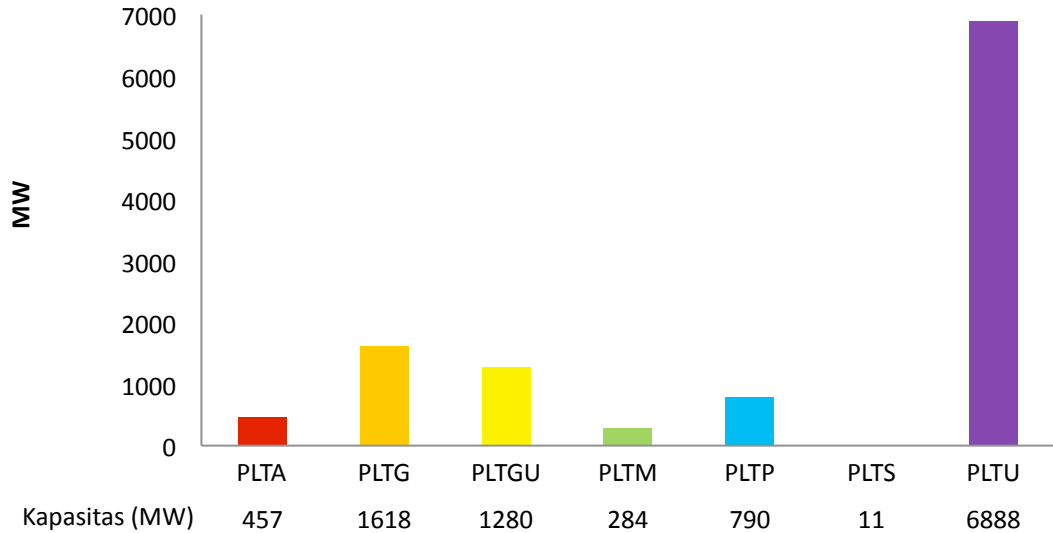
Tabel II-7

Daftar Kapasitas MPP tiap Provinsi

No	Sistem Kelistrikan	Provinsi	Kapasitas (MW)
1	Sumbagut	Sumut	250
2	Sumbagut	Sumut	100
3	Sumbagteng	Jambi	100
4	Sumbagsel	Lampung	100
5	Nias	Sumut	25
6	Bangka	Bangka	50

Gambar II-11

Rencana penambahan
Per Jenis Pembangkit
Wilayah Sumatera
Tahun 2015-2019

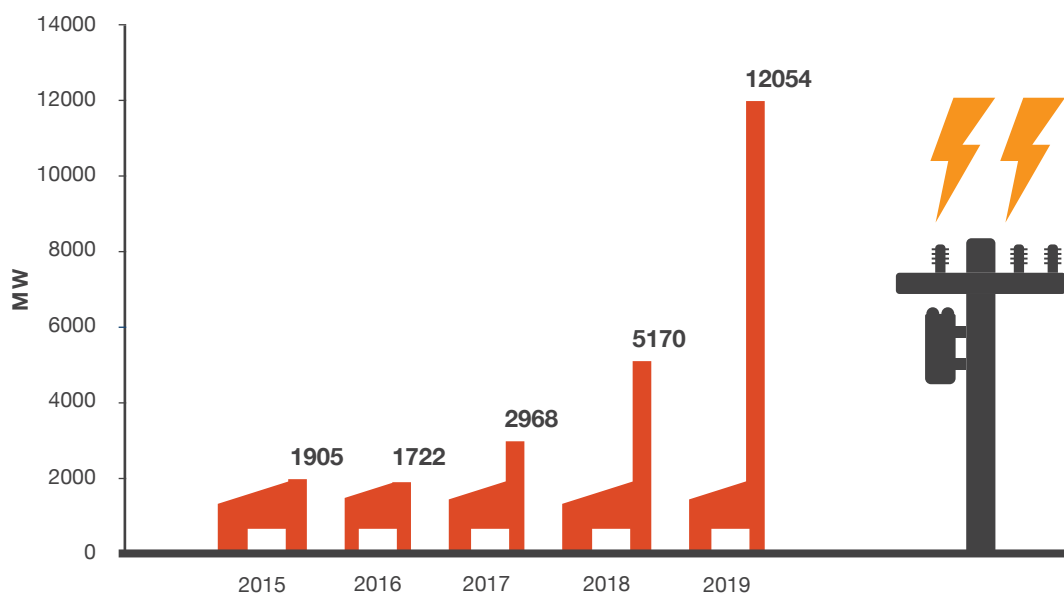


1.2. Wilayah Jawa-Bali

Pada gambar II.12 diperlihatkan rencana penambahan kapasitas pembangkit yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019. Untuk tahun 2015 rencana penambahan pembangkit untuk wilayah Jawa-Bali yaitu sebesar 1.905 MW dan untuk tahun 2019 direncanakan sebesar 12.054 MW. Total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 23.869 MW.

Gambar II-12

Rencana penambahan
Pembangkit Wilayah
Jawa-Bali Tahun 2015-
2019



Di wilayah Jawa-Bali terdapat beberapa proyek pembangkit yang termasuk Fast Track Program I & II. Untuk proyek PLTU FTP1 di Jawa - Bali yang telah selesai dan beroperasi pada tahun 2014 adalah sebesar 1.050 MW, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu Unit 2-3 (2x350 MW) dan PLTU Tanjung Awar-Awar Unit-1 (1x350 MW). Selanjutnya untuk PLTU Adipala (1x660 MW) akan beroperasi tahun 2015 dan PLTU Tanjung Awar-Awar Unit-2 (1x350 MW) beroperasi tahun 2016. Sehingga total kapasitas pembangkit FTP1 Jawa Bali sebesar 7.490 MW akan selesai dan beroperasi seluruhnya pada tahun 2016. Untuk proyek pembangkit FTP2 mengalami keterlambatan dalam implementasinya. Berikut daftar *Fast Track Program II* (FTP II) di Jawa-Bali yang direncanakan beroperasi tahun 2015-2019 :

Tabel II-8

Daftar FTP II Jawa-Bali beroperasi Tahun 2015-2019

Provinsi	Pengembang	Jenis	Nama Proyek	Kapasitas (MW)	COD
Banten	Swasta	PLTU	Jawa-5	2x1000	2019
Jawa Barat	PLN	PLTA	Jatigede	2x55	2019
Jawa Barat	PLN	PLTU	Indramayu-4	1,000.0	2019
Jawa Barat	PLN	PS	Upper Cisokan Pump Storage	4x260	2019
Jawa Barat	Swasta	PLTP	Kamojang-5	30.0	2015
Jawa Barat	Swasta	PLTP	Karaha Bodas	30.0	2016
Jawa Barat	Swasta	PLTP	Patuha	2x55	2019
Jawa Barat	Swasta	PLTP	Tangkuban Perahu-1	55.0	2019
Jawa Barat	Swasta	PLTU	Jawa-1	1,000.0	2019
Jawa Tengah	Swasta	PLTP	Dieng	60.0	2019

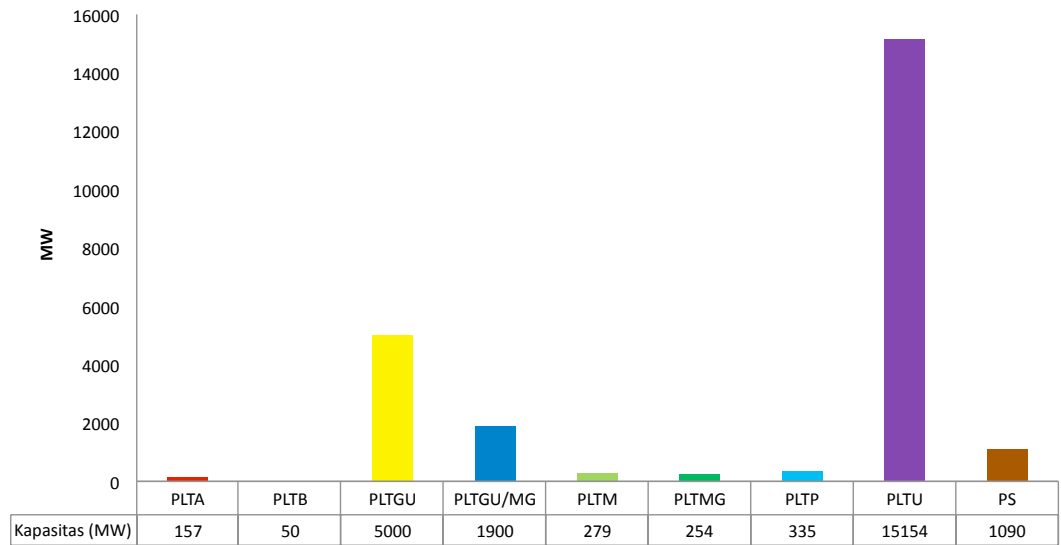
Pada sistem Jawa Bali terdapat beberapa proyek pembangkit strategis berskala besar yang direncanakan sebagai berikut :

- PLTU Jawa Tengah (2x950 MW): Proyek ini sangat strategis, merupakan proyek kelistrikan pertama yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, dibutuhkan sistem pada 2017 dan 2018, tapi karena pembebasan lahan belum tuntas, maka COD mundur menjadi tahun 2019.
- PLTU Indramayu (2x1.000 MW): Proyek ini sangat strategis, relatif dekat dengan pusat beban di Jabodetabek. Dibutuhkan sistem pada tahun 2019, Diharapkan dengan adanya program pembangunan pembangkit 35 GW dalam 5 tahun kedepan, masalah pembebasan lahan dan perizinan dari Pemda dapat diselesaikan, sehingga diharapkan COD tahun 2019.
- PLTU Jawa-1 (1.000 MW): dikembangkan sebagai ekspansi dari IPP yang telah beroperasi dengan titik koneksi ke GITET Mandirancan.

- PLTU Jawa-3 (2x660 MW): dapat dialokasikan untuk PLTU IPP Tanjung Jati A yang akan dikembangkan oleh PT TJPC, atau pembangunan PLTU baru oleh IPP, dengan titik koneksi ke switching station 500 kV antara Pemalang dan Indramayu.
- PLTU Jawa-4 (2x1.000 MW): dapat dikembangkan sebagai ekspansi dari IPP yang telah beroperasi, atau pembangunan PLTU baru oleh IPP, dengan titik koneksi ke GITET Tanjung Jati atau di tempat lain sesuai kebutuhan sistem.
- PLTU Jawa-5 (2x1.000 MW) akan dilaksanakan oleh IPP eksisting dengan alternatif lokasi di Provinsi Jawa Barat/Banten dengan titik koneksi GITET Balaraja atau Incomer SUTET 500 kV Tasik - Depok.
- PLTU Jawa-6 (2x1.000 MW) akan dilaksanakan oleh PLN atau IPP, dalam RUPTL 2013-2022 pembangkit ini berlokasi di Karawang/Bekasi kemudian dipindah ke lokasi Jawa Barat, Banten atau DKI Jakarta.
- PLTU Jawa-7 (2x1.000 MW) lokasi di Bojonegara diatas lahan PLN seluas 170 ha, rencana COD tahun 2019, pre-FS sudah dilakukan, saat ini dalam tahap penyelesaian FS dan penyusunan AMDAL, dikembangkan sebagai proyek IPP dengan titik koneksi Incomer - double pi SUTET Suralaya Baru – Bojanegara – Balaraja Baru pada tahun 2019.
- PLTU Jawa-8 (1.000 MW) akan dilaksanakan oleh pengembang eksisting yang berlokasi di provinsi Jawa Tengah.
- PLTU Jawa-9 (600 MW) akan dilaksanakan oleh pengembang eksisting yang berlokasi di provinsi Banten.
- PLTU Jawa-10 (660 MW) merupakan ekspansi dari PLTU Adipala.
- PLTU Jawa-11 (600 MW) akan dilaksanakan oleh PLN atau IPP yang berlokasi di provinsi Jawa Barat.
- PLTU Jawa-12 (2x1.000 MW) akan dilaksanakan oleh PLN atau IPP yang berlokasi di provinsi Jawa Barat.
- PLTU Jawa-13 (2x1.000 MW) akan dilaksanakan oleh PLN atau IPP.
- PLTGU Jawa-1 (2x800 MW), lokasi semula di Gresik untuk memenuhi kebutuhan pembangkit medium, karena kepastian ketersediaan gas yang belum siap, sehingga lokasi dipindah ke provinsi Jawa Barat dekat pusat beban Jakarta dan akan dikembangkan oleh IPP.
- PLTGU Jawa-2 (1x800 MW), semula berlokasi di Grati, karena sampai saat ini belum ada indikasi pasokan gas sehingga lokasi dipindah ke Priok dekat pusat beban Jakarta.
- PLTGU Jawa-3 (1x800 MW), tambahan pembangkit medium yang berlokasi di Gresik, diharapkan ketersediaan gas dari blok Cepu.

Gambar II-13

Rencana penambahan Per Jenis Pembangkit Wilayah Jawa-Bali Tahun 2015-2019

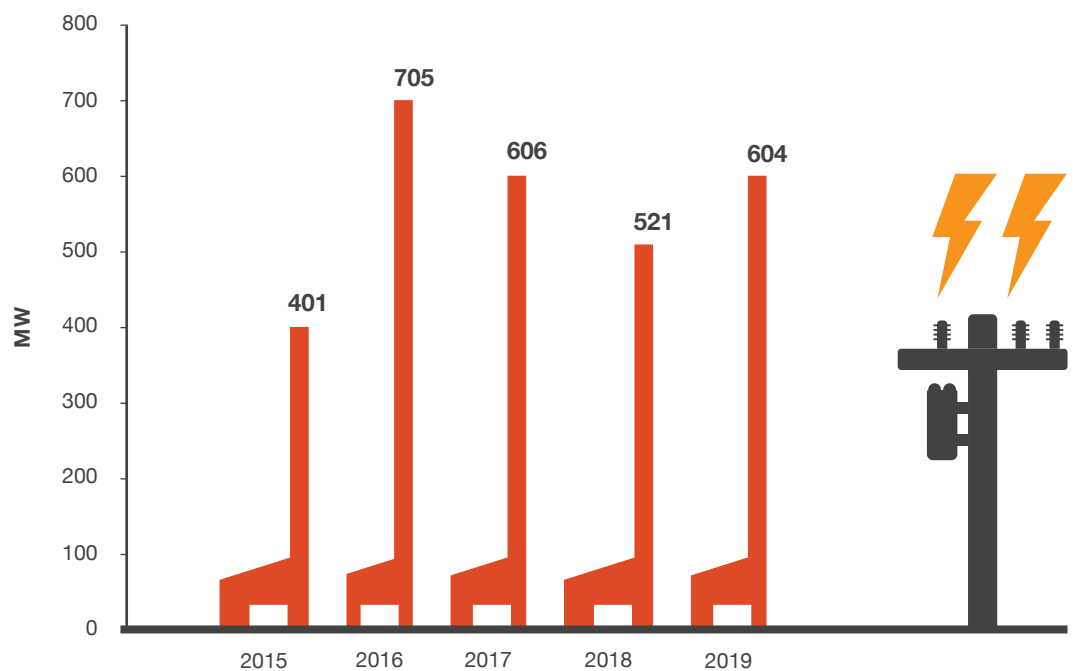


1.3. Wilayah Kalimantan

Rencana penambahan pembangkit untuk wilayah Kalimantan Tahun 2015-2019 berturut-turut sebesar 401MW; 705MW; 604MW; 521MW; 605MW, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 2.837 MW.

Gambar II-14

Rencana penambahan Pembangkit Wilayah Kalimantan Tahun 2015-2019



Pada sistem Kalimantan terdapat beberapa proyek pembangkit strategis berskala besar yang direncanakan sebagai berikut :

Sistem Kalbar

- Pembangunan transmisi 275 kV interkoneksi Kalbar–Serawak yang membentang dari Bengkayang sampai perbatasan Serawak yang direncanakan selesai tahun 2015, serta proyek transmisi 150 kV yang terkait dengan interkoneksi ini.
- Proyek pembangkit FTP1 yaitu Parit Baru dan Pantai Kura-Kura serta proyek pembangkit Parit Baru FTP2 dan pembangkit Kalbar peaker.

Sistem Kalseltengtimra

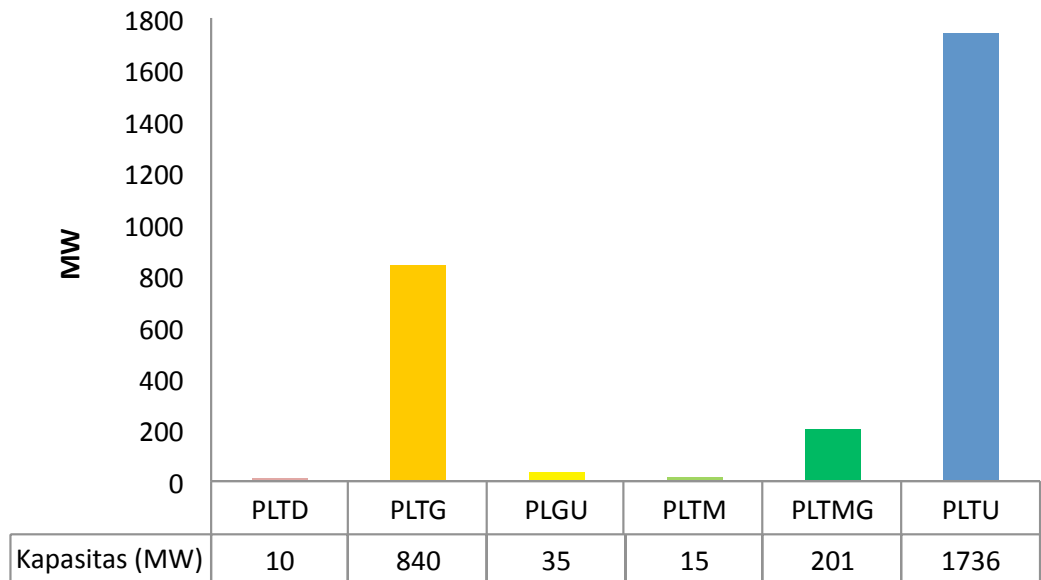
- Proyek pembangkit FTP1 yaitu PLTU Kalteng 2x60 MW di Pulang Pisau dan PLTU Kaltim 2x110 MW di Teluk Balikpapan.
- Proyek pembangkit FTP2 yaitu PLTU IPP Kalsel 2x100 MW, PLTU IPP Kaltim 2x100 MW, Bangkanai Peaker 155 MW dan 140 MW.
- Proyek pembangkit reguler

PLTU yaitu Kalselteng 1 (2x100 MW), Kalselteng 2 (2x100 MW), Kalselteng 3 (2x100 MW), Kaltim 3 (2x200 MW), Kaltim 4 (2x100 MW), dan Kaltim 5 (2x200 MW).

- Proyek pembangkit peaker yaitu: Kalsel Peaker 1 (200 MW), Kalsel Peaker 2 (100 MW), Kaltim Peaker 2 (100 MW) dan Kaltim Peaker 3 (100 MW) dengan bahan bakar LNG.
- Mobile power plant (MPP) 200 MW di Kalsel dengan bahan bakar dual fuel untuk memenuhi kebutuhan beban dan bersifat jangka pendek, terkait beberapa proyek pembangkit IPP mundur dari jadwal semula.
- Pembangunan PLTMG berbahan bakar dual fuel di beberapa sistem isolated di Kalimantan Utara yaitu di Malinau dan di Tanjung Selor untuk memenuhi kebutuhan beban didaerah tersebut yang tumbuh pesat setelah terbentuk Provinsi Kalimantan Utara.
- Penyiapan kecukupan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit peaker tersebut termasuk pembangkit existing dan MPP.

Gambar II-15

Rencana penambahan
Per Jenis Pembangkit
Wilayah Kalimantan
Tahun 2015-2019

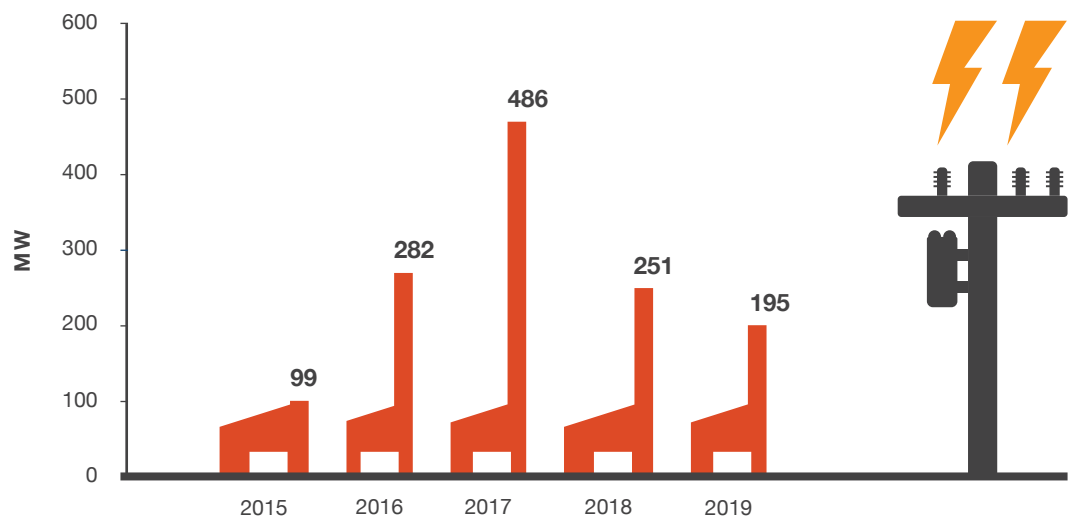


1.4. Wilayah Maluku & Nusa Tenggara

Rencana penambahan kapasitas pembangkit wilayah Maluku dan Nusa Tenggara yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 berturut-turut sebesar 99MW; 282MW; 486MW; 251MW; 195MW, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 1.313 MW.

Gambar II-16

Rencana
penambahan
Pembangkit
Wilayah Maluku
& Nusa Tenggara
Tahun 2015-2019

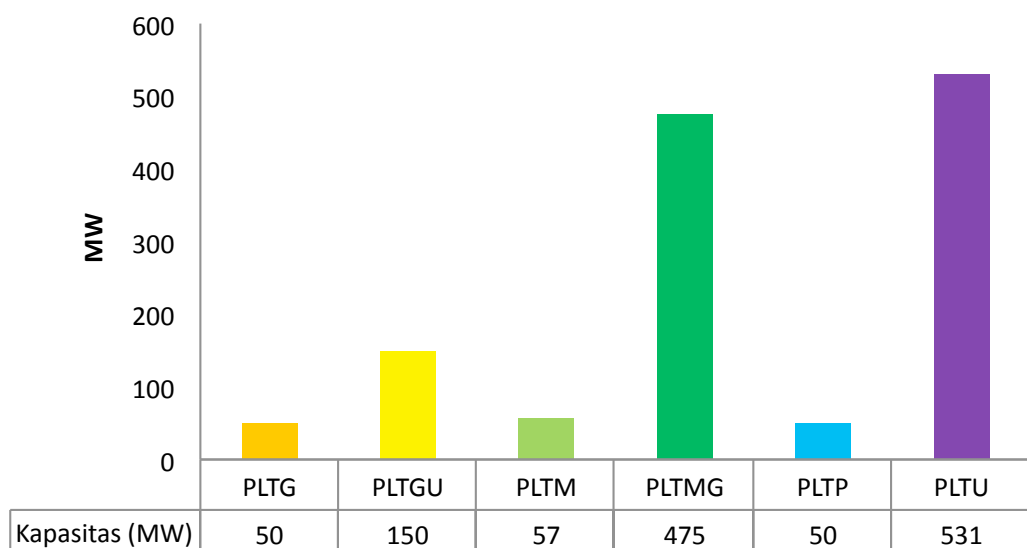


Pada sistem Maluku dan Nusa Tenggara terdapat beberapa proyek pembangkit strategis, yaitu :

- Proyek pembangkit FTP1 yaitu PLTU 2 di NTB Lombok/Jeranjang 2x25 MW yang saat ini dalam tahap pengujian dan diharapkan tahun 2015 sudah beroperasi. Proyek pembangkit FTP2 PLTU Lombok 2x50 MW untuk memenuhi kebutuhan beban yang terus meningkat.
- Proyek-proyek pembangkit IPP yang telah berstatus PPA yaitu PLTU Lombok Timur 2x25 MW, diharapkan tahun 2017 sudah beroperasi.
- Proyek pembangkit Lombok Peaker 150 MW dengan bahan bakar gas yang disimpan dalam bentuk CNG untuk memenuhi kebutuhan beban puncak.
- Proyek PLTU skala kecil tersebar untuk memenuhi kebutuhan beban dan mengurangi penggunaan BBM pada sistem yang masih relatif kecil dan isolated di Provinsi NTB, NTT dan Maluku. Proyek-proyek PLTU tersebut sebagian masuk didalam proyek pembangkit FTP1 dan FTP2 dan proyek pembangkit reguler.
- Proyek-proyek pembangkit dual fuel (berbahan bakar gas dan BBM) skala kecil (PLTMG) tersebar untuk memenuhi kebutuhan beban sebelum pembangkit non-BBM beroperasi, antara lain di sistem Sumbawa, Flores, Kupang, Ambon dan Ternate.

Gambar II-17

Rencana penambahan Per Jenis Pembangkit Wilayah Maluku & Nusa Tenggara Tahun 2015-2019

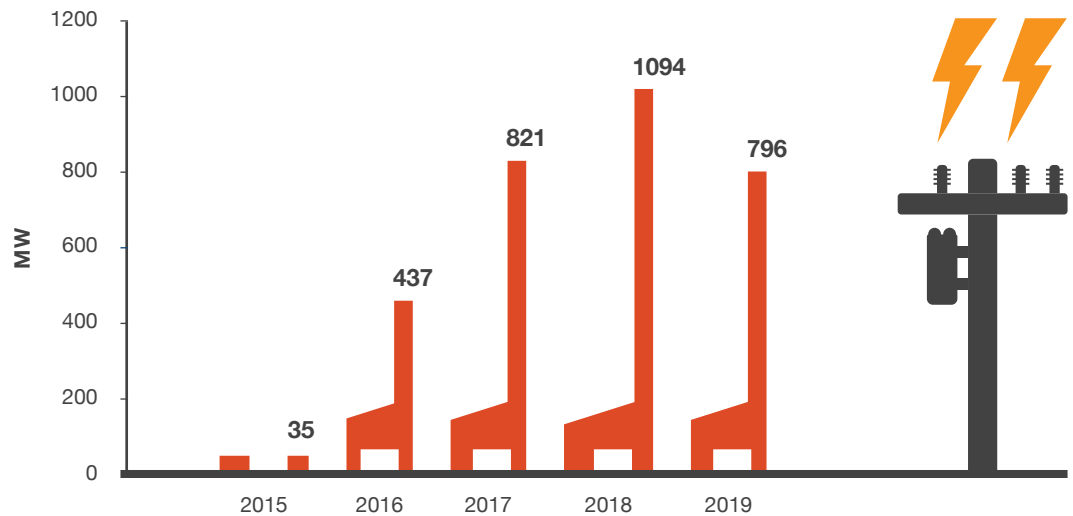


1.5. Wilayah Sulawesi

Rencana penambahan kapasitas pembangkit wilayah Sulawesi yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 berturut-turut sebesar 35MW; 437MW; 821MW; 1094; 796MW, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 3.183 MW.

Gambar II-18

Rencana penambahan Pembangkit Wilayah Sulawesi Tahun 2015-2019



Pada sistem Sulawesi terdapat beberapa proyek pembangkit strategis, yaitu :

Pada Sistem Sulbagut (Sulawesi bagian utara)

- Proyek pembangkit FTP1 yaitu PLTU Gorontalo (2x25 MW) dan PLTU Sulut 1 (2x25 MW).
- Proyek pembangkit FTP2 yaitu PLTP IPP Lahendong 5 dan 6 (2x20 MW), PLTP Kotambagu (total 80 MW).
- Proyek pembangkit reguler PLTU yaitu Sulut 3 (2x50 MW), Sulbagut 1 (2x50 MW), Sulbagut 3 (2x50 MW) dan Sulbagut 2 (2x100 MW).
- Proyek pembangkit peaker yaitu Minahasa Peaker 150 MW, Gorontalo Peaker 100 MW, serta mobile power plant (MPP) kapasitas 100 MW. MPP ini diharapkan tahun 2016 sudah beroperasi dan bersifat sementara sebelum pembangkit non-BBM selesai pembangunannya, agar periode tahun 2016-2017 tidak terjadi defisit daya.

Pada Sistem Sulbagsel (Sulawesi bagian selatan)

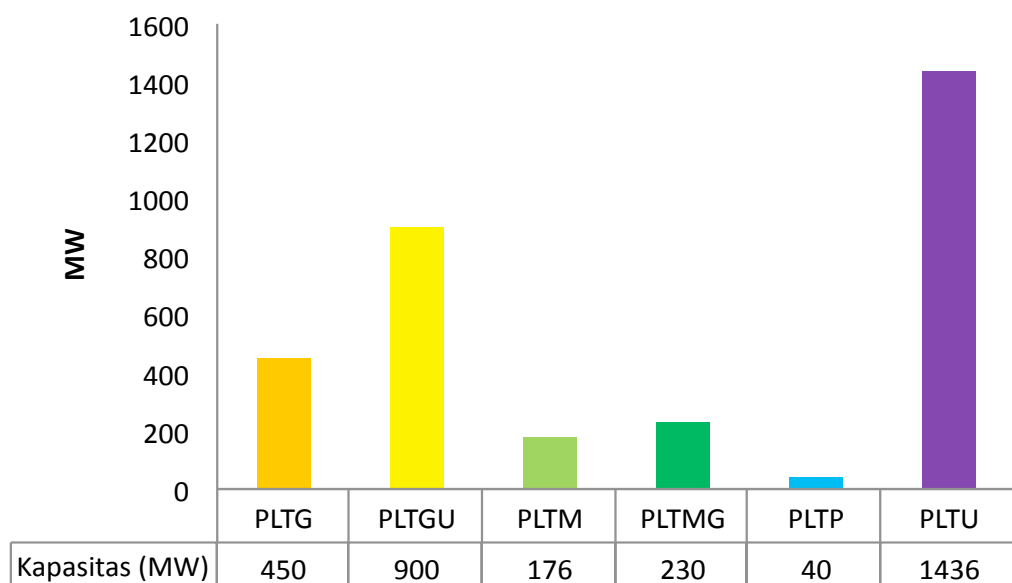
- Proyek pembangkit FTP2 yaitu PLTU Punagaya 2x100 MW, PLTA Malea 90 MW, PLTA Bonto Batu 110 MW, PLTP Bora Pulu 40 MW serta PLTP Marana 20 MW.
- Proyek pembangkit reguler PLTU yaitu Sulsel Barru 2 (1x100 MW), Jeneponto 2 (2x125 MW), Sulsel 2 (2x200 MW), Palu 3 (2x50 MW), Kendari (2x50 MW).
- Proyek pembangkit peaker yaitu Makassar Peaker 450 MW, Sulsel Peaker 450 MW serta mobile power plant (MPP) kapasitas total 200 MW. MPP tersebut bisa beroperasi dengan bahan bakar dual fuel (HSD dan gas/LNG) dan diharapkan tahun 2016 sudah beroperasi.

- Proyek pembangkit hydro yang dikembangkan oleh pihak swasta sebagai proyek IPP dan proyek EPC PLN diperkirakan mencapai 2.800 MW.

Selama periode tahun 2015 - 2017 diperkirakan tidak ada proyek pembangkit baru non-BBM base load yang akan masuk sistem Sulbagsel karena mundur dari jadwal semula, namun di sisi lain banyak calon pelanggan industri besar smelter yang diperkirakan akan mulai beroperasi sehingga daya yang tersedia diperkirakan akan terserap habis dan bahkan mungkin tidak semua calon pelanggan dapat dilayani.

Gambar II-19

Rencana penambahan Per Jenis Pembangkit Wilayah Sulawesi Tahun 2015-2019

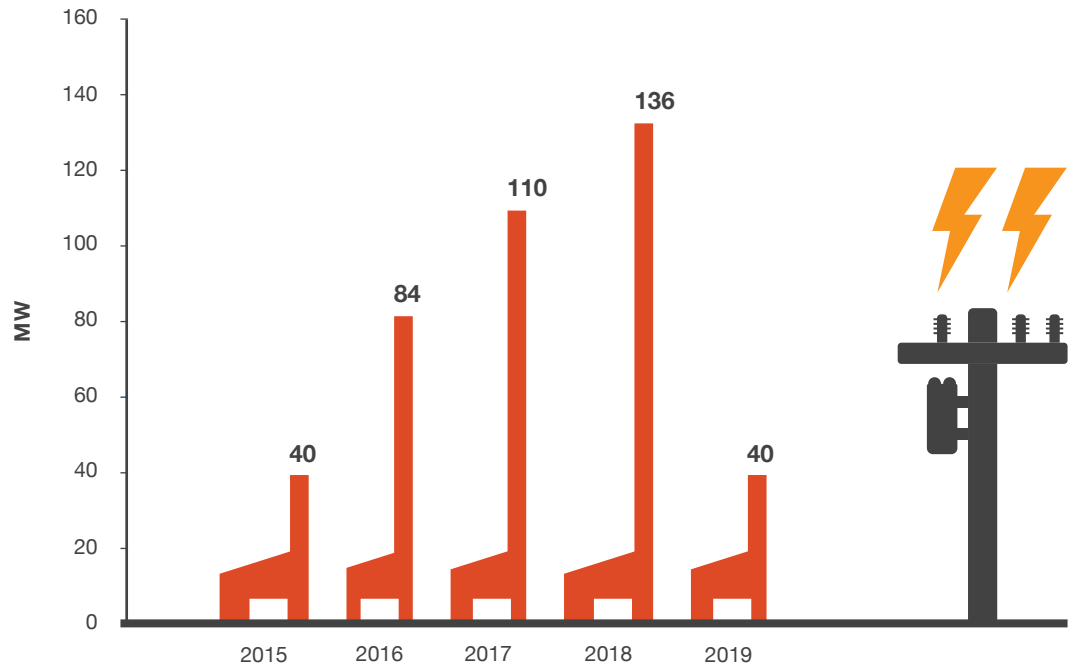


1.6. Wilayah Papua

Rencana penambahan kapasitas pembangkit wilayah Papua yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 berturut-turut sebesar 40 MW; 84MW; 110MW; 136MW; dan 40MW, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu 410 MW.

Gambar II-20

Rencana penambahan per Jenis Pembangkit Wilayah Papua Tahun 2015-2019

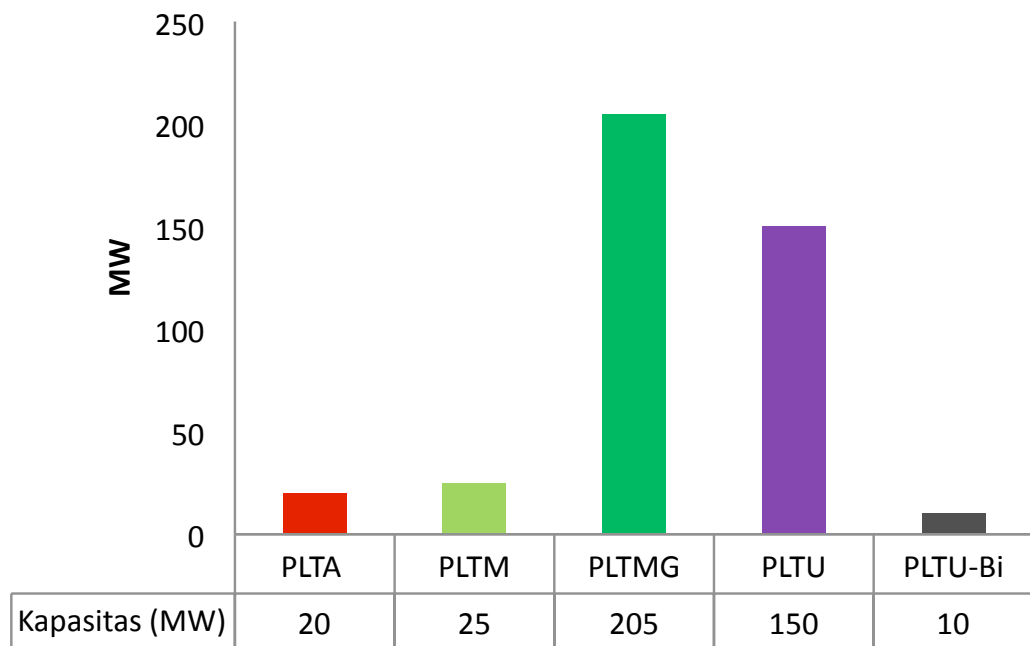


Pada sistem Papua terdapat beberapa proyek pembangkit strategis, yaitu :

- Proyek PLTU skala kecil tersebar untuk memenuhi kebutuhan beban dan mengurangi penggunaan BBM pada sistem yang masih relatif kecil dan isolated di Provinsi Papua.
- Proyek-proyek PLTU tersebut sebagian masuk didalam proyek pembangkit FTP1 dan proyek pembangkit reguler.
- Proyek-proyek pembangkit dual fuel (berbahan bakar gas dan BBM) skala kecil (PLTMG) tersebar untuk memenuhi kebutuhan beban sebelum pembangkit non-BBM beroperasi, antara lain di sistem Manokwari dan Jayapura.
- PLTA Baliem 50 MW di Wamena untuk melistriki Kabupaten Wamena dan tujuh Kabupaten Baru di Pegunungan Puncak Papua yang selama ini belum dilayani listrik PLN.
- Proyek pembangkit berbahan bakar minyak (PLTD) skala kecil untuk memenuhi kebutuhan beban di daerah perbatasan dengan negara tetangga dan pulau terluar.

Gambar II-21

Rencana penambahan
Per Jenis Pembangkit
Wilayah Papua Tahun
2015-2019



2. Pembangunan Transmisi

Sistem kelistrikan yang ada di kepulauan Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi pada jaringan transmisi tenaga listrik, pada Desember 2014 terdapat total 178 sistem kelistrikan di seluruh Indonesia.

Tabel II-9

Daftar Sistem
Kelistrikan di Indonesia
per 31 Desember 2014

No	Wilayah	Sistem	Daya Terpasang (MW)	DMP (MW)	BP (MW)
1	Kalbar (10 Sistem)	Bengkayang	4.88	2.87	2.50
		Ketapang	37.57	26.15	24.25
		Khatulistiwa	283.79	214.50	212.7
		Nanga Pinoh	8.81	6.80	6.43
		Ngabang	7.58	7.82	5.24
		Putusibau	7.39	6.00	5.32
		Sambas	19.07	13.73	14.20
		Sangau	18.62	22.40	21.92
		Sekadau	6.20	6.50	5.95
		Sintang	22.32	18.00	16.80

No	Wilayah	Sistem	Daya Terpasang (MW)	DMP (MW)	BP (MW)
2	Kaltim (9 Sistem)	Mahakam	437.00	388.18	347.5
		Malinau	9.09	6.71	5.91
		Melak	21.70	10.80	10.19
		Nunukan	18.01	11.20	9.69
		Petung	19.50	13.30	13.30
		Sangata	19.02	17.85	15.82
		Tanah Grogot	14.70	12.40	11.50
		Tanjung Redep	26.58	22.50	18.27
		Tanjung Selor	11.60	8.90	8.21
3	KSKT (10 Sistem)	Barito	546.81	479.80	398.1
		Buntok	17.06	11.60	7.74
		Kota Baru	11.88	12.55	6.94
		Kuala Kurun	3.32	2.35	1.98
		Kuala Pambuang	5.47	3.00	2.50
		Muara Teweh	9.93	9.70	5.10
		Nanga Bulik	4.70	3.40	2.80
		Pangkalan Bun	42.03	26.90	24.07
		Puruk Cahu	7.66	4.80	2.57
		Sukamara	4.06	2.40	1.87
4	M2U (14 Sistem)	Ambon	81.00	55.80	53.20
		Bacan/Halmahera Selatan	6.00	3.80	3.39
		Bula/Seram Timur	3.10	1.50	1.37
		Daruba/Morotai	4.00	1.60	1.73
		Dobo/Kep. Aru	3.10	2.93	2.60
		Jailolo/Halmahera Barat	4.40	3.30	3.30
		Masohi/Maluku Tengah	8.00	7.40	4.00
		Namlea-Mako/Buru	11.00	6.20	4.88
		Sanana	5.65	3.40	2.45
		Saumlaki/Maluku Tenggara Barat	4.80	3.10	2.35
		Sofifi	7.40	3.50	3.50
		Ternate	41.00	25.50	22.74
		Tobelo/Halmahera Utara	11.00	7.60	7.91
		Tual	11.60	7.60	6.90
5	NTB (3 Sistem)	Bima	44.72	32.09	34.09
		Lombok	268.36	187.83	180.1
		Sumbawa	57.24	29.87	32.87

No	Wilayah	Sistem	Daya Terpasang (MW)	DMP (MW)	BP (MW)
6	NTT (20 Sistem)	Adonara	4.46	2.80	3.00
		Atambua	8.96	6.20	5.71
		Baa	5.37	3.10	2.90
		Bajawa	3.85	5.39	5.05
		Betun/Malaka	1.60	2.58	2.33
		Ende	11.29	8.89	8.03
		Kabir	0.66	0.60	0.20
		Kalabahi	6.49	4.55	3.77
		Kefa	8.35	5.20	4.78
		Kupang	66.70	60.95	52.04
		Labuan Bajo		4.00	3.20
		Larantuka	6.45	3.95	3.72
		Lembata	6.78	2.80	2.44
		Maumere	14.12	11.15	10.30
		Mbay	5.61	2.43	1.95
		Ruteng	11.56	7.33	6.64
		Sabu Seba	1.90	1.30	1.03
		Soe	9.35	5.05	4.79
		Waikabukak+Waitabula	5.75	5.04	4.35
		Waingapu	6.98	6.32	5.23

No	Wilayah	Sistem	Daya Terpasang (MW)	DMP (MW)	BP (MW)
7	Papua (22 Sistem)	Agats	0.60	0.80	0.60
		Arso	2.10	2.00	0.98
		Biak	17.83	11.40	10.66
		Bintuni	130.00	5.60	2.58
		Doom	0.64	0.38	0.35
		Fak-fak	6.57	4.72	4.07
		Genyem	3.67	1.70	1.42
		Jayapura	89.01	65.60	58.88
		Kaimana	4.96	3.00	2.51
		Keppi	1.44	1.15	0.57
		Manokwari	21.49	16.40	14.77
		Merauke	15.88	15.00	15.90
		Nabire	16.45	12.40	11.55
		Sarmi	2.89	1.50	0.95
		Serui	8.40	4.88	4.32
		Sorong	34.69	42.45	34.10
		Tanah Merah	1.80	1.60	1.29
		Teminabuan	2.52	1.85	1.10
		Timika	20.01	20.50	17.75
		Wamena	7.10	4.83	4.83
		Warbor	0.04	0.31	0.19
		Wondama/Wasior	1.20	0.90	0.60
8	Sulserabar (13 Sistem)	Bau-bau	22.00	15.39	17.14
		Bombana/Kasipute	3.80	4.50	4.50
		Ereke	1.00	0.95	0.92
		Kendari	79.83	72.20	70.80
		Kolaka	17.00	13.11	15.59
		Kolut/Lasusua	7.65	8.40	6.00
		Lambuya	12.57	8.95	8.45
		Malili	9.20	12.06	7.80
		Pasangkayu	3.85	3.27	2.68
		Raha	16.00	9.93	9.55
		Selayar	7.20	6.25	4.62
		Sulawesi Selatan	1,278.40	1,201.36	799.5
		Wangi-wangi	4.60	4.80	2.81

No	Wilayah	Sistem	Daya Terpasang (MW)	DMP (MW)	BP (MW)
9	Sulutenggo (25 Sistem)	Ampana	5.80	6.05	5.21
		Banggai	5.18	6.06	4.51
		Bangkir	17.95	2.34	2.12
		Bungku	10.23	4.52	3.54
		Bunta	5.54	2.25	2.04
		Karakelong	7.06	3.54	3.40
		Kolonedale	12.89	5.43	4.43
		Kota Raya	8.65	4.40	3.46
		Leok	10.60	5.70	4.90
		Lirung	2.85	2.01	1.66
		Luwuk	29.39	20.80	14.19
		Moilong/Toili	7.10	5.85	4.60
		Moutong	5.00	3.30	3.22
		Paleleh	1.34	0.89	0.56
		Palu	149.65	72.78	78.78
		Poso - Tentena	46.18	50.60	21.86
		Salakan	4.38	1.20	1.15
		Siau	4.54	2.85	2.69
		Simatang	0.08	0.05	0.03
		SulutGo	448.00	290.78	310.1
		Tagulandang	3.02	1.36	1.23
		Tahuna	11.75	7.50	7.44
		Tambu	5.00	2.56	3.06
		Tinabogan	1.75	0.35	0.27
		Toli-toli	16.20	10.05	9.25
10	Tarakan (1 Sistem)	Tarakan		31.00	35.50
11	Aceh (11 Sistem)	Bang Pidie	27.05	13.90	6.52
		Balngkejeren	9.12	7.45	2.20
		Calang	8.12	7.29	4.16
		Kuta fajar	5.22	5.90	2.00
		Kutacane	17.70	15.21	7.00
		Meulaboh	47.59	38.40	18.90
		Sabang	11.98	7.15	3.14
		Sinabang	10.67	8.98	2.90
		Subusalam	14.18	14.10	7.80
		Takengon	21.64	17.95	8.00
		Tapaktuan	8.98	6.55	3.91
12	Babel (3 Sistem)	Bangka	144.13	113.85	89.05
		Belitung	55.38	30.80	22.97
		Mentok	0.00	0.00	0.00

No	Wilayah	Sistem	Daya Terpasang (MW)	DMP (MW)	BP (MW)
13	Batam (1 Sistem)	Batam	431.60	405.60	253.4
14	P3BS (2 Sistem)	SBST	4,135.00	2,216.99	1,996.04
		SBU	2,348.10	1,398.40	1,365.40
15	S2JB (9 Sistem)	Batang Asai	0.77	0.45	0.00
		Ipuh Baru	8.85	5.40	0.00
		Kota Bani	8.60	5.34	3.45
		Kuala Tungkal	25.97	15.00	6.27
		Manna	13.81	9.07	0.00
		Muko Muko	17.46	9.10	5.84
		Pelanuhan Dagang	5.25	3.17	1.68
		Sungai Lokan	1.34	0.92	0.00
		Teluk Agung	0.85	0.50	0.00
16	Sumbar (3 Sistem)	Balai Selasa	21.40	10.70	5.52
		Mentawai/Tua Pejat	6.01	3.46	1.41
		Sungai Penuh	25.22	17.00	12.11
17	Sumut (3 Sistem)	Nias Selatan	11.61	6.25	2.60
		Nias Utara	27.80	18.85	10.00
		Pulo Tello	0.81	0.43	0.22
18	WRKR (18 Sistem)	Bagan Siapi api Isolated	10.20	6.61	4.51
		Bengkalis	24.27	16.30	10.59
		Dabo Singkep	4.44	3.75	2.32
		Kuala Enok	2.64	0.97	0.35
		Lubuk Dalam/P. Kerinci	1.23	1.05	0.00
		Pasir Pangaraian	18.00	18.00	10.50
		Pulau Kijang	2.94	0.50	0.36
		Ranai	6.20	3.70	3.35
		Rengat-Siberida-Air Molek	54.36	29.98	24.48
		Selat Panjang	18.75	10.60	6.09
		Siak Indrapura	11.00	10.00	4.85
		Sungai Apit/Siak Indrapura	2.50	0.30	0.00
		Sungai Guntung	4.40	1.55	0.00
		Tanjung Batu	11.40	6.30	3.45
		Tanjung Pinang	96.68	51.70	41.10
		Tanjung Uban	8.22	7.72	5.93
		Tembilahan	26.39	11.88	11.37
		Tanjung Balai Karimun/ Bukit Carok	44.18	22.50	14.70
19	Jawa Bali (1 Sistem)	Jawa & Bali	31,377	19,674	18,547

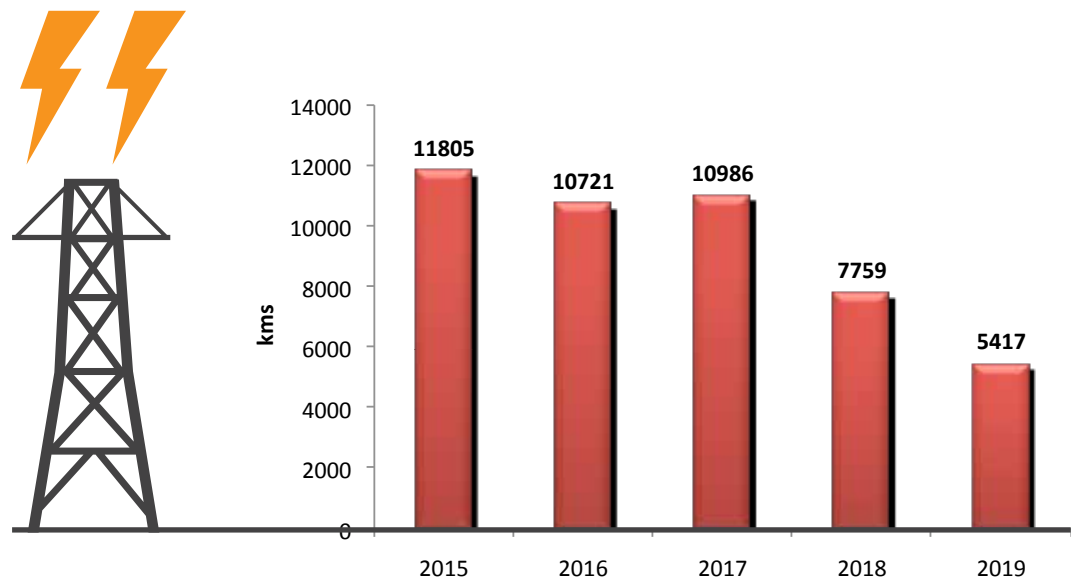
Pada periode 2015 - 2019 pengembangan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik berupa pembangunan Transmisi dengan tegangan 500 kV dan 150 kV di sistem Jawa - Bali serta tegangan 500 kV, 275 kV, 150 kV dan 70 kV di sistem Indonesia Timur dan Sumatera. Pembangunan sistem transmisi secara umum diarahkan kepada tercapainya kesesuaian antara kapasitas pembangkitan di sisi

hulu dan permintaan daya di sisi hilir secara efisien. Disamping itu juga sebagai usaha untuk mengatasi bottleneck penyaluran dan perbaikan tegangan pelayanan.

Rencana pengembangan jaringan transmisi di Indonesia hingga tahun 2019 diproyeksikan 46.688 kms, dengan perincian pada tabel berikut:

Gambar II-22

Rencana penambahan Jaringan Transmisi Indonesia Tahun 2015-2019



Pada tabel di atas diperlihatkan rencana penambahan jaringan transmisi yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019. Untuk tahun 2015 rencana penambahan jaringan transmisi sebesar 11.805 MW dan untuk tahun 2019 direncanakan sebesar 5.417 MW. Total rencana penambahan jaringan transmisi dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 46.688 MW.

2.1. Wilayah Sumatera

Di Pulau Sumatera, terdapat 2 (dua) sistem besar yaitu sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan sistem interkoneksi Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Sistem Sumbagut menghubungkan 2 (dua) Provinsi yaitu: Aceh dan Sumatera Utara melalui SUTT 150 kV, sementara itu Sistem Sumbagsel menghubungkan

6 (enam) Provinsi yaitu: Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung melalui SUTT 150 kV kecuali antara Lahat (Provinsi Sumatera Selatan) dan Kiliran Jao (Provinsi Sumatera Barat) terhubung melalui SUTT 275 kV (walaupun saat ini SUTT tersebut masih dioperasikan dengan tegangan 150 kV). Sistem Sumbagsel merupakan gabungan antara sistem kelistrikan di Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Sumbar-Riau) dengan sistem di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung yang mulai diintegrasikan sejak 2004. Kemudian pada 2006, sistem Sumbagut dan Sumbagsel telah terhubung melalui SUTT 150 kV.

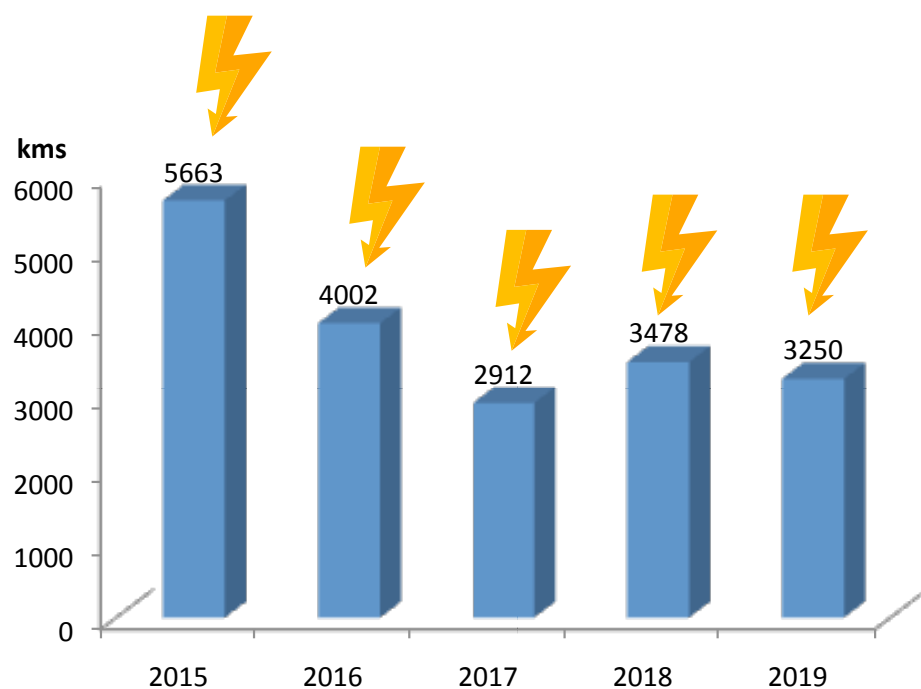
Rencana pengembangan jaringan transmisi di Sumatera yang dibutuhkan dalam kurun tahun 2015-2019 berturut-turut sebesar 5.663

kms; 4.002 kms; 2.912 kms; 3.478 kms; 3.250 kms, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 19.305 kms.

Pengembangan transmisi di Sumatera akan membentuk transmisi back-bone 500 kV yang menyatukan sistem interkoneksi Sumatera pada koridor timur. Pusat-pusat pembangkit skala besar dan pusat-pusat beban yang besar di Sumatera akan tersambung ke sistem transmisi 500 kV ini. Transmisi ini juga akan mentransfer tenaga listrik dari pembangkit listrik di daerah yang kaya sumber energy primer murah (Sumbagsel dan Riau) ke daerah pusat beban yang kurang memiliki sumber energy primer murah (Sumbagut). Selain itu transmisi 500 kV juga dikembangkan di Sumatera

Gambar II-23

Rencana Pengembangan Jaringan Transmisi Sistem Sumatera Tahun 2015-2019



Selatan sebagai feeder pemasok listrik dari PLTU mulut tambang ke stasiun converter transmisi HVDC yang akan menghubungkan pulau Sumatera dan pulau Jawa.

Untuk rencana interkoneksi dengan tegangan 275 kV di Sumatera diprogramkan untuk terlaksana seluruhnya pada tahun 2017.

Beberapa proyek transmisi strategis di Sumatera antara lain:

- Pembangunan transmisi baru 150 dan 275 kV terkait dengan proyek pembangkit PLTU percepatan, PLTA, PLTU IPP dan PLTP IPP.
- Pengembangan transmisi 150 kV yang ada di lokasi tersebar di sistem Sumatera dalam rangka memenuhi kriteria keandalan (N-1) dan untuk mengatasi bottleneck penyaluran, perbaikan tegangan pelayanan, dediselsiasi dan fleksibilitas operasi.
- Pembangunan transmisi 275 kV mulai dari Lahat - Lubuk Linggau - Bangko - Muara Bungo - Kiliranjau - Paya Kumbuh - Padang Sidempuan - Sarulla - Simangkok - Galang - Binjai - Pangkalan Susu sebagai tulang punggung interkoneksi Sumatera koridor barat yang akan mengevakuasi daya dari Sumatera bagian Selatan yang kaya akan sumber energy primer ke pusat beban terbesar di Sumatera bagian Utara. Interkoneksi 275 kV ini akan dapat beroperasi secara bertahap mulai 2015, 2016 dan 2017.
- Proyek transmisi 500 kV mulai dari Muara Enim - New Aur Duri - Peranap - Perawang - Rantau Parapat - Kuala Tanjung - Galang, sebagai tulang punggung interkoneksi Sumatera koridor timur yang akan mengevakuasi daya dari Sumatera bagian Selatan yang kaya akan sumber energy primer ke pusat beban terbesar di Sumatera bagian Utara. Interkoneksi 50 kV ini akan dapat beroperasi secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
- Pembangunan transmisi dan kabel laut ± 500 kV HVDC Sumatera - Peninsular Malaysia yang bertujuan untuk mengoptimalkan operasi kedua sistem dengan memanfaatkan perbedaan waktu terjadinya beban puncak pada kedua sistem tersebut.
- Interkoneksi Batam - Bintan dengan kabel laut 150 kV dimaksudkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan tenaga listrik pulau Bintan dengan tenaga listrik dari Batam dengan mempertimbangkan rencana pengembangan pembangkit di Batam yang akan mencukupi kebutuhan Batam dan sebagian Bintan. Adanya interkoneksi 150 kV tersebut tidak ada hubungannya dengan perluasan wilayah usaha PLN Batam.
- Interkoneksi 150 kV Sumatera - Bangka dengan kapasitas 200 MW pada kondisi N-1 dengan perkiraan COD tahun 2017. Dengan adanya interkoneksi

tersebut, maka di Bangka dapat dibangun PLTU dengan kelas yang lebih besar dibandingkan jika seandainya tidak ada interkoneksi, yaitu kelas 100 MW.

2.2. Wilayah Jawa-Bali

Saat ini sistem kelistrikan yang telah terintegrasi dengan baik hanya di Jawa-Bali, dimana sistem kelistrikan Jawa-Bali memiliki 2 sistem interkoneksi, yaitu Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV sebagai tulang punggung utama (Back Bone) jaringan dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV sebagai jaringan pendukung. Rencana pengembangan jaringan transmisi di Jawa-Bali yang dibutuhkan dalam tahun 2015-2019 berturut-turut sebesar 2.101 kms; 3.701 kms; 2.602 kms; 1.249 kms; 1.553 kms, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun

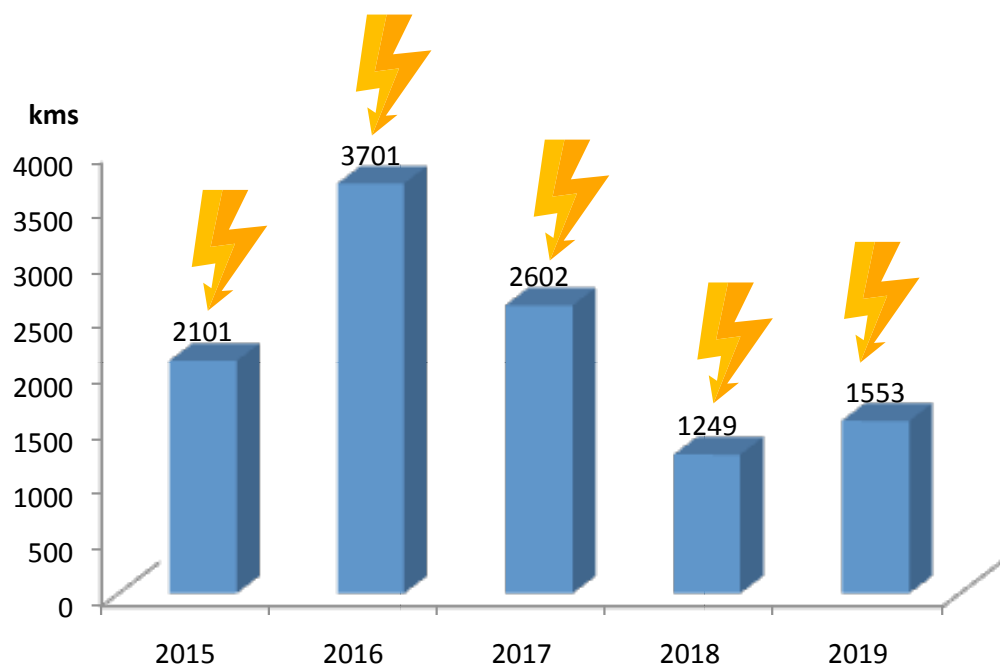
2015-2019 yaitu sebesar 11.206 kms.

Pengembangan transmisi 500 kV di Jawa pada umumnya dimaksudkan untuk mengevakuasi daya dari pembangkit-pembangkit baru maupun ekspansi skala besar dan untuk menjaga kriteria security N-1, baik statik maupun dinamik. Sedangkan pengembangan transmisi 150 kV dimaksudkan untuk menjaga kriteria security N-1 dan sebagai transmisi yang terkait dengan gardu induk 150 kV baru.

Memperhatikan pembangunan SUTET dan SUTT yang sering terlambat karena masalah perizinan, ROW dan sosial, serta kebutuhan tambahan daya yang mendesak, maka PLN perlu melakukan usaha meningkatkan kapasitas transmisi dalam waktu dekat. Pembangunan

Gambar II-24

Rencana Pengembangan Jaringan Transmisi Sistem Jawa-Bali Tahun 2015-2019



SUTET dengan menggunakan rute baru akan memerlukan waktu yang lama sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah rekonduktoring beberapa ruas transmisi 500 kV/150 kV dan mulai akan membangun under ground cable 500 kV di sekitar Jakarta.

Rencana pembangunan SUTET 500 kV baru adalah ruas SUTET dari Tanjung Jati B - Pemalang - Indramayu - Delta Mas, ruas SUTET Balaraja - Kembangan - Durikosambi dan Durikosambi – Muara Karang - Priok - Muaratawar membentuk looping SUTET jalur utara Jakarta, untuk perkuatan dan peningkatan keandalan serta fleksibilitas operasi sistem Jakarta. Sistem transmisi 70 kV pada dasarnya sudah tidak dikembangkan lagi, bahkan di sistem 70 kV di Jawa Barat banyak yang ditingkatkan menjadi 150 kV.

Beberapa proyek transmisi strategis di Jawa - Bali antara lain:

- Proyek transmisi SUTET 500 kV Tx Ungaran - Pemalang - Mandirancan - Indramayu tahun 2020.
- Pembangunan transmisi 500 kV HVDC bipole 3,000 MW Sumatra-Jawa berikut GITET X Bogor
- Incomer (Tasik - Depok dan Cilegon – Cibinong) untuk menyalurkan listrik dari PLTU mulut tambang di Sumatra Selatan ke sistem Jawa - Bali tahun 2019.
- Pembangunan SUTET 500 kV Paiton – New Kapal ter-

masuk overhead line 500 kV menyeberangi selat Bali (Jawa - Bali Crossing) tahun 2018 sebagai solusi jangka panjang pasokan listrik ke Pulau Bali.

- SUTET 500 kV Balaraja - Kembangan - Durikosambi - Muara Karang (tahun 2018) dan Muara Karang - Priok - Muara Tawar tahun 2018.

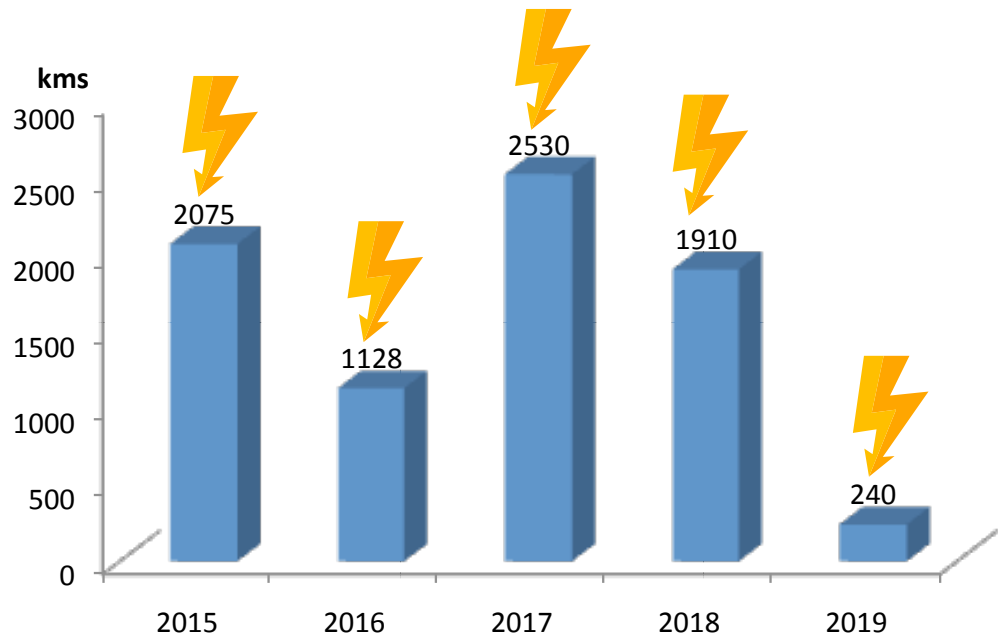
2.3. Wilayah Kalimantan

Di Pulau Kalimantan, SUTT 150 kV baru terdapat pada sebagian kecil wilayah di Provinsi Kalimantan Barat, sebagian kecil wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang terhubung dengan sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan dan sebagian kecil wilayah Kalimantan Timur. Untuk rencana pengembangan jaringan transmisi di Kalimantan yang dibutuhkan dalam tahun 2015-2019 berturut-turut sebesar 2.075 kms; 1.128 kms; 2.530 kms; 1.910 kms; 240 kms, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 11.206 kms.

Di Kalimantan terdapat beberapa sistem interkoneksi yang cukup besar yaitu sistem Kalimantan Barat, sistem Kalselteng - Kaltim - Kaltara, dengan rata-rata menggunakan level tegangan 150 kV. Rencana pengembangan transmisi di Kalimantan diutamakan untuk menghubungkan sistem-sistem yang belum terinterkoneksi. Cross-border interconnection antara Kalimantan Barat dan Serawak

Gambar II-25

Rencana
Pengembangan
Jaringan Transmisi
Sistem Kalimantan
Tahun 2015-2019



akan meningkatkan keandalan dan efisiensi operasi sistem tenaga listrik di Kalbar. Untuk menghubungkan sistem Kalbar dengan sistem Kalselteng, akan dibangun transmisi 150 kV untuk meningkatkan keandalan pasokan. Dalam jangka panjang, sistem kelistrikan se Kalimantan akan terhubung menjadi satu yaitu Grid Borneo. Sebagai penghubung antar sistem termasuk cross-border interconnection dengan Sabah dan Serawak (Malaysia), direncanakan pembangunan transmisi tegangan ekstra tinggi dengan level tegangan sekurang-kurangnya 275 kV atau menggunakan tegangan 500 kV, bergantung pada hasil studinya kelak mengingat jarak antar sistem sangat berjauhan.

Beberapa proyek transmisi strategis di Kalimantan antara lain:

- Proyek transmisi 275 kV cross border interconnection dan transmisi 150 kV yang terkait untuk menyalurkan daya dari Serawak ke Kalbar dalam rangka memenuhi demand dan meningkatkan keandalan pasokan sistem Kalbar.
- Transmisi interkoneksi 150 kV Kalselteng – Kaltim yang membentang dari Tanjung, Kuaro, Petung hingga Karangjoang dan saat ini dalam tahap konstruksi, diharapkan bisa selesai tahun 2016 sehingga akan membentuk sistem Kalseltengtim. Selain itu, rencana transmisi 150 kV Bangkanai – Melak – Kota Bangun akan memperkuat interkoneksi Kalseltengtim.
- Transmisi 150 kV Bangkanai – Muara Teweh – Buntok – Tanjung untuk evakuasi daya PLTMG Bangkanai 155 MW dan 140 MW ke sistem Kalselteng.

- Transmisi 150 kV Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun – Kasongan dan uprating transmisi 150 kV Palangkaraya – Selat – Seberang Barito untuk mendukung evakuasi daya dari PLTU IPP Kalselteng 1 (2x100 MW) ke pusat beban.
- Transmisi 150 kV Sampit – Pangkalan Bun untuk mendukung evakuasi daya dari PLTU Kalselteng 3 (2x100 MW) ke pusat beban.
- Transmisi 150 kV Embalut – New Samarinda – Sambera untuk mendukung evakuasi daya dari PLTU Kaltim 4 (2x100 MW) ke pusat beban.
- Transmisi 150 kV Tanjung Redep – Tanjung Selor – Tidang Pale – Malinau untuk meningkatkan keandalan pasokan ke ibukota Provinsi dan Kabupaten serta Kota di Kalimantan Utara.

2.4. Wilayah Maluku & Nusra

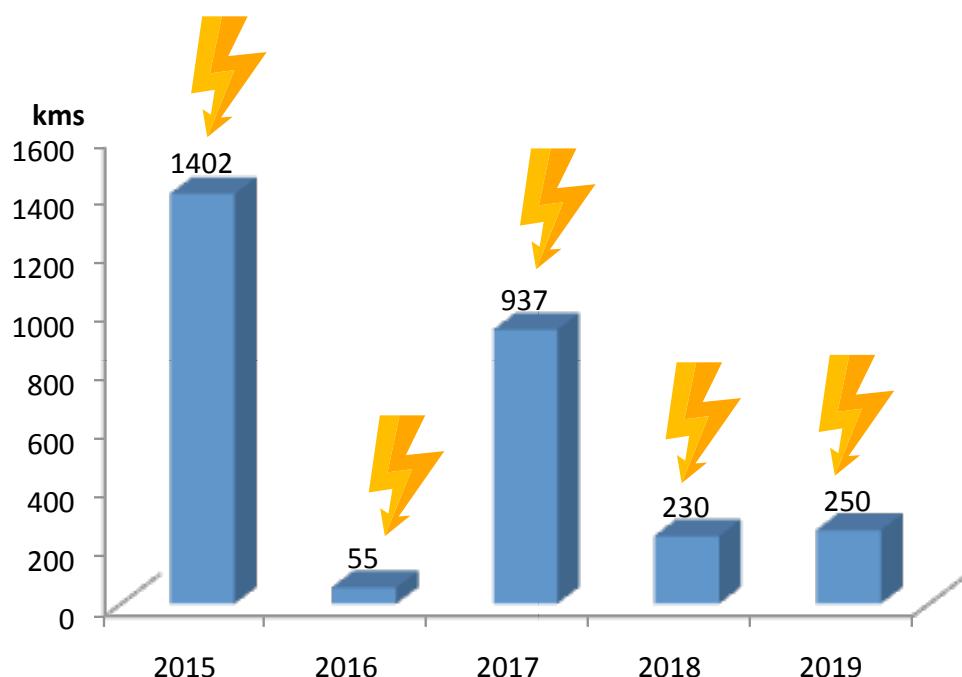
Untuk rencana pengembangan jaringan transmisi di Maluku & Nusa Tenggara yang dibutuhkan dalam tahun 2015-2019 berturut-turut sebesar 1.402 kms; 55 kms; 937 kms; 230 kms; 250kms, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 2.874 kms.

Beberapa proyek transmisi strategis di Maluku & Nusa Tenggara antara lain:

- Transmisi 150 kV Pringgabaya – PLTU Lombok FTP2 untuk evakuasi daya dari PLTU Lombok FTP2 dan PLTU IPP Lombok Timur.
- Transmisi 150 kV PLTU Lombok FTP2 – Bayan – Tanjung sehingga membentuk Looping untuk mendukung evakuasi daya dari kedua

Gambar II-26

Rencana Pengembangan Jaringan Transmisi Sistem Maluku & Nusa Tenggara Tahun 2015-2019



PLTU tersebut.

- Proyek-proyek transmisi dan gardu induk terkait dengan evakuasi daya dari pembangkit nonBBM ke pusat beban.
- Transmisi di Nusa Tenggara yaitu sistem Sumbawa 70 kV dan 150 kV yang membentang dari Taliwang sampai ke Sape, sistem 70 kV Flores yang membentang dari Labuhan Bajo sampai Larantuka, sistem 70 kV Timur yang membentang dari Bolok (Kupang) sampai Atapupu (Atambua).
- Transmisi di Maluku yaitu sistem 70 kV Ambon, sistem 150 kV Seram dan sistem 150 kV Halmahera untuk menyalurkan daya dari pembangkit non BBM (PLTU, PLTP, PLTA, PLTMH, PLTMG gas) ke pusat beban.

2.5. Wilayah Sulawesi

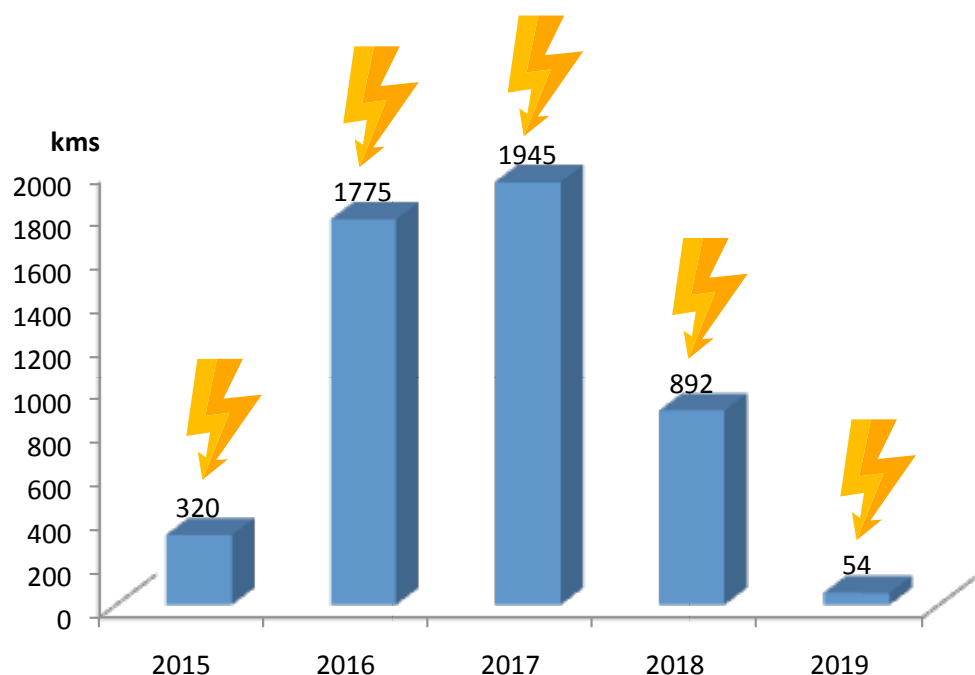
Di Pulau Sulawesi, SUTT 150 kV telah menghubungkan Provinsi Sulawesi Utara dengan sebagian kecil Provinsi Gorontalo yang dinamakan Sistem Sulawesi Bagian Utara (Sulbagut). Sementara itu Provinsi Sulawesi Selatan juga telah terhubung dengan sebagian kecil daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk rencana pengembangan jaringan transmisi di Sulawesi yang dibutuhkan dalam tahun 2015-2019 berturut-turut sebesar 320 kms; 1.775 kms; 1.945 kms; 892 kms; 54 kms, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 4.986 kms.

Beberapa proyek transmisi strategis di Sulawesi antara lain:

- Transmisi 150 kV Poso – Palu Baru untuk menyalurkan daya da-

Gambar II-27

Rencana Pengembangan Jaringan Transmisi Sistem Sulawesi Tahun 2015-2019



ri PLTA Poso ke pusat beban di Palu, saat ini dalam tahap konstruksi dan diharapkan pada awal tahun 2015 sudah bisa beroperasi.

- Transmisi 150 kV Wotu – Malili – Lasusua – Kolaka – Unaaha – Kendari untuk menghubungkan sistem Sulsel dengan sistem Sultra, juga saat ini dalam tahap konstruksi dan diharapkan pada tahun 2016 atau 2017 sudah bisa beroperasi.
- Transmisi EHV sebagai back bone untuk evakuasi daya dari pusat PLTA skala besar disekitar perbatasan Sulsel, Sulbar dan Sulteng ke pusat pertumbuhan beban di Sultra dan di Makassar dan sekitarnya.
- Transmisi 150 kV sistem Bau-Bau untuk menyalurkan daya dari pembangkit non BBM ke pusat beban, serta untuk meng-

hubungan pusat beban di Pulau Muna dan pusat beban di Pulau Buton.

- Transmisi 150 kV Marisa – Moutong – Tolitoli – Buol/Leok dan Tolitoli – Bangkir – Tambu, sehingga membentuk sistem Sulbagut, termasuk rencana interkoneksi ke sistem Palu.

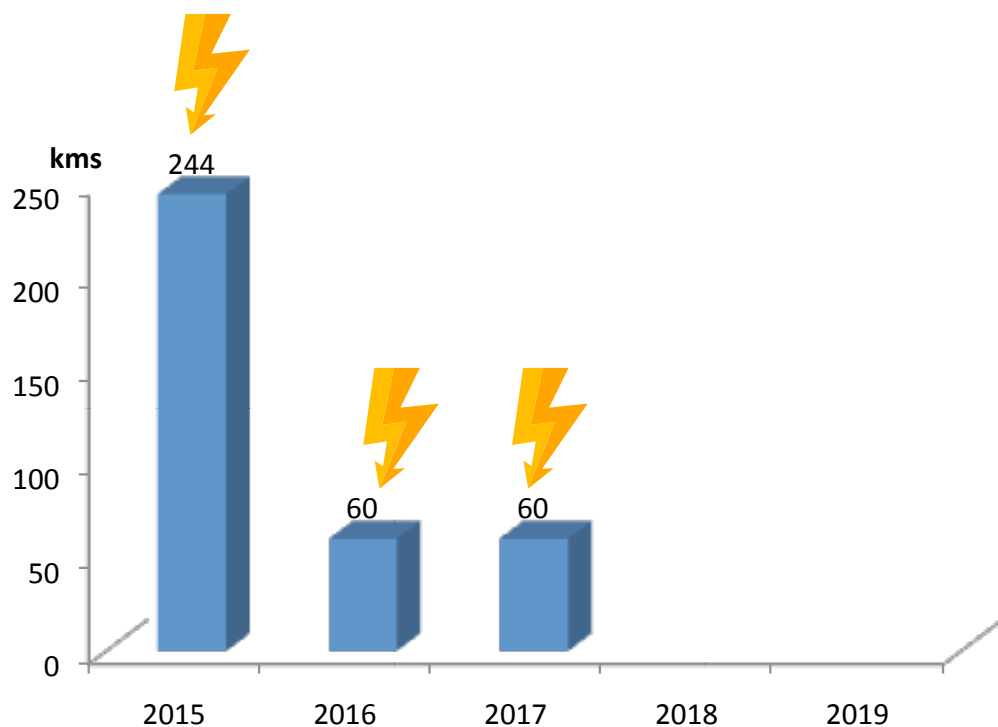
2.6. Wilayah Papua

Untuk rencana pengembangan jaringan transmisi di Papua yang dibutuhkan dalam tahun 2015 sebesar 244 kms, tahun 2016 sebesar 60 kms dan tahun 2017 sebesar 60 kms. Untuk tahun 2018 dan 2019 belum ada rencana pengembangan jaringan transmisi di wilayah Papua.

Beberapa proyek transmisi strategis di wilayah Papua yaitu :

Gambar II-28

Rencana Pengembangan Jaringan Transmisi Sistem Papua Tahun 2015-2019



- Transmisi 70 kV sistem Jayapura dan sistem Sorong untuk menyalurkan daya dari pembangkit non-BBM (PLTU, PLTA, PLTMG gas) ke pusat beban di Jayapura dan Sorong.
- Transmisi 150 kV dan gardu induk 150/20 kV di sekitar Wamena untuk evakuasi daya dari PLTA Baliem ke tujuh ibukota Kabupaten di sekitar Wamena.

Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Listrik

Rencana penyediaan energi dan kebutuhan bahan bakar untuk periode tahun 2015 - 2019 berdasarkan jenis bahan bakarnya diberikan pada gambar Dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019, kebutuhan BBM akan menurun drastis karena digantikan oleh LNG/ CNG.

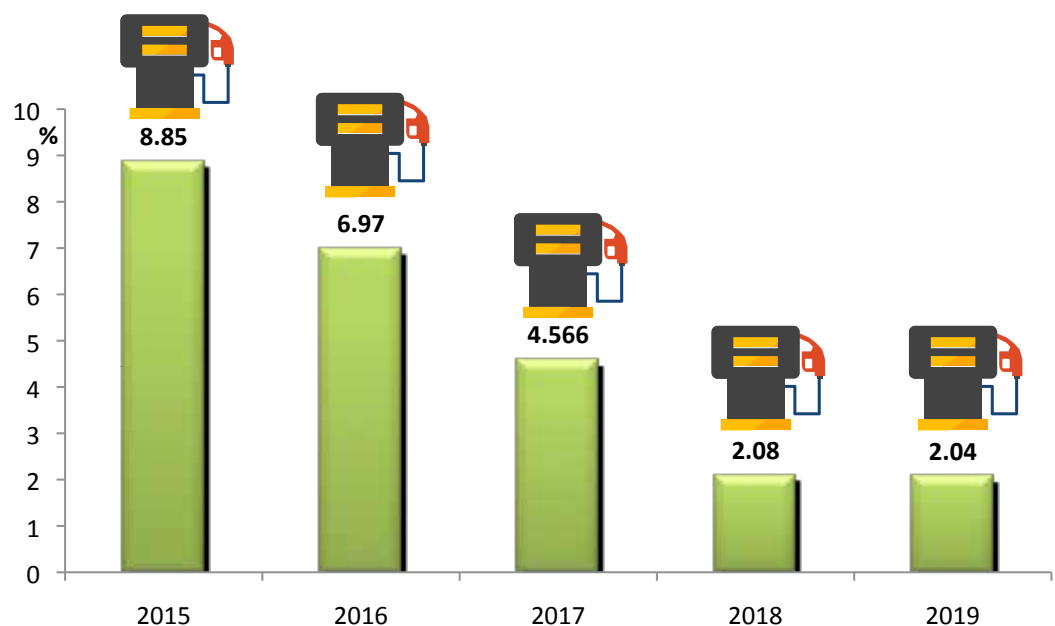
2. SASARAN-8 : MEWUJUDKAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH TEPAT SASARAN

Subsidi listrik tahun 2015 direncanakan sebesar Rp 66,15 triliun sebagaimana APBN-P 2015. Pada 2019 subsidi listrik diperkirakan meningkat menjadi Rp 89,41 triliun, antara lain karena pertumbuhan penjualan listrik atau semakin meningkatnya rumah tangga yang di-listriki. Penurunan subsidi listrik dapat dilakukan dengan penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan tertentu, perbaikan energi mix pembangkit, pengurangan losses, dan mekanisme pemberian margin PT PLN (Persero) yang lebih terukur.

Penurunan susut jaringan tenaga listrik dilakukan dengan meminimalkan nilai susut jaringan, terutama susut yang disebabkan oleh ma-

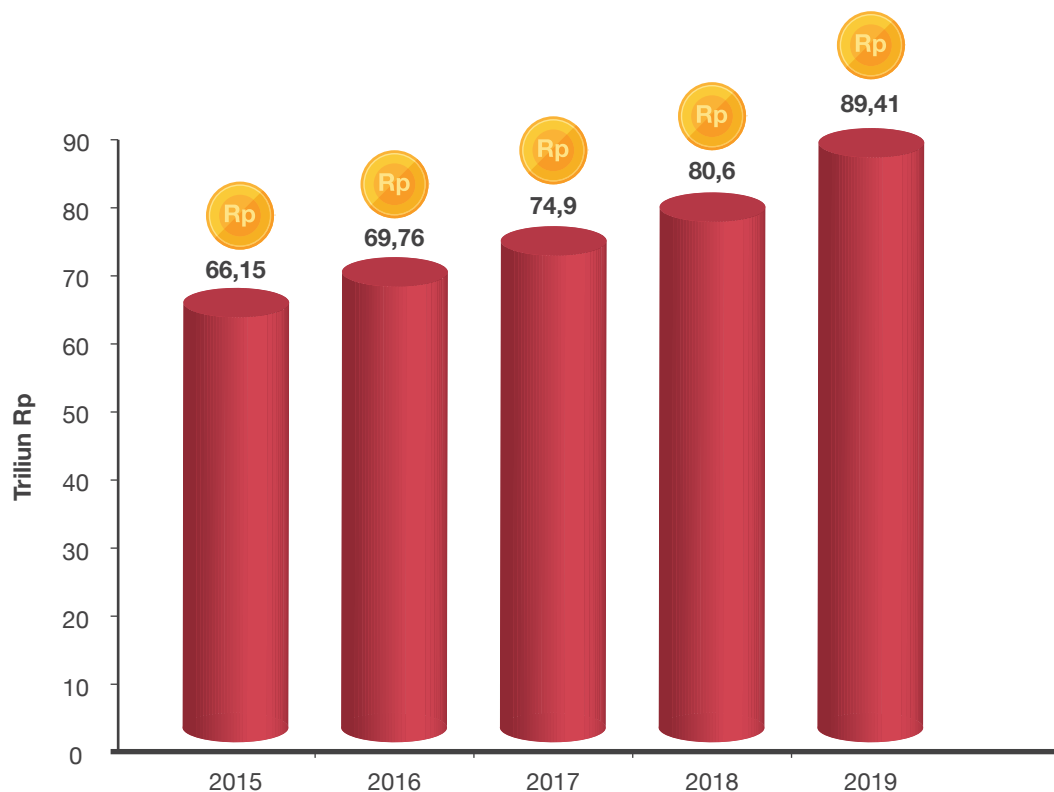
Gambar II-29

Energi Primer BBM
Tahun 2015-2019



Gambar II-30

Rencana Subsidi Listrik
Tahun 2015-2019

**Gambar II-31**

Rencana Subsidi Listrik
Tahun 2015-2019



salah non teknis. Besar kecilnya susut jaringan mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan penyaluran tenaga listrik. Semakin kecil susut jaringan, semakin tinggi efisiensi penyaluran tenaga listrik dan sebaliknya. Dengan susut yang kecil, berarti semakin sedikit energi listrik yang hilang dan semakin banyak energi listrik yang dapat disalurkan/dijual kepada konsumen.

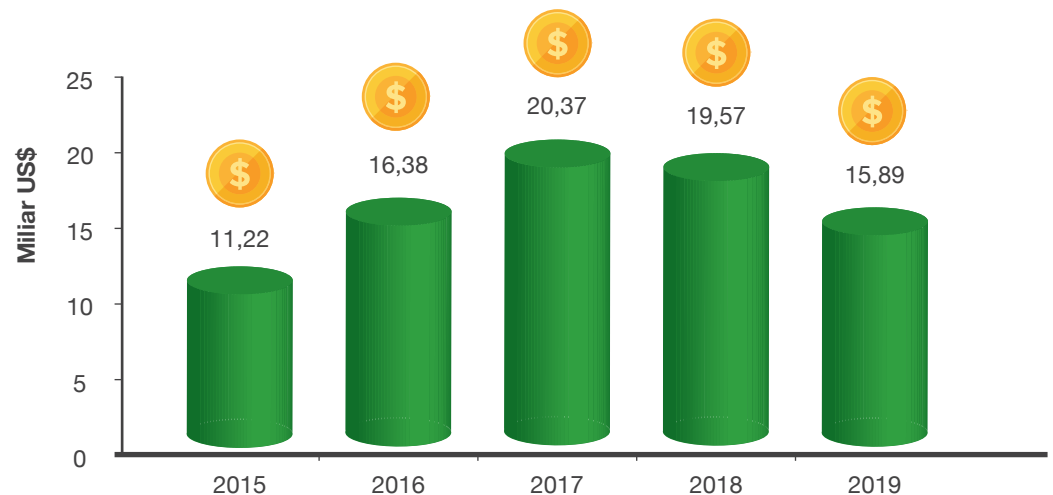
Adapun target 2015-2019, sebenarnya masih jauh di atas Roadmap Jaringan yang ditetapkan PT PLN (Persero), sehingga target 2015-2019 ini menjadi optimis dapat tercapai mengingat PT PLN (Persero) jauh lebih berupaya keras untuk menurunkan susut jaringan.

3. SASARAN-9 : TERWUJUDNYA PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR ESDM

Investasi ketenagalistrikan mencakup pembangunan pembangkitan, transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan jaringan distribusi serta usaha penunjang ketenagalistrikan. Peran Pemerintah dalam investasi di subsektor ketenagalistrikan cukup besar. Target investasi ketenagalistrikan tahun 2015 sebesar US\$ 11,2 miliar dan meningkat dimana pada tahun 2019 direncanakan sekitar US\$ 15,89 miliar utamanya karena pembangunan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW.

Gambar II-32

Rencana Investasi
Ketenagalistrikan Tahun
2015-2019





III

**Arah Kebijakan, Strategi,
Kerangka Regulasi dan
Kerangka Kelembagaan**

Kementerian ESDM merupakan Kementerian yang memiliki lingkup tugas cukup luas, mencakup bidang migas, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta energi baru, terbarukan dan konservasi energi. Selain itu, juga termasuk bidang kegeologian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan dukungan manajemen dan teknis lainnya. Berbeda halnya dengan negara lain seperti di Arab Saudi misalnya, dimana lingkup tugas ESDM dikelola oleh lebih dari 1 Kementerian, dan bahkan di India dikelola oleh 6 Kementerian.

Amanah Pasal 33 UUD 1945 bahwa **bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**. Dalam konteks penguasaan kekayaan bumi oleh negara, Pemerintah berperan sebagai penyelenggara penguasaan tersebut dengan fungsi: penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, pembinaan, pengawasan (monitoring dan evaluasi), pelaksanaan pembangunan.

Namun sesungguhnya, tugas utama sektor ESDM yang paling penting adalah bagaimana menjamin penyediaan energi dan mineral sesuai kebutuhan dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan tetap memperhatikan lingkungan. Khusus untuk energi, tantangannya adalah bagaimana mewujudkan peningkatan ketahanan energi atau bahkan kemandirian energi, sehingga kondisi energi Indonesia tidak rentan dengan gejolak luar negeri.

Hakikat pengelolaan energi dan sumber daya mineral Indonesia ditujukan bagi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan energi serta peningkatan nilai tambah pertambangan. Beberapa ketentuan penting yang melandasi hal tersebut yang merupakan arah kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, diamanatkan dalam konstitusi Undang Undang Dasar Tahun 1945, utamanya Pasal 33 ayat 2, 3 dan 4, yaitu:

Pasal 33 ayat 2: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.

Pasal 33 ayat 3: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 33 ayat 4: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Selain itu, berdasarkan **UUD 1945**

Pasal 33 ayat 5 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”, maka telah diterbitkan 5 Undang-undang sektor ESDM, yaitu:

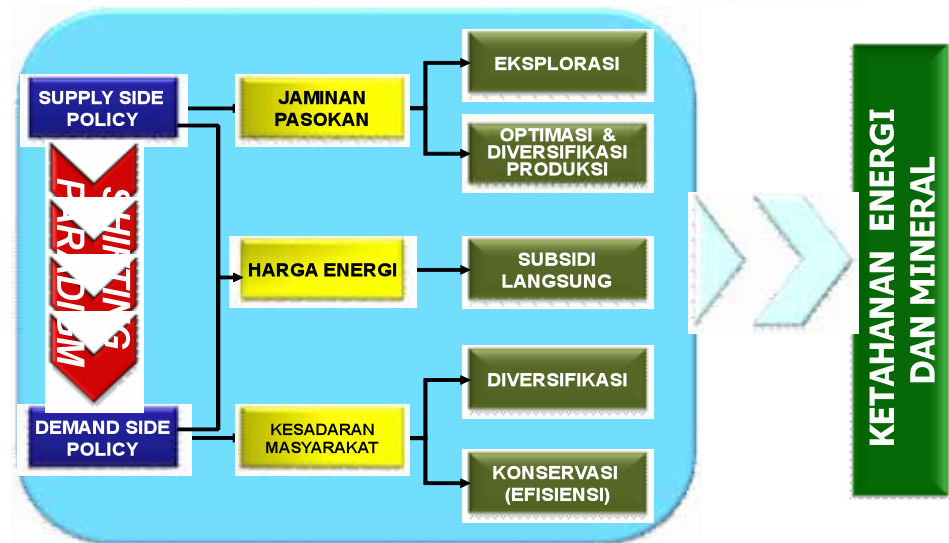
1. UU No. 30/2007 tentang Energi
2. UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. UU No. 04/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan
5. UU No. 21/2014 tentang Panas Bumi

Dalam hal pengelolaan energi, hakikat yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diejawantahkan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menggarisbawahi bahwa komoditas energi yang meliputi sumber daya energi fosil, tenaga air skala besar, panas bumi dan energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitu juga pada ayat (2) mengenai sumber daya energi baru dan terbarukan pengaturan juga dilakukan oleh negara. Sedangkan di dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan mengenai hak dan peran masyarakat yaitu bahwa “setiap orang berhak memperoleh energi”.

Secara umum kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral menekankan suatu *shifting paradigm*, yaitu suatu paradigma yang mengarahkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, bukan lagi semata dari kebijakan *supply side*, namun juga harus

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMI

(UU No. 30/2007 tentang Energi & UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral)



Gambar III-1

Kebijakan Umum
Pengelolaan Energi dan
Sumber Daya Mineral

mengoptimalkan pengaturan dan bagaimana mengoptimalkan *demand side*. Dari *supply side management*, terus dilakukan upaya-upaya eksplorasi termasuk optimasi dan diversifikasi produksi, sedangkan dari *demand side management*, lebih mengutamakan diversifikasi pemanfaatan energi dan efisiensi energi yang melibatkan peran serta dan kesadaran masyarakat pengguna energi.

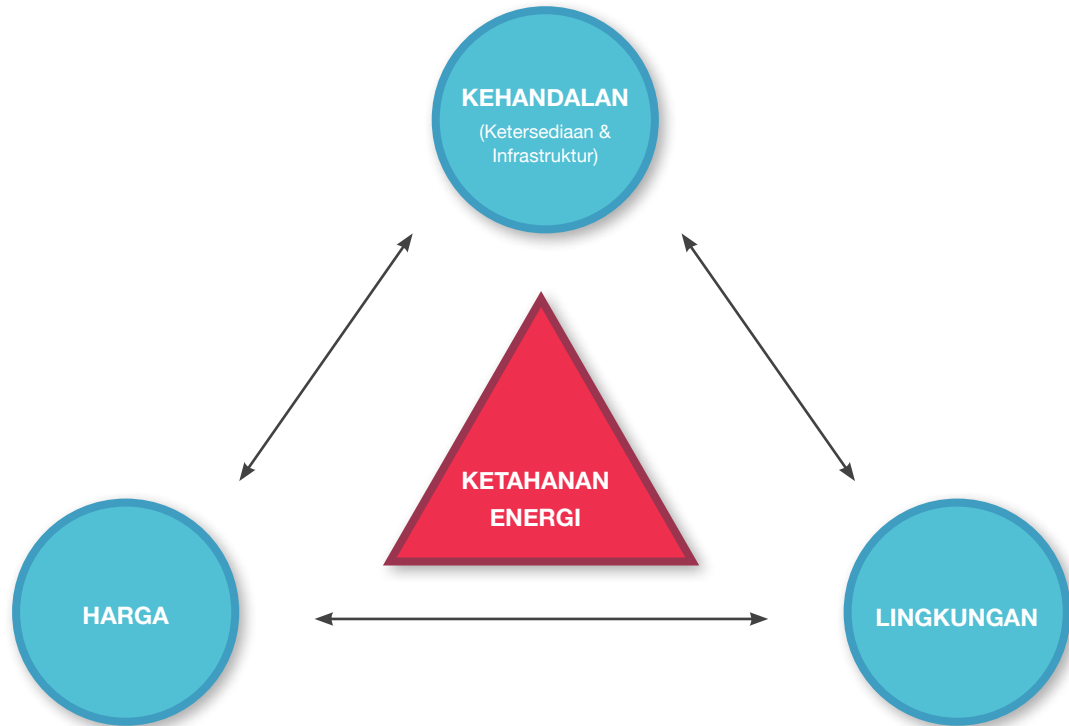
Sebagaimana amanat Pasal 11 ayat 2 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, maka telah diterbitkan PP No 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.

Arah kebijakan sektor ESDM berdasarkan UU Energi ditekankan pada 3 sisi yaitu: *supply side management*, *demand side management*, dan kebijakan harga. Sejak awal tahun 2000 kebutuhan energi semakin meningkat, dan sebaliknya pasokan energi khususnya minyak bumi cenderung menurun, sehingga *demand side management* mendapat perhatian lebih untuk dikendalikan. Upaya konservasi pada *demand side* harus menjadi fokus perhatian, sambil melakukan diversifikasi agar penyediaan dan konsumsi energi tidak selalu mengandalkan minyak bumi. Sedangkan arah kebijakan pengelolaan mineral diutamakan untuk lebih memberikan nilai tambah dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Menurut *International Energy Agency* (IEA), ketahanan energi merupakan

Gambar III-2

Konsep Ketahanan Energi



akses terhadap energi yang memadai, terjangkau dan dapat diandalkan, termasuk ketersediaan sumber daya energi, mengurangi ketergantungan pada impor, penurunan gangguan terhadap lingkungan, persaingan dan pasar yang efisien, menggantungkan pada sumber daya setempat yang bersih lingkungan, dan energi yang terjangkau dan adil.

Untuk melihat ketahanan energi suatu negara ada 4 hal yang dapat diukur yaitu 4A:

1. **Availability**, ketersediaan sumber energi baik dari domestik maupun luar negeri.
2. **Accessibility**, kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik.
3. **Affordability**, biaya investasi di

bidang energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga biaya yang dikenakan ke konsumen.

4. **Acceptability**, penggunaan energi yang peduli lingkungan (Darat, Laut dan Udara), termasuk penerimaan masyarakat.

Mengukur ketahanan energi Indonesia dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana kekuatan Indonesia terhadap 4 hal tersebut. 4 Hal tersebut, tercermin pada Bab I ini yang berisi antara lain pembangunan sektor ESDM 5 tahun kebelakang beserta potensi sumber daya energi dan mineral yang dimiliki. Namun juga perlu dilihat bagaimana posisi energi dan mineral Indonesia pada tataran global sebagai salah satu indikator ketahanan dan kemandirian energi.

III.1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN RENCANA AKSI

Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan akses dan infrastruktur energi, terkait **listrik**, antara lain:

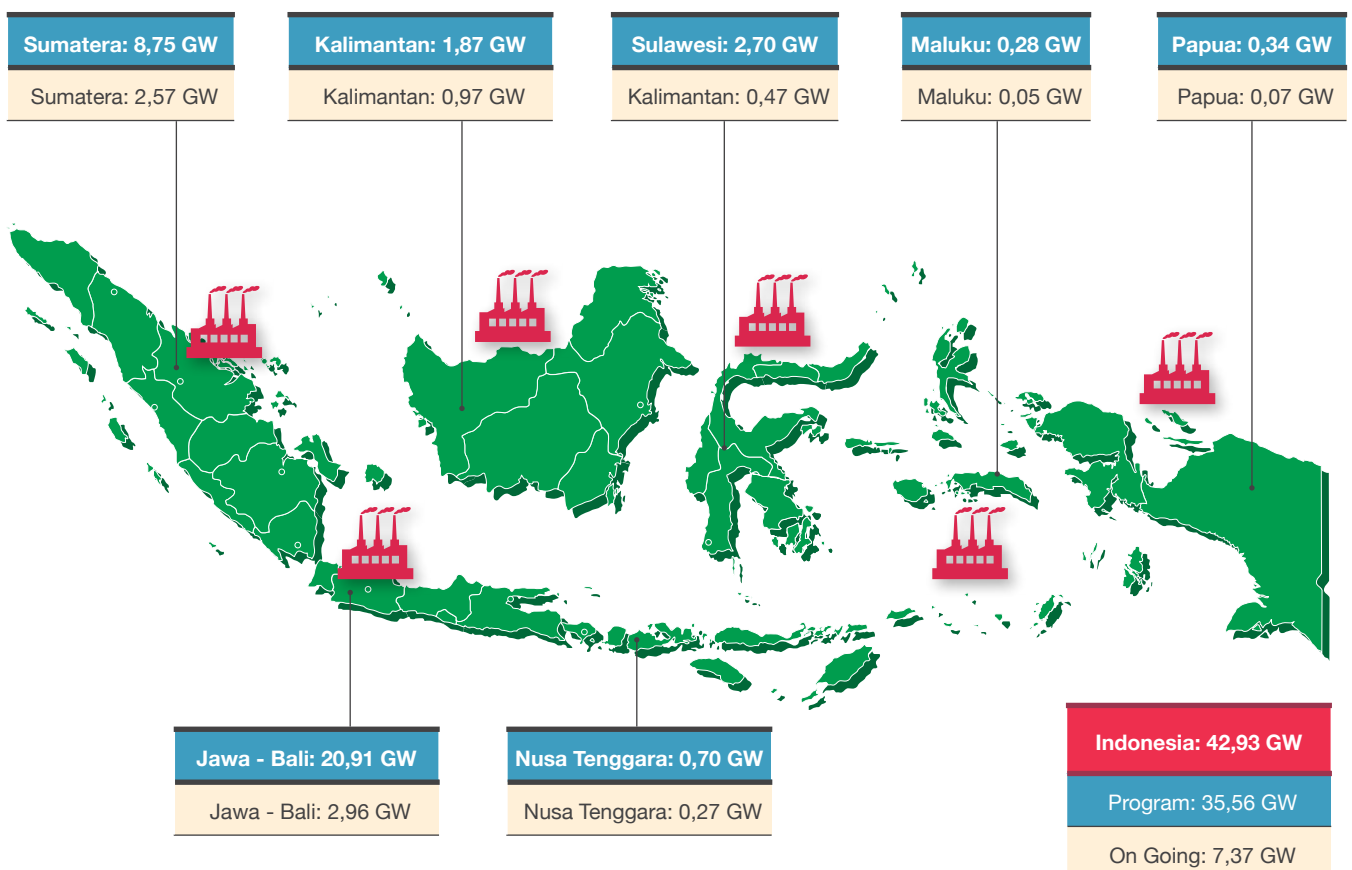
1. **Proyek pembangkit listrik 42,9 GW** yang terdiri dari proyek baru sebesar 35,5 GW dan proyek yang sedang berjalan sebesar 7,4 GW, dengan rincian sebagai berikut:

Rencana aksi	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Tambahan Kapasitas Pembangkit	MW	3.782	4.212	6.389	9.237	19.319
Kapasitas terpasang	MW	57.367	61.579	67.968	77.205	96.524

Catatan: Kapasitas terpasang pembangkit tahun 2014 sebesar 53.585 MW

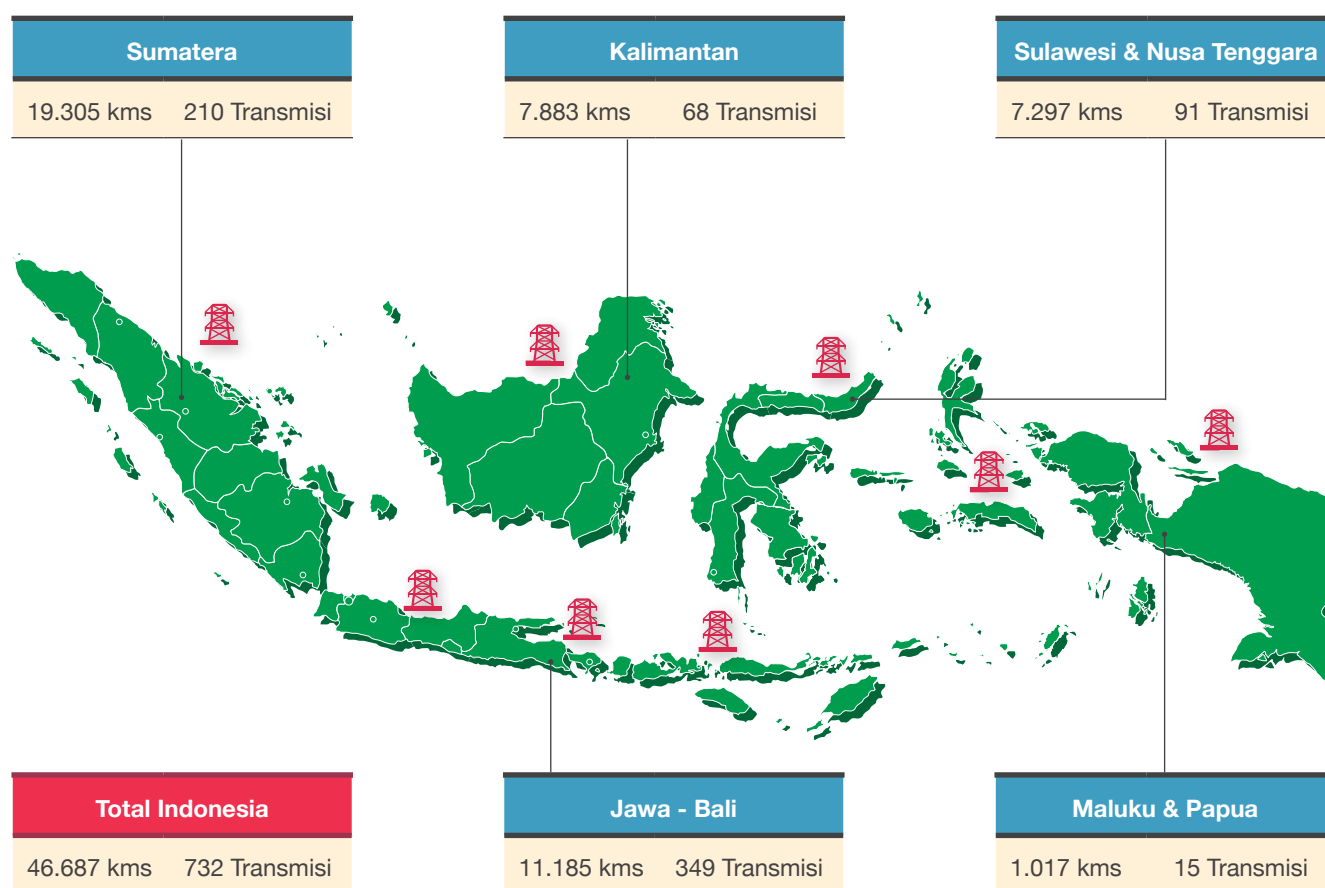
Gambar III-3

Pembangunan
Pembangkit Listrik
35.000 MW



2. Pembangunan infrastruktur listrik non-pembangkit yang bersumber dari APBN dan non-APBN, sebagai berikut:

Rencana aksi	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Transmisi listrik	kms	11.805	10.721	10.986	7.759	5.417
Gardu induk	MVA	26.666	21.353	26.410	20.510	13.850
Gardu distribusi	MVA	3.885	4.100	4.200	4.300	4.300
Jaringan distribusi	kms	28.800	29.800	30.000	30.300	31.300
Pemasangan listrik gratis	RTS	121.399	93.333	93.333	93.333	93.333



Gambar III-4

Sebaran Jumlah dan Kapasitas Transmisi

a. Pengembangan Gardu Induk

a.1. Wilayah Sumatera

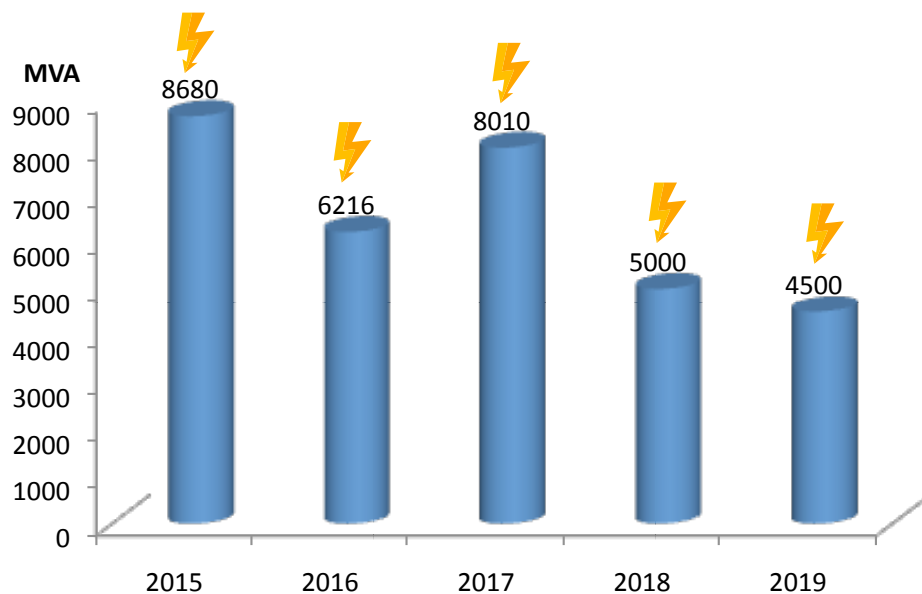
Rencana pengembangan Gardu Induk di Sumatera yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 berturut-turut sebesar 8.680 MVA; 6.216 MVA; 8.010 MVA; 5.000 MVA; 4.500 MVA, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 32.406 MVA.

a.2. Wilayah Jawa-Bali

Rencana pengembangan Gardu Induk di Jawa-Bali yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 berturut-turut sebesar 16.456 MVA; 11.617 MVA; 16.230 MVA; 13.700 MVA; 8.080 MVA, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 66.083 MVA.

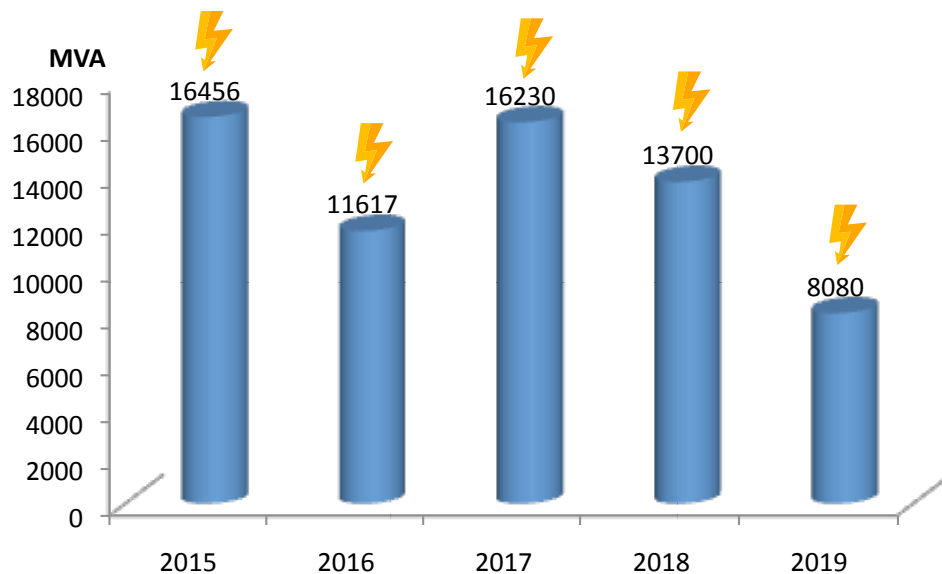
Gambar III-5

Rencana Pengembangan Gardu Induk Wilayah Sumatera Tahun 2015-2019



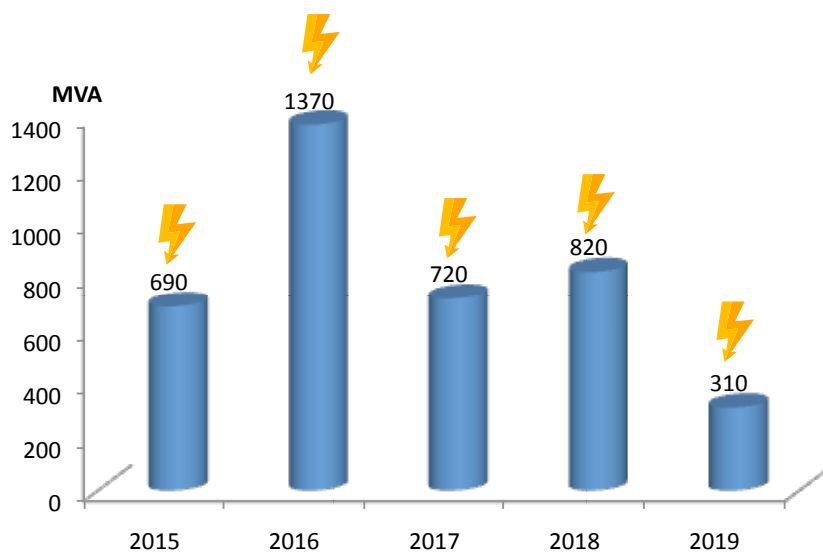
Gambar III-6

Rencana Pengembangan Gardu Induk Wilayah Jawa-Bali Tahun 2015-2019

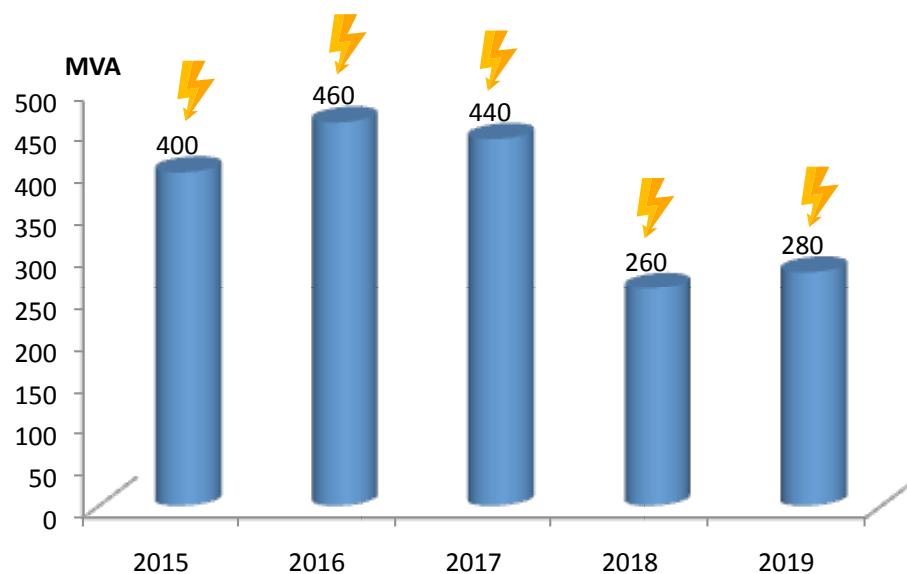


Gambar III-7

Rencana Pengembangan Gardu Induk Wilayah Kalimantan Tahun 2015-2019

**Gambar III-8**

Rencana Pengembangan Gardu Induk Wilayah Maluku & Nusa Tenggara Tahun 2015-2019



a.3. Wilayah Kalimantan

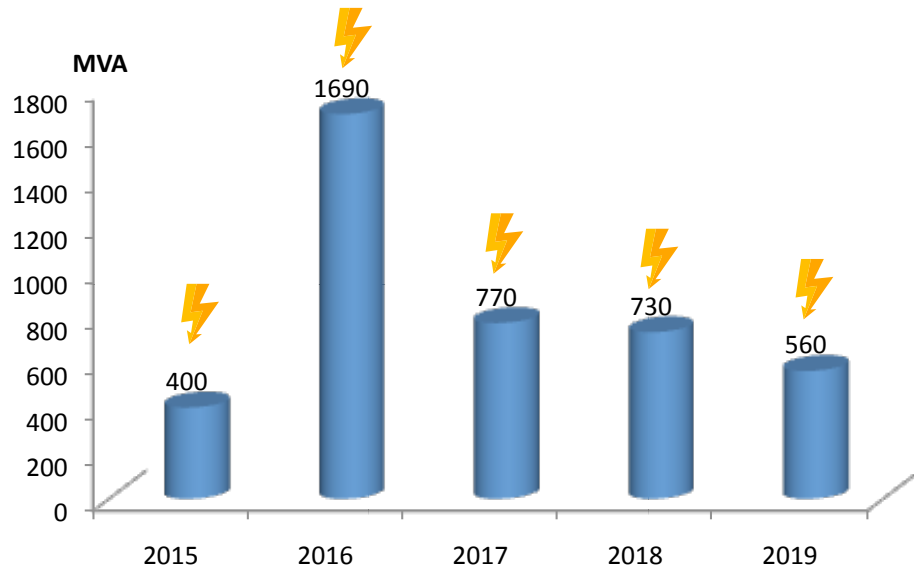
Rencana pengembangan Gardu Induk di Kalimantan yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 berturut-turut sebesar 690 MVA; 1.370 MVA; 720 MVA; 820 MVA; 310MVA, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 3.910 MVA.

a.4. Wilayah Maluku & Nusa Tenggara

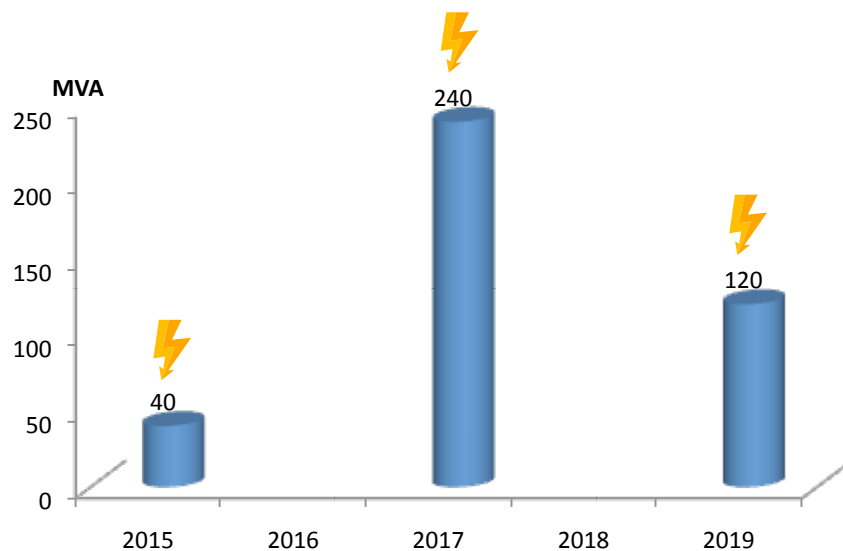
Rencana pengembangan Gardu Induk di Maluku & Nusa Tenggara yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 berturut-turut sebesar 400 MVA; 460 MVA; 440 MVA; 260 MVA; 280 MVA, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari 2015-2019 sebesar 1.840 MVA.

Gambar III-9

Rencana Pengembangan Gardu Induk Wilayah Sulawesi Tahun 2015-2019

**Gambar III-10**

Rencana Pengembangan Gardu Induk Wilayah Papua Tahun 2015-2019



a.5. Wilayah Sulawesi

Rencana pengembangan Gardu Induk di Sulawesi yang dibutuhkan dalam kurun 2015-2019 berturut-turut sebesar 400 MVA; 1.690 MVA; 770 MVA; 730 MVA; 560 MVA, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 4.150 MVA.

a.6. Wilayah Papua

Rencana pengembangan Gardu Induk di Papua yang dibutuhkan tahun 2015 sebesar 40 MVA, tahun 2017 sebesar 240 MVA dan tahun 2019 sebesar 120 MVA, jadi total rencana penambahan kapasitas pembangkit dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 400 MVA.

b. Pengembangan Jaringan Distribusi

Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk dapat mengantisipasi pertumbuhan penjualan tenaga listrik, mempertahankan tingkat keandalan yang diinginkan dan efisiensi serta meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa aksesibilitas layanan ketenagalistrikan yang ditunjukkan dari besarnya konsumsi listrik per kapita masih relatif rendah, konsumsi listrik per kapita merupakan outcome dari pembangunan ketenagalistrikan,

khususnya pembangunan jaringan distribusi dimana konsumsi listrik per kapita didapat dari rasio konsumsi listrik (dalam kWh) terhadap jumlah penduduk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, konsumsi listrik per kapita Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 753,7 kWh/orang pada 2013. Pemerintah dalam RPJM Nasional 2015-2019 telah berkomitmen menargetkan konsumsi listrik per kapita 914 kWh/orang pada 2015 menjadi 1.200 kWh/orang pada akhir 2019.

Gambar III-11

Target Konsumsi Listrik per Kapita 2015-2019



Di samping itu, pengembangan sistem distribusi tenaga listrik diarahkan juga untuk dapat menyalurkan tenaga listrik ke Kawasan Strategis Nasional dan mendukung pelaksanaan KPPIP.

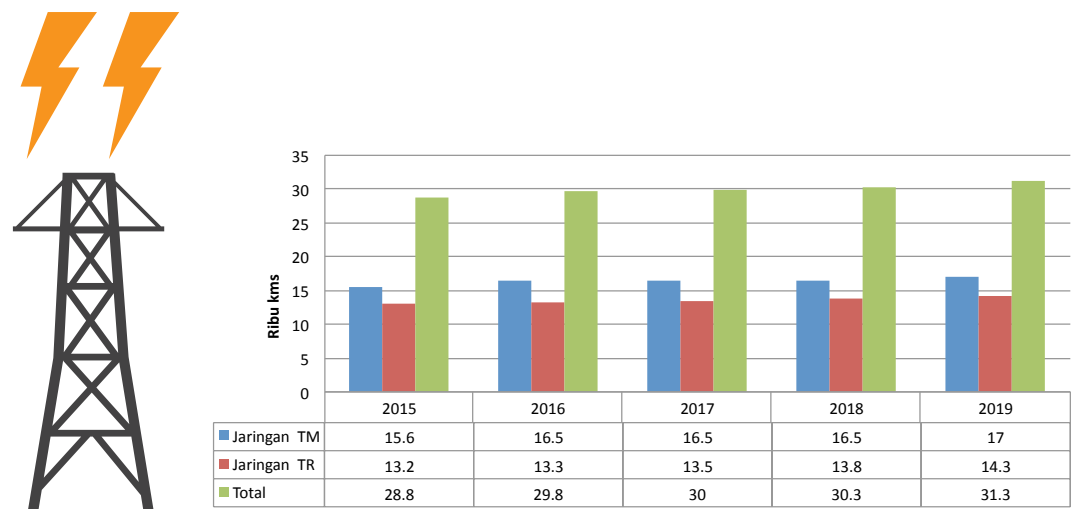
Perancangan sistem distribusi memiliki sasaran utama yaitu tersedianya sarana pendistribusian tenaga listrik yang cukup, andal, berkualitas, efisien dan susut jaringan yang wajar. Selain itu, Perencanaan tersebut juga memiliki sasaran lain yaitu untuk meningkatkan pasokan energi secara terus menerus kepada masyarakat.

Perencanaan kebutuhan fisik jaringan distribusi dikelompokkan dalam dua kegiatan, yaitu penyambungan pelanggan dan perkuatan distribusi.

Rencana pengembangan sistem distribusi di Indonesia periode 2015–2019 total keseluruhan adalah 304,2 ribu kms. Dari keseluruhan tersebut yang terbagi menjadi dua jenis jaringan yaitu Jaringan TM (Tegangan Menengah) dan Jaringan TR (Tegangan Rendah). Untuk Jaringan TM rencana pengembangannya yaitu 165,8 ribu kms dan untuk Jaringan TR 138,4 ribu kms. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar III-12.

Gambar III-12

Grafik Rencana Pengembangan Distribusi di Indonesia



b.1. Wilayah Sumatera

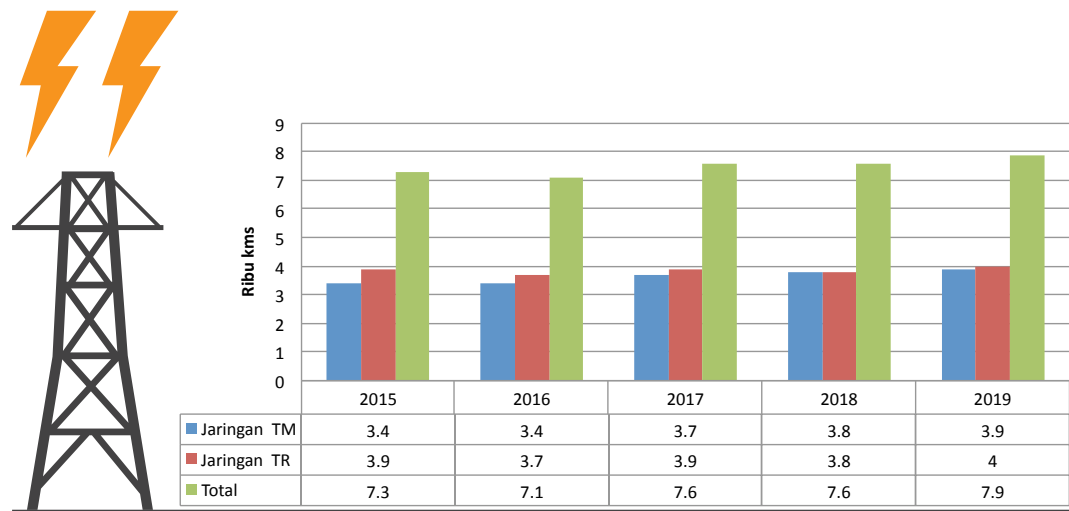
Rencana pengembangan sistem distribusi untuk Wilayah Sumatera dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebesar 18,2 ribu kms untuk jaringan tegangan menengah dan 19,3 ribu kms untuk jaringan tegangan rendah dengan total keseluruhan yaitu 37,5 ribu kms.

b.2. Wilayah Jawa-Bali

Rencana pengembangan sistem distribusi untuk Wilayah Jawa-Bali dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebesar 35,1 ribu kms untuk jaringan tegangan menengah dan 26,7 ribu kms untuk jaringan tegangan rendah dengan total keseluruhan yaitu 61,8 ribu kms.

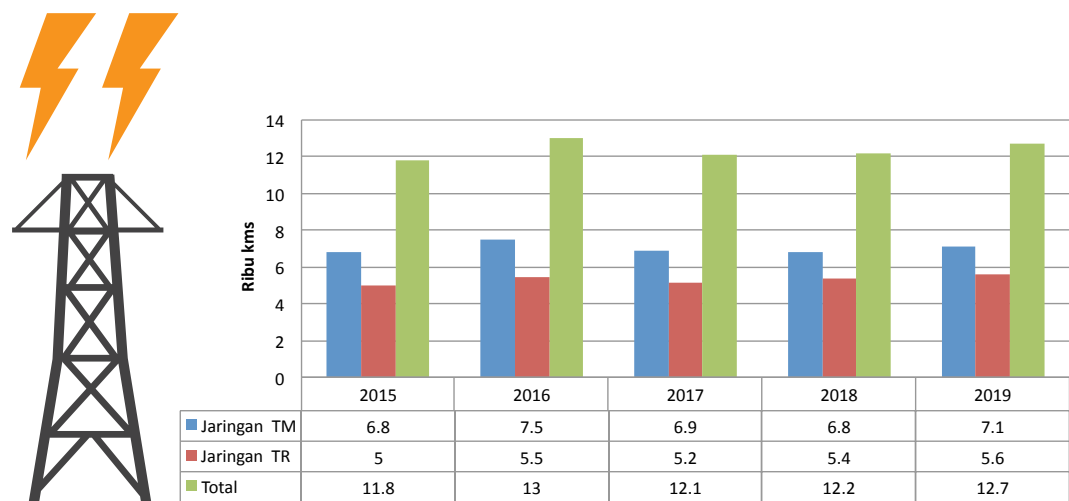
Gambar III-13

Grafik Rencana Pengembangan Distribusi di Wilayah Sumatera



Gambar III-14

Grafik Rencana Pengembangan Distribusi di Wilayah Jawa-Bali

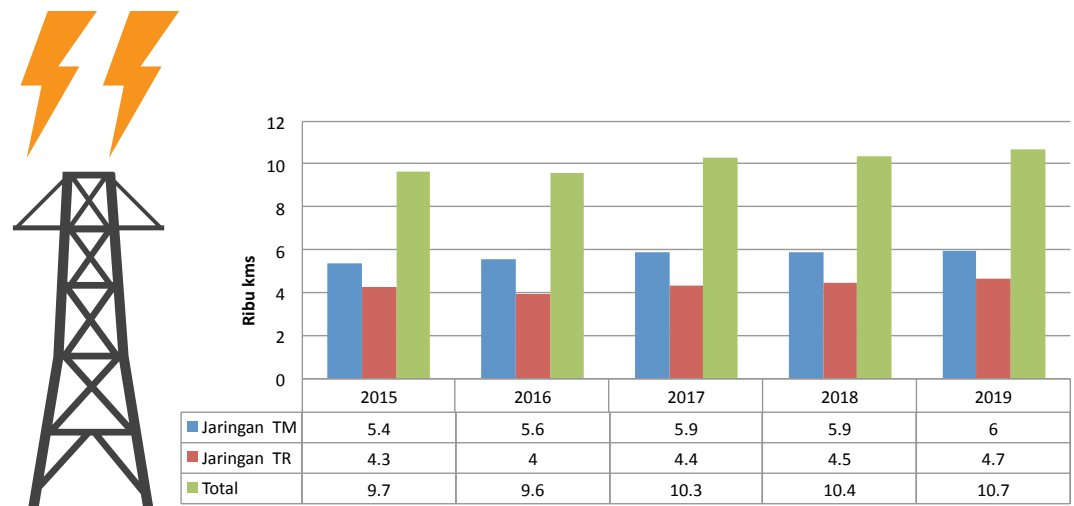


b.3. Wilayah Indonesia Timur

Rencana pengembangan sistem distribusi untuk Wilayah Indonesia Timur dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebesar 28,8 ribu kms untuk jaringan tegangan menengah dan 21,9 ribu kms untuk jaringan tegangan rendah dengan total keseluruhan yaitu 50,7 ribu kms.

Gambar III-15

Grafik Rencana Pengembangan Distribusi di Wilayah Indonesia Timur



c. Kapasitas Gardu Distribusi

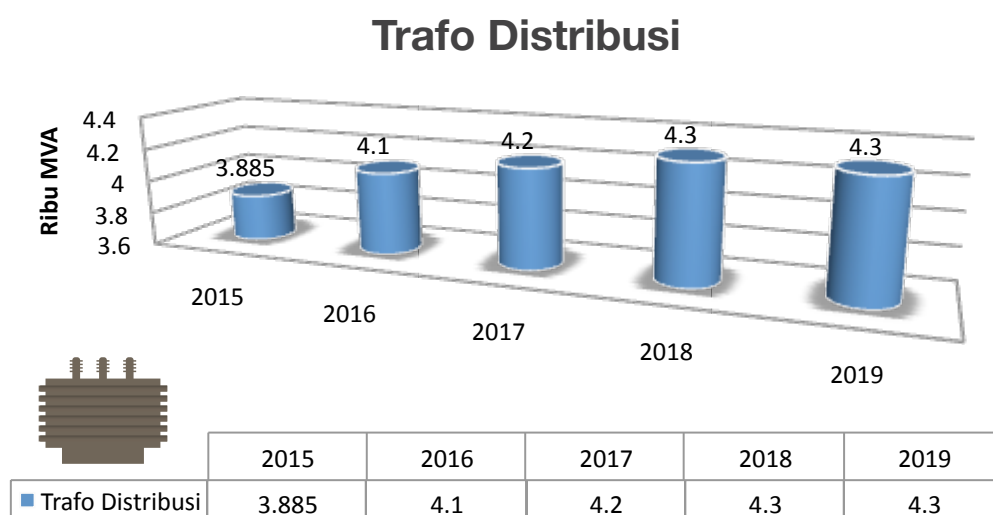
Rencana pengembangan sistem distribusi di Indonesia untuk kebutuhan trafo distribusi dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 20,785 ribu MVA. Kebutuhan fisik sistem distribusi tersebut antara tahun 2015 sampai dengan 2019, berikut terlihat pada grafik III-6. Rencana pengembangan tersebut diperlukan untuk mempertahankan keandalan untuk melayani pelanggan baru.

1.1. Wilayah Sumatera

Untuk mempertahankan keandalan dan melayani pelanggan baru, pada Wilayah Sumatera Rencana pengembangan sistem distribusi terutama untuk kebutuhan trafo distribusi yaitu 2,6 ribu MVA. Kebutuhan fisik sistem distribusi tersebut selama kurun waktu 5 tahun antara tahun 2015 sampai dengan 2019, berikut terlihat pada grafik III-17.

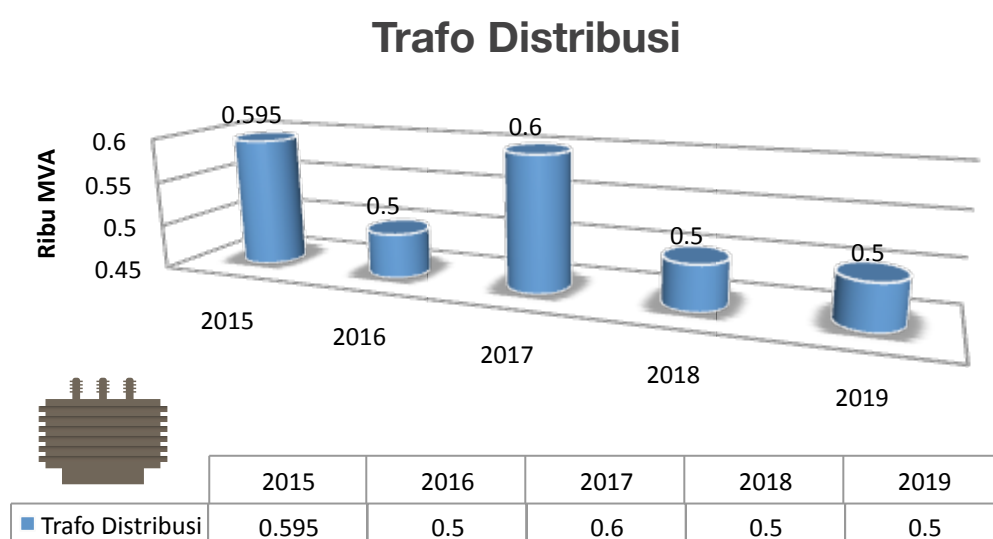
Gambar III-16

Grafik Rencana Pengembangan kapasitas Gardu Distribusi di Indonesia



Gambar III-17

Grafik Rencana Pengembangan kapasitas Gardu Distribusi di Wilayah Sumatera



1.2. Wilayah Jawa Bali

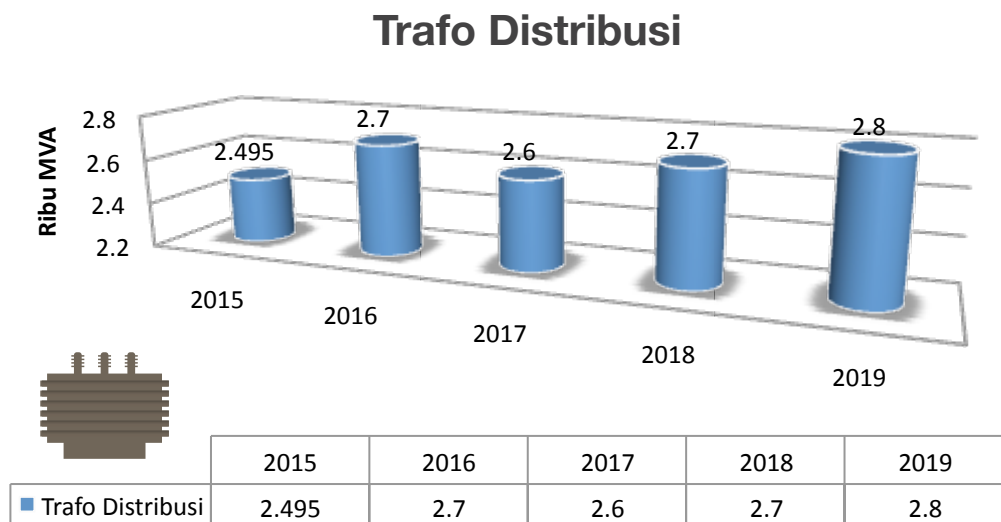
Rencana pengembangan sistem distribusi di Wilayah Jawa Bali untuk kebutuhan trafo distribusi yaitu 13,3 ribu MVA. Kebutuhan fisik sistem distribusi tersebut antara tahun 2015 sampai dengan 2019, berikut terlihat pada grafik III-18.

1.3. Wilayah Indonesia Timur

Rencana pengembangan sistem distribusi di Wilayah Indonesia Timur untuk kebutuhan trafo distribusi yaitu 4,8 ribu MVA. Kebutuhan fisik sistem distribusi tersebut antara tahun 2015 sampai dengan 2019, berikut terlihat pada grafik III-19.

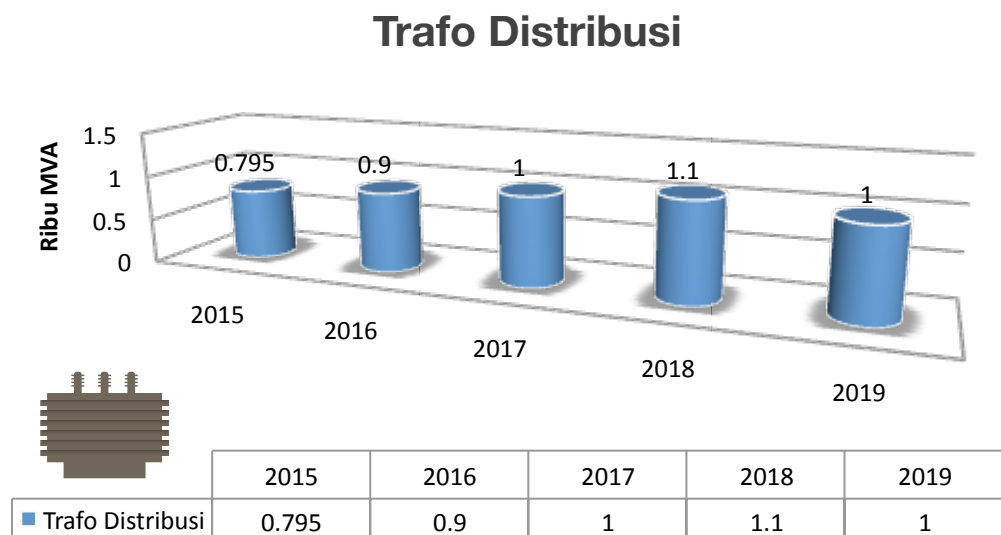
Gambar III-18

Grafik Rencana Pengembangan kapasitas Gardu Distribusi di Wilayah Jawa Bali



Gambar III-19

Grafik Rencana Pengembangan kapasitas Gardu Distribusi di Indonesia Timur



d. Program Instalasi Listrik Gratis Untuk Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu Yang Menerima Program Listrik Gratis

Guna mendukung pembangunan ketenagalistrikan dan bantuan bagi masyarakat tidak mampu serta menjaga kelangsungan upaya perluasan akses pelayanan listrik pada wilayah yang belum terjangkau listrik, mendorong pembangunan/pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan, maka pemerintah menjalankan program

listrik perdesaan yang merupakan kebijakan Pemerintah dalam bidang Ketenagalistrikan untuk perluasan akses listrik pada wilayah yang belum terjangkau jaringan distribusi tenaga listrik di daerah perdesaan.

Sasaran program pemasangan listrik gratis adalah masyarakat nelayan dan masyarakat miskin daerah tertinggal, yang akan memperoleh penyambungan instalasi listrik, 3 titik lampu, 1 stop kontak dan 3 buah Lampu Hemat Energi (LHE).

Tabel III-1

Rencana Program Listrik Perdesaan pada APBN-P 2015 per Wilayah (1/2)

No.	Provinsi	Fisik					PAGU LISDES	RTS	Pagu Listrik Gratis	PAGU TOTAL
		Jaringan (Kms)			GD					
		JTM	JTR	Total	Unit	MVA				
1	Nanggroe Aceh Darussalam	212.58	222.76	435.35	129	5.124	100,000,000,000	6,352	14,292,000,000	114,292,000,000
2	Sumatera Utara	142.00	125.00	267.00	100	3.000	72,992,633,000	1,241	2,792,250,000	75,784,883,000
3	Sumatera Barat	121.00	161.89	282.89	58	2.900	69,161,113,000	1,241	2,792,250,000	71,953,363,000
4	Riau	164.21	235.73	399.94	111	7.348	90,000,000,000	2,250	5,062,500,000	95,062,500,000
5	Kep. Riau	115.94	133.77	249.71	53	3.583	61,440,683,000	1,000	2,250,000,000	63,690,683,000
6	Jambi	145.14	129.17	274.31	91	6.600	81,805,915,000	1,471	3,309,750,000	85,115,665,000
7	Bangka Belitung	121.40	91.00	212.40	59	4.050	60,748,960,000	2,360	5,310,000,000	66,058,960,000
8	Bengkulu	112.00	148.00	260.00	75	4.600	74,743,124,000	2,134	4,801,500,000	79,544,624,000
9	Sumatera Selatan	195.02	214.65	409.67	117	7.092	118,860,111,000	3,500	7,875,000,000	126,735,111,000
10	Lampung	146.34	155.33	301.67	91	6.868	90,500,340,000	2,222	4,999,500,000	95,499,840,000
11	Banten	45.99	167.48	213.47	99	5.123	70,874,876,000	5,000	11,250,000,000	82,124,876,000
12	Jawa Barat	112.00	186.05	298.05	83	5.300	83,611,332,000	3,295	7,413,750,000	91,025,082,000
13	Jawa Tengah	110.00	178.00	288.00	172	8.600	65,899,962,000	3,229	7,265,250,000	73,165,212,000
14	DI Yogyakarta									
15	Jawa Timur	95.36	158.94	254.30	101	10.104	83,928,707,000	2,093	4,709,250,000	88,637,957,000
16	Kalimantan Barat	111.00	90.80	201.80	56	3.600	68,692,460,000	1,376	3,096,000,000	71,788,460,000
17	Kalimantan Tengah	167.49	89.90	257.39	54	2.340	106,387,135,000	5,311	11,950,500,000	118,337,635,000

No.	Provinsi	Fisik					PAGU LISDES	RTS	Pagu Listrik Gratis	PAGU TOTAL
		Jaringan (Kms)			GD					
		JTM	JTR	Total	Unit	MVA				
18	Kalimantan Selatan	119.44	70.86	190.29	59	2.456	80,182,251,000	3,360	7,560,000,000	87,742,251,000
19	Kalimantan Timur	153.44	46.93	200.37	50	6.890	125,278,786,000	2,000	4,500,000,000	129,778,786,000
20	Kalimantan Utara									
21	Sulawesi Tengah	117.92	86.95	204.88	114	5.956	93,468,627,000	4,896	11,016,000,000	104,484,627,000
22	Sulawesi Barat	207.79	164.38	372.17	219	8.956	109,388,233,000	3,229	7,265,250,000	116,653,483,000
23	Sulawesi Selatan	253.24	225.17	478.41	230	15.903	142,349,866,000	7,500	16,875,000,000	159,224,866,000
24	Sulawesi Tenggara	140.00	128.30	268.30	106	6.872	95,306,994,000	4,388	9,873,000,000	105,179,994,000
25	Gorontalo	101.70	227.25	328.96	127	9.662	86,894,671,000	10,000	22,500,000,000	109,394,671,000
26	Sulawesi Utara	82.11	122.02	204.13	95	7.926	81,238,218,000	3,226	7,258,500,000	88,496,718,000
27	Bali	43.35	200.19	243.54	26	1.826	85,769,318,000	2,526	5,683,500,000	91,452,818,000
28	Nusa Tenggara Barat	147.91	89.95	237.86	61	5.926	91,760,456,000	3,500	7,875,000,000	99,635,456,000
29	Nusa Tenggara Timur	199.92	147.19	347.11	61	3.070	150,789,116,000	5,699	12,822,750,000	163,611,866,000
30	Maluku Utara	81.00	22.00	103.00	46	3.240	58,969,331,000	7,500	16,875,000,000	75,844,331,000
31	Maluku	138.55	57.73	196.28	68	3.493	77,849,635,000	7,500	16,875,000,000	94,724,635,000
32	Papua Barat	157.04	41.68	198.72	34	2.458	109,191,401,000	6,000	13,500,000,000	122,691,401,000
33	Papua	175.43	121.39	296.82	66	4.778	146,316,091,000	6,000	13,500,000,000	159,816,091,000
TOTAL		4,236.29	4,240.47	8,476.76	2,811	175.641	2,834,400,345,000	121,399	273,148,500,000	3,107,548,845,000

Tabel III-2

Rencana Program Listrik Perdesaan pada APBN-P 2015 per Wilayah (2/2)

Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan pada suatu wilayah. Adapun data Rumah Tangga secara keseluruhan adalah diolah dengan mengacu pada proyeksi pertumbuhan penduduk menggunakan data Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2010-2035 dari Bappenas-BPS dan proyeksi jumlah penduduk per rumah tangga yang mengacu pada Statistik Indonesia 2014 BPS. Sedangkan data yang dipergunakan untuk menghitung rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik mengacu pada data

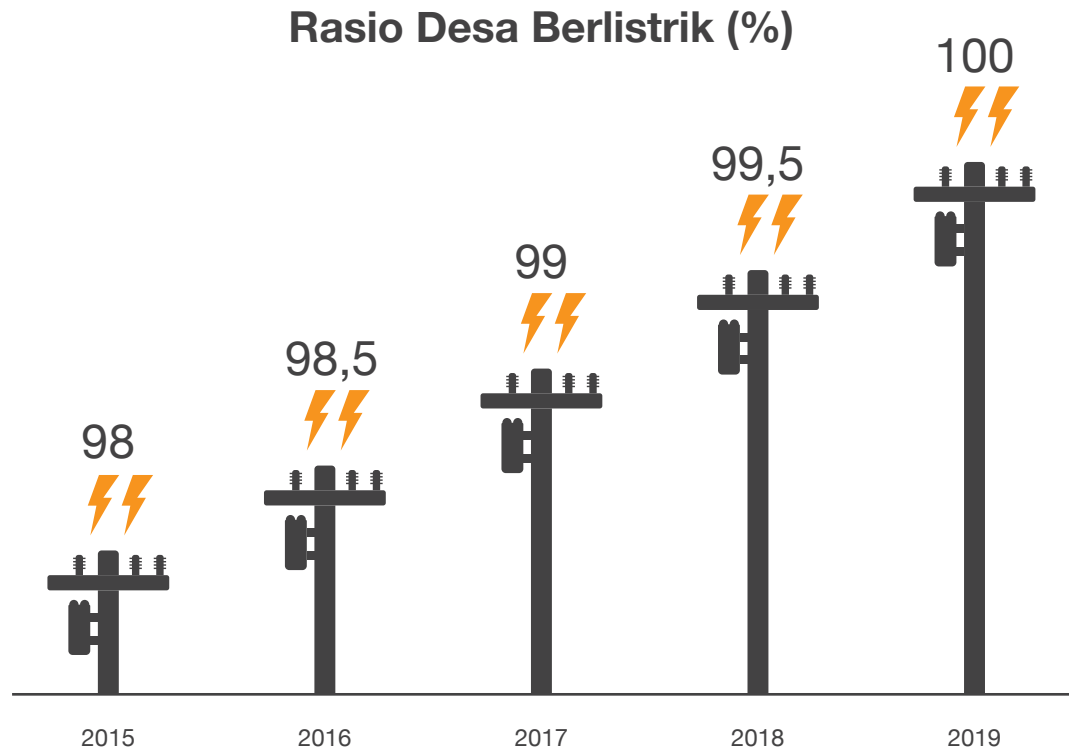
pelanggan rumah tangga PLN dan data yang bersumber dari Pemerintah Provinsi.

Rencana pengembangan desa berlistrik direncanakan akan tercapai pada 2019 dengan rencana peningkatan 0.5% tiap tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Berikut terlihat pada grafik III-20 rencana peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Dengan adanya Program Listrik Perdesaan memiliki banyak manfaat diantaranya yaitu :

Gambar III-20

Grafik rencana peningkatan rasio elektrifikasi



- Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan.
- Meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan.
- Mendorong produktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pedesaan.
- Memudahkan dan mempercepat masyarakat pedesaan memperoleh informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya.
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang selanjutnya diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengembangan listrik perdesaan diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, menjaga kelangsungan upaya perluasan akses pelayanan listrik pa-

da wilayah yang belum terjangkau listrik, mendorong pembangunan/pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program Penyambungan dan Pemasangan instalasi listrik gratis bagi nelayan & masyarakat tidak mampu yang keseluruhannya yaitu 494.732 RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang akan tercapai pada tahun 2019. Terlihat pada grafik III-21 rencana program dari kurun waktu selama 5 tahun, dari mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

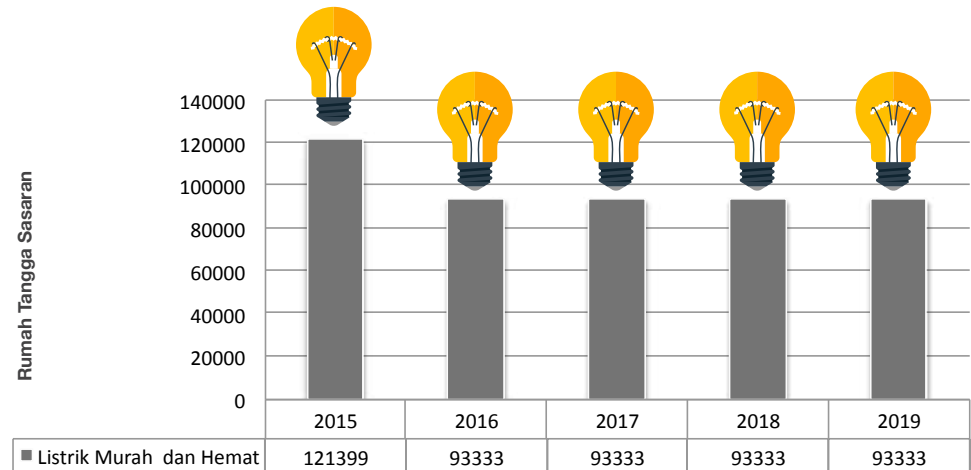
3. Percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan

- Implementasi UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Gambar III-21

Grafik rencana program penyambungan dan pemasangan instalasi listrik gratis

Listrik Murah & Hemat



Umum dalam rangka mengatasi kendala lahan.

- Implementasi Permen ESDM No. 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, Dan PLTA oleh PT PLN (Persero) melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung, yang substansinya, antara lain:
 - **Memperjelas aturan penyediaan tenaga listrik** melalui **pemilihan langsung dan penunjukan langsung**.
 - **Menetapkan Harga Patokan Tertinggi** untuk memudahkan negosiasi antara PLN dan IPP sehingga tidak diperlukan persetujuan Menteri.
 - **Menunjuk Independent**

Procurement Agent yang cakupan tugasnya antara lain melakukan seleksi teknis dan *due diligence* finansial termasuk *bankability* atas usulan penawaran/proposal kontraktor serta merekomendasikan penawaran yang layak untuk ditindaklanjuti.

- Membentuk Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) untuk mengontrol dan mengendalikan pembangunan pembangkit listrik agar sesuai rencana (*de-bottlenecking*)
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menunjuk Eselon I KESDM sebagai koordinator dan menugaskan 5 PNS KESDM di Badan Koordinasi Penanaman

PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)										ASUMSI
PLTU Mulut Tambang	100	150	300	600							
- Harga (cent USD/kWh)	8,2089	7,6520	7,1862	6,9012						Availability Factor (AF): 80%, Calorific Value (gar) : 3000 Kkal/kg, Harga Batubara: 30 USD/Ton, masa kontrak : 30 Tahun	
- Asumsi Heat rate (Kkal/kWh)	3.200	3.000	2.900	2.700							
PLTU Non Mulut Tambang	≤10	15	25	50	100	150	300	600	1000		
- Harga (cent USD/KWh)	11,82	10,61	10,60	9,11	8,43	7,84	7,25	6,96	6,31	Asumsi: Availability Factor (AF): 80%, Calorific Value (gar) : 5000 Kkal/kg, Harga Batubara: 60 USD/Ton, masa kontrak : 25 Tahun. Untuk harga batubara menggunakan prinsip <i>Passthrough</i>	
- Asumsi Heat Rate (Kkal/kWh)	4.160	3.500	3.450	3.200	3.000	2.800	2.600	2.450	2.290		
PLTG/PLTMG	40-60	100									
- Harga (cent USD/kWh)	8,64	7,31								Asumsi: Availability Factor (AF): 85%, Harga Gas: 6,00 USD/MMBTU, masa kontrak : 20 Tahun	
- Asumsi Heat Rate (BTU/kWh)	9.083	8.000									
PLTA	>10 - <50	50 - 100	>100								
- Harga (cent USD/kWh)	9,00	8,50	8,00							Asumsi: Availability Factor (AF): 60%, masa kontrak : 30 Tahun	

Tabel III-3

Harga Patokan Tertinggi
Pembelian Tenaga
Listrik

Modal cq PTSP melalui Kepmen ESDM No. 4270 K/70/MEM/2014 tentang PNS dipekerjakan pada BKPM.

4. Koordinasi pembinaan & pengawasan usaha, mencakup:

- Penyelesaian permasalahan lahan: Koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait (a.l. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, BPN), dan pendekatan kepada masyarakat untuk negosiasi harga. Menteri ESDM telah mener-

bitkan 2 Peraturan Menteri terkait penggunaan tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu Permen ESDM No. 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman di bawah Ruang Bebas SUTET/ SUTT dan Kepmen ESDM No. 2186.K/2014 tentang Penugasan Khusus Kepada PT PLN (Persero) Dalam Rangka Mempercepat Proses Pengadaan Tanah Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

- Perizinan: koordinasi dalam rangka penyederhanaan perizinan yang bukan kewenangan KESDM.

5. Pembangunan kabel laut

Untuk mengembangkan sistem kelistrikan di pulau-pulau yang dekat dengan daratan pulau besar dan sekaligus untuk menurunkan penggunaan BBM, direncanakan interkoneksi antar pulau melalui kabel laut 20 kV atau 150 kV, yaitu:

- Pulau Muna-Pulau Buton (Bau-bau) dengan kabel laut 150 kV.
- Pulau Laut (Kotabaru) - Batulicin dengan kabel laut 150 kV.
- Bitung – Pulau Lembeh (Sulut) dengan kabel laut/SUTM 20 kV.
- Kepulauan Seribu dengan sirkit ke-2 kabel laut 20 kV.
- Bali – Nusa Penida dengan sirkit ke-2 kabel laut 20 kV.

Pembangunan transmisi dan kabel laut ± 500 kV HVDC Sumatera – Peninsular Malaysia bertujuan untuk mengoptimalkan operasi kedua sistem dengan memanfaatkan perbedaan waktu terjadinya beban puncak pada kedua sistem tersebut. Interkoneksi Batam – Bintan dengan kabel laut 150 kV dimaksudkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan tenaga listrik pulau Bintan dengan tenaga listrik dari Batam dengan

mempertimbangkan rencana pengembangan pembangkit di Batam yang akan mencukupi kebutuhan Batam dan sebagian Bintan, karena iaya produksi listrik di Batam lebih rendah dari pada biaya produksi di Bintan yang masih banyak menggunakan pembangkit BBM. Adanya interkoneksi 150 kV tersebut tidak ada hubungannya dengan perluasan wilayah usaha PLN Batam. Untuk pembangunan kabel laut 20 kV sepanjang 62,98 kms di kepulauan seribu dengan pendanaan APBN dan diperkirakan selesai tahun 2017.

Pengembangan kabel laut di Kepulauan Seribu mengalami perubahan dari 2 tahap menjadi 3 tahap yaitu:

- Tahap 1 sudah eksisting, pelaksanaan pembangunan oleh Pemda DKI.
- Tahap 2 tahun 2015/2016: dari GI Teluk Naga sampai P. Tidung kecil.
- Tahap 3 tahun 2017: dari P. Tidung Kecil sampai Pulau Panjang Besar untuk menghubungkan pulau-pulau lainnya.

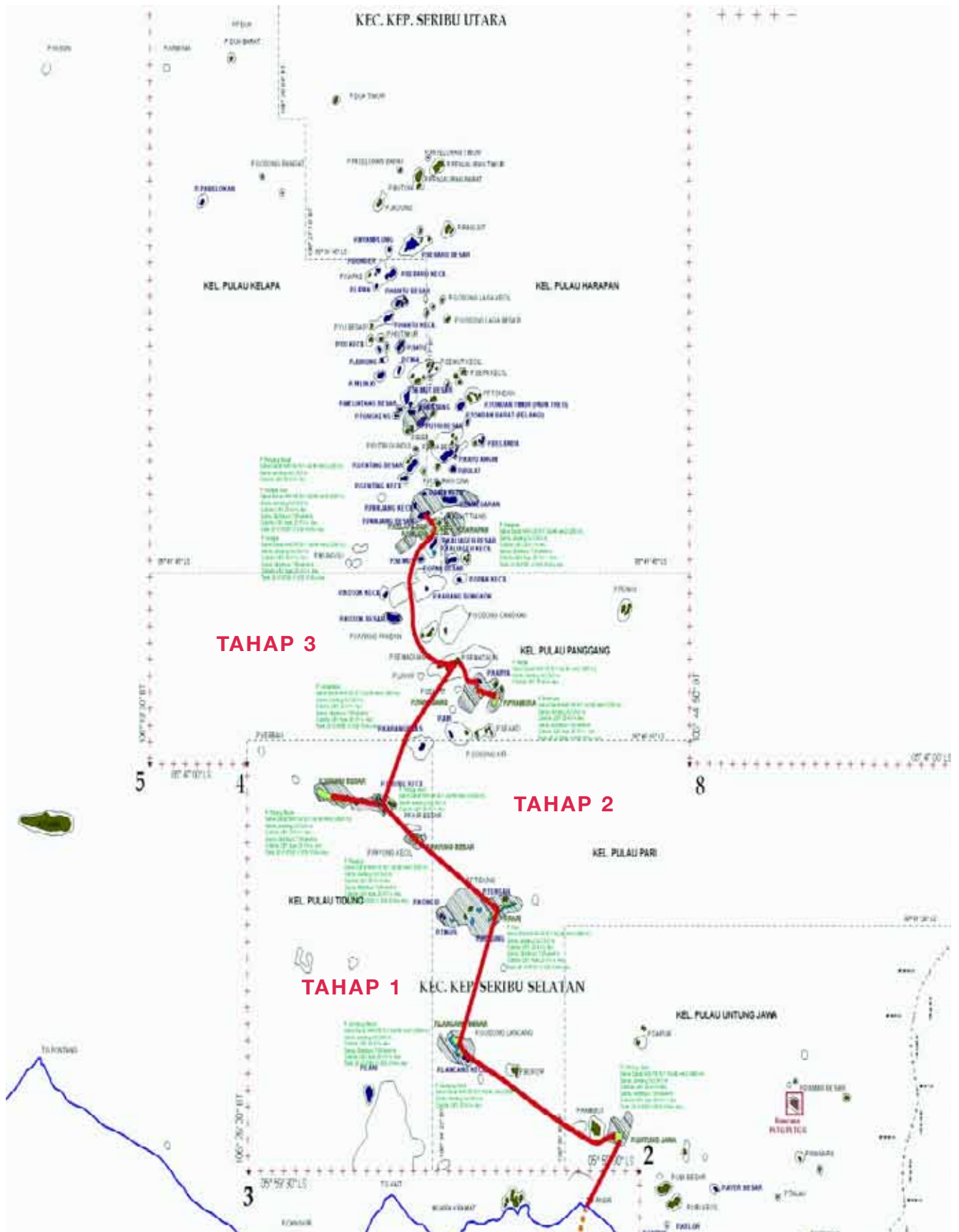
Lingkup pekerjaan tahap 2 dan tahap 3 adalah sebagai berikut:

- a. Tahap 2 jalur selatan, merupakan penambahan sirkit kedua yang menghubungkan GI Teluk Naga melalui penyulang ke GH Tanjung Pasir dan selanjutnya radial hingga ke pulau Tidung Besar

No	Section	SKLTM (kms)	SKTM ke GD (kms)	Trafo GD (MVA)	JTR (kms)
1	P. Tidung Kecil - P. Karya	16,51	0,34	1x630 kVA (P. Karya)	3,20
2	P. Karya - P. Panggang	0,20	1,66	2x630 kVA (P. Panggang)	6,40
3	P. Panggang - P. Pramuka	1,76	0,96	1x630 kVA (P. Pramuka)	3,20
4	P. Karya - P. Kelapa	19,95	2,24	4x630 kVA (P. Kelapa)	12,80
5	P. Kelapa - P. Kelapa Dua/Harapan	0,62	1,45	1x630 kVA (P. Kelapa Dua)	3,20
6	P. Kelapa Dua/Harapan - P. Panjang Besar	0,94	0,84	1x630 kVA (P. Panjang Besar)	3,20
7	P. Panjang Besar - P. Sabira	1,20	-	1x630 kVA (P. Sabira)	3,20
	Total	38,18	7,15	11x630 kVA	35,20

- b. Tahap 3 jalur utara, adalah penyambungan SKLTM radial dari pulau Tidung Besar ke pulau-pulau di sebelah utara

No	Section	SKLTM (kms)	SKTM ke GD
1	GH Tg Pasir - GH P.U. Jawa	5,69	0,4
2	GH P.U. Jawa - GH P.L Kecil	13,39	0,8
3	GH P.L Kecil - GH P.L Besar	0,46	1,0
4	GH P.L Besar - GH Pulau Pari	9,46	0,4
5	GH Pulau Pari - GH P. Payung Besar	8,85	0,8
6	GH P. Payung Besar - GH P. Tidung Kecil	3,56	0,6
7	GH P. Payung Kecil - GH P. Tidung Besar	0,83	2,0
	Total	42,24	6,0



Gambar III-22

Rencana Pembangunan Kabel Laut di Kepulauan Seribu

6. Dukungan Infrastruktur Ketenagalistrikan Pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pembangunan Infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit, transmisi dan distribusi secara nasional mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Terdapat **8 (delapan)** lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah ditetapkan hingga tahun 2014, yaitu:

a. **KEK Sei Mankei**, berlokasi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;

Kegiatan sub sektor ketenagalistrikan yang mendukung KEK Sei Mankei diantaranya :

- PLT Biomass 7 MW (telah COD 2014)
- Pembangkit EBT 2,1 MW (COD 2016)
- Pembangkit tenaga listrik tenaga gas 50 MW (COD 2019)

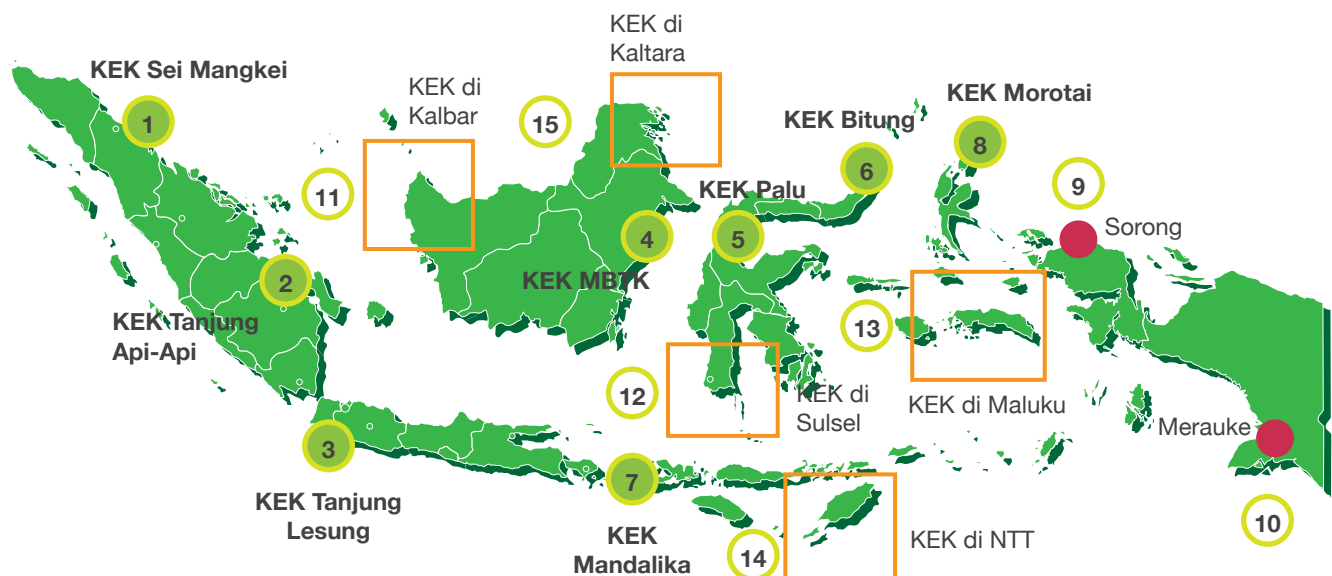
b. **KEK Tanjung Api-api**, berlokasi di Kabupaten Banyuwasin, Sumatera Selatan;

Kegiatan sub sektor ketenagalistrikan yang mendukung KEK Tanjung api-api diantaranya :

- GI Perdagangan (120 MVA)

Gambar III-23

Lokasi KEK 2015-2019



Sumber: Kemenko Perekonomian (2014), Bappenas (2015)

Keterangan



Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014



Calon lokasi KEK 2015 - 2019 (sudah disebutkan kabupatennya)



Calon lokasi KEK 2015 - 2019 (disebutkan nama provinsi)

- GI Tanjung Api-api Ext 2LB
 - T/L Tanjung Api-api - Mentok Bangka Landing Point 50 kms
- c. KEK MBTK**, berlokasi di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur; Kegiatan sub sektor ketenagalistrikan yang mendukung KEK MBTK diantaranya :
- PLTU Kaltim 2 (FTP-2) 2x100MW
 - TL 150 kV PLTU Kaltim 2 (FTP-2) - Bontang 30 kms
 - TL 150 kV Bontang - Sangatta 90 kms
 - TL 150 kV Sangatta - Maloy 160 kms
 - Minahasa Peaker 150 MW (PLTG/GU/MG)
- d. KEK Tanjung Lesung**, Kabupaten Pandeglang, Banten; Kegiatan sub sektor ketenagalistrikan yang mendukung KEK Tanjung Lesung diantaranya : Pembangunan GI Tanjung Lesung 120 MVA
- e. KEK Palu**, berlokasi di Kota Palu, Sulawesi Tengah; Kegiatan sub sektor ketenagalistrikan yang mendukung KEK Palu diantaranya :
- T/L 150 kV Palu Baru - Silae 50 kms
 - T/L 70 kV Palu Baru - Talise 40 kms
- f. KEK Mandalika**, berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, NTB; Kegiatan sub sektor ketenagalistrikan yang mendukung KEK Mandalika diantaranya :
- T/L 150 kV Sengkol-Kuta Sudah COD 2014
 - GI Kuta 30 MW
 - GI Kuta Extension 30 MVA
 - Pembangunan PLTG Mobile 50 MW (lokasi di Sistem Lombok)
- g. KEK Morotai**, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara; Kegiatan sub sektor ketenagalistrikan yang mendukung KEK Morotai diantaranya :
- PLTD Kep. Marotai Selatan total 3 MW (termasuk jaringan distribusi)
 - Pembangunan PLTS komunal 350 kWp
- h. KEK Bitung**, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kegiatan sub sektor ketenagalistrikan yang mendukung KEK Bitung diantaranya :
- Pembangunan GI Paniki 60 MVA (Ext)
 - T/L 150 kV PLTU Sulut 3 - GI Tanjung Merah 20 kms
 - T/L 150 kV Paniki - Tanjung Merah 56 kms
 - Pembangunan GI Tanjung Merah/Kima 60 MVA
 - GI Tanjung Merah 30 MVA
 - GI Likupang 60 MVA
 - T/L 150 kV Likupang Bitung 32 kms
 - Minahasa Peaker 150 MW (PLTG/GU/MG)

KEBIJAKAN-7: RASIONALISASI SUBSIDI DAN HARGA ENERGI YANG LEBIH TERARAH

Sebagaimana Pasal 7 UU No. 30/2007 tentang Energi, bahwa Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan, dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Selain itu, sebagaimana PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, subsidi disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam hal:

- Penerapan keekonomian berkeadilan dan kemampuan daya beli masyarakat tidak dapat dilaksanakan;
- Harga energi terbarukan lebih mahal daripada harga energi dari bahan bakar minyak yang tidak disubsidi;

Penyediaan subsidi sebagaimana dimaksud meliputi:

- Penerapan mekanisme subsidi dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu;
- Pengurangan subsidi BBM dan listrik secara bertahap sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai.

Kebijakan rasionalisasi subsidi dan harga energi mencakup pengalihan subsidi dari belanja konsumtif dan belanja produktif. Subsidi tetap diperlukan, namun secara bertahap dikurangi karena tidak mencerminkan keadilan atau tidak tepat sasaran. Masyarakat mampu bahkan kaya, masih dapat menikmati subsidi BBM dan listrik. Rasionalisasi subsidi akan memberikan fiscal space bagi Pemerintah untuk mengalokasikan belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial untuk rakyat kurang mampu.

Pemerintah bersama PT PLN (Persero) melakukan langkah-langkah upaya penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik. Tarif Tenaga Listrik (TTL) disesuaikan secara bertahap menuju harga keekonomian.

Strategi dan rencana aksi 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah, terkait **subsidi listrik**, antara lain:

1. **Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL)** melalui pelaksanaan *tariff adjustment*, untuk pelanggan yang sudah mencapai keekonomiannya. Pelanggan non subsidi yaitu:

Rumah Tangga	R-1	1.300 VA
Rumah Tangga	R-1	2.200 VA
Rumah Tangga	R-2	3.500 VA s.d. 5.500 VA
Rumah Tangga	R-3	>6.600 VA
Bisnis Menengah	B-2	6.600 VA s.d. 200 kVA
Bisnis Besar	B-3	>200 kVA
Industri Menengah	I-3	>200 kVA
Industri Besar	I-4	>30.000 kVA
Kantor Pemerintah	P-1	6.600 VA s.d. 200 kVA
Kantor Pemerintah	P-2	>200 kVA
Penerangan Jalan Umum	P-3	
Layanan Khusus	L	

Konsep *tariff adjustment* yaitu perubahan TTL mengikuti perubahan nilai kurs, *Indonesian Crude Price* (ICP) dan besaran inflasi terhadap 12 golongan tarif diatas. Penerapan *tariff adjustment* ini telah merupakan hasil keputusan Kementerian ESDM dan DPR-RI.

- 2. Perbaikan** tegangan pelayanan, perbaikan *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI), penurunan susut teknis jaringan, dan rehabilitasi jaringan yang tua, dengan penurunan target susut jaringan dari 8,9% pada tahun 2015 menjadi 8,39% pada 2019.

Rencana aksi	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Penurunan susut jaringan	%	8,9	8,7	8,55	8,45	8,39

- 3. Memperbaiki *energy mix* pembangkit** sehingga komposisi BBM pada bauran energi pembangkit semakin menurun.

Rencana aksi	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Penurunan pangsa energi primer BBM pada pembangkit listrik	%	8,85	6,97	4,66	2,08	2,04



IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

IV.1. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Kementerian yang terdiri dari IKU Menteri ESDM dan IKU unit Eselon I. Khusus untuk IKU Menteri ESDM telah dijabarkan pada bab tujuan dan sasaran. Pada dokumen Renstra ini, target kinerja telah ditetapkan berdasarkan perencanaan dan perkiraan yang dibuat pada tahun 2014/2015, sehingga tidak menutup kemungkinan pada tahun berjalan perencanaannya dapat berubah seiring dengan penetapan APBN, APBN-P, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan dokumen perencanaan lainnya.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran strategis: Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi							
1	Rasio Elektrifikasi	%	87	90	93	95	97
2	Rasio Desa Berlistrik	%	98	99	99	100	100
3	Infrastruktur ketenagalistrikan:						
	a. Penambahan kapasitas pembangkit	MW	3.782	4.212	6.389	9.237	19.319
	b. Penambahan penyaluran tenaga listrik	kms	11.805	10.721	10.986	7.759	5.417
4	Instalasi penyediaan tenaga listrik yang Laik operasi						
	a. Persentase Pembangkit	%	90	90	90	90	90
	b. Persentase Penyaluran	%	90	90	90	90	90
5	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	914	985	1.058	1.129	1.200
Sasaran strategis: Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik							
6	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8,9	8,7	8,55	8,45	8,39
7	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	%	8,85	6,97	4,66	2,08	2,04
Sasaran strategis: Terpantaunya subsidi listrik							
8	Subsidi Listrik	Triliun Rp	66,15	69,76	74,90	80,60	89,41
Sasaran strategis: Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan							
9	Investasi sub sektor ketenagalistrikan	Miliar US\$	11,2	16,4	20,4	19,6	15,9
Sasaran strategis: Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagaslistrikan							
10	Regulasi bidang ketenagalistrikan	Peraturan	7	3	3	2	1

Tabel IV-1

Target kinerja tahun
2015 - 2019

IV.2. KERANGKA PENDANAAN

1. INVESTASI DAN PENDANAAN

Sumber pendanaan pembangunan sektor ESDM utamanya dari investasi swasta dan selebihnya dari APBN. Dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun kedepan, arah pembangunan lebih kepada infrastruktur ketenagalistrikan, energi

terbarukan dan hilir migas serta pengolahan dan pemurnian mineral. Investasi swasta dan pendanaan APBN tersebut akan berdampak pada pencapaian kedaulatan energi dan penerimaan negara yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Perkiraan investasi sektor ESDM tahun 2015-2019 dari swasta dan APBN sekitar Rp 273 miliar dan Rp 104 triliun.

Gambar IV-1

Indikasi kerangka pendanaan sektor ESDM tahun 2015-2019



a. Investasi sektor Ketenagalistrikan, untuk 5 tahun kedepan diperkirakan sebesar US\$ 83,43 miliar, yang utamanya merupakan investasi dari sektor swasta.

Tabel IV-2

Investasi sektor ketenagalistrikan 2015-2019

Indikator Kinerja	Satuan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Investasi Sektor ESDM	miliar US \$	45,5	51,4	57,9	61,0	57,3
a. Migas	miliar US \$	23,7	25,2	26,8	28,4	29,9
b. Ketenagalistrikan	miliar US \$	11,2	16,4	20,4	19,6	15,9
- Pembangkit	miliar US \$	5,9	11,0	15,2	14,6	12,2
- Transmisi	miliar US \$	3,8	4,0	3,6	3,4	2,2
- Distribusi	miliar US \$	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5

2. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kementerian, di dukung dengan pendanaan melalui investasi swasta dan APBN. Khusus untuk yang melalui pendanaan APBN, diakomodir melalui program dan kegiatan pokok yang ada di unit kerja di Kementerian ESDM. Program dan kegiatan pokok ini merupakan terminologi pada dokumen penganggaran Kementerian, dimana Program mewakili unit eselon 1 dan kegiatan pokok mewakili unit eselon 2.

KESDM memiliki 12 Program, dimana masing-masing unit setingkat eselon 1 memiliki 1 program, kecuali Sekretariat Jenderal yang memiliki 2 program. Masing-masing program (Eselon-1) memiliki sasaran program dan Indikator Kinerja Utama (*outcome*), sedangkan masing-ma-

sing kegiatan pokok (Eselon-2) juga memiliki sasaran kegiatan dan indikator kinerja (*output*).

Setiap program dan kegiatan pokok terdapat anggarannya, dimana total Indikasi APBN KESDM untuk 5 tahun direncanakan sekitar Rp 103,6 Triliun, yang terdiri dari Belanja Prioritas sekitar Rp 93,9 triliun dan Belanja Aparatur sekitar Rp 9,7 triliun yang dipergunakan untuk mencapai target kinerja sebagaimana terdapat pada sub bab 4.1.

Belanja Prioritas akan lebih diutamakan alokasi anggaran pada tiap tahunnya dibandingkan dengan Belanja Aparatur yang lebih fluid. Adapun Rencana Belanja Prioritas KESDM 2015-2019 dengan rincian program dan kegiatan pokok per unit eselon 1, sebagai berikut:

Tabel IV-3

Daftar anggaran program/kegiatan pokok dari tahun 2015-2019

No	Program/Kegiatan Pokok	Penanggung Jawab	Target (Rp Miliar)					Total
			2015	2016	2017	2018	2019	
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan		Ditjen Ketenaga-listrikan	4.386,3	5.233,8	5.092,0	5.172,2	5.460,2	25.344,5
1	Kegiatan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	23,8	26,7	28,0	29,4	30,8	138,7
2	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	4.307,9	5.142,3	4.995,7	5.070,4	5.354,3	24.870,6
3	Kegiatan Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	28,0	25,9	27,3	29,2	29,7	140,1
4	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	26,6	38,9	41,0	43,1	45,5	195,0



Lampiran

LAMPIRAN-1

Matriks Kinerja dan Pendanaan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Tahun 2015-2019

LAMPIRAN-1: MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KESDM TAHUN 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Alokasi (dalam miliar rupiah)	Total Alokasi 2015-2019 (Rp. Miliar)
PROGRAM: PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN														
Meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal, aman, dan ramah lingkungan														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		1. Rasio Efisiensi (%)	87	90	93	95	97							
		2. Rasio Desa Berlistrik (%)	98	99	99	100	100							
		3. Infrastruktur Ketenagalistrikan : - Peningkatan kapasitas pembangkit (tidak termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) (APBN & Non APBN) - Peningkatan Penyediaan Tenaga Listrik (APBN & Non APBN) - Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi : - Persentase Pembangkit (%) - Persentase Penyaluran (%) 5. Konsumsi listrik perkapita (kWh) 6. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (%) 7. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik 8. Subsidi Listrik (Tribun Rp.) 9. Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan (Miliar US\$) 10. Regulasi Bidang Ketenagalistrikan (Peraturan)	3.762	4.212	6.389	9.237	19.319							
			11.005	10.721	10.986	7.759	5.417							
			90	90	90	90	90							
			90	90	90	90	90							
			914	985	1.058	1.129	1.200							
			8,90	8,70	8,55	8,45	8,39							
			8,85	6,97	4,66	2,08	2,04							
			66,15	69,76	74,90	80,60	89,41							
			11,20	16,40	20,40	19,60	15,90							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		1. Waktu penyelesaian permohonan Wilayah Usaha (dari kawat)	5	5	5	5	5							
		2. Konsep/Rekomendasi Arah Usaha Penyediaan Tenaga	2	2	2	2	2							
		3. Perencanaan Kawat di Bidang Ketenagalistrikan (Kawat)	2	2	2	2	2							
		4. Penetapan Harga jual Tenaga Listrik (Penetapan)	20	20	20	20	20							
		5. Penetapan Susut Jaringan (Penetapan)	4	4	4	4	4							
		6. Fasilitas Peningkatan Penyaluran Konsumen Listrik (% yang	80	80	80	80	80							
		7. Penetapan Nilai Tingkat Biaya Pelayanan PT PLN (Penetapan)	1	1	1	1	1							
		8. Fasilitas Persetujuan antar Petaku Usaha dan / atau Pengguna Usaha Tenaga Listrik (% yang Ditundakan)	80	80	80	80	80							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		9. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Kelistrikan Nasional. Istisem	22	22	22	22	22							
		10. Pengendalian pemakaian BBM di bidang pembangkitan tenaga listrik (%) ---- QUICKWINS	8,85%	6,97%	4,66%	2,00%	2,04%							
		- Pemantauan dan verifikasi penggunaan BBM untuk pembangkit (Kegiatan)	1	1	1	1	1							
		- Koordinasi dalam rangka pengawasan efisiensi penggunaan batubara untuk pembangkit tenaga listrik (Kegiatan)	1	1	1	1	1							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		11. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (izin)	24	24	24	24	24							
		- Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara	24	24	24	24	24							
		- Monitoring Pertelesian Proyek Pembangkit oleh 25 IPR Yang	1	1	1	1	1							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		12. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (izin)	24	24	24	24	24							
		- Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara	24	24	24	24	24							
		- Monitoring Pertelesian Proyek Pembangkit oleh 25 IPR Yang	1	1	1	1	1							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		13. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (izin)	24	24	24	24	24							
		- Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara	24	24	24	24	24							
		- Monitoring Pertelesian Proyek Pembangkit oleh 25 IPR Yang	1	1	1	1	1							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		14. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (izin)	24	24	24	24	24							
		- Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara	24	24	24	24	24							
		- Monitoring Pertelesian Proyek Pembangkit oleh 25 IPR Yang	1	1	1	1	1							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		15. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (izin)	24	24	24	24	24							
		- Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara	24	24	24	24	24							
		- Monitoring Pertelesian Proyek Pembangkit oleh 25 IPR Yang	1	1	1	1	1							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		16. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (izin)	24	24	24	24	24							
		- Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara	24	24	24	24	24							
		- Monitoring Pertelesian Proyek Pembangkit oleh 25 IPR Yang	1	1	1	1	1							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		17. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (izin)	24	24	24	24	24							
		- Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara	24	24	24	24	24							
		- Monitoring Pertelesian Proyek Pembangkit oleh 25 IPR Yang	1	1	1	1	1							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		18. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (izin)	24	24	24	24	24							
		- Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara	24	24	24	24	24							
		- Monitoring Pertelesian Proyek Pembangkit oleh 25 IPR Yang	1	1	1	1	1							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		19. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (izin)	24	24	24	24	24							
		- Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara	24	24	24	24	24							
		- Monitoring Pertelesian Proyek Pembangkit oleh 25 IPR Yang	1	1	1	1	1							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		20. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (izin)	24	24	24	24	24							
		- Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara	24	24	24	24	24							
		- Monitoring Pertelesian Proyek Pembangkit oleh 25 IPR Yang	1	1	1	1	1							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		21. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (izin)	24	24	24	24	24							
		- Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara	24	24	24	24	24							
		- Monitoring Pertelesian Proyek Pembangkit oleh 25 IPR Yang	1	1	1	1	1							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Terbentuknya pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatkan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga		22. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (izin)	24	24	24	24	24							
		- Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara	24	24	24	24	24							
		- Monitoring Pertelesian Proyek Pembangkit oleh 25 IPR Yang	1	1	1	1	1							
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Usaha Peny														

Program/ Kegiatan	Sasaran	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp. Miliar)
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan: Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	Terpenuhi kebutuhan Tenaga Listrik dan Meningkatkan Rasio Tersedianya dukungan dan fasilitasi bagi percepatan pembangunan	12 Usulan Penetapan Subsidi Listrik (Usulan penetapan)	2	2	2	2	2	6,2	8,0	8,4	8,8	9,2	-
		- Penetapan subsidi listrik (Dokumen)	1	1	1	1	1	4,2	7,7	8,1	8,5	8,9	-
		- Monitoring dan Evaluasi Subsidi Listrik Bagi Pelanggan 450 VA dan	1	1	1	1	1	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	-
								4.307,9	5.142,3	4.995,7	5.070,4	5.354,3	24.870,6
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Pelayanan yang Optimal Baik Administratif maupun Teknis Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Di Dfren	1 Pemantauan, Analisa dan Evaluasi Program Ketenagalistrikan	9	9	9	9	9	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	-
		2 Koordinasi Kesiapsiagaan Ketenagalistrikan (Kesiapsiagaan)	8	8	8	8	8	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	-
								1.191,2	988,4	248,8	43,5	26,4	2.498,2
		3 Fasilitas pembangunan pembangkit listrik (MW) - QUICKWINS	3.782	4.212	6.389	9.217	19.319	30,0	35,0	35,0	-	-	-
		- APBN (MW)						30,0	35,0	35,0	-	-	-
		- RAPBNP 2015 (MW)									-	-	-
		- Non APBN (MW)									-	-	-
		4 Fasilitas pembangunan Gardu Induk (Baranitas terpasang)	26.846	20.293	22.910	21.940	14.470	792,3	713,4	99,2	10,1	-	-
		- APBN (MVA)	240	-	1.780	2.110	620	-	-	-	-	-	-
		- Non APBN (MVA)	26.606	20.293	21.130	19.830	13.850	-	-	-	-	-	-
5 Fasilitas pembangunan Jaringan Transmisi (panjang terpasang) (APBN & Non APBN) (KMSI)	11.805	10.721	10.906	7.759	5.417	349,8	216,5	90,2	-	-	-		
6 Pemantauan Program Ketenagalistrikan (Dokumen)	48	48	48	48	48	19,1	23,4	24,4	25,4	26,4	-		
- Penetapan program Ketenagalistrikan (Dokumen)	45	44	44	44	44	14,6	18,9	19,9	20,9	21,9	-		
- Fasilitas dan Koordinasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (Dokumen) - QUICKWINS	3	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-		
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Pelayanan yang Optimal Baik Administratif maupun Teknis Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Di Dfren						2.834,4	3.934,4	4.526,9	4.806,4	5.106,9	21.209,0	
		7 Fasilitas pembangunan Jaringan Distribusi (APBN & Non APBN) (KMSI) - QUICKWINS	29.417,4	31.134,1	32.609	32.909	33.901	2.425,7	3.326,1	3.829,2	4.066,6	4.321,2	-
		- Baseline (kms)	20.082	31.134	32.609	32.909	33.901	2.015,8	3.326,1	3.829,2	4.066,6	4.321,2	-
		- APBN.P 2015 (kms)	1.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Fasilitas pembangunan Gardu Distribusi (Kapastitas terpasang) (APBN & Non APBN) (MVA) - QUICKWINS	3.913,9	4.125,0	4.250,0	4.350,0	4.350,0	408,7	608,3	697,7	739,8	785,6	-		
- Baseline (MVA)	3.885	4.125	4.250	4.350	4.350	337,6	608,3	697,7	739,8	785,6	-		
- APBN.P 2015 (MVA)	29	-	-	-	-	273,1	210,0	210,0	210,0	210,0	1.113,1		
Kegiatan: Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Meningkatnya Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Ketenagalistrikan	9 Program Instalasi Listrik Gratis untuk Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu (RTS) - QUICKWINS	121.389	93.333	93.333	93.333	93.333	273,1	210,0	210,0	210,0	210,0	-
		- Baseline (RTS)	93.323	93.333	93.333	93.333	93.333	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	-
		- APBN.P 2015 (RTS)	28.066	-	-	-	-	28,0	25,9	27,3	29,2	29,7	140,1
													140,1
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Pelayanan yang Optimal Baik Administratif maupun Teknis Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Di Dfren	1 Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI)	15	15	15	15	15	3,8	6,0	6,2	6,6	6,9	-
		2 Sertifikasi Lait Operasi Instalasi Persewaan Tenaga Listrik	300	330	360	390	420	7,7	8,0	8,1	9,3	9,6	-
		3 Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik)	100	100	100	100	100	2,3	3,6	3,8	4,0	4,2	-
		4 Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik	4	4	4	4	4	2,5	2,7	2,8	2,9	3,1	-
		5 Peningkatan Indeks Kepuasan Pembangkit Listrik (%)	30	30	30	35	35	2,0	2,2	2,4	2,6	2,9	-
		6 Inspeksi Instalasi Tenaga Listrik (Grid Terkoneksi)	55	55	60	65	70	4,4	3,4	3,6	3,8	4,0	-
		7 Output Cadangan	1	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-
								26,6	38,9	41,0	43,1	45,5	195,0
								-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-

Program/ Kegiatan	Sasaran	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp. Miliar)
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
6.		Pelayanan Pengelolaan Aset Barang Milik Negara Bidang	4	4	4	4	4	2,1	2,8	2,9	3,1	3,2	-
7.		Perencanaan, Pembinaan, dan Manajemen Kepegawaian	14	14	14	14	14	1,9	10,3	10,8	11,4	12,0	-
8.		Pelayanan Umum Kerumahaanraan, Perencanaan, dan Tata	10	10	10	10	10	8,5	7,3	7,8	8,4	9,0	-

LAMPIRAN-2

Matriks Kerangka Regulasi
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Tahun 2015-2019

No	Legislasi/Regulasi	Arah Kerangka Regulasi, Latar Belakang dan Urgensi	Hal-hal yang diatur dan substansi pengaturan
Prakarsa Ditjen Ketenagalistrikan			
1	RPermen tentang Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik, Harga Jual Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014	Pengaturan tata cara permohonan persetujuan/penetapan tariff tenaga listrik untuk izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri
2	RPermen tentang Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan	Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan mengacu kepada: 1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 3. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014	Penetapan dan pemberlakuan standarisasi bidang Ketenagalistrikan
3	RPermen tentang Aturan Sistem Jaringan Tenaga Listrik Kalimantan	1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014	Peraturan, persyaratan dan standard untuk menjamin keamanan, keandalan serta pengoperasian dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di sistem Kalimantan
4	RPermen tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan	UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Pedoman berkaitan dengan Tata cara Penyusunan RUK
5	RPermen tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Arus Searah (SUTTAS) dan Saluran Udara Tegangan EkstraTinggi (SUTET) Arus Bolak Balik	1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014	Ruang bebas dan jarak beban minimum merupakan batasan yang wajib dipenuhi sebagai pedoman bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pembangunan SUTT dan SUTET serta menentukan obyek kompensasi tanah, bangunan dan tanaman di bawah SUTT atau SUTET

No	Legislasi/Regulasi	Arah Kerangka Regulasi, Latar Belakang dan Urgensi	Hal-hal yang diatur dan substansi pengaturan
6	RPermen tentang Tata Cara Keberterimaan Sertifikat Produk dan Laporan Hasil Uji Produk Peralatan Tenaga Listrik dari Negara ASEAN	1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014	Dalam rangka AFTA, telah disepakati saling keberterimaan hasil uji dan sertifikat produk untuk peralatan listrik dan elektronika antar negara ASEAN Rancangan Permen tersebut untuk mengatur mekanisme keberterimaan sertifikat produk dan hasil uji tersebut oleh Lembaga Sertifikasi Produk dalam negeri terhadap sertifikat produk dan laporan hasil uji dari negara Asean lain
7	RPermen tentang Keselamatan Ketenagalistrikan	1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014	Dalam rangka AFTA, telah disepakati saling keberterimaan hasil uji dan sertifikat produk untuk peralatan listrik dan elektronika antar negara ASEAN Rancangan Permen tersebut untuk mengatur mekanisme keberterimaan sertifikat produk dan hasil uji tersebut oleh Lembaga Sertifikasi Produk dalam negeri terhadap sertifikat produk dan laporan hasil uji dari negara Asean lain
8	RPermen tentang Perubahan Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa Bali	1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014	Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa Bali
9	RPermen tentang Perubahan Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera	1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014	Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera
10	RPermen tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
11	RPermen tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan PT PLN (Persero)	1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014	Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan PT PLN (Persero)

No	Legislasi/Regulasi	Arah Kerangka Regulasi, Latar Belakang dan Urgensi	Hal-hal yang diatur dan substansi pengaturan
12	RPermen tentang Aturan Sistem Jaringan Tenaga Listrik Sulawesi	1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014	Peraturan, persyaratan dan standard untuk menjamin keamanan, keandalan serta pengoperasian dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di sistem Sulawesi

LAMPIRAN-3

Target Kinerja Tahun 2015 – 2019,
RPJMN dan RUPTL

**Perbandingan Target RPJMN (2015-2019) & RUPTL (2015-2024)
Sebagai Acuan dalam Penentuan Target Renstra KESDM 2015-2019**

Indikator	Satuan	Tahun					Total	Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	%	RPJMN	85.00	88.00	91.00	94.00	97.00	
		RUPTL	87.70	91.30	93.60	95.80	97.40	
		RENSTRA	87.35	90.15	92.75	95.15	97.00	Disamakan dengan draft RUKN
2	%	RPJMN	98.00	99.00	99.00	100.00	100.00	
		RUPTL	98.00	98.50	99.00	99.50	100.00	
		RENSTRA	98.00	99.00	99.00	100.00	100.00	Disamakan dengan RPJMN
3	MW	RPJMN	-	2,250	5,909	4,789	18,694	31,642
		RUPTL	3,782	4,212	6,389	9,237	19,319	42,939
		RENSTRA	3,782	4,212	6,389	9,237	19,319	42,939 Disamakan dengan RUPTL
4	KMS	RPJMN	11,805	10,721	10,986	7,759	5,417	46,688
		RUPTL	11,628	10,602	10,930	7,262	5,075	45,497
		RENSTRA	11,805	10,721	10,986	7,759	5,417	46,688 Disamakan dengan RPJMN
5	MVA	RPJMN	11,853	11,694	11,959	8,732	6,390	50,628
		RUPTL	26,666	21,353	26,420	20,510	13,850	108,799
		RENSTRA	26,666	21,353	26,420	20,510	13,850	108,799 Disamakan dengan RUPTL
6	%	RPJMN	8.45	8.39	8.31	8.24	8.18	
		RUPTL	-	-	-	-	-	
		RENSTRA	8.9	8.7	8.55	8.45	8.39	Dirjen
7	%	RPJMN	8.85	6.97	4.66	2.08	2.04	
		RUPTL	11.41	9.32	5.33	2.72	1.75	
		RENSTRA	8.85	6.97	4.66	2.08	2.04	Disamakan dengan RPJMN

8	Subsidi Listrik	Triliun Rp.	RPJMN	68.69	69.76	74.90	80.60	89.41	383	
			RUPTL	-	-	-	-	-		
			RENSTRA	66.15	69.76	74.90	80.60	89.41	381	Untuk Tahun 2015 disamakan dengan APBN-P 2015 sedangkan Tahun 2016-2019 di samakan dengan RPJMN
9	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	RPJMN	914	985	1,058	1,129	1,200		
			RUPTL	-	-	-	-	-		
			RENSTRA	914	985	1,058	1,129	1,200		Disamakan dengan RPJMN
10	Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Miliar US\$	RPJMN	7.19	7.61	6.71	9.97	7.73	39.21	
			RUPTL	11.22	16.38	20.37	19.57	15.89	83.43	
			RENSTRA	11.22	16.38	20.37	19.57	15.89	83.43	Disamakan dengan RUPTL
11	Panjang Jaringan Distribusi	KMS	RPJMN	28,082	29,800	30,000	30,300	31,301	149,483	
			RUPTL	28,800	29,800	30,000	30,300	31,300	150,200	
			RENSTRA	28,800	29,800	30,000	30,300	31,300	150,200	Disamakan dengan RUPTL
12	Kapasitas Gardu Distribusi	MVA	RPJMN	3,885	4,100	4,200	4,300	4,300	20,785	
			RUPTL	3,900	4,100	4,200	4,300	4,300	20,800	
			RENSTRA	3,885	4,100	4,200	4,300	4,300	20,785	Disamakan dengan RPJMN
13	Program Instalasi Listrik Gratis untuk Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu Yang Menerima Program Listrik Gratis	RTS	RPJMN	93,323	93,333	93,333	93,333	93,333	466,655	
			RUPTL	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	465,000	
			RENSTRA	121,399	93,333	93,333	93,333	93,333	494,732	Untuk Tahun 2015 disamakan dengan APBN-P 2015 sedangkan Tahun 2016-2019 di samakan dengan RPJMN
14	Regulasi	JML	RPJMN	-	-	-	-	-	0	Kepmen Kompetensi Tiap Tahun = 5x1, Regulasi lain 11
			RUPTL	-	-	-	-	-	0	Total 16
			RENSTRA	7	3	3	2	1	16	



LAMPIRAN-4

Rencana Pembangunan Pembangkit,
Transmisi, Gardu Induk
Tahun 2015-2019

Rencana Pengembangan Pembangkit Tahun 2015-2019

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASI- TAS (MW)	COD
1	Jawa-Bali	Bali	PLN	PLTMG	Pesanggaran	50.0	2015
2	Jawa-Bali	Bali	PLN	PLTMG	Pesanggaran	50.0	2015
3	Jawa-Bali	Bali	PLN	PLTMG	Pesanggaran	50.0	2015
4	Jawa-Bali	Bali	PLN	PLTMG	Pesanggaran	50.0	2015
5	Jawa-Bali	Bali	Swasta	PLTM	Muara	1.4	2017
6	Jawa-Bali	Bali	Swasta	PLTM	Sambangan	1.9	2018
7	Jawa-Bali	Bali	Swasta	PLTM	Telagawaja	4.0	2019
8	Jawa-Bali	Bali	Swasta	PLTU	Celukan Bawang	130.0	2015
9	Jawa-Bali	Bali	Swasta	PLTU	Celukan Bawang	125.0	2015
10	Jawa-Bali	Bali	Swasta	PLTU	Celukan Bawang	125.0	2015
11	Jawa-Bali	Banten	PLN	PLTU	Lontar Exp	315.0	2018
12	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTGU/MG	Peaker Jawa-Bali 3	500.0	2017
13	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTM	Situmulya	3.0	2015
14	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTM	Bulakan	10.0	2018
15	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTM	Cidano	1.5	2018
16	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTM	Cikidang	2.0	2019
17	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTM	Cisimeut	2.0	2019
18	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTM	Cisungsang II	3.0	2019
19	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTM	Karang Ropong (Cibareno 1)	5.0	2019
20	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTU	Banten	625.0	2016
21	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTU	Jawa-9	600.0	2018
22	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTU	Jawa-5 (FTP2)	1,000.0	2019
23	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTU	Jawa-5 (FTP2)	1,000.0	2019
24	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTU	Jawa-7	1,000.0	2019
25	Jawa-Bali	Banten	Swasta	PLTU	Jawa-7	1,000.0	2019
26	Jawa-Bali	DI Yogyakarta	Swasta	PLTB	Samas	50.0	2019
27	Jawa-Bali	DKI Jakarta	PLN	PLTGU	Muara Karang	500.0	2017
28	Jawa-Bali	DKI Jakarta	PLN	PLTGU	Jawa-2	800.0	2018
29	Jawa-Bali	Jawa Barat	PLN	PLTA	Jatigede (FTP2)	55.0	2019
30	Jawa-Bali	Jawa Barat	PLN	PLTA	Jatigede (FTP2)	55.0	2019
31	Jawa-Bali	Jawa Barat	PLN	PLTGU	Muara Tawar Add-on 2,3,4	650.0	2017
32	Jawa-Bali	Jawa Barat	PLN	PLTGU/MG	Peaker Jawa-Bali 1	400.0	2017
33	Jawa-Bali	Jawa Barat	PLN	PLTU	Indramayu-4 (FTP2)	1,000.0	2019
34	Jawa-Bali	Jawa Barat	PLN	PS	Upper Cisokan Pump Storage (FTP2)	260.0	2019
35	Jawa-Bali	Jawa Barat	PLN	PS	Upper Cisokan Pump Storage (FTP2)	260.0	2019
36	Jawa-Bali	Jawa Barat	PLN	PS	Upper Cisokan Pump Storage (FTP2)	260.0	2019
37	Jawa-Bali	Jawa Barat	PLN	PS	Upper Cisokan Pump Storage (FTP2)	260.0	2019
38	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTA	Rajamandala	47.0	2017
39	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTGU	Jawa-1	800.0	2018
40	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTGU	Jawa-1	800.0	2018
41	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTGU/MG	Peaker Jawa-Bali 4	300.0	2016
42	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTGU/MG	Peaker Jawa-Bali 4	150.0	2017
43	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cirompang	8.0	2015
44	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cilaki	7.4	2015
45	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cisanggiri	3.0	2015
46	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cianten 2	5.0	2016
47	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cianten 1	2.0	2017
48	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Pakenjeng Bawah	5.7	2016
49	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cijampang 1	1.1	2016
50	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cibalapulung	9.0	2017
51	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cilaki 1B	9.7	2017

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASI- TAS (MW)	COD
52	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cimandiri	3.0	2017
53	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cikopo-2	6.2	2017
54	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cicatih	6.4	2017
55	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Kalapa Nunggal	3.0	2017
56	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Pusaka-1	8.8	2017
57	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cibalapulung-2	6.5	2018
58	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cibalapulung-3	6.0	2018
59	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cilaki 1A	3.1	2018
60	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Pakenjeng Atas	3.6	2018
61	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Ciasem	3.0	2018
62	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cikaniki 1	2.5	2019
63	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cikaniki 2	3.0	2019
64	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cikaengan	3.0	2019
65	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Pusaka-3	3.0	2019
66	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cikandang	6.0	2019
67	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Caringin	4.3	2019
68	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Ciarinem	3.0	2019
69	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cianten 1B	6.2	2019
70	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTM	Cikaengan-2	7.2	2019
71	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTP	Kamojang 5 (FTP2)	30.0	2015
72	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTP	Karaha Bodas (FTP2)	30.0	2016
73	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTP	Patuha (FTP2)	55.0	2019
74	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTP	Patuha (FTP2)	55.0	2019
75	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTP	Tangkuban Perahu 1 (FTP2)	55.0	2019
76	Jawa-Bali	Jawa Barat	Swasta	PLTU	Jawa-1 (FTP2)	1,000.0	2019
77	Jawa-Bali	Jawa Tengah	PLN	PLTMG	Karimunjawa	4.0	2016
78	Jawa-Bali	Jawa Tengah	PLN	PLTU	Adipala	660.0	2015
79	Jawa-Bali	Jawa Tengah	PLN	PLTU	Jawa-10	660.0	2019
80	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Kunci Putih	1.0	2017
81	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Logawa Sunyalangu	1.5	2016
82	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Logawa Baseh	3.0	2017
83	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Banjaran Kebonmanis	2.2	2017
84	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Logawa Babakan	1.3	2017
85	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Logawa Baseh Karangpelem	1.9	2017
86	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Palumbungan	1.6	2017
87	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Gelang	0.3	2017
88	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Bendosari	4.0	2018
89	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Pugeran	6.0	2018
90	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Adipasir 2	0.3	2018
91	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Ambal	2.1	2018
92	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Pagarpelah	3.2	2018
93	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Gunung Wugul	3.0	2018
94	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Timbangreja	0.4	2018
95	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Adipasir 1	0.3	2017
96	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Banyumlayu	0.5	2019
97	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTM	Serayu	8.6	2019
98	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTP	Dieng (FTP2)	60.0	2019
99	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTU	Cilacap exp	614.0	2015
100	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTU	Jawa-8	1,000.0	2018
101	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTU	Jawa-4 (FTP2)	1,000.0	2019
102	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTU	Jawa-4 (FTP2)	1,000.0	2019
103	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTU	Jawa Tengah (PPP)	950.0	2019
104	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Swasta	PLTU	Jawa Tengah (PPP)	950.0	2019
105	Jawa-Bali	Jawa Timur	PLN	PLTGU	Grati	300.0	2016

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASI- TAS (MW)	COD
106	Jawa-Bali	Jawa Timur	PLN	PLTGU	Grati Add-on Blok 2	150.0	2016
107	Jawa-Bali	Jawa Timur	PLN	PLTGU	Grati	150.0	2017
108	Jawa-Bali	Jawa Timur	PLN	PLTGU	Jawa-3	800.0	2018
109	Jawa-Bali	Jawa Timur	PLN	PLTGU/MG	Peaker Jawa-Bali 2	500.0	2017
110	Jawa-Bali	Jawa Timur	PLN	PLTU	Tj. Awar-awar	350.0	2016
111	Jawa-Bali	Jawa Timur	Swasta	PLTM	Lodoyo	9.5	2017
112	Jawa-Bali	Jawa Timur	Swasta	PLTM	Pacet	1.5	2019
113	Jawa-Bali	Jawa Timur	Swasta	PLTM	Balelo	4.3	2019
114	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTG	Mobile PP Kalbar	100.0	2016
115	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTM	Melanggar	0.5	2018
116	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTM	Kembayung 2	2.5	2018
117	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTM	Mahap	1.3	2018
118	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTM	Jitan	3.4	2018
119	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTM	Kalis	3.0	2018
120	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTM	Kembayung 1	4.5	2019
121	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTU	Sintang	7.0	2015
122	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTU	Pantai Kura-Kura (FTP1)	27.5	2016
123	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTU	Pantai Kura-Kura (FTP1)	27.5	2016
124	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTU	Parit Baru (FTP1)	50.0	2016
125	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTU	Parit Baru (FTP1)	50.0	2016
126	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTU	Sintang	7.0	2016
127	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTU	Sintang	7.0	2016
128	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTU	Ketapang	10.0	2016
129	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTU	Ketapang	10.0	2016
130	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTU	Parit Baru (FTP2)	50.0	2017
131	Kalimantan	Kalbar	PLN	PLTU	Parit Baru (FTP2)	50.0	2018
132	Kalimantan	Kalbar	Swasta	PLTD	Ketapang CPO	10.0	2017
133	Kalimantan	Kalbar	Swasta	PLTG	Kalbar Peaker	100.0	2019
134	Kalimantan	Kalbar	Swasta	PLTU	Ketapang (IPP)	6.0	2015
135	Kalimantan	Kalbar	Swasta	PLTU	Ketapang (IPP)	6.0	2015
136	Kalimantan	Kalbar	Swasta	PLTU	Ketapang Biomassa	10.0	2017
137	Kalimantan	Kalbar	Swasta	PLTU	Kalbar-1	100.0	2018
138	Kalimantan	Kalbar	Swasta	PLTU	Kalbar-1	100.0	2018
139	Kalimantan	Kalsel	PLN	PLTG	Mobile PP Kalselteng	100.0	2016
140	Kalimantan	Kalsel	PLN	PLTG	Mobile PP Kalselteng	100.0	2016
141	Kalimantan	Kalsel	PLN	PLTG	Kalsel Peaker 1	200.0	2017
142	Kalimantan	Kalsel	PLN	PLTU	Kotabaru	7.0	2015
143	Kalimantan	Kalsel	PLN	PLTU	Kotabaru	7.0	2015
144	Kalimantan	Kalsel	PLN	PLTU	Kalselteng 2	100.0	2019
145	Kalimantan	Kalsel	Swasta	PLTU	Kalsel (FTP2)	100.0	2018
146	Kalimantan	Kalsel	Swasta	PLTU	Kalsel (FTP2)	100.0	2019
147	Kalimantan	Kaltara	PLN	PLTMG	Tanjung Selor	15.0	2016
148	Kalimantan	Kaltara	PLN	PLTMG	Malinau	6.0	2017
149	Kalimantan	Kaltara	PLN	PLTMG	Nunukan 2	10.0	2018
150	Kalimantan	Kaltara	PLN	PLTU	Tanjung Selor	7.0	2015
151	Kalimantan	Kaltara	PLN	PLTU	Tanjung Selor	7.0	2015
152	Kalimantan	Kaltara	PLN	PLTU	Malinau	3.0	2016
153	Kalimantan	Kaltara	PLN	PLTU	Malinau	3.0	2016
154	Kalimantan	Kalteng	PLN	PLTG	Bangkanai (FTP2)	70.0	2017
155	Kalimantan	Kalteng	PLN	PLTG	Bangkanai (FTP2)	70.0	2017
156	Kalimantan	Kalteng	PLN	PLTMG	Bangkanai (FTP2)	140.0	2016
157	Kalimantan	Kalteng	PLN	PLTU	Pulang Pisau (FTP1)	60.0	2015
158	Kalimantan	Kalteng	PLN	PLTU	Pulang Pisau (FTP1)	60.0	2015
159	Kalimantan	Kalteng	PLN	PLTU	Kuala Pambuang	3.0	2016
160	Kalimantan	Kalteng	PLN	PLTU	Kuala Pambuang	3.0	2016
161	Kalimantan	Kalteng	PLN	PLTU	Sampit	25.0	2018
162	Kalimantan	Kalteng	PLN	PLTU	Sampit	25.0	2018

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASI- TAS (MW)	COD
163	Kalimantan	Kalteng	Swasta	PLTU	Kalselteng 1	100.0	2019
164	Kalimantan	Kaltim	PLN	PLTG	Kaltim Peaker 2	100.0	2017
165	Kalimantan	Kaltim	PLN	PLTMG	Mobile PP Kaltimra	30.0	2016
166	Kalimantan	Kaltim	PLN	PLTU	Teluk Balikpapan (FTP1)	110.0	2015
167	Kalimantan	Kaltim	PLN	PLTU	Teluk Balikpapan (FTP1)	110.0	2015
168	Kalimantan	Kaltim	PLN	PLTU	Tanjung Redep	7.0	2015
169	Kalimantan	Kaltim	PLN	PLTU	Tanjung Redep	7.0	2015
170	Kalimantan	Kaltim	Swasta	PLTGU	Senipah (ST)	35.0	2017
171	Kalimantan	Kaltim	Swasta	PLTU	Lati (Ekspansi)	5.0	2016
172	Kalimantan	Kaltim	Swasta	PLTU	Tanah Grogot	7.0	2016
173	Kalimantan	Kaltim	Swasta	PLTU	Tanah Grogot	7.0	2016
174	Kalimantan	Kaltim	Swasta	PLTU	Kaltim (MT)	27.5	2017
175	Kalimantan	Kaltim	Swasta	PLTU	Kaltim (MT)	27.5	2017
176	Kalimantan	Kaltim	Swasta	PLTU	Kaltim (FTP2)	100.0	2018
177	Kalimantan	Kaltim	Swasta	PLTU	Kaltim 4	100.0	2019
178	Kalimantan	Kaltim	Swasta	PLTU	Kaltim (FTP2)	100.0	2019
179	Maluku	Maluku	PLN	PLTM	Nua (Masohi)	4.4	2018
180	Maluku	Maluku	PLN	PLTM	Wae Mala	1.0	2019
181	Maluku	Maluku	PLN	PLTM	Makariki	2.0	2019
182	Maluku	Maluku	PLN	PLTM	Isal 3	2.0	2019
183	Maluku	Maluku	PLN	PLTM	Nua (Masohi)	4.4	2019
184	Maluku	Maluku	PLN	PLTMG	Mobile PP (Ambon)	70.0	2016
185	Maluku	Maluku	PLN	PLTMG	Langgur	20.0	2017
186	Maluku	Maluku	PLN	PLTMG	Namlea	10.0	2017
187	Maluku	Maluku	PLN	PLTMG	Saumlaki	10.0	2017
188	Maluku	Maluku	PLN	PLTMG	Dobo	10.0	2017
189	Maluku	Maluku	PLN	PLTMG	Ambon Peaker	30.0	2018
190	Maluku	Maluku	PLN	PLTMG	Seram Peaker	20.0	2018
191	Maluku	Maluku	PLN	PLTP	Tulehu (FTP2)	10.0	2018
192	Maluku	Maluku	PLN	PLTP	Tulehu (FTP2)	10.0	2019
193	Maluku	Maluku	PLN	PLTU	Wai (FTP1)	15.0	2017
194	Maluku	Maluku	PLN	PLTU	Wai (FTP1)	15.0	2017
195	Maluku	Maluku	Swasta	PLTM	Sapalewa	4.0	2018
196	Maluku	Maluku	Swasta	PLTM	Sapalewa	4.0	2018
197	Maluku	Maluku	Swasta	PLTM	Wai Tina	6.0	2018
198	Maluku	Maluku	Swasta	PLTM	Wai Tina	6.0	2019
199	Maluku	Maluku Utara	PLN	PLTU	Tidore #1 (FTP1)	7.0	2015
201	Maluku	Malut	PLN	PLTMG	Mobile PP (Ternate)	30.0	2016
202	Maluku	Malut	PLN	PLTMG	Mobile PP (Sofifi)	10.0	2016
203	Maluku	Malut	PLN	PLTMG	Mobile PP Tobelo	10.0	2016
204	Maluku	Malut	PLN	PLTMG	Malifut Peaker	5.0	2017
205	Maluku	Malut	PLN	PLTU	Maluku Utara / Tidore (FTP1)	7.0	2015
206	Maluku	Malut	PLN	PLTU	Maluku Utara / Tidore (FTP1)	7.0	2015
207	Maluku	Malut	PLN	PLTU	Sofifi	6.0	2017
208	Nusra	NTB	PLN	PLTG	Mobile PP Lombok (Ampenan)	50.0	2016
209	Nusra	NTB	PLN	PLTGU	Lombok Peaker	150.0	2017
210	Nusra	NTB	PLN	PLTMG	Sumbawa	50.0	2017
211	Nusra	NTB	PLN	PLTMG	Bima	50.0	2017
212	Nusra	NTB	PLN	PLTU	Bima (FTP1)	10.0	2015
213	Nusra	NTB	PLN	PLTU	Lombok (FTP1)	25.0	2015
214	Nusra	NTB	PLN	PLTU	Bima (FTP1)	10.0	2015
215	Nusra	NTB	PLN	PLTU	Sumbawa Barat	7.0	2015
216	Nusra	NTB	PLN	PLTU	Lombok (FTP1)	25.0	2016
217	Nusra	NTB	PLN	PLTU	Sumbawa Barat	7.0	2016
218	Nusra	NTB	PLN	PLTU	Lombok (FTP 2)	50.0	2018
219	Nusra	NTB	PLN	PLTU	Lombok	25.0	2018
220	Nusra	NTB	PLN	PLTU	Lombok	25.0	2018

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASI- TAS (MW)	COD
221	Nusra	NTB	PLN	PLTU	Lombok (FTP 2)	50.0	2019
222	Nusra	NTB	PLN	PLTU	Lombok 2	50.0	2019
223	Nusra	NTB	Swasta	PLTM	Segara 1	1.5	2015
224	Nusra	NTB	Swasta	PLTM	Sedau	1.3	2018
225	Nusra	NTB	Swasta	PLTM	Kokok Babaq	2.3	2018
226	Nusra	NTB	Swasta	PLTM	Brang Rea 2	3.8	2019
227	Nusra	NTB	Swasta	PLTM	Brang Rea 1	2.5	2019
228	Nusra	NTB	Swasta	PLTM	Bintang Bano	8.8	2019
229	Nusra	NTB	Swasta	PLTU	Lombok Timur	25.0	2017
230	Nusra	NTB	Swasta	PLTU	Lombok Timur	25.0	2017
231	Nusra	NTT	PLN	PLTM	Lokomboro 6, 7	0.4	2015
232	Nusra	NTT	PLN	PLTMG	Mobile PP (Kupang)	30.0	2016
233	Nusra	NTT	PLN	PLTMG	Mobile PP Flores	20.0	2016
234	Nusra	NTT	PLN	PLTMG	Maumere Peaker	40.0	2017
235	Nusra	NTT	PLN	PLTMG	Kupang Peaker	40.0	2017
236	Nusra	NTT	PLN	PLTMG	Waingapu	10.0	2018
237	Nusra	NTT	PLN	PLTMG	Alor	10.0	2018
238	Nusra	NTT	PLN	PLTP	Ulumbu 5	5.0	2019
239	Nusra	NTT	PLN	PLTU	Ende (FTP1)	7.0	2015
240	Nusra	NTT	PLN	PLTU	Kupang (FTP1)	16.5	2015
242	Nusra	NTT	PLN	PLTU	Rote Ndao	3.0	2017
243	Nusra	NTT	PLN	PLTU	Rote Ndao	3.0	2017
244	Nusra	NTT	PLN	PLTU	Alor	6.0	2017
245	Nusra	NTT	PLN	PLTU	Atambua	24.0	2018
246	Nusra	NTT	PLN	PLTU	Timor 1	25.0	2018
247	Nusra	NTT	PLN	PLTU	Timor 1	25.0	2019
248	Nusra	NTT	Swasta	PLTM	Wae Roa - Ngada	0.4	2015
249	Nusra	NTT	Swasta	PLTM	Harunda	1.6	2017
250	Nusra	NTT	Swasta	PLTM	Sita - Borong	1.0	2017
251	Nusra	NTT	Swasta	PLTP	Mataloko (FTP 2)	20.0	2019
252	Nusra	NTT	Swasta	PLTP	Atadei (FTP 2)	5.0	2019
253	Nusra	NTT	Swasta	PLTU	Kupang	15.0	2016
254	Nusra	NTT	Swasta	PLTU	Kupang	15.0	2016
255	Papua	Pabar	PLN	PLTM	Kombemur	3.3	2017
256	Papua	Pabar	PLN	PLTM	Kombemur	3.3	2017
257	Papua	Pabar	PLN	PLTM	Ransiki	2.4	2018
258	Papua	Pabar	PLN	PLTM	Waigo	1.0	2017
259	Papua	Pabar	PLN	PLTMG	Mobile PP (Manokwari)	20.0	2016
260	Papua	Pabar	PLN	PLTMG	Fak-Fak	10.0	2017
261	Papua	Pabar	PLN	PLTMG	Bintuni	10.0	2018
262	Papua	Pabar	Swasta	PLTU	Klalin	15.0	2018
263	Papua	Pabar	Swasta	PLTU	Andai	7.0	2018
264	Papua	Pabar	Swasta	PLTU	Andai	7.0	2018
265	Papua	Pabar	Swasta	PLTU	Klalin	15.0	2018
266	Papua	Papua	PLN	PLTA	Orya (Genyem)	10.0	2015
267	Papua	Papua	PLN	PLTA	Orya (Genyem)	10.0	2015
268	Papua	Papua	PLN	PLTM	Mariarotu I	1.3	2017
269	Papua	Papua	PLN	PLTM	Kalibumi I (APBN)	2.6	2017
270	Papua	Papua	PLN	PLTM	Mariarotu II	1.3	2018
271	Papua	Papua	PLN	PLTM	Kalibumi II	2.5	2018
272	Papua	Papua	PLN	PLTM	Amai	1.4	2018
273	Papua	Papua	PLN	PLTMG	Mobile PP (Jayapura)	50.0	2016
274	Papua	Papua	PLN	PLTMG	Serui	10.0	2017
275	Papua	Papua	PLN	PLTMG	Timika	10.0	2017
276	Papua	Papua	PLN	PLTMG	Biak	15.0	2017
277	Papua	Papua	PLN	PLTMG	Merauke	20.0	2017
278	Papua	Papua	PLN	PLTMG	Nabire	20.0	2017

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASI- TAS (MW)	COD
279	Papua	Papua	PLN	PLTMG	Jayapura Peaker	40.0	2018
280	Papua	Papua	PLN	PLTU	Jayapura (FTP1) - Holtekamp	10.0	2015
281	Papua	Papua	PLN	PLTU	Jayapura (FTP1) - Holtekamp	10.0	2015
282	Papua	Papua	PLN	PLTU	Timika	7.0	2016
283	Papua	Papua	PLN	PLTU	Timika	7.0	2016
284	Papua	Papua	PLN	PLTU	Timika	7.0	2017
285	Papua	Papua	PLN	PLTU	Timika	7.0	2017
286	Papua	Papua	Swasta	PLTM	Walesi Blok II	1.0	2018
287	Papua	Papua	Swasta	PLTM	Walesi Blok II	1.0	2018
288	Papua	Papua	Swasta	PLTM	Walesi Blok II	1.0	2018
289	Papua	Papua	Swasta	PLTM	Walesi Blok II	1.0	2018
290	Papua	Papua	Swasta	PLTM	Walesi Blok II	1.0	2018
291	Papua	Papua	Swasta	PLTM	Walesi Blok II	1.0	2018
292	Papua	Papua	Swasta	PLTU	Biak	7.0	2018
293	Papua	Papua	Swasta	PLTU	Biak	7.0	2018
294	Papua	Papua	Swasta	PLTU	Nabire - Kalibobo	7.0	2018
295	Papua	Papua	Swasta	PLTU	Nabire - Kalibobo	7.0	2018
296	Papua	Papua	Swasta	PLTU	Jayapura - Skouw	15.0	2019
297	Papua	Papua	Swasta	PLTU	Jayapura - Skouw	15.0	2019
298	Papua	Papua	Swasta	PLTU-Bi	Merauke Biomassa	10.0	2019
299	Sulawesi	Gorontalo	PLN	PLTG	Gorontalo Peaker	100.0	2018
300	Sulawesi	Gorontalo	PLN	PLTU	Gorontalo (FTP1)	25.0	2016
301	Sulawesi	Gorontalo	PLN	PLTU	Gorontalo (FTP1)	25.0	2017
302	Sulawesi	Gorontalo	Swasta	PLTM	Taludaa	3.0	2017
303	Sulawesi	Gorontalo	Swasta	PLTM	Iya	2.0	2017
304	Sulawesi	Gorontalo	Swasta	PLTU	Gorontalo Energy	7.0	2017
305	Sulawesi	Gorontalo	Swasta	PLTU	Gorontalo Energy	7.0	2017
306	Sulawesi	Gorontalo	Swasta	PLTU	Sulbagut 3	50.0	2019
307	Sulawesi	Gorontalo	Swasta	PLTU	Sulbagut 1	50.0	2019
308	Sulawesi	Sulbar	Swasta	PLTU	Mamuju	25.0	2017
309	Sulawesi	Sulbar	Swasta	PLTU	Mamuju	25.0	2017
310	Sulawesi	Sulsel	PLN	PLTG	Mobile PP Sulsel (Tello)	50.0	2016
311	Sulawesi	Sulsel	PLN	PLTGU	Makassar Peaker	300.0	2017
312	Sulawesi	Sulsel	PLN	PLTGU	Makassar Peaker	150.0	2018
313	Sulawesi	Sulsel	PLN	PLTGU	Sulsel Peaker	300.0	2018
314	Sulawesi	Sulsel	PLN	PLTGU	Sulsel Peaker	150.0	2019
315	Sulawesi	Sulsel	PLN	PLTMG	Mobile PP Sulsel (Tallo Lama)	100.0	2016
316	Sulawesi	Sulsel	PLN	PLTMG	Selayar	10.0	2017
317	Sulawesi	Sulsel	PLN	PLTU	Punagaya (FTP2)	100.0	2017
318	Sulawesi	Sulsel	PLN	PLTU	Punagaya (FTP2)	100.0	2018
319	Sulawesi	Sulsel	PLN	PLTU	Sulsel Barru - 2	100.0	2018
320	Sulawesi	Sulsel	PLN	PLTU	Sulsel 2	200.0	2019
321	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Ussu Malili	3.0	2015
322	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Siteba	7.5	2015
323	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Tombolo Pao	2.0	2017
324	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Bantaeng 1	4.2	2017
325	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Bungin III	5.0	2017
326	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Datara	7.0	2017
327	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Belajen	8.3	2017
328	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Pasui 2	6.0	2018
329	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Pongbatik	3.0	2018
330	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Mallawa	5.0	2018
331	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Baliase	9.0	2018
332	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Pasui	2.0	2019
333	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Malua	5.0	2017
334	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTM	Kondongan	3.0	2019
335	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTMG	Wajo	20.0	2016

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASI- TAS (MW)	COD
336	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTU	Jeneponto 2	125.0	2018
337	Sulawesi	Sulsel	Swasta	PLTU	Jeneponto 2	125.0	2019
338	Sulawesi	Sulteng	PLN	PLTM	Buleleng	1.2	2016
339	Sulawesi	Sulteng	PLN	PLTU	Ampana	3.0	2016
340	Sulawesi	Sulteng	PLN	PLTU	Ampana	3.0	2016
341	Sulawesi	Sulteng	PLN	PLTU	Palu 3	50.0	2018
342	Sulawesi	Sulteng	PLN	PLTU	Palu 3	50.0	2018
343	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTM	Biak I	1.5	2017
344	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTM	Biak II	1.3	2017
345	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTM	Biak III	1.2	2017
346	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTM	Alani	5.6	2017
347	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTM	Halulai	1.2	2018
348	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTM	Tomasa	10.0	2018
349	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTM	Korokabalo	2.5	2018
350	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTM	Bongkasoa	1.4	2018
351	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTM	Pono	6.0	2019
352	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTM	Bambalo 2	3.0	2019
353	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTM	Bambalo II	1.8	2019
354	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTMG	Luwuk	40.0	2017
355	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTU	Tawaeli (Ekspansi)	15.0	2016
356	Sulawesi	Sulteng	Swasta	PLTU	Tawaeli (Ekspansi)	15.0	2016
357	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTG	Mobile PP Sultra (Kendari)	50.0	2016
358	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTM	Rongi	0.8	2016
359	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTM	Lapai 2	4.0	2016
360	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTM	Riorita	0.5	2019
361	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTM	Toaha	0.5	2019
362	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTMG	Bau-Bau	30.0	2016
363	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTMG	Mobile PP Wangi-Wangi	5.0	2016
364	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTMG	Mobile PP Bombana	10.0	2016
365	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTMG	Mobile PP Kolaka Utara	5.0	2016
366	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTU	Kendari (Ekspansi)	10.0	2015
367	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTU	Wangi-Wangi	3.0	2017
368	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTU	Wangi-Wangi	3.0	2017
369	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTU	Bau-Bau	25.0	2019
370	Sulawesi	Sultra	PLN	PLTU	Bau-Bau	25.0	2019
371	Sulawesi	Sultra	Swasta	PLTU	Bau-Bau	7.0	2015
372	Sulawesi	Sultra	Swasta	PLTU	Bau-Bau	7.0	2015
373	Sulawesi	Sultra	Swasta	PLTU	Kendari 3	50.0	2019
374	Sulawesi	Sultra	Swasta	PLTU	Kendari 3	50.0	2019
375	Sulawesi	Sulut	PLN	PLTG	Mobile PP Sulbagut (Amurang)	100.0	2016
376	Sulawesi	Sulut	PLN	PLTG	Minahasa Peaker	150.0	2017
377	Sulawesi	Sulut	PLN	PLTM	Lelipang	0.5	2018
378	Sulawesi	Sulut	PLN	PLTMG	Tahuna	10.0	2018
379	Sulawesi	Sulut	PLN	PLTU	Talaud	3.0	2017
380	Sulawesi	Sulut	PLN	PLTU	Talaud	3.0	2017
381	Sulawesi	Sulut	PLN	PLTU	Amurang	25.0	2017
382	Sulawesi	Sulut	PLN	PLTU	Amurang	25.0	2017
383	Sulawesi	Sulut	PLN	PLTU	Sulut 1	25.0	2018
384	Sulawesi	Sulut	PLN	PLTU	Sulut 1	25.0	2018
385	Sulawesi	Sulut	Swasta	PLTM	Duminanga	3.5	2017
386	Sulawesi	Sulut	Swasta	PLTM	Duminanga	0.5	2018
387	Sulawesi	Sulut	Swasta	PLTM	Pidung	2.0	2019
388	Sulawesi	Sulut	Swasta	PLTM	Ranowangko	2.2	2019
389	Sulawesi	Sulut	Swasta	PLTP	Lahendong V (FTP 2)	20.0	2017
390	Sulawesi	Sulut	Swasta	PLTP	Lahendong VI (FTP 2)	20.0	2018
391	Sulawesi	Sulut	Swasta	PLTU	Sulut 3	50.0	2019
392	Sumatera	Aceh	PLN	PLTA	Peusangan 1-2	88.0	2018

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASI- TAS (MW)	COD
393	Sumatera	Aceh	PLN	PLTG	Arun (Peaker)	200.0	2015
394	Sumatera	Aceh	PLN	PLTG	Sabang	4.0	2017
395	Sumatera	Aceh	PLN	PLTGU	Sumbagut-2 Peaker	250.0	2017
396	Sumatera	Aceh	PLN	PLTU	Meulaboh #3,4	200.0	2019
397	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTA	Redelong	18.0	2019
398	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTM	Sabulussalam	7.0	2017
399	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTM	Lawe Gurah	5.0	2017
400	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTM	Lawe Sikap	7.0	2017
401	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTM	Lawe Mamas	7.0	2017
402	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTM	Bidin 1	6.6	2017
403	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTM	Ketol A	9.9	2017
404	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTM	Tembolon	3.1	2017
405	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTM	Kerpap	2.0	2017
406	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTM	Kr Isep	10.0	2017
407	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTM	Lumut	10.0	2018
408	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTP	Jaboi (FTP2)	5.0	2019
409	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTS	Sinabang	2.0	2016
410	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTS	Sabang	1.0	2016
411	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTS	Singkil	1.0	2016
412	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTU	Sinabang	7.0	2018
413	Sumatera	Aceh	Swasta	PLTU	Sinabang	7.0	2019
414	Sumatera	Babel	PLN	PLTG	Mobile PP Air Anyer	50.0	2016
415	Sumatera	Babel	PLN	PLTU	Air Anyer (FTP1)	30.0	2015
416	Sumatera	Babel	PLN	PLTU	Belitung Baru (FTP1)	16.5	2015
418	Sumatera	Babel	Swasta	PLTG	Belitung Peaker	30.0	2018
419	Sumatera	Babel	Swasta	PLTG	Bangka Peaker-1	50.0	2018
420	Sumatera	Babel	Swasta	PLTG	Bangka Peaker-1	50.0	2018
421	Sumatera	Bengkulu	PLN	PLTP	Hululais (FTP2)	55.0	2019
422	Sumatera	Bengkulu	PLN	PLTU	Bengkulu	200.0	2019
423	Sumatera	Bengkulu	Swasta	PLTA	Air Putih	21.0	2018
424	Sumatera	Bengkulu	Swasta	PLTM	PLTMH Tersebar Sumsel	13.0	2016
425	Sumatera	Bengkulu	Swasta	PLTM	PLTMH Tersebar Sumbar	31.0	2017
426	Sumatera	Bengkulu	Swasta	PLTU	Muko Muko	7.0	2017
427	Sumatera	Bengkulu	Swasta	PLTU	Muko Muko	7.0	2017
428	Sumatera	Jambi	PLN	PLTG	Truck Mounted Tanjung Jabung Timur	100.0	2016
429	Sumatera	Jambi	PLN	PLTG	Jambi Peaker	100.0	2017
430	Sumatera	Jambi	PLN	PLTGU	Batanghari	30.0	2017
431	Sumatera	Jambi	Swasta	PLTU	Jambi	600.0	2019
432	Sumatera	Jambi	Swasta	PLTU	Jambi	600.0	2019
433	Sumatera	Kepri	PLN	PLTG	Tanjung Batu-1	15.0	2016
434	Sumatera	Kepri	PLN	PLTS	Bengkalis	1.5	2015
435	Sumatera	Kepri	PLN	PLTS	Selat Panjang	1.5	2015
436	Sumatera	Kepri	PLN	PLTU	TB. Karimun #2 (FTP1)	7.0	2015
437	Sumatera	Kepri	Swasta	PLTG	TB. Karimun Peaker-1	40.0	2017
438	Sumatera	Kepri	Swasta	PLTG	Dabo Singkep	16.0	2018
439	Sumatera	Kepri	Swasta	PLTG	Natuna-2	25.0	2018
440	Sumatera	Kepri	Swasta	PLTG	Tanjung Pinang 2	30.0	2018
441	Sumatera	Kepri	Swasta	PLTG	Bengkalis	18.0	2018
442	Sumatera	Kepri	Swasta	PLTG	Selat Panjang -1	15.0	2018
443	Sumatera	Kepri	Swasta	PLTS	TB. Karimun	2.5	2016
444	Sumatera	Kepri	Swasta	PLTS	Tanjung Batu	1.0	2016
445	Sumatera	Lampung	PLN	PLTG	Truck Mounted Lampung	100.0	2016
446	Sumatera	Lampung	PLN	PLTG	Lampung Peaker	200.0	2017
448	Sumatera	Lampung	Swasta	PLTA	Semangka (FTP2)	56.0	2018
449	Sumatera	Lampung	Swasta	PLTP	Ulubelu #3,4 (FTP2)	55.0	2016
450	Sumatera	Lampung	Swasta	PLTP	Ulubelu #3,4 (FTP2)	55.0	2017

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	COD
451	Sumatera	Riau	PLN	PLTG	Riau Peaker	100.0	2017
452	Sumatera	Riau	PLN	PLTG	Riau Peaker	100.0	2017
453	Sumatera	Riau	PLN	PLTU	Riau (Amandemen FTP1)	110.0	2015
454	Sumatera	Riau	PLN	PLTU	Riau (Amandemen FTP1)	110.0	2015
455	Sumatera	Riau	Swasta	PLTGU	Riau	90.0	2017
456	Sumatera	Riau	Swasta	PLTGU	Riau	160.0	2018
457	Sumatera	Riau	Swasta	PLTU	Riau Kemitraan (PLN-TNB-PTBA)	600.0	2019
458	Sumatera	Riau	Swasta	PLTU	Riau Kemitraan (PLN-TNB-PTBA)	600.0	2019
459	Sumatera	Sumbar	Swasta	PLTP	Muara Laboh (FTP2)	70.0	2018
460	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTP	Lumut Balai (FTP2)	55.0	2017
461	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTP	Lumut Balai (FTP2)	55.0	2019
462	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTP	Rantau Dadap (FTP2)	110.0	2019
463	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTU	Keban Agung	112.5	2015
464	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTU	Keban Agung	112.5	2015
465	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTU	Sumsel - 5	150.0	2015
466	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTU	Sumsel - 5	150.0	2016
467	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTU	Sumsel - 7	150.0	2018
468	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTU	Sumsel - 7	150.0	2018
469	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTU	Sumbagsel-1	150.0	2018
470	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTU	Sumsel - 6	300.0	2019
471	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTU	Sumsel-8 MT	600.0	2019
472	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTU	Sumsel-8 MT	600.0	2019
473	Sumatera	Sumsel	Swasta	PLTU	Sumbagsel-1	150.0	2019
474	Sumatera	Sumut	PLN	PLTA	Asahan III (FTP2)	174.0	2019
475	Sumatera	Sumut	PLN	PLTG	Mobile PP Nias	25.0	2016
476	Sumatera	Sumut	PLN	PLTG	Barge Mounted Sumut	100.0	2016
477	Sumatera	Sumut	PLN	PLTG	Barge Mounted Sumut	250.0	2016
478	Sumatera	Sumut	PLN	PLTGU	Sumbagut-1 Peaker	250.0	2018
479	Sumatera	Sumut	PLN	PLTGU	Sumbagut-3 Peaker	250.0	2019
480	Sumatera	Sumut	PLN	PLTGU	Sumbagut-4 Peaker	250.0	2019
481	Sumatera	Sumut	PLN	PLTU	Pangkalan Susu #1 (FTP1)	220.0	2015
482	Sumatera	Sumut	PLN	PLTU	Pangkalan Susu #2 (FTP1)	220.0	2015
483	Sumatera	Sumut	PLN	PLTU	Nias (FTP2)	7.0	2016
484	Sumatera	Sumut	PLN	PLTU	Nias (FTP2)	7.0	2016
485	Sumatera	Sumut	PLN	PLTU	Nias (FTP2)	7.0	2016
486	Sumatera	Sumut	PLN	PLTU	Pangkalan Susu #4 (FTP2)	200.0	2018
487	Sumatera	Sumut	PLN	PLTU	Pangkalan Susu #3 (FTP2)	200.0	2019
488	Sumatera	Sumut	Swasta	PLTA	Wampu (FTP2)	45.0	2016
489	Sumatera	Sumut	Swasta	PLTA	Hasang (FTP2)	40.0	2019
490	Sumatera	Sumut	Swasta	PLTA	Sidikalang-1	15.0	2019
491	Sumatera	Sumut	Swasta	PLTM	PLTMH Tersebar Sumut	10.9	2015
492	Sumatera	Sumut	Swasta	PLTM	PLTMH Tersebar Sumut	63.0	2017
493	Sumatera	Sumut	Swasta	PLTM	PLTMH Tersebar Sumut	98.7	2017
494	Sumatera	Sumut	Swasta	PLTP	Sarulla I (FTP2)	110.0	2017
495	Sumatera	Sumut	Swasta	PLTP	Sarulla I (FTP2)	110.0	2018
496	Sumatera	Sumut	Swasta	PLTP	Sarulla I (FTP2)	110.0	2018
497	Sumatera	Sumut	Swasta	PLTU	Sumut-1	300.0	2018
	TOTAL					42,939	

Rencana Pengembangan Jaringan Transmisi 2015 - 2019

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
1	Jawa-Bali	Banten	Bojanegara	Balaraja Baru	500 kV	120	2015
2	Jawa-Bali	Banten	Suralaya Baru	Bojanegara	500 kV	32	2015
3	Jawa-Bali	Banten	PLTU Banten	Inc. (Suralaya Baru-Balaraja)	500 kV	40	2016
4	Jawa-Bali	Banten	Lengkong 500 kV	Inc. (Blrja-Gndul)	500 kV	4	2017
5	Jawa-Bali	Banten	Balaraja	Kembangan	500 kV	80	2017
6	Jawa-Bali	Banten	Bogor X	Tpcut	500 kV DC	220	2019
7	Jawa-Bali	Banten	Bogor X	Inc (Cigon-Cibinong)	500 kV	60	2019
8	Jawa-Bali	Banten	Bogor X	Inc (Depok-Tsmya)	500 kV	6	2019
9	Jawa-Bali	Banten	Tpcut	Ketapang	500 kV DC	80	2019
10	Jawa-Bali	Banten	PLTU Jawa-7	Inc (Suralaya Baru - Balaraja)	500 kV	20	2019
11	Jawa-Bali	Banten	Bojanegara	Balaraja Baru	500 kV	120	2019
12	Jawa-Bali	Banten	Suralaya Baru	Bojanegara	500 kV	32	2019
13	Jawa-Bali	Banten	Balaraja	Gandul	500 kV	92	2019
15	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Bekasi	Tx. Mtawar-Cibinong	500 kV	12	2016
16	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Cawang Baru (GIS)	Gandul	500 kV	40	2017
17	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Kembangan	Durikosambi (GIS)	500 kV	6	2017
18	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Tx Kembangan	Durikosambi (GIS)	500 kV	6	2017
19	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Priok	Muaratawar	500 kV	30	2018
20	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Priok	Muarakarang (GIS)	500 kV	20	2018
21	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Muarakarang (GIS)	Durikosambi (GIS)	500 kV	30	2018
24	Jawa-Bali	Jabar	Tambun 500 kV	Inc. (Bkasi-Cibinong)	500 kV	2	2016
25	Jawa-Bali	Jabar	Bandung Selatan	Inc. (Tasik-Depok)	500 kV	4	2016
26	Jawa-Bali	Jabar	Delta Mas	Inc (Cbatu-Cirata)	500 kV	8	2017
27	Jawa-Bali	Jabar	Cikalong	Dbphi. (Tasik-Depok)	500 kV	4	2017
28	Jawa-Bali	Jabar	Cibatu Baru	Inc (Muaratawar-Cibatu)	500 kV	20	2018
29	Jawa-Bali	Jabar	PLTGU Jawa-1	Cibatu Baru	500 kV	80	2018
30	Jawa-Bali	Jabar	Mandirancan	Bandung Selatan	500 kV	118	2019
31	Jawa-Bali	Jabar	Upper Cisokan PLTA (Kit)	Incomer (Cibng-Sglng)	500 kV	30	2018
32	Jawa-Bali	Jabar	PLTU Jawa-1	Mandirancan	500 kV	116	2019
33	Jawa-Bali	Jabar	Indramayu	Delta Mas	500 kV	260	2019
34	Jawa-Bali	Jabar	Suralaya Lama	Suralaya Baru	500 kV	2	2019
37	Jawa-Bali	Jateng	Rawalo/Kesugihan	Dbphi (Pedan-Tasik)	500 kV	4	2015
38	Jawa-Bali	Jateng	Rawalo/Kesugihan	PLTU Adipala	500 kV	28	2015
39	Jawa-Bali	Jateng	PLTU Cilacap Exp	Adipala	500 kV	10	2015
40	Jawa-Bali	Jateng	Tanjung Jati B	Tx Ungaran	500 kV	260	2016
41	Jawa-Bali	Jateng	Ampel	Inc (Ungaran-Pedan)	500 kV	2	2017
42	Jawa-Bali	Jateng	PLTU Jateng	Pemalang 500 kV	500 kV	40	2019
43	Jawa-Bali	Jateng	PLTU Jawa-12 (KBN)	Inc (Muaratawar - Priok)	500 kV	10	2019
47	Jawa-Bali	Jatim	Surabaya Selatan	Grati	500 kV	160	2015
48	Jawa-Bali	Jatim	Bangil	Inc. (Paiton-Kediri)	500 kV	4	2017
49	Jawa-Bali	Jatim	Paiton	Watu Dodol	500 kV	262	2018
50	Jawa-Bali	Jatim	Watu Dodol	Segararupek	500 kV	8	2018
51	Jawa-Bali	Jatim	Tandes	Gresik	500 kV	24	2018
52	Jawa-Bali	Bali	Gilimanuk	New Antosari	500 kV	185	2018
53	Jawa-Bali	Bali	Segararupek	Gilimanuk	500 kV	20	2018
58	Jawa-Bali	Banten	Bintaro II	Bintaro	150 kV	8	2015
59	Jawa-Bali	Banten	Asahimas II/Cinangka	Inc. (Mnes-Asahi)	150 kV	4	2015
60	Jawa-Bali	Banten	Bayah/Cemindo Gemilang	PLTU Pelabuhan Ratu	150 kV	140	2015
61	Jawa-Bali	Banten	Millenium	Inc. (Lautan-Citra)	150 kV	8	2015
62	Jawa-Bali	Banten	Cilegon Baru II / Kramatwatu	Cilegon Baru	150 kV	5	2015
63	Jawa-Bali	Banten	Cilegon	Serang	150 kV	45	2015

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
64	Jawa-Bali	Banten	Samator KIEC	Cilegon Lama	150 kV	10	2016
65	Jawa-Bali	Banten	Tangerang Baru II	PLTU Lontar	150 kV	26	2016
66	Jawa-Bali	Banten	Citra Baru Steel	Puncak Ardi Mulya II	150 kV	2	2016
67	Jawa-Bali	Banten	Puncak Ardi Mulya II	Inc (Pucam-Kopo)	150 kV	2	2016
68	Jawa-Bali	Banten	Malimping	Saketi Baru	150 kV	80	2016
69	Jawa-Bali	Banten	Bintaro	Serpong	150 kV	18	2016
70	Jawa-Bali	Banten	Lengkong	Serpong	150 kV	12	2016
71	Jawa-Bali	Banten	Balaraja	Citra Habitat	150 kV	24	2016
72	Jawa-Bali	Banten	Kembangan	Kembangan II (GIS)	150 kV	2	2016
73	Jawa-Bali	Banten	Sawangan	Depok/Rawadenok (Depok III)	150 kV	20	2017
74	Jawa-Bali	Banten	Bayah	malimping	150 kV	140	2017
75	Jawa-Bali	Banten	Lengkong II	Inc. Serpong-Lengkong	150 kV	1	2017
76	Jawa-Bali	Banten	Jatake II	Inc. (Jatake-Tangerang Lama)	150 kV	20	2017
77	Jawa-Bali	Banten	Sulindafin	Inc. (Balaraja Lama- Cikupa)	150 kV	10	2017
78	Jawa-Bali	Banten	Sepatan II	Sepatan	150 kV	10	2017
79	Jawa-Bali	Banten	Gajah Tunggal	Pasar Kemis	150 kV	20	2017
80	Jawa-Bali	Banten	PLTGU/MG Peaker Jawa- Bali 3	Cilegon	150 kV	10	2017
81	Jawa-Bali	Banten	Lengkong III/BSD I	Inc.(Serpong-Lengkong II)	150 kV	20	2017
82	Jawa-Bali	Banten	Pasar Kemis II	Inc. (Pasar Kemis- Sepatan)	150 kV	20	2017
83	Jawa-Bali	Banten	Tangerang Baru III	Tangerang Baru II	150 kV	10	2017
84	Jawa-Bali	Banten	Sinar Sahabat	Balaraja Baru	150 kV	30	2017
85	Jawa-Bali	Banten	CSW III (GIS)	Inc. (Kemang - Antasari)	150 kV	20	2018
86	Jawa-Bali	Banten	Balaraja New	Millenium	150 kV	30	2018
87	Jawa-Bali	Banten	Lippo Curug II	Lippo Curug	150 kV	10	2018
88	Jawa-Bali	Banten	Teluk Naga II	Inc.(Lontar-Tgbru-2)	150 kV	20	2018
89	Jawa-Bali	Banten	Tanjung Lesung	PLTU Labuhan	150 kV	70	2018
90	Jawa-Bali	Banten	Bintaro III/Jombang	Inc.(Bntro-Srpng)	150 kV	4	2019
91	Jawa-Bali	Banten	Lengkong IV/BSD 2	Lengkong II	150 kV	10	2019
92	Jawa-Bali	Banten	Kopo II	Inc. (Rangkas-Kopo)	150 kV	20	2019
108	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Kapuk (PIK) (GIS)	Inc (Mkrang-Dksbi)	150 kV	4	2015
109	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Gandul	Serpong	150 kV	40	2015
110	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Harapan Indah (GIS)	Inc.(Mtawar-Bekasi)	150 kV	2	2015
111	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Gandaria (GIS)	TMII (Miniatur)	150 kV	24	2015
112	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Gunung Sahari (GIS)	Kemayoran	150 kV	12	2015
113	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Duren Tiga	Kemang	150 kV	6	2015
114	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Jatake	Maximangando	150 kV	2	2015
115	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Cileungsi II/Jonggol	Cibatu	150 kV	60	2015
116	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Karet Baru	Karet Lama	150 kV	1	2015
117	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Ketapang	Mangga Besar	150 kV	12	2015
118	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Depok	Gandul	150 kV	10	2015
119	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Gandul	Petukangan	150 kV	28	2015
120	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Jatirangon 2/Cibubur	Inc.(Jtngn-Cibng)	150 kV	4	2015
121	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Cakung TownShip	Harapan Indah / Kan- dang Sapi	150 kV	10	2015
122	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Gedung Pola	Manggarai	150 kV	8	2015
123	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Manggarai	Dukuh Atas (GIS)	150 kV	16	2015
124	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Jatiwaringin	Inc. (Pdklp-Jtngn)	150 kV	48	2015
125	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Antasari / CSW 2 / Kemang Village (GIS)	Inc (Drtga/Kemang- Kenvil)	150 kV	20	2015
126	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Durikosambi 2 / Daan Mogot (GIS)	Inc.(Dksbi-Mkrng)	150 kV	2	2015
127	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Plumpang	Gambir Baru	150 kV	10	2015
128	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Muarakarang Lama	Muarakarang Baru	150 kV	2	2016
129	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Pelindo II Priok	Priok Barat	150 kV	11	2016

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
130	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Pelindo II Kalibaru	Marunda	150 kV	10	2016
131	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Semanggi Barat (GIS)	Karet Lama	150 kV	16	2016
132	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Spinmill	Inc. (New Balaraja-Citra)	150 kV	8	2016
133	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Semanggi Barat (GIS)	Semanggi Timur (GIS)	150 kV	6	2016
134	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Cengkareng II/Bandara Soetta	Cengkareng	150 kV	1	2016
135	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Kebon Sirih	Gambir Lama	150 kV	4	2016
136	Jawa-Bali	DKI Jakarta	New Senayan	Senayan	150 kV	12	2016
137	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Pondok Indah II/Cirende	Inc. (PtKng-Gndul)	150 kV	6	2016
138	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Senayan	Danayasa	150 kV	3	2016
139	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Senayan	Danayasa	150 kV	3	2016
140	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Danayasa	Tx (Senayan-Abadi Guna Papan)	150 kV	3	2016
141	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Mampang	Abadi Guna Papan	150 kV	4	2016
142	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Mampang	Abadi Guna Papan	150 kV	4	2016
143	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Abadi Guna Papan	Tx (Danayasa-Mam-pang)	150 kV	4	2016
144	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Petukangan	Bintaro	150 kV	18	2017
145	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Muarakarang	Angke	150 kV	12	2017
146	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Pegangsaan	Penggilingan	150 kV	20	2017
147	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Pulogadung	Penggilingan	150 kV	20	2017
148	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Pondok Kelapa	Tambun	150 kV	28	2017
149	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Gandaria (GIS)	Cibinong	150 kV	24	2017
150	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Depok/Rawadenok (Depok III)	Cimanggis	150 kV	40	2017
151	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Duren Tiga II/Ragunan (GIS)	Cawang Lama	150 kV	20	2017
152	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Duren Tiga II/Ragunan (GIS)	Depok II	150 kV	20	2017
153	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Pulo Gadung II	Pulogadung (GIS)	150 kV	10	2017
154	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Tomang (GIS)	Grogol	150 kV	10	2017
155	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Abadi Guna Papan II	Cawang Lama	150 kV	6	2017
156	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Gambir Lama II (GIS)	Gambir Lama (GIS)	150 kV	2	2017
157	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Lontar	Cikupa	150 kV	60	2017
158	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Semanggi Barat II/Benhil (GIS)	Inc (Karet-Angke)	150 kV	4	2017
159	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Senayan Baru 2 (GIS)	Senayan Baru	150 kV	32	2017
160	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Marunda II	Marunda	150 kV	10	2017
161	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Grogol II	Inc. (Dksbi - Grogol)	150 kV	10	2017
162	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Kebon sirih II (GIS)	Inc. (Gbr Lama - Pulo Mas)	150 kV	20	2017
163	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Plumpang II	Inc. (Priok Barat-Plumpang)	150 kV	28	2018
164	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Danayasa II	Danayasa	150 kV	10	2018
165	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Taman Rasuna 2 / Pengadegan Tmr (GIS)	Taman Rasuna	150 kV	20	2018
166	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Cipinang II/Jatinegara	Inc. (Plmas-Mgrai)	150 kV	20	2018
167	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Durikosambi III/Rawa Buaya	Durikosambi II	150 kV	10	2018
168	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Gandaria II/Mekar Sari	Gandaria	150 kV	30	2018
169	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Kemayoran II (GIS)	Inc. (Kemayoran-Gunung Sahari)	150 kV	6	2018
170	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Penggilingan II (GIS)	Penggilingan (GIS)	150 kV	12	2018
171	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Tigaraksa II	Tigaraksa	150 kV	10	2018
172	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Manggarai II	Taman Rasuna 2 / Pengadegan Tmr (GIS)	150 kV	10	2019
173	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Pondok Indah III/Ciputat	Inc. (Gandul-Serpong)	150 kV	20	2019
174	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Muara Karang III / Kamal	Muarakarang	150 kV	10	2019
209	Jawa-Bali	Jabar	Karangnunggal	Tasikmalaya New	150 kV	32	2015
210	Jawa-Bali	Jabar	Indoliberty	Maligi	150 kV	6	2015
211	Jawa-Bali	Jabar	Braga (GIS)	Cigereleng	150 kV	16	2015
212	Jawa-Bali	Jabar	Cikedung	Inc. (Jtbrg - Hrgls)	150 kV	20	2015
213	Jawa-Bali	Jabar	Cikarang Lippo	Inc. (Cibatu-Gdamekar)	150 kV	2	2015

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
214	Jawa-Bali	Jabar	Kosambi Baru	Bekasi	150 kV	118	2015
215	Jawa-Bali	Jabar	Jatiluhur II	Inc. (Kosambi Baru - Padalarang)	150 kV	92	2015
216	Jawa-Bali	Jabar	Kamojang	Drajat	150 kV	44	2015
217	Jawa-Bali	Jabar	Lagadar	Padalarang	150 kV	22	2015
218	Jawa-Bali	Jabar	Bandung Utara	Padalarang	150 kV	26	2015
219	Jawa-Bali	Jabar	Padalarang	Cibabat	150 kV	40	2015
220	Jawa-Bali	Jabar	Bogor Kota (GIS)	Kedung Badak Baru	150 kV	20	2015
221	Jawa-Bali	Jabar	Cimanggis II/Tengah	Inc. (Kdbdk-Depok/ Rawadenok (Depok III))	150 kV	15	2015
222	Jawa-Bali	Jabar	Gunung Rajapaksi	Inc. double phi (Ckrg- Gdamekar)	150 kV	12	2015
223	Jawa-Bali	Jabar	Sukatani /Gobel	Inc. (Bkasi Utara-Ksbru)	150 kV	20	2015
224	Jawa-Bali	Jabar	Semen Jawa	Inc. (Lembursitu - PLTU Pelabuhan Ratu)	150 kV	4	2015
225	Jawa-Bali	Jabar	PLTP Kamojang	Kamojang	150 kV	2	2015
226	Jawa-Bali	Jabar	Depok II	Inc (Tx. Cimanggis- Rawadenok (Depok III))	150 kV	8	2016
227	Jawa-Bali	Jabar	Cibadak Baru II	PLTU Pelabuhan Ratu	150 kV	140	2016
228	Jawa-Bali	Jabar	Bogor Baru II/Tajur (GIS)	Inc. (Bgbru - Cianjur)	150 kV	0	2016
229	Jawa-Bali	Jabar	Jatiluhur Baru	PLTA Jatiluhur	150 kV	20	2016
230	Jawa-Bali	Jabar	Indomulia Cipta Nusantara	Inc. (Indramayu - Kosambi)	150 kV	12	2016
231	Jawa-Bali	Jabar	Drajat	Garut	150 kV	51	2016
232	Jawa-Bali	Jabar	Arjawinangun Baru	Inc.double phi (Jtbrg- Mdcan)	150 kV	20	2016
233	Jawa-Bali	Jabar	PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 (Bekasi Power)	Sukatani	150 kV	16	2016
234	Jawa-Bali	Jabar	U.Berung New/R.kasumba baru	Ujung Berung	150 kV	20	2016
235	Jawa-Bali	Jabar	U.Berung New/R.kasumba baru	Inc. (Ubrng-Rckek)	150 kV	20	2016
236	Jawa-Bali	Jabar	ITP	Bogor Baru	150 kV	20	2016
237	Jawa-Bali	Jabar	Malangbong Baru	New Tasikmalaya	150 kV	74	2016
238	Jawa-Bali	Jabar	Bekasi	Plumpang	150 kV	16	2016
239	Jawa-Bali	Jabar	Kiaracandong II/Rancanum- pang	Inc. (Krcdg-Ubrng)	150 kV	16	2016
240	Jawa-Bali	Jabar	New Tasikmalaya	Tasik Lama (Tx-Ciamis)	150 kV	128	2016
241	Jawa-Bali	Jabar	Kanci	Inc. (PLTU Kanci- Brebes)	150 kV	24	2016
242	Jawa-Bali	Jabar	Cigereleng	Lagadar	150 kV	33	2016
243	Jawa-Bali	Jabar	Cigereleng	Bandung Selatan II/ Soreang	150 kV	78	2016
244	Jawa-Bali	Jabar	Bekasi Utara/Tarumajaya	Inc. (Bkasi-Ksbru)	150 kV	4	2016
245	Jawa-Bali	Jabar	Air Liquide	Rajapaksi	150 kV	6	2016
246	Jawa-Bali	Jabar	Dayeuhkolot (GIS)	Inc (Bdslt-Cgrlrg)	150 kV	6	2016
247	Jawa-Bali	Jabar	Kadipaten Baru	Inc.double phi (Sragi- Rckek)	150 kV	8	2016
248	Jawa-Bali	Jabar	Pelabuhan Ratu Baru / Jampang Kulon	PLTU Pelabuhan Ratu	150 kV	60	2016
249	Jawa-Bali	Jabar	U.Berung New/R.kasumba baru	Inc. (Cksk-Rckek)	150 kV	3	2016
250	Jawa-Bali	Jabar	Bandung Selatan	Wayang Windu	150 kV	66	2016
251	Jawa-Bali	Jabar	Wayang Windu	Kamojang	150 kV	62	2016
252	Jawa-Bali	Jabar	Kamojang	Drajat	150 kV	28	2016
253	Jawa-Bali	Jabar	Bandung Selatan II/Soreang	Incomer (Cgrlrg-Cnjur)	150 kV	10	2016
254	Jawa-Bali	Jabar	Bekasi II/Pinggir Kali	Bekasi	150 kV	8	2016
255	Jawa-Bali	Jabar	Bunar Baru	Rangkasbitung II	150 kV	72	2016
256	Jawa-Bali	Jabar	Cangkring Baru/Kapetakan	Inc. (Jtbrg-Haurgelis)	150 kV	20	2016
257	Jawa-Bali	Jabar	Cibadak Baru II/Cicurug	Inc (Cbdrn-Ciawi)	150 kV	20	2016
258	Jawa-Bali	Jabar	Cikumpay II/Sadang	Inc. (Crata-Ckpay)	150 kV	20	2016
259	Jawa-Bali	Jabar	Malangbong Baru	Cikijing	150 kV	80	2016

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
260	Jawa-Bali	Jabar	Padalarang Baru II/Ngam-prah	Cirata	150 kV	60	2016
261	Jawa-Bali	Jabar	Padalarang Baru II/Ngam-prah	Padalarang Baru	150 kV	20	2016
262	Jawa-Bali	Jabar	Subang Baru	Inc.(Skmdi-Hrgls)	150 kV	40	2016
263	Jawa-Bali	Jabar	Tambun II	Inc. (Pdklp-Tmbun)	150 kV	60	2016
264	Jawa-Bali	Jabar	Pabuaran	Sukamandi	150 kV	40	2016
265	Jawa-Bali	Jabar	KIIC 2	Pinayungan	150 kV	20	2016
266	Jawa-Bali	Jabar	PLTP Karaha Bodas	Garut	150 kV	20	2016
267	Jawa-Bali	Jabar	Depok III	Depok II	150 kV	8	2017
268	Jawa-Bali	Jabar	Aspek	Cileungsi	70 kV	1	2017
269	Jawa-Bali	Jabar	Purwakarta	Semen Pasific	70 kV	18	2017
270	Jawa-Bali	Jabar	Purwakarta	Kosambi baru	70 kV	23	2017
271	Jawa-Bali	Jabar	Rancaekek	Sunyaragi	150 kV	166	2017
272	Jawa-Bali	Jabar	Bandung Timur Baru	Ujungberung	150 kV	18	2017
273	Jawa-Bali	Jabar	Balongan	Jatibarang	150 kV	34	2017
274	Jawa-Bali	Jabar	Drajat	Tasikmalaya	150 kV	130	2017
275	Jawa-Bali	Jabar	Garut	Tasikmalaya	150 kV	81	2017
276	Jawa-Bali	Jabar	Bandung Selatan	Garut	150 kV	66	2017
277	Jawa-Bali	Jabar	Poncol Baru II/Bj.Menteng	Poncol Baru	150 kV	2	2017
278	Jawa-Bali	Jabar	Poncol Baru II/Bj.Menteng	Tambun	150 kV	22	2017
279	Jawa-Bali	Jabar	PLTA Rajamandala	Inc. (Cnjur-Cgrlg)	150 kV	8	2017
280	Jawa-Bali	Jabar	Kuningan Baru	Inc. (Ckjing - Mdcn)	150 kV	20	2017
281	Jawa-Bali	Jabar	Majalaya Baru	Rancakasumba	150 kV	30	2017
282	Jawa-Bali	Jabar	Kertajati/Kadipaten Baru II	Kadipaten Baru	150 kV	32	2017
283	Jawa-Bali	Jabar	Rengasdengklok Baru/ Cilamaya	Sukamandi	150 kV	40	2017
284	Jawa-Bali	Jabar	Deltamas	Cikarang Lippo	150 kV	31	2017
285	Jawa-Bali	Jabar	Deltamas	KIIC 2	150 kV	22	2017
286	Jawa-Bali	Jabar	AUA/Heksa	Deltamas	150 kV	13	2016
287	Jawa-Bali	Jabar	Sukatani /Gobel	Cikarang	150 kV	10	2017
288	Jawa-Bali	Jabar	Bogor baru	Kedung Badak	150 kV	20	2017
289	Jawa-Bali	Jabar	Muaratawar	Inc. (Harapan Indah- Plumpang)	150 kV	20	2017
290	Jawa-Bali	Jabar	Tanggeung/Cianjur Selatan	Pelabuhan Ratu Baru	150 kV	120	2016
291	Jawa-Bali	Jabar	Cikijing	Mandirancan	150 kV	80	2017
292	Jawa-Bali	Jabar	Sumedang Baru/Tj. Sari	Rancakasumba/New Ujung Berung	150 kV	20	2017
293	Jawa-Bali	Jabar	Bengkong Baru	Inc. (Bdutr-Dgpk)	150 kV	20	2017
294	Jawa-Bali	Jabar	Jababeka II	Inc (Jbeka-Cbatu)	150 kV	20	2017
295	Jawa-Bali	Jabar	Kracak Baru	Kedung Badak	150 kV	20	2017
296	Jawa-Bali	Jabar	Babakan Baru	Inc.(Kanci-Brbes)	150 kV	60	2017
297	Jawa-Bali	Jabar	Teluk Jambe II	AUA	150 kV	28	2018
298	Jawa-Bali	Jabar	Teluk Jambe II	Inc. (Tatajabar - Jati- luhur II)	150 kV	20	2018
299	Jawa-Bali	Jabar	Kosambi Baru II	Inc. (Ksbru - Bkasi)	150 kV	16	2018
300	Jawa-Bali	Jabar	Ciawi Baru II/Cisarua	Inc. (Bgbru-Cnjur)	150 kV	20	2018
301	Jawa-Bali	Jabar	Parakan Kondang Baru	Inc (Rckek-Sragi)	150 kV	20	2018
302	Jawa-Bali	Jabar	Bogor X	Inc. (Bunar-Kracak)	150 kV	8	2017
303	Jawa-Bali	Jabar	Bunar Baru	Kracak Baru	150 kV	30	2018
304	Jawa-Bali	Jabar	Rancakasumba II/Sangian	Rancakasumba	150 kV	20	2018
305	Jawa-Bali	Jabar	Cikalong	Inc (Cgrlg-Lgdar)	150 kV	20	2018
306	Jawa-Bali	Jabar	Cibabat III/Gunung Batu	Padalarang Baru II	150 kV	12	2019
307	Jawa-Bali	Jabar	PLTA Jatigede	Inc. (Rancaekek- Sunyaragi)	150 kV	20	2019
308	Jawa-Bali	Jabar	PLTP Tangkuban Perahu I	Subang Baru	150 kV	15	2019
309	Jawa-Bali	Jabar	Cikande II	Inc. (Serang - Cikande)	150 kV	20	2019
332	Jawa-Bali	Jateng	Sunyaragi	Brebes	150 kV	73	2015
333	Jawa-Bali	Jateng	Kudus	Purwodadi	150 kV	63	2015

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
334	Jawa-Bali	Jateng	Purwodadi	Ungaran	150 kV	68	2015
335	Jawa-Bali	Jateng	Sayung	Inc Tx (Bawen-Tbrok)	150 kV	20	2015
336	Jawa-Bali	Jateng	Tanjung Jati	Sayung	150 kV	120	2015
337	Jawa-Bali	Jateng	Semen Nusantara	Inc. (Kesugihan-Lomanis)	150 kV	4	2015
338	Jawa-Bali	Jateng	New Rawalo/Kesugihan	Rawalo	150 kV	4	2015
339	Jawa-Bali	Jateng	Kesugihan	Gombong	150 kV	4	2015
340	Jawa-Bali	Jateng	Apac inti Corpora	Bawen	150 kV	2	2015
341	Jawa-Bali	Jateng	Sinar Tambang Artalestari	Inc. (Rawalo-Majenang)	150 kV	36	2015
342	Jawa-Bali	Jateng	Weleri	Ungaran	150 kV	76	2015
343	Jawa-Bali	Jateng	Semen Indonesia	Blora	150 kV	16	2015
344	Jawa-Bali	Jateng	Nguter / Rayon Utama Makmur (RUM)	Inc. (Wonogiri-Wonosari)	150 kV	20	2015
345	Jawa-Bali	Jateng	Batang	Weleri	150 kV	62	2016
346	Jawa-Bali	Jateng	Kebasen	Pemalang	150 kV	56	2016
347	Jawa-Bali	Jateng	Kebasen	Brebes	150 kV	30	2016
348	Jawa-Bali	Jateng	Kudus	Jepara	150 kV	53	2016
349	Jawa-Bali	Jateng	Pekalongan	Batang	150 kV	33	2016
350	Jawa-Bali	Jateng	Pemalang	Pekalongan	150 kV	62	2016
351	Jawa-Bali	Jateng	Semen Grobogan	inc. (Mranggen-Purwodadi)	150 kV	20	2016
352	Jawa-Bali	Jateng	Tanjung Jati	Jepara	150 kV	48	2016
353	Jawa-Bali	Jateng	Semen Indonesia Rembang	PLTU Rembang	150 kV	16	2016
354	Jawa-Bali	Jateng	Sritex (Jetis)	Inc. (Wonogiri-Wonosari)	150 kV	24	2016
355	Jawa-Bali	Jateng	Semen Ultratech	Nguntoronadi	150 kV	30	2016
356	Jawa-Bali	Jateng	Kudus II	Inc.(Kudus-Jepara)	150 kV	20	2017
357	Jawa-Bali	Jateng	Sluke II (Smelter Rembang)	PLTU Rembang	150 kV	10	2017
358	Jawa-Bali	Jateng	Pemalang New	(inc Btang-Wleri)	150 kV	40	2017
359	Jawa-Bali	Jateng	Cornal	Inc (Pekalongan-Pemalang)	150 kV	40	2017
360	Jawa-Bali	Jateng	PLTU Tambaklorok (GIS)	Tambaklorok	150 kV	20	2017
361	Jawa-Bali	Jateng	Ampel	Inc. (Bawen-Klaten)	150 kV	20	2017
362	Jawa-Bali	Jateng	Kalibakal II	Inc.(Klbbk-Bmayu)	150 kV	40	2018
363	Jawa-Bali	Jateng	Tegal Kota	Inc.(Kebasen - Brebes)	150 kV	10	2018
364	Jawa-Bali	Jateng	Pati II	Pati	150 kV	20	2018
365	Jawa-Bali	Jateng	PLTP Dieng	Dieng	150 kV	10	2019
366	Jawa-Bali	Jateng	Pandeanlamper II	Pandeanlamper	150 kV	10	2019
367	Jawa-Bali	Jateng	Sanggrahan II/Rajeg	Inc.(Sgrahan-Medari)	150 kV	20	2019
377	Jawa-Bali	DIY	Pedan	Wonosari	150 kV	44	2016
378	Jawa-Bali	DIY	PLTB Samas	Wates	150 kV	46	2019
379	Jawa-Bali	DIY	Kentungan Baru/Kalasan	Inc.(Pedan-Kentungan)	150 kV	20	2019
387	Jawa-Bali	Jatim	Tandes II/Sambi Kerep	Inc.(Waru-Gresik)	150 kV	4	2015
388	Jawa-Bali	Jatim	New Jombang	Jayakertas	150 kV	36	2015
389	Jawa-Bali	Jatim	Surabaya Barat	Driyorejo	150 kV	11	2015
390	Jawa-Bali	Jatim	Cheil Jedang	New Jombang	150 kV	11	2015
391	Jawa-Bali	Jatim	Gresik (GIS)	Gresik (Konv)	150 kV	0	2015
392	Jawa-Bali	Jatim	Sidoarjo	Inc. (Bdran-Bngil)	150 kV	4	2015
393	Jawa-Bali	Jatim	Bambe	Karangpilang	150 kV	10	2015
394	Jawa-Bali	Jatim	Simogunung (GIS)	Inc.(Swan-Waru)	150 kV	20	2016
395	Jawa-Bali	Jatim	Paiton	Kraksaan	150 kV	40	2016
396	Jawa-Bali	Jatim	Kraksaan	Probolinggo	150 kV	60	2016
397	Jawa-Bali	Jatim	New Porong/Gempol	Inc (New Sidoarjo-Bangil)	150 kV	8	2016
398	Jawa-Bali	Jatim	The Master Steel (Semangit Pangeran Jayakarta)	Manyar	70 kV	2	2016
399	Jawa-Bali	Jatim	Grati	Pier	150 kV	64	2016
400	Jawa-Bali	Jatim	Wlingi II	Tulungagung II	150 kV	68	2016
401	Jawa-Bali	Jatim	Tulungagung II	Kediri	150 kV	80	2016

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
402	Jawa-Bali	Jatim	Kalisari	Surabaya Selatan	150 kV	24	2016
403	Jawa-Bali	Jatim	Sukolilo	Kalisari	150 kV	2	2016
404	Jawa-Bali	Jatim	Sekarputih	Kertosono	150 kV	88	2016
405	Jawa-Bali	Jatim	Ujung	Kenjeran	150 kV	17	2016
406	Jawa-Bali	Jatim	Kedinding	Tx Ujung	150 kV	2	2016
407	Jawa-Bali	Jatim	Kedinding	Tx Kenjeran	150 kV	2	2016
408	Jawa-Bali	Jatim	Kedinding	Tx Bangkalan	150 kV	2	2016
409	Jawa-Bali	Jatim	Kediri Baru	Jayakertas/Kertosono	150 kV	64	2016
410	Jawa-Bali	Jatim	Surabaya Steel	Inc. (Krian - Cerme & KasihJatim - Cerme)	150 kV	8	2016
411	Jawa-Bali	Jatim	Java Fortis	Ngimbang	150 kV	30	2016
412	Jawa-Bali	Jatim	Pelindo III	Altaprima	150 kV	128	2016
413	Jawa-Bali	Jatim	Multi Baja Industri	Inc. (Ngimbang-Mliwang)	150 kV	64	2016
414	Jawa-Bali	Jatim	New Buduran/Sedati	Inc.(Bngil-Waru)	150 kV	4	2017
415	Jawa-Bali	Jatim	Cheil Jedang	Ngimbang	150 kV	22	2017
416	Jawa-Bali	Jatim	Bangil	Sidoarjo	150 kV	28	2017
417	Jawa-Bali	Jatim	Babat	Lamongan	150 kV	41	2017
418	Jawa-Bali	Jatim	Lamongan	Segoromadu	150 kV	56	2017
419	Jawa-Bali	Jatim	Cerme	Inc. (Lamongan - Sego-romadu)	150 kV	4	2017
420	Jawa-Bali	Jatim	Bangil New	Bangil	150 kV	40	2017
421	Jawa-Bali	Jatim	Bangil New	Blimbing Baru	150 kV	40	2017
422	Jawa-Bali	Jatim	Bangil New	Lawang/Bulu Kandang	150 kV	40	2017
423	Jawa-Bali	Jatim	Tandes New	Tandes	150 kV	10	2017
424	Jawa-Bali	Jatim	Tandes	Perak	150 kV	18	2017
425	Jawa-Bali	Jatim	Perak	Ujung	150 kV	6	2017
426	Jawa-Bali	Jatim	Darmo Grande	Tandes	150 kV	9	2017
427	Jawa-Bali	Jatim	Sukolilo	Kenjeran	150 kV	9	2017
428	Jawa-Bali	Jatim	Kedung Ombo	Sragen	150 kV	30	2017
429	Jawa-Bali	Jatim	Blimbing Baru	Inc. (Pier-Pakis)	150 kV	60	2017
430	Jawa-Bali	Jatim	Pandaan Baru	Inc. (Bangil-Lawang)	150 kV	40	2017
431	Jawa-Bali	Jatim	Jember II / Arjasa	Inc. (Bondowoso-Jember)	150 kV	20	2017
432	Jawa-Bali	Jatim	New Driyorejo	Inc. (Balongbendo-Sekarputih)	150 kV	20	2019
433	Jawa-Bali	Jatim	Trenggalek Baru	Tulungagung II	150 kV	60	2019
434	Jawa-Bali	Jatim	Jember Selatan/Puger	Jember	150 kV	30	2019
447	Jawa-Bali	Bali	PLTU Celukan Bawang	Kapal	150 kV	140	2015
448	Jawa-Bali	Bali	PLTU Celukan Bawang	Inc. (Pmron-Glnuk)	150 kV	6	2015
449	Jawa-Bali	Bali	GIS Bandara (Tahap-2)	Pesanggaran	150 kV	10	2016
450	Jawa-Bali	Bali	Antosari	New Kapal	150 kV	54	2016
451	Jawa-Bali	Bali	Antosari	Kapal	150 kV	47	2016
452	Jawa-Bali	Bali	Kapal	Pemecutan Kelod	150 kV	14	2016
453	Jawa-Bali	Bali	Kapal	Baturiti	150 kV	76	2016
454	Jawa-Bali	Bali	Negara	Gilimanuk	150 kV	76	2016
455	Jawa-Bali	Bali	Pemecutan Kelod	Nusa Dua	150 kV	17	2016
456	Jawa-Bali	Bali	Sanur II/Padang Galak	Inc.(Gnyar-Sanur)	150 kV	1	2016
457	Jawa-Bali	Bali	Kapal II/Tanah Lot (GIS)	Inc. (Cik Bawang-Kapal)	150 kV	40	2017
458	Jawa-Bali	Bali	Kapal II/Tanah Lot (GIS)	Kapal	150 kV	54	2017
459	Jawa-Bali	Bali	Nusa Dua II/Pecatu	Bandara	150 kV	10	2017
460	Jawa-Bali	Bali	Nusa Dua II/Pecatu	Nusa Dua	150 kV	10	2017
467	Sumatera	Aceh	Sidikalang	Subulussalam	150 kV	111	2015
468	Sumatera	Aceh	Meulaboh	PLTU Meulaboh/Nagan Raya	150 kV	60	2015
469	Sumatera	Aceh	Langsa	Tualang Cut	150 kV	24	2015
470	Sumatera	Aceh	Bireun	PLTA Peusangan-1	150 kV	126	2016
471	Sumatera	Aceh	PLTA Peusangan-1	PLTA Peusangan-2	150 kV	14	2016

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
472	Sumatera	Aceh	PLTA Peusangan-1	Takengon	150 kV	22	2016
473	Sumatera	Aceh	Brastagi	Kutacane	150 kV	290	2015
474	Sumatera	Aceh	Ulee Kareng	Banda Aceh	150 kV	40	2017
475	Sumatera	Aceh	Lhokseumawe (Uprate)	Idie (Uprate)	150 kV	82	2016
476	Sumatera	Aceh	Idie (Uprate)	Langsa (Uprate)	150 kV	47	2016
477	Sumatera	Aceh	Lhokseumawe (Uprate)	Langsa (Uprate)	150 kV	129	2016
478	Sumatera	Aceh	Bireun (Uprate)	Lhokseumawe (Uprate)	150 kV	123	2016
479	Sumatera	Aceh	Krueng Raya	Ulee Kareng	150 kV	60	2017
480	Sumatera	Aceh	PLTU Meulaboh/Nagan Raya	Blang Pidie	150 kV	190	2015
481	Sumatera	Aceh	Blang Pidie	Aek Kanopan	150 kV	130	2017
482	Sumatera	Aceh	Cot Trueng (Arun)	Inc. 2 Pi (Bireun - Lhokseumawe)	150 kV	17	2015
483	Sumatera	Aceh	Samalanga	Inc. 1 Pi (Bireun - Sigli)	150 kV	4	2017
484	Sumatera	Aceh	Takengon	Blang Kjeran	150 kV	174	2017
485	Sumatera	Aceh	Calang	Meulaboh	150 kV	160	2018
486	Sumatera	Aceh	Subulussalam	Singkil	150 kV	120	2018
487	Sumatera	Aceh	Banda Aceh	Lam Pisang	150 kV	30	2019
488	Sumatera	Aceh	Calang	Lampisang	150 kV	198	2018
499	Sumatera	Sumut	Dolok Sanggul	Inc. 1 Pi (Tele-Tarutung)	150 kV	76	2015
500	Sumatera	Sumut	Tanjung Pura	Inc. 1 Pi (P.Brandan-Binjai)	150 kV	30	2016
501	Sumatera	Sumut	Sidikalang	Dairi Prima Mineral	150 kV	60	2015
502	Sumatera	Sumut	Galang	Namurambe	150 kV	80	2015
503	Sumatera	Sumut	Galang	Tanjung Morawa	150 kV	20	2015
504	Sumatera	Sumut	Tele	Pangururan	150 kV	26	2016
505	Sumatera	Sumut	Rantau prapat	Labuhan Bilik	150 kV	130	2017
506	Sumatera	Sumut	Galang	Negeri Dolok	150 kV	66	2016
507	Sumatera	Sumut	Pakkat	Dolok Sanggul	150 kV	70	2018
508	Sumatera	Sumut	Padang Sidempuan	Penyabungan	150 kV	140	2016
509	Sumatera	Sumut	Pangkalan Brandan	Binjai (Uprate)	150 kV	102	2017
510	Sumatera	Sumut	Binjai	Payageli (Uprate)	150 kV	28	2015
511	Sumatera	Sumut	GIS Mabar	KIM	150 kV	0	2017
512	Sumatera	Sumut	GIS Listrik	GIS Glugur	150 kV	10	2017
513	Sumatera	Sumut	Sibuhuan	Pasir Pangarayan	150 kV	154	2019
514	Sumatera	Sumut	Sibuhuan	Gunung Tua	150 kV	180	2016
515	Sumatera	Sumut	Perdagangan	Inc. 2 Pi (Kisaran-K. Tanjung)	150 kV	80	2016
516	Sumatera	Sumut	Parlilitan	Dolok Sanggul	150 kV	50	2018
517	Sumatera	Sumut	PLTA Wampu	Brastagi	150 kV	80	2015
518	Sumatera	Sumut	Helvetia	Inc. 2 Pi (Glugur-Paya Geli)	150 kV	1	2017
519	Sumatera	Sumut	Sidikalang	Salak	150 kV	60	2016
520	Sumatera	Sumut	Pematang Siantar	Tanah Jawa	150 kV	30	2017
521	Sumatera	Sumut	Selayang	Inc. 2 Pi (Paya Geli - Namurambe)	150 kV	4	2017
522	Sumatera	Sumut	Dairi	Inc. 1 Pi (Sidikalang-Sabulussalam)	150 kV	10	2016
523	Sumatera	Sumut	Tebing Tinggi	Seirotan (Uprate)	150 kV	54	2016
524	Sumatera	Sumut	Tanjung Balai	Kisaran	150 kV	30	2017
525	Sumatera	Sumut	Natal	Panyabungan	150 kV	100	2018
526	Sumatera	Sumut	Seirotan	Perbaungan (Uprate)	150 kV	43	2016
527	Sumatera	Sumut	Perbaungan	Tebing Tinggi (Uprate)	150 kV	43	2016
528	Sumatera	Sumut	Perbaungan	Kuala Namu	150 kV	20	2017
529	Sumatera	Sumut	Padang Sidempuan	New Padangsidempuan	150 kV	4	2016
530	Sumatera	Sumut	Kuala	Binjai	150 kV	18	2018
531	Sumatera	Sumut	Pangkalan Susu	Pangkalan Brandan	150 kV	22	2018
532	Sumatera	Sumut	KIM 2	Inc. 2 Pi (KIM - Sei Rotan)	150 kV	4	2017
533	Sumatera	Sumut	Pancing	KIM I	150 kV	20	2017

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
534	Sumatera	Sumut	Denai	Pancing	150 kV	24	2017
535	Sumatera	Sumut	GI/GIS Batu ginggaing	Paya Geli	150 kV	10	2018
536	Sumatera	Sumut	GI/GIS Batu ginggaing	GIS Listrik	150 kV	10	2018
537	Sumatera	Sumut	Sei kera	Inc. 1 Pi (Denai-Pancing)	150 kV	12	2018
538	Sumatera	Sumut	Titi Kuning	Teladan	150 kV	10	2018
539	Sumatera	Sumut	Teladan	Sei Kera	150 kV	12	2018
540	Sumatera	Sumut	GIS Listrik	inc (Sei Kera-Teladan	150 kV	6	2018
541	Sumatera	Sumut	PLTP Sarulla I	Sarulla	150 kV	20	2017
542	Sumatera	Sumut	Mabar	Listrik	150 kV	6	2018
543	Sumatera	Sumut	Payapasir	KIM	150 kV	10	2018
544	Sumatera	Sumut	Simangkok	PLTA Asahan III(FTP 2)	150 kV	22	2019
545	Sumatera	Sumut	PLTA Hasang	Aek Kanopan	150 kV	50	2019
552	Sumatera	Sumut	Teluk Dalam	PLTU Nias	70 kV	220	2016
553	Sumatera	Sumut	PLTU Nias	Gunung Sitoli	70 kV	20	2016
555	Sumatera	Riau	Teluk Kuantan	Rengat	150 kV	194	2015
556	Sumatera	Riau	Bangkinang	Pasir Pangarayan	150 kV	220	2015
557	Sumatera	Riau	Pasir Putih	Garuda Sakti	150 kV	55	2016
558	Sumatera	Riau	Tenayan / PLTU Riau	Teluk Lembu	150 kV	20	2015
559	Sumatera	Riau	Tenayan / PLTU Riau	Pasir Putih	150 kV	35	2015
560	Sumatera	Riau	Dumai	Kawasan Industri Dumai (KID)	150 kV	56	2015
561	Sumatera	Riau	Pasir Putih	Pangkalan Kerinci	150 kV	134	2015
562	Sumatera	Riau	New Garuda Sakti	Inc. 2 Pi (G.Sakti - Duri)	150 kV	12	2015
564	Sumatera	Riau	Teluk Lembu	Garuda Sakti (Uprate)	150 kV	36	2016
565	Sumatera	Riau	Kandis	Inc. 2 pi (New G.Sakti - Duri)	150 kV	10	2017
566	Sumatera	Riau	Dumai	Bagan Siapi api	150 kV	228	2016
567	Sumatera	Riau	Tenayan / PLTU Riau	Perawang	150 kV	50	2016
568	Sumatera	Riau	PLTU Sewa Dumai	Kawasan Industri Dumai (KID)	150 kV	14	2016
569	Sumatera	Riau	Rengat	Pangkalan Kerinci	150 kV	220	2017
570	Sumatera	Riau	GIS Kota Pekan Baru	Inc. 2 Pi (G.Sakti-Teluk Lembu)	150 kV	10	2016
571	Sumatera	Riau	Tenayan / PLTU Riau	Siak Sri Indra Pura	150 kV	100	2017
572	Sumatera	Riau	Rengat	Tembilahan	150 kV	120	2016
573	Sumatera	Riau	Bangkinang	Lipat Kain	150 kV	70	2018
574	Sumatera	Riau	Dumai (Uprate)	Kawasan Industri Dumai (KID)	150 kV	56	2019
576	Sumatera	Kepri	Tanjung Kasam	Tanjung Sauh	150 kV	6	2015
577	Sumatera	Kepri	Tanjung Sauh	Pulau Ngenang	150 kV	10	2015
578	Sumatera	Kepri	Pulau Ngenang	Tanjung Taloh	150 kV	12	2015
579	Sumatera	Kepri	Tanjung Taloh	Tanjung Uban	150 kV	60	2015
580	Sumatera	Kepri	Tanjung Uban	Sri Bintan	150 kV	60	2015
581	Sumatera	Kepri	Sri Bintan	Air Raja	150 kV	70	2015
582	Sumatera	Kepri	Air Raja	Kijang	150 kV	40	2015
583	Sumatera	Kepri	Tanjung Pinang (PLTU)	Kijang	150 kV	30	2017
584	Sumatera	Sumbar	PLTU Sumbar Pesisir/Teluk Sirih	Kambang	150 kV	160	2015
586	Sumatera	Sumbar	Maninjau	Padang Luar	150 kV	42	2015
587	Sumatera	Sumbar	Padang Luar	Payakumbuh	150 kV	32	2015
588	Sumatera	Sumbar	GI Bingkuang/GIS Kota	Inc. 2 Pi (Pauh Limo - L.Alung/PIP)	150 kV	8	2016
589	Sumatera	Sumbar	Singkarak	Batusangkar	150 kV	25	2019
590	Sumatera	Sumbar	Sungai Rumbai	Batang Sangir	150 kV	140	2017
591	Sumatera	Sumbar	Batang Sangir	PLTP Muara Laboh	150 kV	20	2018
592	Sumatera	Sumbar	Pasaman	Simpang Empat	150 kV	60	2018
593	Sumatera	Sumbar	Solok	Inc. 2 Pi (Ombilin - Indarung)	150 kV	2	2018
596	Sumatera	Jambi	Bangko	PLTA Merangin	150 kV	136	2015

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
597	Sumatera	Jambi	PLTA Merangin	Sungai Penuh	150 kV	110	2015
600	Sumatera	Jambi	New Aur Duri	2 pi incomer (Aur Duri-Sei Gelam)	150 kV	30	2015
601	Sumatera	Jambi	Muara Sabak	Inc. 1 Pi (Payo Selincih - Aur Duri)	150 kV	122	2015
602	Sumatera	Jambi	Muara Bulian	Sarolangun	150 kV	130	2015
603	Sumatera	Jambi	Sarolangun	Muara Rupit	150 kV	80	2017
604	Sumatera	Jambi	New Aur Duri (Uprate)	Sei Gelam (Uprate)	150 kV	20	2018
605	Sumatera	Jambi	Payo Selincih	Sei Gelam	150 kV	20	2018
606	Sumatera	Jambi	Kasang	Inc. 2 Pi (Payoselincih-Sei Gelam)	150 kV	10	2018
608	Sumatera	Jambi	Muara Sabak	Kuala Tungkal	150 kV	109	2018
609	Sumatera	Jambi	Tebo	Inc. 2 Pi (Muara Bungo-Muara Bulian)	150 kV	1	2016
612	Sumatera	Bengkulu	Pekalongan	Pulo Baai	150 kV	90	2016
613	Sumatera	Bengkulu	Tess	Arga Makmur 70kV	70 kV	160	2015
614	Sumatera	Bengkulu	PLTU Bengkulu	Arga Makmur 150kV	150 kV	40	2018
615	Sumatera	Bengkulu	PLTU Bengkulu	Pulo Baai	150 kV	160	2018
616	Sumatera	Bengkulu	Pekalongan	PLTP Hululais	150 kV	120	2019
617	Sumatera	Bengkulu	Manna	Bintuhan	150 kV	140	2018
618	Sumatera	Bengkulu	Kambang	Muko-Muko	150 kV	220	2019
619	Sumatera	Bengkulu	Muko-Muko	Arga Makmur	150 kV	360	2019
620	Sumatera	Bengkulu	Pulau Baai	PLTU Bengkulu	150 kV	160	2019
623	Sumatera	Sumsel	Kenten	Inc. 2 Pi (Talang Kelapa - Borang)	150 kV	1	2015
624	Sumatera	Sumsel	Betung	Sekayu	150 kV	70	2015
626	Sumatera	Sumsel	Gandus	Inc. 2 Pi (Keramasan - Talang Kelapa)	150 kV	20	2015
631	Sumatera	Sumsel	Lahat	PLTU Keban Agung	150 kV	70	2015
633	Sumatera	Sumsel	Tanjung Api-Api	Mentok/Bangka Land-ing Point	150 kV	20	2017
634	Sumatera	Sumsel	Mariana	Kayu Agung	150 kV	60	2016
635	Sumatera	Sumsel	Lubuk Linggau	Tebing Tinggi	150 kV	150	2015
636	Sumatera	Sumsel	Kayu Agung	Gumawang	150 kV	90	2016
637	Sumatera	Sumsel	Tugumulyo	Inc. 2 Pi (Kayu Agung - Gumawang)	150 kV	40	2016
638	Sumatera	Sumsel	Jakabaring	Inc. 2 Pi (Keramasan - Mariana)	150 kV	1	2015
639	Sumatera	Sumsel	Pendopo	Inc. 2 Pi (Lahat - Simpang Belimbing)	150 kV	40	2016
640	Sumatera	Sumsel	Muara Dua	Martapura	150 kV	92	2017
641	Sumatera	Sumsel	Martapura	Inc. 2 pi (Baturaja-B. Kemuning)	150 kV	2	2016
642	Sumatera	Sumsel	PLTP Lumut Balai	GITET Lumut Balai	150 kV	44	2017
643	Sumatera	Sumsel	Gandus	GIS Kota Barat	150 kV	6	2017
644	Sumatera	Sumsel	Keramasan	GIS Kota Barat	150 kV	6	2017
645	Sumatera	Sumsel	Kenten	GIS Kota Timur	150 kV	12	2017
646	Sumatera	Sumsel	Boom Baru	GIS Kota Timur	70 kV	1	2017
647	Sumatera	Sumsel	GIS Kota Barat	GIS Kota Timur	150 kV	5	2017
650	Sumatera	Lampung	Menggala	Kotabumi	150 kV	58	2015
651	Sumatera	Lampung	Menggala	Seputih Banyak	150 kV	120	2016
652	Sumatera	Lampung	Pagelaran	Kota Agung	150 kV	80	2015
653	Sumatera	Lampung	Bukit Kemuning	Liwa	150 kV	80	2015
654	Sumatera	Lampung	Pagelaran	Gedong Tataan	150 kV	60	2017
655	Sumatera	Lampung	Gedon Tataan	Teluk Ratai	150 kV	60	2017
656	Sumatera	Lampung	Kalianda	Ketapang	150 kV	90	2017
657	Sumatera	Lampung	Gumawang	Mesuji	150 kV	160	2015
658	Sumatera	Lampung	Mesuji	Dipasena	150 kV	152	2017
659	Sumatera	Lampung	Sukarame	Inc. 2 Pi (Sutami-Natar)	150 kV	2	2016
660	Sumatera	Lampung	Sukarame	Jatiagung	150 kV	16	2016

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
661	Sumatera	Lampung	PLTG Lampung Peaker	Sribawono	150 kV	34	2016
662	Sumatera	Lampung	Pakuan Ratu/Way Kanan	Blambangan Umpu	150 kV	30	2016
663	Sumatera	Lampung	Bandar Surabaya	Inc. 2 Pi (S.Banyak-Dipasena)	150 kV	4	2016
664	Sumatera	Lampung	Seputih Banyak	Dipasena	150 kV	200	2016
665	Sumatera	Lampung	Teluk Betung	New Tarahan	150 kV	20	2018
666	Sumatera	Lampung	Langkapura	Inc. 2 Pi (Natar - Teluk Betung)	150 kV	2	2017
667	Sumatera	Lampung	PLTP Ulubelu #3,4	Ulubelu	150 kV	20	2016
668	Sumatera	Lampung	PLTA Semangka	Kota Agung	150 kV	60	2018
669	Sumatera	Lampung	Liwa	Bengkunat	150 kV	120	2019
670	Sumatera	Lampung	KIM Tenggamus	Inc. 2 Pi (Kota Agung-Semangka)	150 kV	10	2019
678	Sumatera	Babel	Dukong	Manggar	70 kV	140	2016
680	Sumatera	Babel	Pangkal Pinang	Koba	150 kV	120	2015
681	Sumatera	Babel	Kelapa	Mentok	150 kV	140	2016
682	Sumatera	Babel	Koba	Toboali	150 kV	120	2016
683	Sumatera	Babel	Tanjung Api-Api	Mentok	150 kV	90	2017
684	Sumatera	Babel	Tanjung Batu Itam	Manggar	70 kV	70	2016
686	Sumatera	Aceh	Sigli	Arun	275 kV	322	2018
687	Sumatera	Aceh	Pangkalan Susu	Arun	275 kV	360	2018
688	Sumatera	Aceh	Sigli	Ulee Kareng	275 kV	130	2018
689	Sumatera	Aceh	Arun	Pangkalan Susu	275 kV	194	2018
695	Sumatera	Sumut	Simangkok	Galang	275 kV	318	2015
696	Sumatera	Sumut	Galang	Binjai	275 kV	160	2015
697	Sumatera	Sumut	Sarulla	Simangkok	275 kV	194	2015
698	Sumatera	Sumut	Padang Sidempuan	Sarulla	275 kV	138	2015
699	Sumatera	Sumut	Rantau Prapat	Sarulla	275 kV	220	2018
705	Sumatera	Sumut	Pangkalan Susu	Langsa	275 kV	40	2018
708	Sumatera	Riau	Payakumbuh	New Garuda Sakti	275 kV	300	2015
709	Sumatera	Riau	Riau 1	Riau 2	500 kV	440	2017
710	Sumatera	Riau	Border	Pulau Rupat	500 kV DC	53	2019
711	Sumatera	Riau	Pulau Rupat Utara	Pulau Rupat Selatan	500 kV DC	100	2018
712	Sumatera	Riau	P. Rupat Selatan	Sumatra Landing Point	500 kV DC	12	2019
713	Sumatera	Riau	Sumatera Landing Point	New Garuda Sakti	500 kV DC	278	2019
715	Sumatera	Sumbar	Kiliranjao	Payakumbuh	275 kV	282	2015
716	Sumatera	Sumbar	New Padang Sidempuan	Payakumbuh	275 kV	600	2016
717	Sumatera	Sumbar	Sungai Rumbai	Inc. 2 pi (Muara Bungo - Kiliranjao)	275 kV	2	2016
718	Sumatera	Jambi	Bayung Lincir/PLTU Sum-sel-5	New Aur Duri	275 kV	120	2015
719	Sumatera	Jambi	Jambi 2	Riau 1	500 kV	420	2017
720	Sumatera	Jambi	Sumsel 1	Jambi 2	500 kV	240	2019
721	Sumatera	Sumsel	Lahat	Lumut Balai	275 kV	50	2015
722	Sumatera	Sumsel	Lumut Balai	Gumawang	275 kV	405	2015
723	Sumatera	Sumsel	Bayung Lincir/PLTU Sum-sel-5	Sungai Lilin	275 kV	100	2016
724	Sumatera	Sumsel	PLTU Sumsel-7	Sungai Lilin	275 kV	30	2017
725	Sumatera	Sumsel	Betung	Sungai Lilin	275 kV	40	2016
726	Sumatera	Sumsel	Sumsel-6	Muara Enim/ inc 2 pi (Muara Enim - Betung)	275 kV	40	2019
727	Sumatera	Sumsel	Sumsel-1	Betung	275 kV	80	2019
728	Sumatera	Sumsel	Betung	GITET Palembang	275 kV	132	2018
729	Sumatera	Sumsel	Muara Enim	Inc. 2 Pi (Gumawang-Lumut Balai)	275 kV	30	2018
730	Sumatera	Sumsel	Muara Enim	Betung	275 kV	350	2019
731	Sumatera	Sumsel	Muara Enim	perbatasan Sumsel/ Lampung	500 kV DC	200	2019
732	Sumatera	Sumsel	PLTP Rantau Dedap	Lumut Balai	275 kV	40	2019

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
733	Sumatera	Sumsel	Jambi 1	Inc. 2 pi (Sumsel-1 - Jambi-2)	500 kV	30	2019
734	Sumatera	Lampung	Gumawang	Lampung	275 kV	405	2018
735	Sumatera	Lampung	Ketapang	perbatasan Sumsel/ Lampung	500 kV DC	600	2019
736	Sulawesi	Sulbar	Pasang Kayu	Silae	150 kV	90	2015
737	Sulawesi	Sulut	Likupang	Bitung	70 kV	32	2015
738	Sulawesi	Sulut	Teling (GIS)	Ranomut Baru (Paniki)	150 kV	22	2015
739	Sulawesi	Sulut	Ranomut Baru (Paniki)	Tanjung Merah (Kema)	150 kV	56	2015
740	Sulawesi	Gorontalo	PLTU TLG (Molotabu) (IPP)	Incomer 1 phi (Botupingge-Isimu)	150 kV	30	2015
741	Sulawesi	Sulteng	Palu Baru	Silae	150 kV	50	2015
742	Sulawesi	Sulteng	Palu Baru	Talise	70 kV	40	2015
743	Kalimantan	Kalbar	PLTU Singkawang (Perpres)/ Kura2	Inc. 2 pi (Singkawang- Mempawah)	150 kV	40	2017
744	Kalimantan	Kalbar	Parit Baru	Kota Baru	150 kV	40	2015
745	Kalimantan	Kalbar	Sei Raya	Kota Baru	150 kV	32	2015
746	Kalimantan	Kalbar	Singkawang	Sambas	150 kV	126	2015
747	Kalimantan	Kalbar	Siantan	Tayan	150 kV	184	2015
748	Kalimantan	Kalbar	Singkawang	Bengkayang	150 kV	120	2015
749	Kalimantan	Kalbar	Tayan	Sanggau	150 kV	180	2017
750	Kalimantan	Kalbar	Bengkayang	Ngabang	150 kV	180	2016
751	Kalimantan	Kalbar	Ngabang	Tayan	150 kV	110	2016
752	Kalimantan	Kalbar	Sanggau	Sekadau	150 kV	100	2016
753	Kalimantan	Kalbar	Sintang	Sekadau	150 kV	180	2017
754	Kalimantan	Kalbar	Sintang	Nanga Pinoh	150 kV	180	2018
756	Kalimantan	Kalbar	Ketapang	Sukadana	150 kV	200	2018
757	Kalimantan	Kalbar	Sukadana	Sandai	150 kV	180	2018
758	Kalimantan	Kalbar	Sandai	Tayan	150 kV	300	2018
759	Kalimantan	Kalbar	Nanga Pinoh	Kota Baru 2	150 kV	180	2018
760	Kalimantan	Kalbar	Bengkayang	Perbatasan	275 kV	180	2015
761	Maluku	Maluku	PLTU Waai	GI Passo	70 kV	18	2015
762	Maluku	Maluku	PLTU Waai	GI Sirimau	70 kV	30	2015
763	Maluku	Maluku	GI Passo	GI Sirimau	70 kV	12	2015
764	Papua	Papua	PLTU Holtekamp	GI Jayapura (Skyland)	70 kV	44	2015
765	Papua	Papua	GI Jayapura (Skyland)	GI Sentani	70 kV	40	2015
766	Papua	Papua	PLTA Genyem	GI Sentani	70 kV	160	2015
767	Kalimantan	Kalsel	Tanjung	Kuaro	150 kV	244	2015
768	Kalimantan	Kalsel	Bandara	Incomer 2 phi (Cempaka-Mantuil)	150 kV	2	2015
769	Kalimantan	Kalteng	Tanjung	Buntok	150 kV	260	2015
770	Kalimantan	Kalteng	Muara Teweh	Buntok	150 kV	220	2015
771	Kalimantan	Kalteng	Sampit	Pangkalan Bun	150 kV	344	2015
772	Kalimantan	Kalteng	PLTG/MG Bangkanai	Muara Teweh	150 kV	100	2015
773	Kalimantan	Kalteng	PLTU Pulang Pisau	Incomer 2 phi (P. Raya-Selat)	150 kV	4	2015
774	Kalimantan	Kaltim	Kuaro	Tanjung	150 kV	93	2015
775	Kalimantan	Kaltim	PLTU Teluk Balikpapan	Incomer 2 phi (Karjo - Kuaro)	150 kV	16	2015
776	Kalimantan	Kaltim	PLTG Senipah	Palaran	150 kV	110	2015
777	Nusra	NTB	PLTU Bima (FTP1)	GI Bima	70 kV	30	2015
778	Nusra	NTB	GI Bima	GI Dompur	70 kV	48	2015
779	Nusra	NTB	Meninting	GI Tanjung	150 kV	24	2015
780	Nusra	NTB	GI Alas/Tano	GI Labuhan/Sumbawa	70 kV	120	2015
781	Nusra	NTB	GI Taliwang	GI Alas/Tano	70 kV	30	2015
782	Nusra	NTB	PLTU Sumbawa Barat	GI Taliwang	70 kV	10	2015
783	Nusra	NTT	Maulafa	Naibonat	70 kV	62	2015
784	Nusra	NTT	Naibonat	Nonohonis/Soe	70 kV	102	2015
785	Nusra	NTT	Kefamenanu	Atambua	70 kV	150	2015

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
786	Nusra	NTT	Atambua	Atapupu	70 kV	36	2015
787	Nusra	NTT	Ropa	Maumere	70 kV	120	2015
788	Nusra	NTT	Kefamenanu	Nonohonis / Soe	70 kV	90	2015
789	Nusra	NTT	Ropa	Bajawa	70 kV	190	2015
790	Nusra	NTT	Bajawa	Ruteng	70 kV	120	2015
791	Nusra	NTT	PLTP Ulumbu	Ruteng	70 kV	40	2015
792	Nusra	NTT	Ruteng	Labuan Bajo	70 kV	170	2015
793	Sulawesi	Sulsel	Sengkang	Siwa	150 kV	133	2016
794	Sulawesi	Sulsel	Keera	Inc. 1 phi Sengkang-Siwa	150 kV	13	2016
795	Sulawesi	Sulsel	Siwa	Palopo	150 kV	180	2016
796	Sulawesi	Sulsel	Daya Baru	Incomer 2 phi (Maros-Sungguminasa)	150 kV	16	2016
797	Sulawesi	Sulsel	Panakukang baru/Bolangi (New)	Inc. 1 phi (Maros-Sungguminasa)	150 kV	2	2016
798	Sulawesi	Sulsel	KIMA Maros	Maros	150 kV	12	2016
799	Sulawesi	Sulsel	Sungguminasa	Lanna	150 kV	20	2016
800	Sulawesi	Sulsel	Wotu	Malili (New)	150 kV	82	2016
801	Sulawesi	Sulsel	Wotu	GI Masamba	150 kV	110	2016
802	Sulawesi	Sulsel	KIMA Makassar	Daya Baru	150 kV	28	2016
803	Sulawesi	Sulsel	Malili	Lasusua	150 kV	290	2016
804	Sulawesi	Sultra	Lasusua	Kolaka	150 kV	232	2016
805	Sulawesi	Sultra	Kolaka	Unaaha	150 kV	150	2016
806	Sulawesi	Sultra	Unaaha	Kendari	150 kV	110	2016
807	Sulawesi	Sultra	GI Kendari 150 kV	GI Kendari 70 kV	150 kV	30	2016
808	Sulawesi	Sulbar	PLTU Mamuju (FTP2)	Mamuju	150 kV	68	2016
809	Sulawesi	Sulut	Otam	Molibagu	150 kV	132	2016
810	Sulawesi	Sulut	PLTG/MG Minahasa Peaker	Likupang	150 kV	1	2016
811	Sulawesi	Sulut	Likupang	Paniki	150 kV	42	2016
812	Sulawesi	Gorontalo	PLTG Gorontalo Peaker	Marisa	150 kV	20	2016
813	Sulawesi	Sulteng	PLTU Tawaeli Ekspansi	TIP 24 (Talise-Parigi)	70 kV	14	2016
814	Sulawesi	Sulteng	PLTU Palu 3	Talise Baru	150 kV	90	2016
815	Maluku	Maluku	PLTP Tulehu	Incomer 1 phi (Sirimau-Waai)	70 kV	6	2016
816	Papua	Papua	PLTU Timika	GI Timika	70 kV	60	2016
817	Kalimantan	Kalsel	Satui	Incomer 1 phi (Asam-asam - Batulicin)	150 kV	30	2016
818	Kalimantan	Kalteng	Muara Teweh	Puruk Cahu	150 kV	94	2016
819	Kalimantan	Kalteng	Palangkaraya [New]	Incomer 1 phi (Selat - P raya)	150 kV	2	2016
820	Kalimantan	Kalteng	Parenggean	Incomer 1 phi (Kasongan - Sampit)	150 kV	30	2016
821	Kalimantan	Kaltim	Karang Joang	Kuaro	150 kV	182	2016
822	Kalimantan	Kaltim	Petung	Incomer 2 phi (Karjo - Kuaro)	150 kV	46	2016
823	Kalimantan	Kaltim	Tenggarong	Kota Bangun	150 kV	120	2016
824	Kalimantan	Kaltim	New Samarinda	Embalut	150 kV	32	2016
825	Kalimantan	Kaltim	GI New Balikpapan	Incomer 2 phi (Mangarsari-Industri)	150 kV	2	2016
826	Kalimantan	Kaltim	PLTG Bangkanai	Melak	150 kV	200	2016
827	Nusra	NTB	GI Ampenan	Meninting	150 kV	11	2016
828	Sulawesi	Sulsel	PLTGU Makassar Peaker	Maros	150 kV	10	2017
829	Sulawesi	Sulsel	Tanjung Bunga	Bontoala	150 kV	12	2017
830	Sulawesi	Sulbar	Mamuju Baru	Inc. 2 phi (Topoyo-Mamuju)	150 kV	4	2017
831	Sulawesi	Sulbar	Pasangkayu	Mamuju	150 kV	400	2017
832	Sulawesi	Sulut	PLTP Lahendong V & VI	Kawangkoan	150 kV	10	2017
833	Sulawesi	Gorontalo	Marisa	Moutong	150 kV	180	2017
834	Sulawesi	Sulteng	PLTMG Luwuk	Luwuk	150 kV	180	2017
835	Sulawesi	Sulteng	Moutong	Bangkir	150 kV	220	2017

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
836	Sulawesi	Sulteng	Toli-toli	Leok	150 kV	216	2017
837	Sulawesi	Sulteng	Toli-toli	Bangkir	150 kV	180	2017
838	Sulawesi	Sulteng	Tambu	Bangkir	150 kV	90	2017
839	Sulawesi	Sulteng	Poso	Ampana	150 kV	248	2017
840	Sulawesi	Sulteng	Bunta	Luwuk	150 kV	190	2017
841	Maluku	Maluku	GI Passo	GI Wayame	150 kV	26	2017
842	Maluku	Maluku	GI Namrole	GI Namlea	70 kV	171	2017
843	Papua	Pabar	PLTU Sorong	GI Sorong	150 kV	60	2017
844	Papua	Pabar	PLTU Manokwari	GI Manokwari	150 kV		2017
845	Kalimantan	Kalsel	Batu Licin	Landing point Batulicin	150 kV	6	2017
846	Kalimantan	Kalsel	Landing point P. Laut	Kotabaru	150 kV	74	2017
847	Kalimantan	Kalsel	Landing point Batulicin	Landing point P. Laut	150 kV	6	2017
848	Kalimantan	Kalsel	Barikin	Kayutangi	150 kV	240	2017
849	Kalimantan	Kalsel	Seberang Barito	Trisakti	150 kV	30	2017
850	Kalimantan	Kalsel	PLTU Kalsel 1 (FTP 2)	Tanjung	150 kV	100	2017
851	Kalimantan	Kalteng	Puruk Cahu	Kuala Kurun	150 kV	196	2017
852	Kalimantan	Kalteng	PLTU Sampit	Sampit	150 kV	84	2017
853	Kalimantan	Kalteng	Kasongan	Kuala Kurun	150 kV	240	2017
854	Kalimantan	Kalsel	Seberang Barito	Trisakti	150 kV	12	2017
855	Kalimantan	Kalsel	PLTGU Kalselteng Peaker	Seberang Barito	150 kV	6	2017
856	Kalimantan	Kaltim	New Samarinda	Sambera	150 kV	40	2017
857	Kalimantan	Kaltim	Bontang	Sangatta	150 kV	90	2017
858	Kalimantan	Kaltim	GI New Balikpapan	GI Kariangau	150 kV	40	2017
859	Kalimantan	Kaltim	Kuaro	Grogot	150 kV	32	2017
860	Kalimantan	Kaltim	Sangatta	Maloi	150 kV	160	2017
861	Kalimantan	Kaltim	PLTU Kaltim 2 (FTP-2)	Bontang	150 kV	30	2017
862	Kalimantan	Kaltim	Melak	GI Kotabangun	150 kV	268	2017
863	Kalimantan	Kaltim	Lati	Tanjung Redep	150 kV	60	2017
864	Kalimantan	Kaltara	Tanjung Redep	Tanjung Selor	150 kV	160	2017
865	Kalimantan	Kaltara	Tj Selor	Tidang Pale	150 kV	204	2017
866	Kalimantan	Kaltara	Tidang Pale	Malinau	150 kV	52	2017
867	Nusra	NTB	PLTU Sumbawa	GI Labuhan/Sumbawa	150 kV	30	2017
868	Nusra	NTB	PLTU Lombok Timur	PLTU Lombok (FTP 2)	150 kV	20	2017
869	Nusra	NTB	GI Sape	GI Bima	150 kV	70	2017
870	Nusra	NTB	GI Mataram	Inc. 1 phi (Ampenan-Tanjung)	150 kV	20	2017
871	Nusra	NTB	GI Dompu	GI Labuhan/Sumbawa	150 kV	284	2017
872	Nusra	NTB	Jeranjang	Sekotong	150 kV	30	2017
873	Nusra	NTT	PLTMG Kupang Peaker	GI Maulafa	150 kV	60	2017
874	Nusra	NTT	GI Oekatibi	Inc 1 phi (Kupang Peaker-Maulafa)	150 kV	50	2017
875	Nusra	NTT	GI Naibonat	GI Oekatibi	150 kV	24	2017
876	Sulawesi	Sulsel	Maros	Tallo Lama	150 kV	20	2018
877	Sulawesi	Sulsel	Punagaya	Bantaeng (Smelter)	150 kV	60	2018
878	Sulawesi	Sulsel	PLTU Barru 2	Inc. 2 phi (Sidrap-Maros)	150 kV	5	2017
879	Sulawesi	Sultra	PLTU Kendari 3	Kendari 150 kV	150 kV	20	2018
880	Sulawesi	Sultra	Raha	Bau-Bau	150 kV	170	2018
881	Sulawesi	Sultra	Kendari	GI Andolo	150 kV	180	2018
882	Sulawesi	Sultra	GI Andolo	GI Kasipute	150 kV	84	2018
883	Sulawesi	Sulsel	Makale	Rantepao	150 kV	30	2018
884	Sulawesi	Sulut	PLTU Sulut 1 (FTP1)	Incomer double phi (Lolak - Buroko)	150 kV	10	2018
885	Sulawesi	Sulteng	Kolonedale	Tentena	150 kV	130	2018
886	Sulawesi	Sulteng	Kolonedale	Bungku	150 kV	180	2018
887	Sulawesi	Sulut	Teling (GIS)	Sario (GIS) (atas telling arah pantai)	150 kV	8	2018
888	Maluku	Maluku	GI Piru	GI Kairatu	150 kV	110	2018

No	PULAU/ KEPULAUAN	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN	PANJANG (kms)	COD
889	Maluku	Maluku	GI Piru	GI Taniwel	150 kV	60	2018
890	Kalimantan	Kalsel	Kayutangi	Mantuil	150 kV	60	2018
891	Kalimantan	Kalteng	GI Pangkalan Bun	GI Sukamara	150 kV	140	2018
892	Kalimantan	Kalteng	GI Nangabulik	Incomer 1-phi (P Bun-S mara)	150 kV	70	2018
893	Kalimantan	Kalteng	Palangkaraya	Selat	150 kV	248	2018
894	Kalimantan	Kalteng	Selat	Seberang Barito	150 kV	84	2018
895	Kalimantan	Kalteng	GI Pangkalan Banteng	Incomer 1-phi (P Bun-Sampit)	150 kV	48	2018
896	Kalimantan	Kalteng	PLTU Kalselteng 1	Kasongan	150 kV	120	2018
897	Kalimantan	Kaltim	Muara Wahau	Sepaso	150 kV	100	2018
898	Nusra	NTB	PLTU Lombok (FTP 2)	GI Pringgabaya	150 kV	38	2016
899	Nusra	NTB	Taliwang	Maluk	70 kV	40	2018
900	Nusra	NTB	GI Tanjung	GI Bayan	150 kV	70	2017
901	Nusra	NTB	GI Bayan	PLTU Lombok (FTP 2)	150 kV	82	2017
902	Nusra	NTT	GI Maulafa	GI Kupang	70 kV	10	2018
903	Nusra	NTT	GI Tenau	Inc. 1 phi (Bolok-Maulafa)	70 kV	10	2018
904	Sulawesi	Sulut	PLTU Sulut 3	Tanjung Merah (Kema)	150 kV	20	2019
905	Sulawesi	Sulut	Paniki	Pandu (atas sebelah bandara)	150 kV	24	2019
906	Sulawesi	Sulteng	Petobo/Talise Baru	Inc 1 phi (Talise-Palu Baru)	150 kV	10	2019
907	Maluku	Malut	Jailolo	Tobelo	150 kV	220	2019
908	Kalimantan	Kaltim	Muara Wahau	Tanjung Redep	150 kV	240	2019
909	Nusra	NTT	PLTP Mataloko	Bajawa	70 kV	30	2019
924	Nusra	NTB	PLTA Brang Beh	GI Labuhan/Sumbawa	70 kV	90	2019
			TOTAL			46,687	

Rencana Pengembangan Gardu Induk 2015 - 2019

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
1	Banten	Balaraja	500/150 kV	500	2015
2	Banten	Balaraja	500/150 kV	500	2015
3	Banten	Balaraja	500/150 kV	167	2016
4	Banten	Cilegon	500/150 kV	167	2016
5	Banten	PLTU Banten	500 kV	4 LB	2016
6	Banten	Balaraja	500 kV	2 LB	2017
7	Banten	Lengkong	500/150 kV	1,000	2017
8	Banten	Balaraja	500 kV	2 LB	2019
9	Banten	Balaraja	500 kV	2 LB	2019
11	DKI Jakarta	Cawang (GIS)	500/150 kV	500	2015
12	DKI Jakarta	Bekasi	500/150 kV	167	2015
13	DKI Jakarta	Cawang	500/150 kV	167	2015
14	DKI Jakarta	Kembangan (GIS)	500/150 kV	167	2015
15	DKI Jakarta	Cawang	500/150 kV	167	2016
16	DKI Jakarta	Durikosambi (GIS)	500/150 kV	167	2016
17	DKI Jakarta	Bekasi	500 kV	2 LB	2016
18	DKI Jakarta	Kembangan	500 kV	2 LB	2017
19	DKI Jakarta	Durikosambi (GIS)	500/150 kV	1,000	2017
20	DKI Jakarta	Kembangan (GIS)	500 kV	2 LB	2017
21	DKI Jakarta	Cawang Baru (GIS)	500/150 kV	1,000	2017
22	DKI Jakarta	Gandul	500 kV	2 LB	2017
23	DKI Jakarta	Durikosambi (GIS)	500/150 kV	500	2018
24	DKI Jakarta	Muarakarang (GIS)	500/150 kV	1,000	2018
25	DKI Jakarta	Durikosambi (GIS)	500/150 kV	500	2018
26	DKI Jakarta	Priok	500/150 kV	500	2018
28	Jabar	Gandul	500/150 kV	167	2015
29	Jabar	Muaratawar	500/150 kV	167	2015
30	Jabar	New Ujung Berung	500/150 kV	167	2016
31	Jabar	Cibatu	500/150 kV	167	2016
32	Jabar	Cibinong	500/150 kV	167	2016
33	Jabar	Cirata	500/150 kV	167	2016
34	Jabar	Bandung Selatan	500 kV	2 LB	2016
35	Jabar	Cibinong	500/150 kV	500	2016
36	Jabar	Cirata	500/150 kV	500	2016
37	Jabar	Gandul	500/150 kV	500	2017
38	Jabar	Tambun	500/150 kV	1,000	2016
39	Jabar	Delta Mas	500/150 kV	1,000	2017
40	Jabar	Cibatu Baru	500/150 kV	1,000	2018
41	Jabar	Muaratawar	500/150 kV	1,000	2018
42	Jabar	Cikalong	500/150 kV	500	2017
43	Jabar	Mandirancan	500/150 kV	500	2018
44	Jabar	Bandung Selatan	500 kV	2 LB	2019
45	Jabar	PLTU Jawa-12 (KBN)	500 kV	2 LB	2019
46	Jabar	Mandirancan	500 kV	2 LB	2019
47	Jabar	Upper Cisokan PS	500 kV	2 LB	2019
48	Jabar	Bogor X	500/150 kV	1,000	2019
49	Jabar	Bogor X dan Converter St	500 kV DC	3,000	2019
50	Jabar	Gandul	500 kV	2 LB	2019
51	Jabar	PLTU Jawa-7	500/150 kV	1,000	2019
52	Jabar	PLTU Indramayu	500 kV	6 LB	2019
55	Jateng	Cilacap Exp	500 kV	3 LB	2015
56	Jateng	PLTU Adipala	500 kV	6 LB	2015
57	Jateng	Rawalo/Kesugihan	500/150 kV	500	2015

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
58	Jateng	Rawalo/Kesugihan	500/150 kV	500	2015
59	Jateng	Ungaran	500/150 kV	167	2016
60	Jateng	Ampel	500/150 kV	1,000	2017
61	Jateng	Rawalo/Kesugihan	500/150 kV	1,000	2017
62	Jateng	Tanjung Jati B	500/150 kV	500	2017
63	Jateng	Pemalang	500 kV	6 LB	2018
64	Jateng	Pemalang	500/150 kV	1,000	2018
65	Jateng	PLTU Jateng	500 kV	3 LB	2019
67	DIY	Pedan	500/150 kV	167	2015
68	DIY	Pedan	500/150 kV	500	2015
69	DIY	Pedan	500/150 kV	500	2015
70	Jatim	Kediri	500/150 kV	500	2015
71	Jatim	Krian	500/150 kV	167	2015
72	Jatim	Krian	500/150 kV	500	2015
73	Jatim	Kediri	500/150 kV	167	2015
74	Jatim	Surabaya selatan	500/150 kV	1,000	2015
75	Jatim	Grati	500/150 kV	167	2016
76	Jatim	Gresik	500/150 kV	500	2016
77	Jatim	Ngimbang	500/150 kV	167	2016
78	Jatim	Bangil	500/150 kV	1,000	2017
79	Jatim	Surabaya selatan	500/150 kV	500	2017
80	Jatim	Paiton (GIS)	500 kV	2 LB	2018
81	Jatim	Tandes (GIS)	500/150 kV	1,000	2018
82	Bali	New Antosari (GIS)	500/150 kV	1,000	2018
83	Banten	Serpong	150/20 kV	60	2015
84	Banten	Bintaro II (GIS)	150/20 kV	120	2015
85	Banten	Bintaro	150 kV	2 LB	2015
86	Banten	Asahimas II/Cinangka	150/20 kV	60	2015
87	Banten	Millenium	150/20 kV	120	2015
88	Banten	Cemindo Gemilang/Bayah	150 kV	3 LB	2015
89	Banten	Cilegon Baru II / Kramatwatu	150/20 kV	120	2015
90	Banten	Cilegon Baru	150 kV	2 LB	2015
91	Banten	Legok	150/20 kV	60	2015
92	Banten	Teluk Naga	150/20 kV	60	2015
93	Banten	Citra habitat	150/20 kV	60	2015
94	Banten	Sepatan	150/20 kV	60	2015
95	Banten	Tangerang baru	150/20 kV	60	2015
96	Banten	Cemindo Gemilang/Bayah	150/20 kV	60	2015
97	Banten	Cikupa	150/20 kV	60	2015
98	Banten	Saketi Baru	150/20 kV	60	2015
99	Banten	Serang	150/20 kV	60	2015
100	Banten	Cilegon lama	150 kV	1 LB	2016
101	Banten	Cengkareng II/Bandara Soetta	150/20 kV	120	2016
102	Banten	Cengkareng	150 kV	2 LB	2016
103	Banten	Tangerang Baru II	150/20 kV	120	2016
104	Banten	PLTU Lontar	150 kV	2 LB	2016
105	Banten	Malimping	150/20 kV	60	2016
106	Banten	Puncak Ardi Mulya II	150/20 kV	120	2016
107	Banten	Millennium	150/20 kV	60	2016
108	Banten	Legok	150/20 kV	60	2016
109	Banten	Cileduk II/Alam Sutra (GIS)	150/20 kV	60	2016
110	Banten	Serang	150/20 kV	60	2016
111	Banten	Citra Baru Steel	150/20 kV	120	2016

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
112	Banten	Puncak Ardi Mulya II	150 kV	2 LB	2016
113	Banten	Malimping	150 kV	2 LB	2017
114	Banten	Jatake II (GIS)	150/20 kV	120	2017
115	Banten	Deltamas	150/20 kV	120	2017
116	Banten	Lengkong II	150/20 kV	120	2017
117	Banten	Sulindafin	150/20 kV	120	2017
118	Banten	Sepatan II	150/20 kV	120	2017
119	Banten	Sepatan	150 kV	2 LB	2017
120	Banten	Lengkong III/BSD 1	150/20 kV	120	2017
121	Banten	Bintaro II (GIS)	150/20 kV	60	2017
122	Banten	Tangerang Baru III	150/20 kV	60	2017
123	Banten	Tangerang Baru II	150 kV	2 LB	2017
124	Banten	Menes	150/20 kV	60	2017
125	Banten	Serang Selatan/Baros	150/20 kV	120	2018
126	Banten	Teluk Naga II	150/20 kV	120	2018
127	Banten	Lippo Curug II	150/20 kV	120	2018
128	Banten	Lippo Curug	150 kV	2 LB	2018
129	Banten	Sepatan	150/20 kV	60	2018
130	Banten	Kopo	150/20 kV	60	2018
131	Banten	Rangkas Bitung Baru	150/20 kV	60	2018
132	Banten	Salira Indah (GIS)	150/20 kV	60	2018
133	Banten	Cengkareng II/Bandara Soetta	150/20 kV	60	2018
134	Banten	Millennium	150/20 kV	60	2018
135	Banten	Lautan Steel	150/20 kV	60	2018
136	Banten	Tangerang Baru II	150/20 kV	60	2018
137	Banten	Tanjung Lesung	150/20 kV	120	2018
138	Banten	Bintaro III/Jombang (GIS)	150/20 kV	100	2019
139	Banten	Lengkong IV/BSD 2	150/20 kV	100	2019
140	Banten	Lengkong II	150 kV	2 LB	2019
141	Banten	Kopo II	150/20 kV	100	2019
142	Banten	Tangerang Baru III	150/20 kV	60	2019
172	DKI Jakarta	Cawang Baru (GIS)	150/20 kV	60	2015
173	DKI Jakarta	Manggarai (GIS)	150/20 kV	60	2015
174	DKI Jakarta	Tanah Tinggi (GIS)	150/20 kV	60	2015
175	DKI Jakarta	Kapuk (PIK) (GIS)	150/20 kV	120	2015
176	DKI Jakarta	Harapan Indah (GIS)	150/20 kV	120	2015
177	DKI Jakarta	Gunung Sahari (GIS)	150/20 kV	120	2015
178	DKI Jakarta	Kemayoran	150 kV	2 LB	2015
179	DKI Jakarta	Gandaria (GIS)	150/20 kV	180	2015
180	DKI Jakarta	TMI (Miniatur) (GIS)	150 kV	2 LB	2015
181	DKI Jakarta	Antasari / CSW 2 / Kemang Village (GIS)	150/20 kV	120	2015
182	DKI Jakarta	Jatiwaringin (GIS)	150/20 kV	120	2015
183	DKI Jakarta	Cakung Township (GIS)	150/20 kV	120	2015
184	DKI Jakarta	Kandang Sapi (GIS)	150 kV	2 LB	2015
185	DKI Jakarta	Jatirangon 2/Cibubur	150/20 kV	120	2015
186	DKI Jakarta	Durikosambi 2 / Daan Mogot (GIS)	150/20 kV	120	2015
187	DKI Jakarta	Semanggi Barat (GIS)	150/20 kV	120	2015
188	DKI Jakarta	Karet Lama	150 kV	2 LB	2015
189	DKI Jakarta	Karet Baru	150 kV	1 LB	2015
190	DKI Jakarta	Karet Lama	150 kV	1 LB	2015
191	DKI Jakarta	Plumpang	150 kV	2 LB	2015
192	DKI Jakarta	Gambir Baru	150 kV	2 LB	2015
193	DKI Jakarta	Petukangan	150/20 kV	60	2015
194	DKI Jakarta	Duren tiga (GIS)	150/20 kV	60	2015
195	DKI Jakarta	Miniatur (GIS)	150/20 kV	60	2015
196	DKI Jakarta	Tigaraksa	150/20 kV	60	2015
197	DKI Jakarta	Pasar kemis	150/20 kV	60	2015

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
198	DKI Jakarta	Duri Kosambi	150/20 kV	60	2015
199	DKI Jakarta	Penggilingan (GIS)	150/20 kV	60	2015
200	DKI Jakarta	Karet Lama	150/20 kV	60	2015
201	DKI Jakarta	Lippo curug	150/20 kV	60	2015
202	DKI Jakarta	Kemayoran	150/20 kV	60	2015
203	DKI Jakarta	Mampang II	150/20 kV	60	2015
204	DKI Jakarta	Spinmill	150 kV	5 LB	2016
205	DKI Jakarta	Marunda	150 kV	2 LB	2016
206	DKI Jakarta	Priok Barat	150 kV	2 LB	2016
207	DKI Jakarta	Kembangan II (GIS)	150/20 kV	120	2016
208	DKI Jakarta	Kembangan	150 kV	2 LB	2016
209	DKI Jakarta	Pondok Indah II/Cirende (GIS)	150/20 kV	120	2016
210	DKI Jakarta	Pondok Indah (GIS)	150 kV	2 LB	2016
211	DKI Jakarta	CSW	150 kV	1 LB	2016
212	DKI Jakarta	Pulogadung	150 kV	1 LB	2016
213	DKI Jakarta	Pulogadung	150 kV	1 LB	2016
214	DKI Jakarta	Mampang (GIS)	150 kV	2 LB	2016
215	DKI Jakarta	Senayan (GIS)	150 kV	2 LB	2016
216	DKI Jakarta	Danayasa (GIS)	150 kV	2 LB	2016
217	DKI Jakarta	Abadi Guna Papan (GIS)	150 kV	2 LB	2016
218	DKI Jakarta	Priok Timur	150/20 kV	60	2016
219	DKI Jakarta	Taman Rasuna (GIS)	150/20 kV	60	2016
220	DKI Jakarta	Pondok Indah (GIS)	150/20 kV	60	2016
221	DKI Jakarta	Cakung Township (GIS)	150/20 kV	60	2016
222	DKI Jakarta	Tigaraksa	150/20 kV	60	2016
223	DKI Jakarta	Jatirangon	150/20 kV	60	2016
224	DKI Jakarta	Cileduk	150/20 kV	60	2016
225	DKI Jakarta	Balaraja	150/20 kV	60	2016
226	DKI Jakarta	Cawang	150/20 kV	60	2017
227	DKI Jakarta	Jatiwaringin (GIS)	150/20 kV	60	2017
228	DKI Jakarta	Harapan Indah (GIS)	150/20 kV	60	2017
229	DKI Jakarta	Duren Tiga II/Ragunan (GIS)	150/20 kV	120	2017
230	DKI Jakarta	Cawang Lama	150 kV	2 LB	2017
231	DKI Jakarta	Gajah Tunggal	150/20 kV	120	2017
232	DKI Jakarta	Pasar Kemis	150 kV	2 LB	2017
233	DKI Jakarta	Abadi Guna Papan II (GIS)	150/20 kV	120	2017
234	DKI Jakarta	Cawang Lama	150 kV	2 LB	2017
235	DKI Jakarta	Marunda II (GIS)	150/20 kV	120	2017
236	DKI Jakarta	Marunda	150 kV	2 LB	2017
237	DKI Jakarta	Pasar Kemis II	150/20 kV	180	2017
238	DKI Jakarta	Sinar Sahabat	150/20 kV	120	2017
239	DKI Jakarta	Balaraja Baru	150 kV	2 LB	2017
240	DKI Jakarta	Pulo Gadung II	150/20 kV	120	2017
241	DKI Jakarta	Pulogadung (GIS)	150 kV	2 LB	2017
242	DKI Jakarta	Kandang Sapi (GIS)	150/20 kV	60	2017
243	DKI Jakarta	Gambir Lama II (GIS)	150/20 kV	120	2017
244	DKI Jakarta	Gambir Lama (GIS)	150 kV	2 LB	2017
245	DKI Jakarta	Grogol II (GIS)	150/20 kV	120	2017
246	DKI Jakarta	New balaraja	150/20 kV	60	2017
247	DKI Jakarta	Kebon Sirih II (GIS)	150/20 kV	120	2017
248	DKI Jakarta	Senayan Baru II (GIS)	150/20 kV	120	2017
249	DKI Jakarta	Senayan Baru	150 kV	2 LB	2017
250	DKI Jakarta	Tomang (GIS)	150/20 kV	120	2017
251	DKI Jakarta	Grogol	150 kV	2 LB	2017
252	DKI Jakarta	Semanggi Barat II/Benhil (GIS)	150/20 kV	120	2017
253	DKI Jakarta	Cawang	150/20 kV	60	2017
254	DKI Jakarta	Gandaria (GIS)	150 kV	2 LB	2017

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
255	DKI Jakarta	Cibinong	150 kV	2 LB	2017
256	DKI Jakarta	Poncol Baru II/Bj.Menteng (GIS)	150 kV	2 LB	2017
257	DKI Jakarta	Tambun	150 kV	2 LB	2017
258	DKI Jakarta	Balaraja New	150 kV	2 LB	2018
259	DKI Jakarta	Priok Timur	150/20 kV	60	2018
260	DKI Jakarta	Plumpang II (GIS)	150/20 kV	120	2018
261	DKI Jakarta	Durikosambi III/Rawa Buaya (GIS)	150/20 kV	120	2018
262	DKI Jakarta	Durikosambi II	150 kV	2 LB	2018
263	DKI Jakarta	Danayasa II/Semanggi Timur (GIS)	150/20 kV	120	2018
264	DKI Jakarta	Cipinang II/Jatinegara (GIS)	150/20 kV	120	2018
265	DKI Jakarta	Taman Rasuna 2 / Pengadegan Tmr (GIS)	150/20 kV	120	2018
266	DKI Jakarta	Taman Rasuna (GIS)	150 kV	2 LB	2018
267	DKI Jakarta	Antasari / CSW 2 / Kemang Village (GIS)	150/20 kV	60	2018
268	DKI Jakarta	Gandaria II/Mekar Sari (GIS)	150/20 kV	180	2018
269	DKI Jakarta	Gandaria	150 kV	2 LB	2018
270	DKI Jakarta	Penggilingan II (GIS)	150/20 kV	120	2018
271	DKI Jakarta	Penggilingan (GIS)	150 kV	2 LB	2018
272	DKI Jakarta	Kemayoran II (GIS)	150/20 kV	120	2018
273	DKI Jakarta	Tanah Tinggi (GIS)	150/20 kV	60	2018
274	DKI Jakarta	Dukuh Atas (GIS)	150/20 kV	60	2018
275	DKI Jakarta	Tigaraksa II (GIS)	150/20 kV	120	2018
276	DKI Jakarta	Tigaraksa	150 kV	2 LB	2018
277	DKI Jakarta	CSW III (GIS)	150/20 kV	60	2018
278	DKI Jakarta	Kembangan II (GIS)	150/20 kV	60	2018
279	DKI Jakarta	Gunung Sahari (GIS)	150/20 kV	60	2018
280	DKI Jakarta	Manggarai II (GIS)	150/20 kV	100	2019
281	DKI Jakarta	Taman Rasuna 2 / Pengadegan Tmr (GIS)	150 kV	2 LB	2019
282	DKI Jakarta	Kebon Sirih II (GIS)	150/20 kV	60	2019
283	DKI Jakarta	Jatirangon II/Cibubur	150/20 kV	60	2019
284	DKI Jakarta	Cileduk	150/20 kV	60	2019
285	DKI Jakarta	Duren Tiga II/Ragunan (GIS)	150/20 kV	60	2019
286	DKI Jakarta	Muara Karang III / Kamal	150/20 kV	100	2019
287	DKI Jakarta	Muarakarang	150 kV	2 LB	2019
288	DKI Jakarta	Senayan Baru II (GIS)	150/20 kV	60	2019
289	DKI Jakarta	Pondok Indah III/Ciputat (GIS)	150/20 kV	100	2019
290	DKI Jakarta	Kapuk (PIK) (GIS)	150/20 kV	60	2019
291	DKI Jakarta	Gajah Tunggal	150/20 kV	60	2019
292	DKI Jakarta	Kelapa Gading	150/20 kV	60	2019
353	Jabar	Pangandaran	70/20 kV	30	2015
354	Jabar	Padalarang baru	150/20 kV	60	2015
355	Jabar	PLTU Pelabuhan Ratu	150 kV	2 LB	2015
356	Jabar	Cibadak baru	150/20 kV	60	2015
357	Jabar	Malangbong	70/20 kV	30	2015
358	Jabar	Majalaya	70/20 kV	30	2015
359	Jabar	Karangnunggal	150/20 kV	30	2015
360	Jabar	New Tasikmalaya	150 kV	2 LB	2015
361	Jabar	Semen Jawa	150/20 kV	60	2015
362	Jabar	Braga (GIS)	150/20 kV	120	2015
363	Jabar	Cigereleng	150 kV	2 LB	2015
364	Jabar	Sukatani /Gobel	150/20 kV	120	2015
365	Jabar	Cikarang Lippo	150/20 kV	120	2015
366	Jabar	Cikedung	150/20 kV	60	2015
367	Jabar	Bogor Kota (GIS)	150/20 kV	120	2015
368	Jabar	Kedung Badak Baru	150 kV	2 LB	2015
369	Jabar	Cimanggis II/Tengah	150/20 kV	120	2015
370	Jabar	Gunung Garuda Rajapaksi	150/20 kV	60	2015
371	Jabar	Jatiluhur II	150/20 kV	60	2015

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
372	Jabar	Indoliberty	150 kV	2 LB	2015
373	Jabar	Cibatu	150/20 kV	60	2015
374	Jabar	Jababeka	150 kV	1 LB	2015
375	Jabar	Cibatu	150 kV	2 LB	2015
376	Jabar	Maligi	150 kV	1 LB	2015
377	Jabar	Santosa	70/20 kV	20	2015
378	Jabar	Haurgeulis	150/20 kV	60	2015
379	Jabar	Sumadra	70/20 kV	30	2015
380	Jabar	Tasikmalaya	150/20 kV	60	2015
381	Jabar	Kamojang	150/20 kV	60	2015
382	Jabar	Wayang Windu	150/70 kV	100	2015
383	Jabar	Garut	150/20 kV	60	2015
384	Jabar	Poncol baru	150/20 kV	60	2015
385	Jabar	Ciawi baru	150/20 kV	60	2015
386	Jabar	Cianjur	150/20 kV	60	2015
387	Jabar	Ujung Berung New/Rancakasumba baru	150/20 kV	60	2015
388	Jabar	Ujung Berung New/Rancakasumba baru	150/20 kV	60	2015
389	Jabar	Cileungsi II/Jonggol	150/20 kV	120	2015
390	Jabar	Cibatu	150 kV	2 LB	2015
391	Jabar	Chandra Asri	150/20 kV	60	2015
392	Jabar	Bekasi	150/20 kV	60	2015
393	Jabar	Lembursitu Baru	150/20 kV	60	2015
394	Jabar	Dawuan	150/20 kV	60	2015
395	Jabar	Cikande	150/20 kV	60	2015
396	Jabar	Semen Baru Cibinong	150/20 kV	120	2015
397	Jabar	Arjawinangun	70/20 kV	30	2015
398	Jabar	Padalarang baru	150/20 kV	60	2015
399	Jabar	Pameungpeuk	70/20 kV	30	2015
400	Jabar	Cimanggis	150/20 kV	60	2015
401	Jabar	Kamojang	150 kV	2 LB	2015
402	Jabar	Jui Shin Indonesia	150/20 kV	60	2016
403	Jabar	Indomulia Cipta Nusantara	150 kV	5 LB	2016
404	Jabar	ITP	150 kV	2 LB	2016
405	Jabar	Bogor Baru	150 kV	2 LB	2016
406	Jabar	Cibeureum	150/20 kV	60	2016
407	Jabar	Bekasi Utara/Tarumajaya	150/20 kV	120	2016
408	Jabar	Pelabuhan Ratu Baru / Jampang Kulon	150/20 kV	60	2016
409	Jabar	PLTU Pelabuhan Ratu	150 kV	2 LB	2016
410	Jabar	Kadipaten Baru	150/20 kV	180	2016
411	Jabar	Arjawinangun Baru	150/20 kV	120	2016
412	Jabar	Bogor Baru II/Tajur (GIS)	150/20 kV	120	2016
413	Jabar	Dayeuhkolot (GIS)	150/20 kV	120	2016
414	Jabar	Kanci	150/20 kV	60	2016
415	Jabar	Kiaracondong II/Rancanumpang	150/20 kV	120	2016
416	Jabar	Air Liquide	150 kV	3 LB	2016
417	Jabar	Gandamekar	150 kV	2 LB	2016
418	Jabar	Cibatu	150/20 kV	60	2016
419	Jabar	Parakan	70/20 kV	30	2016
420	Jabar	Kuningan	70/20 kV	30	2016
421	Jabar	Babakan	70/20 kV	30	2016
422	Jabar	Pabuaran	150 kV	2 LB	2016
423	Jabar	Sukamandi	150 kV	2 LB	2016
424	Jabar	Ciamis	150 kV	2 LB	2016
425	Jabar	Drajat	150 kV	2 LB	2016
426	Jabar	Kamojang	150 kV	2 LB	2016
427	Jabar	Sukatani	150 kV	2 LB	2016
428	Jabar	Saketi Baru	150 kV	2 LB	2016

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
429	Jabar	Malangbong Baru	150/20 kV	120	2016
430	Jabar	New Tasikmalaya	150 kV	2 LB	2016
431	Jabar	Cikumpay	150 kV	2 LB	2016
432	Jabar	Samator KIEC	150/20 kV	60	2016
433	Jabar	Tatajabar Sejahtera	150/20 kV	60	2016
434	Jabar	Panasia	150/20 kV	60	2016
435	Jabar	Mekarsari	150/20 kV	60	2016
436	Jabar	Depok II (GIS)	150/20 kV	180	2016
437	Jabar	Bandung Selatan II/Soreang	150/20 kV	120	2016
438	Jabar	Bekasi II/Pinggir Kali	150/20 kV	120	2016
439	Jabar	Bekasi	150 kV	2 LB	2016
440	Jabar	Bunar Baru	150/20 kV	120	2016
441	Jabar	Rangkasbitung Baru	150 kV	2 LB	2016
442	Jabar	Cangkring Baru/Kapetakan	150/20 kV	120	2016
443	Jabar	Cibadak Baru II/Cicurug	150/20 kV	120	2016
444	Jabar	Pelabuhan Ratu PLTU	150 kV	2 LB	2016
445	Jabar	Cikumpay II/Sadang	150/20 kV	120	2016
446	Jabar	Padalarang Baru II/Ngamprah	150/20 kV	120	2016
447	Jabar	Cirata	150 kV	2 LB	2016
448	Jabar	Padalarang Baru	150 kV	2 LB	2016
449	Jabar	Subang Baru/Pamanukan	150/20 kV	120	2016
450	Jabar	Tambun II	150/20 kV	120	2016
451	Jabar	Poncol Baru II/Bj.Menteng (GIS)	150/20 kV	120	2016
452	Jabar	KIIC 2	150/20 kV	120	2016
453	Jabar	Pinayungan	150 kV	2 LB	2016
454	Jabar	Garut	150 kV	2 LB	2016
455	Jabar	Lengkong	150/20 kV	60	2016
456	Jabar	Cikarang Lippo	150/20 kV	60	2016
457	Jabar	Poncol baru	150/20 kV	60	2016
458	Jabar	Kedungbadak baru	150/20 kV	60	2016
459	Jabar	Rancakusumba	150/20 kV	60	2016
460	Jabar	Sukamandi	150/20 kV	60	2016
461	Jabar	Lagadar	150/20 kV	60	2016
462	Jabar	Depok / rawadenok	150/20 kV	60	2016
463	Jabar	Garut	150/20 kV	60	2016
464	Jabar	Padalarang	150 kV	2 LB	2016
465	Jabar	Padalarang	150 kV	2 LB	2016
466	Jabar	Cikarang Lippo	150 kV	2 LB	2017
467	Jabar	KIIC 2	150 kV	2 LB	2017
468	Jabar	Cikijing	150/20 kV	60	2017
469	Jabar	Mandirancan	150 kV	2 LB	2017
470	Jabar	Muaratawar	150/20 kV	60	2017
471	Jabar	Tangeung/Cianjur Selatan	150/20 kV	60	2017
472	Jabar	Pelabuhan Ratu Baru / Jampang Kulon	150 kV	2 LB	2017
473	Jabar	Bandung Timur Baru	150/20 kV	120	2017
474	Jabar	Ujungberung	150 kV	2 LB	2017
475	Jabar	Kosambi baru	150/20 kV	60	2017
476	Jabar	Kuningan Baru	150/20 kV	120	2017
477	Jabar	Majalaya Baru	150/20 kV	120	2017
478	Jabar	Rancakusumba	150 kV	2 LB	2017
479	Jabar	Rengas Dengklok II / Cilamaya	150/20 kV	120	2017
480	Jabar	Sukamandi	150 kV	2 LB	2017
481	Jabar	Kertajati/Kadipaten Baru II	150/20 kV	120	2017
482	Jabar	Kadipaten Baru	150 kV	2 LB	2017
483	Jabar	Balongan	150/20 kV	120	2017
484	Jabar	Jatibarang	150 kV	2 LB	2017
485	Jabar	Depok/Rawadenok (Depok III)	150 kV	2 LB	2017

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
486	Jabar	Cimanggis	150 kV	2 LB	2017
487	Jabar	Cikijing	150 kV	2 LB	2017
488	Jabar	Malangbong Baru	150 kV	2 LB	2017
489	Jabar	Kedung Badak Baru	150 kV	2 LB	2017
490	Jabar	Sunyaragi	150 kV	2 LB	2017
491	Jabar	Babat	150 kV	2 LB	2017
492	Jabar	Lamongan	150 kV	4 LB	2017
493	Jabar	Segoromadu	150 kV	2 LB	2017
494	Jabar	Cibatu	150 kV	2 LB	2017
495	Jabar	Bogor Baru	150 kV	2 LB	2017
496	Jabar	Sawangan	150/20 kV	60	2017
497	Jabar	Depok/Rawadenok (Depok III)	150 kV	2 LB	2017
498	Jabar	Depok/Rawadenok (Depok III)	150 kV	2 LB	2017
499	Jabar	Sumedang Baru/Tj.Sari	150/20 kV	120	2017
500	Jabar	Ujung Berung New/Rancakasumba baru	150 kV	2 LB	2017
501	Jabar	Jababeka II/Pamahan	150/20 kV	120	2017
502	Jabar	Bengkong Baru (GIS)	150/20 kV	60	2017
503	Jabar	Kracak Baru	150/20 kV	60	2017
504	Jabar	Kedung Badak	150 kV	2 LB	2017
505	Jabar	AUA/Heksa	150/20 kV	120	2017
506	Jabar	PLTA Rajamandala	150/20 kV	120	2017
507	Jabar	Arjawinangun baru	150/20 kV	60	2017
508	Jabar	Telukjambe	150/20 kV	60	2017
509	Jabar	Sukatani/Gobel	150/20 kV	60	2017
510	Jabar	Cikasungka	150/20 kV	60	2017
511	Jabar	Ujungberung	150/20 kV	60	2017
512	Jabar	Peruri	150/20 kV	60	2017
513	Jabar	Cikedung	150/20 kV	60	2017
514	Jabar	Cileungsi II/jonggol	150/20 kV	60	2017
515	Jabar	Kiaracondong II/Rancanumpang	150/20 kV	60	2017
516	Jabar	Sunyaragi	150/20 kV	60	2017
517	Jabar	Babakan Baru	150/20 kV	120	2018
518	Jabar	Telukjambe II	150/20 kV	120	2018
519	Jabar	PLTU Labuhan	150 kV	2 LB	2018
520	Jabar	Ciawi Baru II/Cisarua	150/20 kV	120	2018
521	Jabar	Kosambi Baru II	150/20 kV	60	2018
522	Jabar	Cikande	150/20 kV	60	2018
523	Jabar	Parakan Kondang Baru	150/20 kV	60	2018
524	Jabar	Rancakasumba II/Sangian	150/20 kV	120	2018
525	Jabar	Rancakasumba	150 kV	2 LB	2018
526	Jabar	Bogor X	150/20 kV	120	2018
527	Jabar	Rengas Dengklok II / Cilamaya	150/20 kV	60	2018
528	Jabar	Tambun II	150/20 kV	60	2018
529	Jabar	Cibeureum	150/20 kV	60	2018
530	Jabar	Dayeuhkolot (GIS)	150/20 kV	60	2018
531	Jabar	Pameungpeuk	70/20 kV	30	2018
532	Jabar	Tegal herang	150/20 kV	60	2018
533	Jabar	Cikalong	150/20 kV	120	2018
534	Jabar	Jatibarang	150/20 kV	60	2018
535	Jabar	Karangnunggal	150/20 kV	60	2018
536	Jabar	Cibabat III/Gunung Batu	150/20 kV	100	2019
537	Jabar	Padalarang Baru II/Ngamprah	150 kV	2 LB	2019
538	Jabar	Cikande II	150/20 kV	100	2019
539	Jabar	Pabuaran	150/20 kV	60	2019
540	Jabar	Subang Baru	150 kV	2 LB	2019
541	Jabar	Sukamandi	150/20 kV	60	2019
591	Jateng	Kebasen	150/20 kV	60	2015

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
592	Jateng	Srondol	150/20 kV	60	2015
593	Jateng	Mrica PLTA	150/20 kV	60	2015
594	Jateng	Dieng	150/20 kV	30	2015
595	Jateng	Banyudono	150/20 kV	60	2015
596	Jateng	Lomanis	150/20 kV	60	2015
597	Jateng	Majenang	150/20 kV	60	2015
598	Jateng	Purworejo	150/20 kV	60	2015
599	Jateng	Klaten	150/20 kV	60	2015
600	Jateng	Gombang	150/20 kV	60	2015
601	Jateng	Grogol/Solo Baru	150/20 kV	60	2015
602	Jateng	Kalibakal	150/20 kV	60	2015
603	Jateng	Beringin	150/20 kV	60	2015
604	Jateng	Ungaran	150/20 kV	60	2015
605	Jateng	Tambak Lorok PLTU	150/20 kV	60	2015
606	Jateng	Rawalo	150/20 kV	60	2015
607	Jateng	Sanggrahan	150/20 kV	60	2015
608	Jateng	Secang	150/20 kV	60	2015
609	Jateng	Pandeanlamper	150/20 kV	60	2015
610	Jateng	Pati	150/20 kV	60	2015
611	Jateng	Pekalongan	150/20 kV	60	2015
612	Jateng	Blora	150/20 kV	60	2015
613	Jateng	Bumiayu	150/20 kV	60	2015
614	Jateng	Wonosobo	150/20 kV	60	2015
615	Jateng	Krapyak	150/20 kV	60	2015
616	Jateng	Semanu	150/20 kV	60	2015
617	Jateng	Sragen	150/20 kV	60	2015
618	Jateng	Sragen	150/20 kV	60	2015
619	Jateng	Nguter / Rayon Utama Makmur (RUM)	150 kV	5 LB	2015
620	Jateng	Semen Indonesia	150 kV	3 LB	2015
621	Jateng	Blora	150 kV	2 LB	2015
622	Jateng	Temanggung	150/20 kV	60	2015
623	Jateng	Brebes	150/20 kV	60	2015
624	Jateng	Pudak Payung (GIS)	150/20 kV	60	2015
625	Jateng	Palur Baru/Gondang Rejo	150/20 kV	60	2015
626	Jateng	Sinar Tambang Arta Lestari/Ajibarang	150/20 kV	30	2015
627	Jateng	Cepu	150/20 kV	60	2015
628	Jateng	Pedan	150/20 kV	60	2015
629	Jateng	Apac inti Corpora	150/20 kV	60	2015
630	Jateng	Sritex (Jetis)	150 kV	5 LB	2016
631	Jateng	Semen Indonesia Rembang	150 kV	3 LB	2016
632	Jateng	PLTU Rembang	150 kV	2 LB	2016
633	Jateng	Sluke /PLTU Rembang	150/20 kV	60	2016
634	Jateng	Grogol/Solo Baru	150/20 kV	60	2016
635	Jateng	Mojosongo	150/20 kV	60	2016
636	Jateng	Rembang	150/20 kV	60	2016
637	Jateng	Mranggen	150/20 kV	60	2016
638	Jateng	Pandeanlamper	150/20 kV	60	2016
639	Jateng	Banyudono	150/20 kV	60	2016
640	Jateng	Purwodadi	150/20 kV	60	2016
641	Jateng	Sanggrahan	150/20 kV	60	2016
642	Jateng	Wadaslintang	150/20 kV	30	2016
643	Jateng	Weleri	150/20 kV	60	2016
644	Jateng	Pedan	150/20 kV	60	2016
645	Jateng	Kebasen	150/20 kV	60	2016
646	Jateng	Semen Ultratech	150 kV	3 LB	2016
647	Jateng	Nguntoronadi	150 kV	2 LB	2016
648	Jateng	Semen Grobogan	150/20 kV	120	2016

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
649	Jateng	Kedungombo PLTA	150/20 kV	60	2017
650	Jateng	Weleri	150/20 kV	60	2017
651	Jateng	Kudus II	150/20 kV	60	2017
652	Jateng	New Pemalang	150/20 kV	60	2017
653	Jateng	Tambaklorok PLTU (GIS)	150/20 kV	60	2017
654	Jateng	Comal	150/20 kV	60	2017
655	Jateng	Sluke II (Smelter Rembang)	150 kV	3 LB	2017
656	Jateng	PLTU Rembang	150 kV	2 LB	2017
657	Jateng	Medari	150/20 kV	60	2017
658	Jateng	Semen Nusantara	150/20 kV	60	2017
659	Jateng	Pemalang	150/20 kV	60	2017
660	Jateng	Ampel	150/20 kV	120	2017
661	Jateng	Kebumen	150/20 kV	60	2017
662	Jateng	Cerme	150 kV	2 LB	2017
663	Jateng	Kalibakal II	150/20 kV	60	2018
664	Jateng	Pati II	150/20 kV	120	2018
665	Jateng	Pati	150 kV	2 LB	2018
666	Jateng	Batang	150/20 kV	60	2018
667	Jateng	Purbalingga	150/20 kV	60	2018
668	Jateng	Klaten	150/20 kV	60	2018
669	Jateng	Tambaklorok Baru/Gajah	150/20 kV	60	2018
670	Jateng	Jekulo	150/20 kV	60	2018
671	Jateng	Tegal Kota	150/20 kV	120	2018
672	Jateng	Pandeanlamper II/Banget Ayu	150/20 kV	100	2019
673	Jateng	Pandeanlamper	150 kV	2 LB	2019
674	Jateng	Dieng	150 kV	2 LB	2019
675	Jateng	Sanggrahan II/Rajeg	150/20 kV	60	2019
676	Jateng	Wonosari	150/20 kV	60	2019
709	DIY	Wirobrajan	150/20 kV	60	2015
710	DIY	Kentungan	150/20 kV	60	2015
711	DIY	Wates	150/20 kV	60	2015
712	DIY	Godean	150/20 kV	60	2016
713	DIY	Kentungan	150/20 kV	60	2018
714	DIY	Wates	150 kV	2 LB	2019
715	DIY	Kentungan Baru/Kalasan	150/20 kV	120	2019
716	DIY	Wates	150/20 kV	60	2019
719	Jatim	Genteng	150/20 kV	60	2015
720	Jatim	Balongbendo	150/20 kV	60	2015
721	Jatim	Kenjeran	150/20 kV	60	2015
722	Jatim	Kebonagung	150/20 kV	60	2015
723	Jatim	Bangkalan	150/20 kV	60	2015
724	Jatim	Tandes II/Sambi Kerep	150/20 kV	120	2015
725	Jatim	New Jombang	150/20 kV	60	2015
726	Jatim	Jaya kertas	150 kV	2 LB	2015
727	Jatim	Mliwang	150 kV	1 LB	2015
728	Jatim	PLTU Perak	150 kV	1 LB	2015
729	Jatim	Manyar	150 kV	2 LB	2015
730	Jatim	Bambe	150/20 kV	120	2015
731	Jatim	Karang pilang	150 kV	2 LB	2015
732	Jatim	Sidoarjo	150/20 kV	60	2015
733	Jatim	Cheil Jedang	150 kV	3 LB	2015
734	Jatim	New Jombang	150 kV	2 LB	2015
735	Jatim	Babadan	150/20 kV	60	2015
736	Jatim	Bumi Cokro	150/20 kV	60	2015
737	Jatim	Blitar Baru	70/20 kV	20	2015
738	Jatim	Pier	150/20 kV	60	2015
739	Jatim	Bulukandang	150/20 kV	60	2015

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
740	Jatim	Gili Timur	150/20 kV	30	2015
741	Jatim	Tarik	70/20 kV	30	2015
742	Jatim	Java Fortis	150 kV	3 LB	2015
743	Jatim	Cerme	150/20 kV	60	2015
744	Jatim	Manyar	150/20 kV	60	2015
745	Jatim	PLTA Sengguruh	70/20 kV	30	2015
746	Jatim	Bondowoso	150/20 kV	60	2015
747	Jatim	Banaran	150/20 kV	60	2015
748	Jatim	Tanggul	150/20 kV	60	2015
749	Jatim	The Master Steel (Semangat Pangeran Jayakarta)	150 kV	3 LB	2016
750	Jatim	Surabaya Steel	150 kV	5 LB	2016
751	Jatim	Kedinding (GIS)	150/20 kV	60	2016
752	Jatim	Pelindo III	150 kV	3 LB	2016
753	Jatim	Alta Prima	150 kV	2 LB	2016
754	Jatim	Multi Baja Industri	150 kV	5 LB	2016
755	Jatim	Ngimbang	150 kV	2 LB	2016
756	Jatim	Kertosono	150 kV	2 LB	2016
757	Jatim	Sukolilo	150 kV	2 LB	2016
758	Jatim	Sekarputih	150 kV	2 LB	2016
759	Jatim	Kenjeran	150 kV	2 LB	2016
760	Jatim	Kediri Baru	150 kV	2 LB	2016
761	Jatim	Simogunung (GIS)	150/20 kV	120	2016
762	Jatim	Gempol/New Porong	150/20 kV	60	2016
763	Jatim	Pare	70/20 kV	30	2016
764	Jatim	Wlingi II	150/20 kV	30	2016
765	Jatim	Tulungagung II	150 kV	2 LB	2016
766	Jatim	Tulungagung II	150/20 kV	60	2016
767	Jatim	Kediri	150 kV	2 LB	2016
768	Jatim	Kalisari	150/20 kV	60	2016
769	Jatim	Surabaya Selatan	150 kV	2 LB	2016
770	Jatim	Jember	150/20 kV	60	2016
771	Jatim	Sby Selatan (Wonorejo)	150/20 kV	60	2016
772	Jatim	Kediri Baru (Gitet)	150/20 kV	60	2016
773	Jatim	Undaan (GIS)	150/20 kV	60	2016
774	Jatim	PLTU Pacitan/Sudimoro	150/20 kV	60	2016
775	Jatim	Ngoro	150/20 kV	60	2016
776	Jatim	Sekarputih	150/20 kV	60	2016
777	Jatim	Sengkaling	150/20 kV	60	2016
778	Jatim	Pacitan Baru	150/20 kV	60	2016
779	Jatim	Sumenep	150/20 kV	60	2016
780	Jatim	PLTA Wlingi	150/20 kV	60	2016
781	Jatim	Babat/Baureno	150/20 kV	60	2016
782	Jatim	Probolinggo	150/20 kV	60	2016
783	Jatim	Segoro Madu	150/20 kV	20	2016
784	Jatim	New Buduran/Sedati (GIS)	150/20 kV	120	2017
785	Jatim	Manyar	150/70 kV	60	2017
786	Jatim	Bangil New	150/20 kV	120	2017
787	Jatim	Blimbing Baru	150/20 kV	180	2017
788	Jatim	Pandaan Baru	150/20 kV	120	2017
789	Jatim	Gembong (GIS)	150/20 kV	60	2017
790	Jatim	Kertosono	150/20 kV	60	2017
791	Jatim	Ngimbang	150 kV	2 LB	2017
792	Jatim	Cheil Jedang	150 kV	2 LB	2017
793	Jatim	Lumajang	150/20 kV	60	2017
794	Jatim	Sukolilo	150/20 kV	60	2017
795	Jatim	Tuban	150/20 kV	60	2017

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
796	Jatim	Alta prima	150/20 kV	60	2017
797	Jatim	Wonogiri	150/20 kV	60	2017
798	Jatim	Babat/Baureno	150/20 kV	60	2017
799	Jatim	Ponorogo II	150/20 kV	60	2017
800	Jatim	Mliwang/Dwima Agung	150/20 kV	60	2017
801	Jatim	Jember II / Arjasa	150/20 kV	120	2018
802	Jatim	Cerme	150/20 kV	60	2018
803	Jatim	Bangil	150/20 kV	60	2018
804	Jatim	Jaya Kertas	150/20 kV	60	2018
805	Jatim	Manyar	150/20 kV	60	2018
806	Jatim	Wlingi II	150/20 kV	60	2018
807	Jatim	Banaran	150/20 kV	60	2018
808	Jatim	Sekarputih	150/20 kV	60	2018
809	Jatim	New Jombang	150/20 kV	60	2018
810	Jatim	Krian	150/20 kV	60	2018
811	Jatim	Tulungagung II	150/20 kV	60	2018
812	Jatim	Pamekasan	150/20 kV	60	2018
813	Jatim	Sampang	150/20 kV	60	2018
814	Jatim	Pakis / Malang Timur	150/20 kV	60	2018
815	Jatim	Nganjuk	70/20 kV	30	2018
816	Jatim	Balongbendo	150/20 kV	60	2018
817	Jatim	Segoro Madu	150/20 kV	60	2018
818	Jatim	Karang Pilang	150/20 kV	60	2018
819	Jatim	New Driyorejo	150/20 kV	120	2019
820	Jatim	Magetan Baru	150/20 kV	120	2019
821	Jatim	Manisrejo	150 kV	2 LB	2019
822	Jatim	Trenggalek Baru	150/20 kV	120	2019
823	Jatim	Caruban Baru	150/20 kV	120	2019
824	Jatim	Jember Selatan/Puger	150/20 kV	100	2019
825	Jatim	Leces	150/20 kV	60	2019
826	Jatim	Sekarputih II/Gondang	150/20 kV	100	2019
827	Jatim	Wonokromo	150/20 kV	60	2019
828	Jatim	Sidoarjo	150/20 kV	60	2019
829	Jatim	Sby. Selatan (Wonorejo)	150/20 kV	60	2019
830	Jatim	Kraksaan	150/20 kV	60	2019
831	Jatim	Genteng	150/20 kV	60	2019
832	Jatim	Manisrejo	150/20 kV	60	2019
897	Bali	Payangan	150/20 kV	30	2015
898	Bali	Pesanggaran (GIS)	150/20 kV	13 LB	2015
899	Bali	Celukan Bawang	150/20 kV	60	2015
900	Bali	Payangan	150/20 kV	30	2015
901	Bali	Kapal	150/20 kV	60	2015
902	Bali	Pemaron	150/20 kV	60	2015
903	Bali	Sanur	150/20 kV	60	2015
904	Bali	Amlapura	150/20 kV	60	2015
905	Bali	Sanur II/Padang Galak	150/20 kV	60	2016
906	Bali	Kapal II/Tanah Lot	150/20 kV	60	2017
907	Bali	Nusa Dua II/Pecatu (GIS)	150/20 kV	120	2017
908	Bali	Bandara	150 kV	2 LB	2017
909	Bali	Nusa Dua	150 kV	2 LB	2017
910	Bali	Gilimanuk	150/20 kV	30	2017
911	Bali	Padangsambian	150/20 kV	60	2018
912	Bali	Negara	150/20 kV	60	2019
913	Bali	Payangan	150/20 kV	60	2019
922	Aceh	Subulussalam	150/20 kV	30	2015
923	Aceh	Nagan Raya	150 kV	2 LB	2015
924	Aceh	Meulaboh	150/20 kV	30	2015

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
925	Aceh	Bireun	150 kV	2 LB	2016
926	Aceh	Takengon	150/20 kV	60	2016
927	Aceh	Kuta Cane	150/20 kV	30	2015
928	Aceh	Banda Aceh	150 kV	2 LB	2017
929	Aceh	Ulee Kareng	150/20 kV	120	2017
930	Aceh	Ulee Kareng	150 kV	2 LB	2017
931	Aceh	Krueng Raya	150/20 kV	30	2017
932	Aceh	Nagan Raya	150 kV	2 LB	2015
933	Aceh	Blang Pidie	150/20 kV	30	2015
934	Aceh	Blang Pidie	150 kV	2 LB	2015
935	Aceh	Tapak Tuan	150/20 kV	30	2017
936	Aceh	Arun/Cot Trueng	150/20 kV	60	2015
937	Aceh	Samalanga	150/20 kV	30	2017
938	Aceh	Takengon	150 kV	2 LB	2017
939	Aceh	Blang Kjeran	150/20 kV	30	2017
940	Aceh	Meulaboh	150 kV	2 LB	2018
941	Aceh	Calang	150/20 kV	30	2018
942	Aceh	Subulussalam	150 kV	2 LB	2018
943	Aceh	Singkil	150/20 kV	30	2018
944	Aceh	Calang	150 kV	2 LB	2019
945	Aceh	Banda Aceh	150 kV	2 LB	2019
946	Aceh	Lampisang	150/20 kV	60	2019
950	Aceh	Tualang Cut	150/20 kV	30	2015
951	Aceh	Tualang Cut	150/20 kV	50	2017
952	Aceh	Alue Batee/Idie	150/20 kV	40	2016
954	Aceh	Lhokseumawe	150/20 kV	30	2015
955	Aceh	Bireun	150/20 kV	60	2017
956	Aceh	Banda Aceh/ Lambaroe	150/20 kV	60	2015
961	Aceh	PLTU Nagan Raya	150/20 kV	60	2016
962	Aceh	Meulaboh	150/20 kV	30	2015
963	Aceh	Ulee Kareng	150/20 kV	60	2019
964	Sumut	Sidikalang	150 kV	2 LB	2015
965	Sumut	Brastagi	150 kV	2 LB	2015
966	Sumut	Sidikalang	150 kV	2 LB	2016
967	Sumut	Dolak sanggul	150/20 kV	30	2015
968	Sumut	Tanjung Pura	150/20 kV	60	2016
969	Sumut	Galang	150/20 kV	30	2015
970	Sumut	Pangururan	150/20 kV	30	2016
971	Sumut	Tele	150 kV	2 LB	2016
972	Sumut	Labuhan Bilik	150/20 kV	60	2017
973	Sumut	Rantau Prapat	150 kV	2 LB	2017
974	Sumut	Perdagangan	150/20 kV	120	2016
975	Sumut	Perdagangan	150/20 kV		2016
976	Sumut	Dolak sanggul	150 kV	2 LB	2018
977	Sumut	Parlilitan	150/20 kV	30	2018
978	Sumut	Namurambe	150 kV	2 LB	2015
979	Sumut	Namurambe	150 kV	2 LB	2017
980	Sumut	Tanjung Morawa	150 kV	2 LB	2015
981	Sumut	Negeri Dolok	150/20 kV	30	2016
982	Sumut	Galang	150 kV	2 LB	2016
983	Sumut	Dolak sanggul	150 kV	2 LB	2018
984	Sumut	Pakkat	150/20 kV	30	2018
985	Sumut	Gunung Tua	150 kV	2 LB	2016
986	Sumut	Sibuhuan	150/20 kV	60	2016
987	Sumut	Brastagi	150 kV	2 LB	2015
988	Sumut	GIS Listrik	150 kV	1 LB	2018
989	Sumut	Helvetia	150/20 kV	160	2017

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
990	Sumut	Sei Kera	150/20 kV	160	2018
991	Sumut	Pancing	150 kV	2 LB	2017
992	Sumut	Padang Sidempuan	150 kV	2 LB	2016
993	Sumut	Panyabungan	150/20 kV	30	2017
994	Sumut	Pematang Siantar	150 kV	2 LB	2017
995	Sumut	Tanah Jawa	150/20 kV	30	2016
996	Sumut	Selayang	150/20 kV	160	2017
997	Sumut	Denai	150 kV	2 LB	2017
998	Sumut	KIM II	150 kV	2 LB	2017
999	Sumut	Pancing	150/20 kV	120	2017
1000	Sumut	Sidikalang	150 kV	2 LB	2016
1001	Sumut	Salak	150/20 kV	60	2016
1002	Sumut	KIM 2	150/20 kV	80	2017
1003	Sumut	Kisaran	150 kV	2 LB	2017
1004	Sumut	Tanjung Balai	150/20 kV	60	2017
1005	Sumut	Dairi	150/20 kV	30	2016
1006	Sumut	Pangkalan Susu	150/20 kV	30	2018
1007	Sumut	Pangkalan Brandan	150 kV	2 LB	2018
1008	Sumut	Padang Sidempuan	150 kV	2 LB	2016
1009	Sumut	New Padang Sidempuan	150/20 kV	30	2016
1010	Sumut	Payegeli	150 kV	1 LB	2017
1011	Sumut	GIS Listrik	150 kV	1 LB	2017
1012	Sumut	GIS Batu Gingging	150/20 kV	160	2018
1013	Sumut	Panyabungan	150 kV	2 LB	2018
1014	Sumut	Natal	150/20 kV	10	2018
1015	Sumut	Binjai	150 kV	2 LB	2018
1016	Sumut	Kuala	150/20 kV	60	2018
1017	Sumut	Titi Kuning	150 kV	1 LB	2018
1018	Sumut	Sei Kera	150 kV	1 LB	2018
1019	Sumut	Teladan	150/20 kV	60	2018
1020	Sumut	Sarulla	150/20 kV	30	2016
1021	Sumut	Simangkok	150 kV	2 LB	2019
1022	Sumut	Aek Kanopan	150 kV	2 LB	2019
1024	Sumut	Glugur	150/20 kV	60	2016
1025	Sumut	GIS Listrik	150/20 kV	60	2015
1026	Sumut	Titi Kuning	150/20 kV	60	2015
1027	Sumut	Denai	150/20 kV	60	2016
1031	Sumut	Sei Rotan	150/20 kV	50	2017
1032	Sumut	Sei Rotan	150/20 kV	50	2019
1036	Sumut	Payageli	150/20 kV	60	2015
1040	Sumut	Kualanamu	150/20 kV	60	2015
1042	Sumut	Binjai	150/20 kV	60	2019
1043	Sumut	Pangkalan Brandan	150/20 kV	30	2015
1044	Sumut	Pangkalan Brandan	150/20 kV	60	2017
1046	Sumut	Tebing Tinggi	150/20 kV	60	2016
1050	Sumut	Kuala Tanjung	150/20 kV	80	2017
1053	Sumut	Gunung Para	150/20 kV	30	2017
1055	Sumut	Aek Kanopan	150/20 kV	60	2016
1056	Sumut	Rantau Prapat	150/20 kV	60	2016
1058	Sumut	Kota Pinang	150/20 kV	60	2015
1062	Sumut	Tarutung	150/20 kV	60	2018
1063	Sumut	Tarutung	150/20 kV	60	2019
1065	Sumut	Padang Sidempuan	150/20 kV	60	2015
1067	Sumut	Martabe	150/20 kV	60	2018
1068	Sumut	Negeri Dolok	150/20 kV	60	2019
1069	Sumut	Tanjung Pura	150/20 kV	60	2016
1071	Sumut	Labuhan Bilik	150/20 kV	60	2018

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
1073	Sumut	KIM2	150/20 kV	80	2018
1079	Sumut	Perdagangan	150/20 kV	80	2019
1081	Sumut	Galang	150/20 kV	80	2018
1093	Riau	Koto Panjang	150/20 kV	30	2015
1094	Riau	Garuda Sakti	150/20 kV	60	2015
1095	Riau	Pasir Putih	150/20 kV	60	2015
1096	Riau	Garuda Sakti	150 kV	2 LB	2015
1097	Riau	New Garuda Sakti	150/20 kV	120	2015
1098	Riau	Pasir Pangarayan	150/20 kV	30	2015
1099	Riau	Bangkinang	150 kV	2 LB	2015
1100	Riau	Rengat	150/20 kV	60	2015
1101	Riau	Teluk Kuantan	150 kV	2 LB	2015
1102	Riau	Pangkalan Kerinci	150/20 kV	60	2016
1105	Riau	Tenayan	150/20 kV	60	2015
1106	Riau	Tenayan	150/20 kV	2 LB	2017
1107	Riau	Teluk Lembu	150 kV	2 LB	2015
1109	Riau	KID	150/20 kV	60	2015
1110	Riau	Dumai	150 kV	2 LB	2015
1111	Riau	Perawang	150/20 kV	60	2016
1112	Riau	Tenayan	150 kV	2 LB	2016
1113	Riau	GIS Kota Pekanbaru/Arengka	150/20 kV	80	2016
1114	Riau	Tembilahan	150/20 kV	30	2016
1115	Riau	Bagan Siapi-api	150/20 kV	30	2016
1116	Riau	Dumai	150 kV	2 LB	2016
1117	Riau	Siak Sri Indrapura	150/20 kV	60	2017
1118	Riau	Tenayan	150 kV	2 LB	2017
1119	Riau	Lipat Kain	150/20 kV	60	2018
1120	Riau	Bangkinang	150 kV	2 LB	2018
1121	Riau	Bangkinang	150/20 kV	60	2016
1122	Riau	KID	150 kV	2 LB	2016
1123	Riau	Teluk Kuantan	150/20 kV	60	2017
1124	Riau	Duri	150/20 kV	60	2017
1125	Riau	Rengat	150/20 kV	60	2017
1126	Riau	Bagan Batu	150/20 kV	60	2018
1127	Riau	Pasir Putih	150/20 kV	60	2016
1130	Riau	KIT Tenayan	150/20 kV	60	2019
1152	Kepri	Pulau Ngenang	150/20 kV	10	2015
1153	Kepri	Sri Bintan	150/20 kV	30	2015
1154	Kepri	Air Raja	150/20 kV	60	2015
1155	Kepri	Kijang	150/20 kV	60	2015
1156	Kepri	Tanjung Uban	150/20 kV	60	2015
1158	Kepri	Air Raja	150/20 kV	60	2019
1161	Sumbar	PIP	150/20 kV	30	2015
1162	Sumbar	Padang Panjang	150/20 kV	30	2015
1163	Sumbar	Sungai Penuh (TB)	150/20 kV	30	2015
1164	Sumbar	Padang Luar	150/20 kV	60	2015
1165	Sumbar	Simpang Empat	150/20 kV	20	2015
1166	Sumbar	Payakumbuh	150/20 kV	30	2015
1167	Sumbar	Kambang	150/20 kV	30	2015
1168	Sumbar	PLTU Teluk Sirih	150 kV	2 LB	2015
1169	Sumbar	Sungai Penuh	150/20 kV	30	2015
1170	Sumbar	Bangko	150 kV	2 LB	2015
1171	Sumbar	Simpang Haru	150/20 kV	60	2016
1173	Sumbar	Kiliranjao	150/20 kV	30	2017
1174	Sumbar	Batusangkar	150/20 kV	20	2016
1175	Sumbar	Bungus	150/20 kV	30	2016
1176	Sumbar	Maninjao	150/20 kV	60	2016

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
1177	Sumbar	Payakumbuh	150/20 kV	60	2017
1178	Sumbar	Sungai Rumbai/Gunung Medan	150/20 kV	60	2016
1179	Sumbar	Bingkuang/GIS Kota Padang	150/20 kV	80	2016
1180	Sumbar	Bingkuang/GIS Kota Padang	150/20 kV	80	2016
1181	Sumbar	PIP	150/20 kV	60	2017
1182	Sumbar	Pasaman	150/20 kV	60	2018
1183	Sumbar	Simpang Empat	150 kV	2 LB	2018
1184	Sumbar	Muaralaboh/Batang Sangir	150/20 kV	60	2017
1185	Sumbar	Sungai Rumbai/Gunung Medan	150 kV	2 LB	2017
1186	Sumbar	Muaralaboh/Batang Sangir	150 kV	2 LB	2018
1187	Sumbar	Solok	150 kV	2 LB	2017
1193	Sumbar	Kambang	150 kV	2 LB	2019
1194	Jambi	Sabak	150/20 kV	30	2015
1195	Jambi	Muaro Bungo	150/20 kV	60	2015
1196	Jambi	Seigelam	150/20 kV	60	2015
1197	Jambi	Sarolangun	150/20 kV	30	2015
1198	Jambi	Muara Bulian	150 kV	2 LB	2015
1199	Jambi	New Aurduri/Seibertam	150/20 kV	120	2015
1200	Jambi	Tebo	150/20 kV	60	2016
1201	Jambi	GIS Kasang	150/20 kV	120	2018
1202	Jambi	Payoselincih (line Bay GIS)	150 kV	2 LB	2017
1203	Jambi	Seigelam	150 kV	2 LB	2017
1205	Jambi	Kuala Tungkal	150/20 kV	60	2018
1206	Jambi	Sabak	150 kV	2 LB	2018
1207	Jambi	Aur Duri	150/20 kV	30	2018
1208	Jambi	Tebo	150/20 kV	60	2018
1209	Jambi	Bangko	150/20 kV	60	2018
1210	Jambi	Sungai Penuh	150 kV	2 LB	2019
1211	Jambi	Sarolangun	150/20 kV	60	2016
1219	Bengkulu	Pulau Baai	150/20 kV	120	2016
1220	Bengkulu	Pekalongan	150 kV	2 LB	2016
1221	Bengkulu	Arga makmur	70/20 kV	30	2018
1222	Bengkulu	Tes	150 kV	2 LB	2016
1223	Bengkulu	Arga makmur	150/20 kV	120	2019
1224	Bengkulu	Pulau Baai	150 kV	2 LB	2019
1225	Bengkulu	Bintuhan	150/20 kV	30	2018
1226	Bengkulu	Manna	150 kV	2 LB	2018
1227	Bengkulu	Muko Muko	150/20 kV	30	2019
1228	Bengkulu	Pekalongan	150 kV	2 LB	2019
1229	Bengkulu	Arga Makmur	150 kV	2 LB	2019
1231	Bengkulu	Pekalongan	150/20 kV	60	2017
1236	Bengkulu	Arga makmur	150/20 kV	60	2018
1240	Sumsel	Lahat	150 kV	2 LB	2015
1241	Sumsel	Kenten	150/20 kV	60	2015
1242	Sumsel	Sekayu	150/20 kV	30	2015
1243	Sumsel	Betung	150 kV	2 LB	2015
1244	Sumsel	Gumawang	150 kV	2 LB	2015
1245	Sumsel	Tebing Tinggi	150/20 kV	30	2015
1246	Sumsel	Lubuk Linggau	150 kV	2 LB	2015
1247	Sumsel	Kayu Agung	150/20 kV	30	2016
1248	Sumsel	Mariana	150 kV	2 LB	2016
1249	Sumsel	Tanjung Api-Api	150 kV	2 LB	2017
1250	Sumsel	Landing Point Sumatera-Bangka	150 kV	2 LB	2017
1251	Sumsel	Sungai Lilin	150/20 kV	60	2015
1252	Sumsel	Gandus	150/20 kV	60	2015
1253	Sumsel	Lumut Balai	150/20 kV	30	2017
1254	Sumsel	Kayu Agung	150 kV	2 LB	2015

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
1255	Sumsel	Gumawang	150 kV	2 LB	2015
1256	Sumsel	Jakabaring	150/20 kV	30	2015
1257	Sumsel	Tugumulyo	150/20 kV	30	2016
1258	Sumsel	GIS Kota Barat	150/20 kV	60	2017
1259	Sumsel	GIS Kota Timur	150/20 kV	60	2017
1260	Sumsel	kenten	150 kV	1 LB	2017
1261	Sumsel	Gandus	150 kV	1 LB	2017
1262	Sumsel	Keramasan	150 kV	1 LB	2017
1263	Sumsel	Muara Dua	150/20 kV	30	2017
1264	Sumsel	Martapura	150 kV	2 LB	2017
1265	Sumsel	Muara Rupit	150/20 kV	30	2017
1266	Sumsel	Sarolangun	150 kV	2 LB	2017
1267	Sumsel	Martapura	150/20 kV	30	2016
1268	Sumsel	Pendopo	150/20 kV	30	2016
1269	Sumsel	Baturaja	150 kV	2 LB	2018
1272	Sumsel	Talang Ratu	150/70 kV	20	2015
1273	Sumsel	Prabumulih	150/20 kV	60	2015
1274	Sumsel	Pagar Alam	150/20 kV	20	2015
1275	Sumsel	Lubuk Linggau	150/20 kV	30	2015
1276	Sumsel	Lahat	150/20 kV	20	2015
1277	Sumsel	Gumawang	150/20 kV	30	2015
1278	Sumsel	Betung	150/20 kV	30	2015
1279	Sumsel	Baturaja	150/20 kV	30	2015
1280	Sumsel	Mariana	150/20 kV	60	2016
1281	Sumsel	Bukit Siguntang	150/70 kV	30	2016
1282	Sumsel	Simpang Tiga	150/20 kV	60	2017
1283	Sumsel	Pagar Alam	150/20 kV	60	2017
1284	Sumsel	Lahat	150/20 kV	60	2017
1285	Sumsel	Gunung Megang	150/20 kV	60	2017
1286	Sumsel	Gandus	150/20 kV	80	2017
1287	Sumsel	Boom Baru	150/70 kV	30	2017
1288	Sumsel	Betung	150/20 kV	30	2017
1289	Sumsel	Kayu Agung	150/20 kV	80	2018
1290	Sumsel	Jakabaring	150/20 kV	60	2018
1291	Sumsel	Kenten	150/20 kV	60	2018
1317	Lampung	Kota Agung	150/20 kV	60	2015
1318	Lampung	Pagelaran	150 kV	2 LB	2015
1319	Lampung	Liwa	150/20 kV	30	2015
1320	Lampung	Bukit Kemuning	150 kV	2 LB	2015
1321	Lampung	Tegineneng	150/20 kV	60	2015
1322	Lampung	Sribawono	150/20 kV	60	2015
1323	Lampung	Kotabumi	150/20 kV	60	2015
1324	Lampung	Sukarame	150/20 kV	60	2015
1325	Lampung	Gedong Tataan	150/20 kV	60	2017
1326	Lampung	Pagelaran	150 kV	2 LB	2017
1327	Lampung	Teluk Ratai	150/20 kV	30	2017
1328	Lampung	Gedong Tataan	150 kV	2 LB	2017
1329	Lampung	Ketapang	150/20 kV	30	2017
1330	Lampung	Kalianda	150 kV	2 LB	2017
1331	Lampung	Mesuji	150/20 kV	30	2015
1332	Lampung	Teluk Betung	150/20 kV	60	2015
1333	Lampung	Sutami	150/20 kV	60	2015
1334	Lampung	Blambangan Umpu	150/20 kV	16	2016
1335	Lampung	Dipasena	150/20 kV	120	2017
1336	Lampung	Seputih banyak	150 kV	2 LB	2016
1337	Lampung	Mesuji	150 kV	2 LB	2016

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
1338	Lampung	Jati Agung	150/20 kV	60	2016
1339	Lampung	Sukarame	150 kV	2 LB	2016
1340	Lampung	Pakuan Ratu/Way Kanan	150/20 kV	30	2016
1341	Lampung	Blambangan Umpu	150 kV	4 LB	2016
1342	Lampung	Bandar Surabaya	150/20 kV	60	2016
1343	Lampung	Tarahan	150/20 kV	60	2016
1344	Lampung	Ulu Belu	150 kV	2 LB	2016
1345	Lampung	Sribawono	150 kV	2 LB	2017
1346	Lampung	Langkapura	150/20 kV	60	2017
1347	Lampung	Tarahan	150/20 kV	60	2018
1348	Lampung	Mesuji	150/20 kV	60	2019
1349	Lampung	Kota Agung	150 kV	2 LB	2018
1350	Lampung	Tegineneng	150/20 kV	60	2018
1351	Lampung	Seputih banyak	150/20 kV	60	2018
1352	Lampung	Jati Agung	150/20 kV	60	2018
1354	Lampung	Bengkunat	150/20 kV	30	2019
1355	Lampung	Liwa	150 kV	2 LB	2019
1356	Lampung	KIM/Tenggamus	150/20 kV	120	2019
1357	Lampung	Liwa	150/20 kV	60	2017
1358	Lampung	New Tarahan	150/20 kV	60	2019
1359	Lampung	Bengkunat	150 kV	2 LB	2019
1365	Lampung	GIS Garuntang	150/20 kV	60	2019
1373	Lampung	Menggala	150/20 kV	60	2017
1380	Lampung	Menggala	150/20 kV	60	2016
1381	Babel	Pangkal Pinang	150/20 kV	4 LB	2015
1382	Babel	Manggar	70/20 kV	30	2016
1383	Babel	Kelapa	150/20 kV	30	2015
1384	Babel	Koba	150/20 kV	30	2015
1385	Babel	Sungai Liat	150/20 kV	60	2016
1386	Babel	Mentok	150/20 kV	30	2016
1387	Babel	Toboali	150/20 kV	30	2016
1388	Babel	Kelapa	150/20 kV	2 LB	2016
1389	Babel	Air Anyir	150/20 kV	60	2015
1390	Babel	Tj. Batu Itam	150/20 kV	30	2015
1391	Babel	Dukong	70/20 kV	30	2016
1392	Babel	Pangkal Pinang	150/20 kV	30	2016
1393	Babel	Sungai Liat	150/20 kV	60	2018
1394	Babel	Kelapa	150/20 kV	60	2018
1395	Babel	Air Anyir	150/20 kV	60	2018
1401	Babel	Pangkal Pinang 2	150/20 kV	60	2018
1404	Babel	Pangkal Pinang 2	150/20 kV	60	2019
1406	Babel	Pangkal Pinang 2	150/20 kV	60	2019
1408	Sumut	Binjai	275/150 kV	250	2015
1409	Sumsel	Lahat	275/150 kV	1,000	2015
1410	Sumsel	Lubuk Linggau	275/150 Kv	250	2015
1411	Jambi	Bangko	275/150 kV	250	2015
1412	Jambi	Muaro Bungo	275/150 kV	250	2015
1413	Sumbar	Kiliranjao	275/150 kV	250	2015
1414	Sumsel	Lubuk Linggau	275 kV	0	2015
1415	Jambi	Bangko	275 kV	0	2015
1416	Jambi	Muaro Bungo	275 kV	0	2015
1417	Sumbar	Kiliranjao	275 kV	0	2015
1418	Sumsel	Lahat	275/150 kV	500	2015
1419	Sumsel	Lubuk Linggau	275/150 kV	250	2015
1420	Jambi	Bangko	275/150 kV	250	2015
1421	Jambi	Muaro Bungo	275/150 kV	250	2015
1422	Sumbar	Kiliranjao	275/150 kV	250	2015

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
1423	Sumut	Binjai	275 kV	2 LB	2015
1424	Sumut	Galang	275/150 kV	500	2015
1425	Sumut	Galang	275/150 kV	500	2015
1426	Sumut	Simangkok	275 kV	2 LB	2015
1427	Sumut	Simangkok	275/150 kV	250	2017
1428	Jambi	New Aur Duri	275/150 kV	500	2015
1429	Sumbar	Kiliranjao	275 kV	0	2015
1430	Sumbar	Payakumbuh	275/150 kV	250	2015
1431	Sumsel	Betung	275/150 kV	250	2016
1432	Sumsel	Sungai Lilin	275/150 kV	250	2018
1433	Sumsel	Bayung Lincir/PLTU Sumsel - 5	275 kV	0	2015
1434	Sumsel	Betung	275/150 kV	250	2017
1435	Sumut	Sarulla	275/150 kV	0	2016
1436	Sumut	Sarulla	275 kV	2 LB	2016
1437	Sumbar	Sungai Rumbai	275/150 kV	500	2016
1438	Sumut	Sarulla	275/150 kV	250	2017
1439	Sumut	New Padang Sidempuan	275/150 kV	500	2016
1440	Sumbar	New Padang Sidempuan	275 kV	0	2016
1441	Sumbar	Payakumbuh	275 kV	2 LB	2016
1442	Riau	Perawang	275/150 kV	500	2016
1443	Sumbar	Payakumbuh	275 kV	0	2016
1444	Sumsel	Gumawang	275/150 kV	500	2016
1445	Sumsel	Lahat	275 kV	2 LB	2016
1446	Sumsel	Lumut Balai	275/150 kV	500	2016
1447	Sumut	Binjai	275/150 kV	250	2016
1448	Sumut	Pangkalan Susu	275/150 kV	500	2016
1450	Lampung	Lampung	275/150 kV	500	2019
1451	Sumut	Pangkalan Susu	275/150 kV	500	2017
1452	Aceh	Arun/Lhokseumawe	275/150 kV	500	2017
1453	Aceh	Langsa	275/150 kV	500	2018
1454	Aceh	Bireun	275/150 kV	500	2017
1455	Aceh	Ulee Kareng	275/150 kV	500	2018
1456	Aceh	PLTU Meulaboh/Nagan Raya	275/150 kV	500	2019
1457	Aceh	PLTU Meulaboh/Nagan Raya	275/150 kV	500	2019
1458	Riau	Perawang	275/150 kV	500	2018
1459	Sumut	Sarulla	275 kV	2 LB	2019
1460	Sumut	Rantau Prapat	275/150 kV	750	2019
1461	Sumsel	Muara Enim	275/150 kV	500	2019
1462	Sumsel	Betung	275 kV	2 LB	2019
1463	Sumsel	Betung	275 kV	2 LB	2019
1464	Sumsel	Palembang/Kenten	275/150 kV	500	2018
1465	Sumsel	Betung	275/150 kV	500	2018
1466	Sumsel	Gumawang	275 kV	2 LB	2018
1467	Sumsel	Lumut Balai	275 kV	2 LB	2019
1471	Riau	RIAU 2	500/275 kV	1,000	2017
1472	Riau	RIAU 1	500/150 kV	1,000	2017
1474	Jambi	Jambi 2	500/275 kV	1,000	2017
1475	Jambi	Jambi 1	500 kV	0	2019
1476	Sumsel	Sumsel 1	500/275 kV	2 LB	2019
1477	Sumsel	Sumsel 1	500 kV	2 LB	2019
1478	Sumsel	Sumsel 1	500 kV	4 LB	2019
1484	Riau	New Garuda Sakti HVDC Sta. Converter	500 kV DC	600	2019
1485	Sumsel	Muara Enim	500 kV DC	0	2019
1486	Lampung	Ketapang Switching Station	500 kV DC	0	2019
1487	Kalbar	Kota Baru	150/20 kV	30	2015
1488	Kalbar	Parit Baru	150/20 kV	2 LB	2015
1489	Kalbar	Sei Raya	150/20 kV	2 LB	2015

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
1490	Kalbar	PLTU Singkawang (Perpres)/Kura2	150/20 kV	30	2017
1491	Kalbar	Sambas	150/20 kV	30	2015
1492	Kalbar	Tayan	150/20 kV	30	2016
1493	Kalbar	Siantan	150/20 kV	2 LB	2015
1494	Kalbar	Ngabang	150/20 kV	30	2015
1495	Kalbar	Bengkayang	150/20 kV	30	2015
1496	Kalbar	Sanggau	150/20 kV	30	2017
1497	Kalbar	Tayan	150/20 kV	4 LB	2015
1498	Kalbar	Tayan	150/20 kV	2 LB	2016
1499	Kalbar	Sekadau	150/20 kV	30	2017
1500	Kalbar	Singkawang	150/20 kV	60	2015
1501	Kalbar	Sintang	150/20 kV	60	2017
1502	Kalbar	Nanga Pinoh	150/20 kV	30	2018
1503	Kalbar	Sanggau	150/20 kV	30	2019
1504	Kalbar	Sintang	150/20 kV	2 LB	2018
1505	Kalbar	Sukadana	150/20 kV	30	2018
1506	Kalbar	Sandai	150/20 kV	30	2018
1507	Kalbar	Kota Baru 2	150/20 kV	30	2019
1508	Kalbar	Parit Baru	150/20 kV	60	2018
1509	Kalbar	Ketapang	150/20 kV	60	2018
1510	Kalbar	Putussibau	150/20 kV	30	2017
1511	Kalbar	Sintang	150/20 kV	2 LB	2017
1512	Kalbar	Nanga Pinoh	150/20 kV	2 LB	2019
1513	Kalbar	Sambas	150/20 kV	30	2018
1514	Kalbar	Siantan	150/20 kV	60	2018
1515	Kalbar	Kota Baru	150/20 kV	30	2016
1516	Kalbar	Bengkayang	275/150 kV	250	2015
1517	Sulsel	Sengkang, Ext LB	150 kV	2 LB	2015
1518	Sulsel	Palopo	150/20 kV	30	2015
1519	Sulsel	Siwa, Ext 4 LB	150 kV	4 LB	2015
1520	Sulsel	Malili + 4 LB	150/20 kV	30	2015
1521	Sulsel	Sungguminasa	150/20 kV	60	2015
1522	Sulsel	Siwa	150/20 kV	30	2015
1523	Sulsel	Bantaeng	150/20 kV	30	2015
1524	Sultra	Kolaka - (GI Baru) + 2 LB	150/20 kV	30	2015
1525	Sultra	Lasusua - (GI Baru) + 4 LB	150/20 kV	30	2015
1526	Sultra	Kolaka, Ext 4 LB	150 kV	4 LB	2015
1527	Sulbar	Pasangkayu	150/20 kV	30	2015
1528	Sulut	Kema/Tanjung Merah	150/20 kV	30	2015
1529	Sulut	Paniki	150/20 kV	30	2015
1530	Gorontalo	PLTU Gorontalo/Anggrek	150/20 kV	10	2015
1531	Gorontalo	Botupinge	150/20 kV	60	2015
1532	Maluku	Sirimau	70/20 kV	40	2015
1533	Maluku	Passo	70/20 kV	20	2015
1534	Maluku	Passo	70 kV	2 LB	2015
1535	Papua	Skyland	70/20 kV	20	2015
1536	Papua	Sentani/Waena	70/20 kV	20	2015
1537	Kalsel	Tanjung Ext LB (Perbatasan)	150 kV	2 LB	2015
1538	Kalsel	Banjarmasin/Ulin	70/20 kV	30	2015
1539	Kalsel	Tanjung Ext LB	150 kV	2 LB	2015
1540	Kalteng	Sampit Ext LB	150 kV	2 LB	2015
1541	Kalteng	Sampit Ext LB (PLTU)	150 kV	2 LB	2015
1542	Kalteng	Buntok	150/20 kV	30	2015
1543	Kalteng	Buntok Ext LB	150 kV	2 LB	2015
1544	Kalteng	Muara Teweh	150/20 kV	30	2015
1545	Kalteng	Muara Teweh Ext LB (PLTG)	150 kV	2 LB	2015
1546	Kaltim	Bukuan/Palaran	150/20 kV	60	2015

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
1547	Kaltim	Kuaro / Tanah Grogot	150/20 kV	20	2015
1548	Kaltim	Tenggarong / Bukit Biru	150/20 kV	30	2015
1549	Kaltim	Senipah	150/20 kV	30	2015
1550	Kaltim	Petung	150/20 kV	30	2015
1551	NTB	Labuhan/Sumbawa	70/20 kV	30	2015
1552	NTB	Pringgabaya	150 kV	2 LB	2015
1553	NTB	Dompur	70/20 kV	20	2015
1554	NTB	Bonto	70/20 kV	10	2015
1555	NTB	Bima	70/20 kV	20	2015
1556	NTB	Woha	70/20 kV	20	2015
1557	NTB	Taliwang	70/20 kV	30	2015
1558	NTB	Sengkol	150/20 kV	30	2015
1559	NTB	Sape	150/20 kV	20	2015
1560	NTT	Maumere	70/20 kV	10	2015
1561	NTT	Naibonat	70/20 kV	20	2015
1562	NTT	Nonohonis	70/20 kV	20	2015
1563	NTT	Kefamenanu	70/20 kV	20	2015
1564	NTT	Kefamenanu	70/20 kV	2 LB	2015
1565	NTT	Atambua	70/20 kV	20	2015
1566	NTT	Atapupu	70/20 kV	10	2015
1567	NTT	Labuan Bajo	70/20 kV	20	2015
1568	NTT	Bajawa	70/20 kV	20	2015
1569	NTT	Ruteng	70/20 kV	20	2015
1570	Sulsel	Pinrang	150/20 kV	30	2016
1571	Sulsel	Panakkukang	150/20 kV	60	2016
1572	Sulsel	Keera	150/20 kV	30	2016
1573	Sulsel	Daya Baru/Pattalasang + 4 LB	150/20 kV	60	2016
1574	Sulsel	Enrekang	150/20 kV	30	2016
1575	Sulsel	Maros	150/20 kV	30	2016
1576	Sulsel	Wotu - (GI Baru) + 2 LB	150/20 kV	30	2016
1577	Sulsel	KIMA Maros	150/20 kV	60	2016
1578	Sulsel	Lanna	150/20 kV	30	2016
1579	Sulsel	Panakkukang Baru/Bolangi	150/20 kV	60	2016
1580	Sulsel	KIMA Makassar	150/20 kV	60	2016
1581	Sulsel	Soppeng	150/20 kV	60	2016
1582	Sulsel	Sidrap	150/20 kV	30	2016
1583	Sulsel	Bontoala (GIS)	150/20 kV	60	2016
1584	Sulsel	Punagaya	150/20 kV	30	2016
1585	Sulsel	Panakkukang	150/20 kV	60	2016
1586	Sulsel	Tanjung Bunga	150/20 kV	60	2016
1587	Sulsel	Palopo	150/20 kV	60	2016
1588	Sulsel	Masamba	150/20 kV	30	2016
1589	Sulsel	Bantaeng (Smelter)	150/20 kV	8 LB	2016
1590	Sulsel	Sungguminasa	150/20 kV	60	2016
1591	Sultra	Kendari	150/20 kV	30	2016
1592	Sultra	Unaaha + 4 LB	150/20 kV	60	2016
1593	Sultra	Kendari - IBT 2x31,5 MVA	150/70 kV	60	2016
1594	Sultra	Kendari, Ext 4 LB	150 kV	4 LB	2016
1595	Sulbar	Mamuju	150/20 kV	60	2016
1596	Sulut	Kawangkoan	150/20 kV	60	2016
1597	Sulut	Tomohon	150/20 kV	30	2016
1598	Sulut	Otam	150/20 kV	30	2016
1599	Sulut	Molibagu	150/20 kV	20	2016
1600	Sulut	Teling (GIS)	150/20 kV	60	2016
1601	Sulut	Likupang (IBT)	150/70 kV	60	2016
1602	Sulut	Tasik Ria	70/20 kV	30	2016
1603	Sulut	Tonsealama	70/20 kV	30	2016

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
1604	Gorontalo	Isimu	150/20 kV	30	2016
1605	Sulteng	Silae	150/20 kV	60	2016
1606	Sulteng	Palu Baru	150/20 kV	30	2016
1607	Sulteng	Parigi	70/20 kV	30	2016
1608	Sulteng	Moutong	150/20 kV	30	2016
1609	Sulteng	Poso	150/20 kV	30	2016
1610	Sulteng	Bangkir	150/20 kV	20	2016
1611	Maluku	Sirimau	70/20 kV	20	2016
1612	Kalsel	Tanjung	150/20 kV	30	2016
1613	Kalsel	Cempaka	150/20 kV	60	2016
1614	Kalsel	Bandara	150/20 kV	60	2016
1615	Kalsel	Satui	150/20 kV	30	2016
1616	Kalsel	Trisakti (IBT)	150/70 kV	60	2016
1617	Kalsel	Trisakti	150/20 kV	60	2016
1618	Kalsel	Batulicin	150/20 kV	30	2016
1619	Kalsel	Mantuil	150/20 kV	60	2016
1620	Kalsel	Pulang Pisau	150/20 kV	30	2016
1621	Kalsel	Rantau	150/20 kV	30	2016
1622	Kalsel	Tanjung Ext LB (PLTU IPP)	150 kV	2 LB	2016
1623	Kalsel	Barikin	150/20 kV	60	2016
1624	Kalteng	Sampit	150/20 kV	30	2016
1625	Kalteng	Pangkalan Bun	150/20 kV	60	2016
1626	Kalteng	Parenggean	150/20 kV	30	2016
1627	Kalteng	New Palangkaraya	150/20 kV	60	2016
1628	Kalteng	Puruk Cahu	150/20 kV	30	2016
1629	Kaltim	Sambutan	150/20 kV	60	2016
1630	Kaltim	Kariangau	150/20 kV	60	2016
1631	Kaltim	Industri/Gunung Malang	150/20 kV	60	2016
1632	Kaltim	Sei Kleidang / Harapan Baru	150/20 kV	60	2016
1633	Kaltim	New Industri	150/20 kV	60	2016
1634	Kaltim	Kotabangun	150/20 kV	20	2016
1635	Kaltim	Kotabangun	150 kV	2 LB	2016
1636	Kaltim	Batakan/Manggarsari	150/20 kV	60	2016
1637	Kaltim	Bontang	150/20 kV	60	2016
1638	Kaltim	New Balikpapan	150/20 kV	60	2016
1639	Kaltim	New Samarinda	150/20 kV	60	2016
1640	Kaltim	Melak	150/20 kV	30	2016
1641	Kaltim	Sambutan Ext LB	150 kV	2 LB	2016
1642	NTB	Alas/Tano	70/20 kV	20	2016
1643	NTB	Bima	70/20 kV	20	2016
1644	NTB	Labuhan/Sumbawa (IBT)	150/70 kV	60	2016
1645	NTB	Mantang	150/20 kV	30	2016
1646	NTB	Labuhan/Sumbawa	150 kV	2 LB	2016
1647	NTB	Dompur	150 kV	2 LB	2016
1648	NTB	Dompur	70/20 kV	20	2016
1649	NTB	Sambelia (Pembangkit)	150/20 kV	20	2016
1650	NTB	Empang	150/20 kV	20	2016
1651	NTB	Mataram	150/20 kV	60	2016
1652	NTB	Dompur (IBT)	150/70 kV	60	2016
1653	NTT	Ulumbu	70/20 kV	20	2016
1654	NTT	Maumere	70/20 kV	20	2016
1655	NTT	Ende	70/20 kV	20	2016
1656	NTT	Maulafa	70/20 kV	30	2016
1657	NTT	Naibonat	70/20 kV	20	2016
1658	NTT	Bolok	70/20 kV	20	2016
1659	Sulsel	Wotu (IBT)	275/150 kV	90	2017
1660	Sulsel	Tanjung Bunga, Ext 2 LB	150 kV	2 LB	2017

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
1661	Sulsel	Bontoala (GIS)	150/20 kV	60	2017
1662	Sulsel	Siwa	150/20 kV	60	2017
1663	Sultra	Raha	150/20 kV	30	2017
1664	Sultra	Bau Bau	150/20 kV	30	2017
1665	Sultra	Kendari	150/20 kV	60	2017
1666	Sultra	Unaaha	150/20 kV	60	2017
1667	Sulbar	Topoyo	150/20 kV	30	2017
1668	Sulbar	Mamuju Baru	150/20 kV	30	2017
1669	Gorontalo	Botupingge	150/20 kV	60	2017
1670	Sulteng	Toli-Toli	150/20 kV	30	2017
1671	Sulteng	Luwuk	150/20 kV	30	2017
1672	Sulteng	Toili	150/20 kV	20	2017
1673	Sulteng	Leok/Buol	150/20 kV	20	2017
1674	Sulteng	Tambu	150/20 kV	20	2017
1675	Sulteng	Talise (IBT)	150/70 kV	30	2017
1676	Sulteng	Ampana	150/20 kV	20	2017
1677	Sulteng	Talise	150/20 kV	60	2017
1678	Sulteng	Tentena	150/20 kV	30	2017
1679	Maluku	Poka/Wayame	150/20 kV	30	2017
1680	Maluku	Piru	150/20 kV	30	2017
1681	Maluku	Taniwel	150/20 kV	10	2017
1682	Maluku	Masohi	150/20 kV	30	2017
1683	Maluku	Kairatu	150/20 kV	30	2017
1684	Maluku	Namrole	70/20 kV	10	2017
1685	Maluku	Namlea	70/20 kV	10	2017
1686	Papua	Timika	70/20 kV	30	2017
1687	Papua	Skyland	70/20 kV	60	2017
1688	Papua	Sentani/Waena	70/20 kV	60	2017
1689	Pabar	Sorong	150/20 kV	60	2017
1690	Pabar	Manokwari	150/20 kV	30	2017
1691	Kalsel	Kayutangi	150 kV	2 LB	2017
1692	Kalsel	Kotabaru	150/20 kV	30	2017
1693	Kalsel	Paringin	150/20 kV	30	2017
1694	Kalsel	Rantau Ext LB (Kusan)	150 kV	2 LB	2017
1695	Kalsel	Pelaihari	150/20 kV	30	2017
1696	Kalsel	Amuntai	150/20 kV	30	2017
1697	Kalteng	Kuala Kurun	150/20 kV	30	2017
1698	Kaltim	Sanggatta	150/20 kV	30	2017
1699	Kaltim	Tana Paser (Grogot)	150/20 kV	30	2017
1700	Kaltim	Komam (Batu Sopang)	150/20 kV	30	2017
1701	Kaltim	Longikis	150/20 kV	30	2017
1702	Kaltim	Berau / Tj Redep	150/20 kV	30	2017
1703	Kaltim	Bontang Ext LB	150 kV	2 LB	2017
1704	Kaltim	Petung	150/20 kV	30	2017
1705	Kaltim	Karang Joang/Giri Rejo	150/20 kV	60	2017
1706	Kaltim	Lati	150/20 kV	30	2017
1707	Kaltim	Sepaso	150/20 kV	30	2017
1708	Kaltim	Sanga-Sanga	150/20 kV	60	2017
1709	Kaltara	Bulungan / Tj Selor	150/20 kV	30	2017
1710	NTB	Kuta	150/20 kV	30	2017
1711	NTB	Labuhan/Sumbawa	70/20 kV	30	2017
1712	NTB	Selong	150/20 kV	60	2017
1713	NTB	Sekotong	150/20 kV	20	2017
1714	NTB	Pringgabaya	150/20 kV	60	2017
1715	NTB	Bayan	150/20 kV	30	2017
1716	NTT	Maulafa	70/20 kV	30	2017
1717	NTT	PLTMG Kupang Peaker/Peaf	150/20 kV	30	2017

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
1718	Sulsel	Pinrang	150/20 kV	60	2018
1719	Sulsel	Bone	150/20 kV	30	2018
1720	Sulsel	Tallo Lama	150/20 kV	60	2018
1721	Sulsel	Bakaru, Ext 4 LB	150 kV	4 LB	2018
1722	Sulsel	Pare-Pare	150/20 kV	30	2018
1723	Sultra	Andolo	150/20 kV	10	2018
1724	Sultra	Kasipute	150/20 kV	20	2018
1725	Sultra	Nii Tanasa	150/20 kV	30	2018
1726	Sultra	Kolaka	150/20 kV	30	2018
1727	Sultra	Bau Bau	150/20 kV	30	2018
1728	Sulsel	Rantepao	150/20 kV	30	2018
1729	Sulbar	Mamasa	150/20 kV	30	2018
1730	Sulut	Bintauna (Town Feeder)	150/20 kV	20	2018
1731	Sulut	Paniki	150/20 kV	60	2018
1732	Gorontalo	GI Gorontalo Baru	150/20 kV	60	2018
1733	Sulteng	Kolonedale	150/20 kV	30	2018
1734	Sulteng	Silae	150/20 kV	60	2018
1735	Sulteng	Luwuk	150/20 kV	30	2018
1736	Sulteng	Bunta	150/20 kV	20	2018
1737	Sulteng	Bungku	150/20 kV	30	2018
1738	Sulut	Sario (GIS)	150/20 kV	60	2018
1739	Maluku	Passo	70/20 kV	20	2018
1743	Kalsel	Sei Tabuk	150/20 kV	30	2018
1744	Kalsel	Banjarmasin/Ulin (GIS)	150/20 kV	60	2018
1745	Kalsel	Trisakti	150/20 kV	2 LB	2018
1746	Kalteng	Pangkalan Banteng	150/20 kV	30	2018
1747	Kalteng	Sukamara	150/20 kV	20	2018
1748	Kalteng	Nangabulik	150/20 kV	20	2018
1749	Kalteng	Seberang Barito	150/20 kV	30	2018
1750	Kalteng	Kasongan	150/20 kV	30	2018
1751	Kalteng	Sampit	150/20 kV	60	2018
1752	Kaltim	Maloy	150/20 kV	30	2018
1753	Kaltim	Samboja (Karjo-Haru)	150/20 kV	60	2018
1754	Kaltim	Bontang Koala (Bontang)	150/20 kV	60	2018
1755	Kaltim	New Samarinda	150/20 kV	60	2018
1756	Kaltim	Tenggarong / Bukit Biru	150/20 kV	30	2018
1757	NTB	Maluk	70/20 kV	20	2018
1758	NTB	Woha	70/20 kV	20	2018
1759	NTB	Alas/Tano	70/20 kV	20	2018
1760	NTT	Maulafa (IBT)	150/70 kV	60	2018
1761	NTT	Tenau	70/20 kV	60	2018
1762	NTT	Maulafa Baru	70/20 kV	60	2018
1763	Sulsel	Makale, Ext 2 LB (arah PLTA)	150 kV	2 LB	2019
1764	Sulsel	Kajuara	150/20 kV	60	2019
1765	Sulsel	Malili	150/20 kV	20	2019
1766	Sulsel	Tello	150/20 kV	60	2019
1767	Sulsel	Wotu	150/20 kV	30	2019
1768	Sulsel	Bulukumba	150/20 kV	60	2019
1769	Sulsel	Sengkang	150/20 kV	60	2019
1770	Sulsel	Luwu	150/20 kV	60	2019
1771	Sulut	Kema/Tanjung Merah	150/20 kV	60	2019
1772	Gorontalo	Tilamuta	150/20 kV	30	2019
1773	Sulut	Pandu	150/20 kV	60	2019
1774	Sulteng	Petobo (ambil beban talise)	150/20 kV	60	2019
1775	Malut	Sofifi	150/20 kV	30	2019
1776	Malut	Maba	150/20 kV	30	2019
1777	Malut	Jailolo	150/20 kV	30	2019

No.	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN	KAPASITAS (MVA)	COD
1778	Malut	Tobelo	150/20 kV	30	2019
1779	Papua	Sentani/Waena	70/20 kV	60	2019
1780	Papua	Abepura	70/20 kV	60	2019
1781	Kalsel	Rantau (Rekonfigurasi)	150 kV	2 LB	2019
1782	Kalsel	Marabahan	150/20 kV	20	2019
1783	Kaltim	Sanggatta	150/20 kV	60	2019
1784	Kaltim	Berau / Tj Redep	150/20 kV	30	2019
1785	Kaltim	Muara Wahau	150/20 kV	30	2019
1786	Kaltim	New Balikpapan	150/20 kV	60	2019
1787	Kaltara	Tidang Pale/Tana Tidung	150/20 kV	20	2019
1788	Kaltara	Malinau	150/20 kV	30	2019
1789	NTB	Ampenan	150/70 kV	60	2019
1790	NTB	Empang	150/20 kV	20	2019
1791	NTT	Atambua	70/20 kV	20	2019
1792	NTT	Larantuka	70/20 kV	20	2019
1793	NTT	Ropa	70/20 kV	20	2019
1794	NTT	Ende	70/20 kV	20	2019
		TOTAL		108,789	

LAMPIRAN-5

Matriks Bidang Pembangunan RPJMN 2015-2019

Matriks K/L RPJMN 2015-2019

Matriks Bidang Pembangunan RPJMN 2015-2019

Sub Sektor Ketenagalistrikan

Matriks RPJMN 2015-2019 Kementerian ESDM

Sub Sekor Ketenagalistrikan (1)

Matriks RPJMN 2015-2019 Kementerian ESDM

Sub Sekor Ketenagalistrikan (2)

Matriks RPJMN 2015-2019 Kementerian ESDM

Sub Sekor Ketenagalistrikan (3)

Matriks Bidang Pembangunan RPJMN 2015-2019 Sub Sektor Ketenagalistrikan

[illegible]

Matriks RPJMN 2015-2019 Kementerian ESDM Sub Sektor Ketenagalistrikan (1)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN KETENAGALISTRIKAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)
				2015	2016	2017	2018	2019	
	PROGRAM: PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								55.278,0
		MENINGKATKAN PEMANFAATAN ENERGI LISTRIK YANG ANDAL, AMAN, DAN RAMAH LINGKUNGAN							-
			Rasio Elektrifikasi (%)	85,15	88,19	91,00	93,9	96,01	-
			Rasio Desa Berlistrik (%)	98	99	99	100	100	-
			Infrastruktur Ketenagalistrikan :						-
			a. Penambahan kapasitas pembangkit (tidak termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) (APEN & Non APEN) (MW)	-	2.250	5909	8749	18964	-
			b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik (APEN & Non APEN) (KMS)	11805	10721	10080	7750	5417	-
			Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Layak Operasi :						-
			- Persentase Pembangkit	90	90	90	90	90	-
			- Persentase Penyaluran	90	90	90	90	90	-
			Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	8,45	8,39	8,31	8,24	8,18	-
			Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik (%)	8,85	6,97	4,00	2,08	2,04	-
			Subsidi Listrik (Tribun Rp.)	08,09	09,70	74,9	80,0	89,41	-
			Konsumsi Listrik perkapita (kWh)	914	985	1058	1129	1200	-
			Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan (Miliar US\$)	7,194055	7,600525	0,711809	9,073425	7,725031	-
			Regulasi Bidang Ketenagalistrikan	10	7	5	2	3	-
	Kegiatan : Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik								141,8
		Meningkatnya Pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Meningkatnya pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatkan Mutu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik							-
			Penyelesaian permohonan Wilayah Usaha (hari kerja)	5	5	5	5	5	-

Matriks RPJMN 2015-2019 Kementerian ESDM Sub Sekor Ketenagalistrikan (2)

KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
KL	PROG			
				Konsep/Rekomendasi Aturan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
				Penanganan Kasus di Bidang Ketenagalistrikan
				Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik
				Penetapan Susut Jaringan
				Fasilitasi Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik (Persentase Yang Ditind
				Penetapan Nilai Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (Persero)
				Fasilitasi Perselisihan antar Pelaku Usaha dan / atau Pengguna Usaha Tenaga
			Terkendalanya Pelaksanaan Pembangunan Kelistrikan Nasional (QW)	
			Terkendalanya pemakaian BBM di pembangkitan tenaga listrik (QW 7.f)	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Kelistrikan Nasional (sistem kelistrikan)
				Pengendalian pemakaian BBM di bidang pembangkitan tenaga listrik (%)
				- Pemantauan dan verifikasi penggunaan BBM untuk pembangkit
				- Koordinasi dalam rangka pengawasan efisiensi penggunaan batubara untuk pembangkit tenaga listrik
			Terbaitnya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (QW 6)	
				Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara
				- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara
				- Monitoring Penyelesaian Proyek Pembangkit oleh 25 IPP Yang Terkendala (Quick Wins Nomor 6)
			Tersedianya Usulan Penetapan Subsidi Listrik (QW 7.e)	
				Usulan Penetapan Subsidi Listrik
				- Penetapan subsidi listrik
				- Monitoring dan Evaluasi Subsidi Listrik Bagi Pelanggan 450 VA dan 900 VA (Quick Wins Nomor 7.e)
		Kegiatan: Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan		
			Terpenuhiinya Kebutuhan Tenaga Listrik dan Meningkatnya Rasio	
				Pemantauan, Analisa dan Evaluasi Program Ketenagalistrikan (Monitoring)
				Koordinasi Kerjasama Ketenagalistrikan
			Tersedianya dukungan dan fasilitasi	

Matriks RPJMN 2015-2019 Kementerian ESDM Sub Sektor Ketenagalistrikan (3)

KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)
KL	PRGK				2015	2016	2017	2018	2019	
				Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) [perusahaan] - Kontraktor atau Badan Usaha yang memiliki SMKM dengan rating dengan nilai 93-100	10	15	20	25	30	-
			Terbangannya Infrastruktur Gas Untuk Sektor Transportasi (Mini LNG Plant) [QW10]		10	15	20	25	30	-
				Pembangunan Mini LNG Plant (kilang)						1.143,0
					Penyiapan dan Penyelaksan Lahan serta Ijin	Pelaksanaan EPC dan PMC				-
		Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas								565,7
			Menyelenggarakan manajemen perencanaan dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perbendaharaan, Barang Milik Negara, serta akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan peraturan hukum, pertimbangan hukum, dan urusan hubungan masyarakat yang profesional dan berbasis pelayanan							565,7
				Kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian	3	3	3	3	3	-
				- Jumlah Dokumen Perencanaan (RKT, RKAK/A, Kajian Akademis)	1	1	1	1	1	-
				Pelayanan pengelolaan data dan informasi teknologi serta informasi publik						-
				- Jumlah Pemeliharaan & Pengelolaan Website, Irtigan dan Database serta penyebaran dan pelayanan informasi publik (paket)	1	1	1	1	1	-
				Perbendaharaan, akuntansi/laporan keuangan dan barang milik negara	4	4	4	4	4	-
				- Realisasi Anggaran Belanja (%)	90	90	90	90	90	-
				- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI (%)	100	100	100	100	100	-
				- Pencatatan Realisasi PNB Ditjen Migas (%)	100	100	100	100	100	-
				- Pencatatan Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Migas (%)	100	100	100	100	100	-
				- Penyelesaian Usulan Penghapusan BMN Ditjen Migas (%)	100	100	100	100	100	-
				Penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pelayanan	4	4	4	4	4	-
				- Jumlah Rancangan Peraturan PerUlian Sektor Migas	7	10	10	15	15	-
										192,0
			Pelayanan yang Optimal Baik Administratif maupun Teknis Untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan							
				Penyusunan Rencana Kerja, Penganggaran, dan Evaluasi	10	10	10	10	10	-
				Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi	13	13	13	13	13	-
				Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan	5	5	5	5	5	-
				Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	10	7	5	2	3	-
				Pelayanan Akuntansi dan Perbendaharaan	9	9	9	9	9	-
				Pelayanan Pengelolaan Aset Barang Milik Negara Bidang Ketenagalistrikan	4	4	4	4	4	-
				Perencanaan, Pembinaan, dan Manajemen Kepegawaian	14	14	14	14	14	-
				Pelayanan Umum Kerumahaan, Perencanaan, dan Tata Usaha	10	10	10	10	10	-
										-





**Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia**